

D E N N Y J . A

**Napak Tilas**

# REFORMASI

## Politik Indonesia

Talkshow Denny J.A Dalam Dialog Aktual Radio Delta FM

DELTA FM



The Smart Side  
of Indonesia

LKIS

## KATA PENGANTAR

Islam hampir senantiasa dipersamakan dengan sistem yang tidak demokratis. Negara-negara (berpenduduk mayoritas) Islam senantiasa diidentikkan dengan sistem pemerintahan yang tertutup, otoriter dan menindas. Namun lahir konstelasi yang agak berbeda dalam beberapa tahun belakangan. Di tengah-tengah opini dunia yang tak kunjung favourable tentang negara-negara Islam, Indonesia dan Turki memberanikan diri untuk memulai sebuah eksperimen demokrasi. Hebatnya, eksperimen itu dalam banyak aspek berhasil. Sungguh mematahkan asumsi berbagai pihak, di dua negara ini, proses reformasi politik berlangsung dengan cepat dan bertumpu pada beberapa hal mendasar: pelebagaan prinsip-prinsip good and clean governance, kebebasan pers, sistem politik multi-partai, pemilu yang terbuka, bahkan pemilihan presiden secara langsung. Maka muncullah “identitas baru”, masyarakat Muslim yang demokratis dan egaliter.

Indonesia berhasil melampaui pemilu yang demokratis tahun 1999. Betapapun masih berdarah-darah dan penuh konflik, pemilu ini menunjukkan Indonesia berhasil membuktikan kemauan untuk berubah dan beranjak dari sistem otoritarian. Namun bersamaan dengan perubahan politik menuju demokrasi yang selanjutnya bergulir, krisis ekonomi terus menggerogoti daya survival bangsa Indonesia. Supremasi sipil hasil pemilu 1999 tak berhasil membantu mengentaskan bangsa ini dari krisis. Pengangguran semakin membesar, harga-harga kebutuhan dasar melambung, nilai tukar rupiah merosot, dan angka kemiskinan merayap naik. Problem korupsi juga tak bisa diselesaikan, bahkan muncul korupsi baru yang tak kalah memprihatinkan. Dengan melihat fakta-fakta ini, wajar jika banyak pihak pesimis dengan Pemilu 2004. Mereka tak

yakin kisah sukses pemilu 1999 akan terulang. Apalagi jika melihat betapa amburadulnya KPU mempersiapkan pemilu, sementara skala kerumitan justru bertambah dengan dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung.

Namun lagi-lagi opini dunia tentang Indonesia salah kali ini. Pemilu 2004 berjalan demokratis, relatif lancar dan aman. Di luar dugaan banyak pihak, tingkat kekerasan dan konflik justru menurun dibandingkan pemilu 1999. Tak pelak, dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam melakukan demokratisasi politik. Pemilu 2004 mendapatkan respek dari banyak pihak, tanpa terkecuali dari mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter yang sempat datang sebagai observer.

Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah liku-liku dan dinamika yang muncul menuju pemilu yang demokratis itu? Kendala-kendala apa saja yang menghambat, konstelasi-konstelasi semacam apa yang muncul, dan komplikasi masalah seperti apa yang mewarnai tahap demi tahap menuju pemilu 2004?

Dalam konteks inilah Buku Napak Tilas Reformasi Politik Indonesia: Talkshow Denny J.A. Dalam Dialog Aktual Radio Delta FM ini sangat penting untuk dibaca. Buku ini secara komprehensif merekam liku-liku dan dinamika politik menuju pemilu 2004. Buku ini merupakan kumpulan talkshow dalam program “Dialog Interaktif” di Radio 99,1 Delta FM Jakarta yang dipandu oleh Dr. Denny J .A. dan presenter Delta FM, Ria Basuki. Talkshow ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio 99,4 Delta FM Bandung, Radio 96,8 Delta FM Surabaya, Radio 105,8 Delta FM Medan, Radio 99,2 Delta FM Makas’sar, Radio 99,3 Delta FM Manado. Rangkaian talkshow interaktif pada periode 4 Juni 2003-4 Februari 2004 itu dihadirkan kembali ke publik dengan format buku.

Buku ini memberikan kronologi sekaligus pemetaan masalah-masalah yang melatarbelakangi pemilu 2004. Apa yang terjadi di balik “pesta besar demokrasi” itu? Pertanyaan ini berusaha dijawab dengan menampilkan kembali dialog interaktif tentang berbagai tema seputar pemilu dan pilpres, dengan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, berikut analisis politik, ekonomi dan budaya yang bernas dan kritis. Yang tak kalah penting adalah keberhasilan Bung Denny J.A dalam memilih tema-tema yang bukan hanya aktual, tapi juga sangat mendesak untuk didiskusikan dengan publik. Bung Denny J.A juga berperan mengarahkan diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan menstimuli lahirnya diskusi yang menarik dan relevan.

Buku ini secara garis besar menceritakan dua hal. Pertama, proses reformasi politik yang berlangsung di Indonesia dengan berbagai akibatnya. Reformasi penyelenggaraan negara melahirkan lembaga-lembaga baru yang dibutuhkan dalam kerangka check and balance kekuasaan, namun juga berpotensi melahirkan tirani baru. Hal ini tercermin dari kekhawatiran atas pelembagaan Mahkamah Konstitusi. Reformasi politik di sisi lain juga diwarnai dengan kembalinya lembaga recalling di DPR, sebuah mekanisme yang dapat mempersempit peluang para wakil rakyat untuk mengambil sikap secara independen, tanpa tergantung sepenuhnya kepada garis politik partai. Pembahasan RUU Pemilihan Presiden memungkinkan fraksi-fraksi besar untuk merumuskan sendiri kriteria-kriteria calon presiden, entah berdasarkan alasan-alasan yang idealistik maupun sekedar sebagai alat bargaining politik dengan fraksi-fraksi yang lain.

Reformasi politik juga menghantarkan kita pada era pemilihan presiden langsung. Tak pelak, publik pun disibukkan oleh perdebatan tentang siapa yang akan maju dalam bursa calon presiden. Namun dalam soal calon presiden ini, ternyata orang lebih banyak bicara soal

figur, soal daya tarik dan kharisma personal, bukan soal program, platform ataupun kualitas kepemimpinan. Dalam konteks yang sama, publik juga dihadapkan pada figur-figur lama yang itu-itu juga. Dari klan Soekarno, muncul tiga nama sekaligus: Megawati Soekarnoputri, Rahmawati Soekarnoputri dan Sukmawati Soekarnoputri. Dari partai Golkar sempat muncul nama-nama beken seperti sang ketua umum, Akbar Tanjung, Sri Sultan Hamengku Bhuwono X, Nurcholis Madjid, dan Wiranto. Dari kalangan militer selain Wiranto juga muncul nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Agum Gumelar. Juga ada nama Amien Rais, Hamzah Haz, Abdurrahman Wahid dan lain-lain. Dari keluarga Soeharto muncul nama Mbak Tutut. Melihat nama-nama di atas, berbagai pihak khawatir hasil pemilu 2004 belum benar-benar steril dari (dan justru menjadi momentum bagi tampilnya kembali) tokoh-tokoh yang “bermasalah” di masa lalunya. Bahkan muncul kekhawatiran pemilu 2004 juga menjadi momentum kebangkitan para politisi hitam untuk menguasai parlemen.

Kedua, buku ini juga berbicara tentang krisis yang terjadi Indonesia pada saat-saat menjelang pemilu 2004. Alih-alih mau menyelesaikan kasus korupsi lama, kita justru dihadapkan ada kasus-kasus korupsi baru yang tak kalah serius, seperti terlihat pada kasus pembelian pesawat tempur Rusia oleh pemerintah yang terkesan tidak transparan dan menyalahi prosedur.

Bangsa Indonesia juga masih berkutat dengan problem disintegrasi nasional, dengan belum terselesaikannya masalah GAM. Kerusuhan Poso seperti dibahas dalam buku ini juga menunjukkan betapa konflik berbasis agama dan etnisitas juga belum sepenuhnya berhasil diredam. Persoalan semakin rumit karena masalah-masalah ini muncul menjelang pemilu. Mungkinkah diselenggarakan pemilu yang berkualitas jika di Aceh dan Poso, konflik masih bergejolak, kondisi keamanan belum terjamin? Rekonsiliasi konflik belum

berhasil diwujudkan. Namun pada saat yang sama muncul kabar gembira tentang rekonsiliasi nasional pada konteks yang lain, yakni direhabilitasinya hak-hak politik korban G 30 S/1965 dalam pemilu 2004.

Situasi krisis juga terasa dari letupan kasus terorisme di Indonesia. Bayang-bayang tragedi Bom Bali masih belum hilang dari ingatan kita, tiba-tiba meledak bom di Hotel JW Marriot Jakarta. Korban berjatuhan, masyarakat diliputi keresahan, pemerintah panik, nilai tukar rupiah anjlok dan kita siap-siap mendengar negara-negara besar mengumumkan travel warning kepada warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia. Indonesia mendapatkan dampak buruk dari perang global melawan terorisme yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Buku ini mengantarkan pembaca untuk melakukan napak tilas terhadap proses reformasi politik di Indonesia, dengan segala gegap gempita dan eforia kebebasan yang berkembang, serta dalam kaitannya dengan krisis ekonomi yang terjadi. Buku ini mengabarkan optimisme dan pesimisme sekaligus. Optimisme tentang reformasi politik yang demokratis. Pesimisme yang muncul karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis. Namun justru dengan kombinasi antara optimisme dan pesimisme itulah kita akan terdorong untuk tak pernah berhenti memikirkan solusi untuk bangsa ini, tanpa terburu-buru menyerah kepada keadaan.

Jakarta, Agustus 2006

Agus Sudibyo

Penyunting

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I: REFORMASI PEMERINTAHAN

1. Mahkarnah Konstitusi : Sebuah Monster Baru
2. Kembalinya Lembaga Recalling di DPR-RI
3. Kompromi Calon Presiden Melalui RUU Pemilihan Presiden
4. Penerapan Partai Peserta Pemilu, Seberapa Jauh Partai Dapat Mengobati Kekecewaan Publik aras Reformasi

### BAB II : KOMPLIKASI MEMILIH PEMIMPIN BARU

5. PertarunganTiga Purri Bung Karno
6. Calon Presiden Dari Kalangan Militer
7. Heboh Mbak Tutut Sebagai Calon Presiden
8. Konvensi Partai Golkar, Mengapa Golkar Sebagai Partai Semakin Populer, Namun Calon Presidennya Belum Populer?
9. Menjadi Presiden Versi SMS
10. Kemungkinan Kembalinya Para Politisi Hitam Melalui Pemilu 2004

**BAB III : SISTEM PEMILU BARU, KONFLIK POLITIK BARU**

11. Konflik Internal Partai Politik Menjelang Pemilu
12. Konflik Internal Partai Soal Calon Anggota DPR
13. Konflik Internal PDIP dalam Pemilihan Gubernur
14. Kemelut Pemilihan Gubernur
15. Potensi Kerusuhan Dalam Pemilu 2004

**BAB IV : DISINTEGRASI DAN REKONSILIASI**

16. Darurat Militer Di Aceh Jilid Kedua
17. Melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka di Swedia
18. Kernbalinya Kekerasan di Poso, Menjelang Pemilu 2004
19. Rehabilitasi Hak Politik Korban G 30 S 1965

**BAB V: TERORISME DAN KONFLIK GLOBAL**

20. Teror Bom Mengguncang Jakarta
21. Setahun Bom Bali, Apakah Indonesia Sudah Aman Dan Jaringan Terorisme Sudah hancur?
22. Dua Tahun Tragedi 11 September
23. Saddam Hussein Versus George Bush Jilid Kedua



## **BAB VI : GOOD GOVERNANCE**

24. NU dan Muhammadiyah Merarmaßen Gerakan Melawan Korupsi
25. Kontroversi Pembelian Pesawat Rusia

## **ASAL TULISAN**

## **DAFTAR BUKU DENNY J.A**

**BAB I**  
**REFORMASI PEMERINTAHAN**

## **MAHKAMAH KONSTITUSI: SEBUAH MONSTER BARU**

Tanggal: 2 Juli 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Sultoni (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional)

Sebagai bagian dari proses reformasi penyelenggaraan kekuasaan negara, lahir lembaga-lembaga baru dalam kerangka check and balance terhadap kekuasaan eksekutif legislatif maupun yudikatif. Salah-satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi yang hendak dilahirkan dengan kekuasaan yang sangat besar. Lembaga ini bisa membatalkan undang-undang, membubarkan partai politik, membatalkan pemilu dan juga bisa meng-impeach seorang presiden dan wakil presiden. Lembaga ini memang menjadi salah-satu produk reformasi politik yang patut didukung. Namun tidak kalah penting juga untuk dipikirkan bagaimana mengontrol kewenangan yang besar itu, agar Mahkamah Komtitusi tidak menampilkan diri sebagai “monster baru” yang menakutkan, represif dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Bagaimana agar Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan efek yang sama sebagaimana mahkamah serupa di negara-negara yang demokratis.

**DENNY J.A. :**

Para pendengar Delta FM di mana pun berada, jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. Kali ini topik kita adalah “Mahkamah Konstitusi: Sebuah Monster Baru”.

Sebagai bagian dari proses reformasi pemerintahan, lahir lembaga-lembaga baru dalam kerangka check and balance terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Salah-satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilahirkan dengan kekuasaan yang sangatlah besar. Lembaga ini bisa membatalkan undang-undang, membubarkan partai politik, membatalkan pemilu dan juga bisa meng-impeach seorang presiden dan wakil presiden. Jika ini terjadi, bisa dibayangkan politik akan gonjang ganjing, para pengikut presiden akan saling bertikai dan sangat mungkin akan terjadi konflik yang susah didamaikan. Dan ini terjadi karena kewenangan untuk membatalkan perhitungan hasil pemilu dimiliki MK, lembaga inilah yang saat ini sedang kita bangun. Karena kewenangan yang sangat dasyat itu, kita sebut MK sebagai “monster baru”.

Bagaimana supaya lembaga yang begitu berpengaruh ini bisa kita dikontrol sedemikian rupa sehingga menjadi “monster” yang baik dan berguna bagi terbentuknya sistem politik demokratis? Bukan sebaliknya menjadi “monster” buruk yang justru menjadi unsur perusak dalam sistem demokrasi kita.

Sudah hadir di studio Bung Sultoni, Ketua Divisi Konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Selamat pagi Bung.

**SULTONI:**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J .A.:**

MK begitu banyak kewenangannya : membatalkan pemilu, membatalkan undang-undang, menyelesaikan perselisihan lembaga-lembaga negara, kemudian ikut serta dalam pemecatan presiden dan wakil presiden. Apakah ini tidak terlalu berlebihan?

**SULTONI:**

Terima kasih Bung Denny. Sebelum saya menjawab beberapa hal, saya tertarik dengan statement Bung Denny bahwa MK adalah “monster”. MK memang sesuatu yang baru dan memang menakutkan semua orang. Saya katakan menjadi monster, karena pertama, dia memiliki kewenangan untuk meng-impeach presiden, dan itu akan sangat menakutkan siapa pun dalam posisi presiden. Kedua, dalam konteks pengujian undang-undang, di mana MK bisa mengontrol kebijakan legislasi. Kemudian ada mekanisme baru, DPR tidak bisa sewenang-wenang dalam membuat kebijakan-kebijakan publik melalui proses legislasi. Jadi memang tepat istilah “monster” itu, terutama bagi kekuasaan yang sekarang mungkin ada di eksekutif maupun legislatif. Berbicara tentang kewenangan-kewenangan yang tadi coba disampaikan, di beberapa negara, fungsi utama dari MK adalah bagaimana menjaga konstitusi, bagaimana konstitusi itu dilakukan secara konsekuen, bagaimana konstitusi dipatuhi oleh semua orang. Dalam konteks ini, di beberapa negara fungsi MK lebih dititikberatkan pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

**DENNYJ.A.:**

Jadi judicial review ya.

**SULTONI:**

Ya, judicial review sebenarnya inti dari fungsi pengawasan konstitusi. Itulah sebenarnya tugas utama dari MK. Kemudian dalam amandemen ketiga konstitusi ternyata teman-teman kita di MPR memberikan beban yang lain.

**DENNY J.A.:**

Bonus ya?

**SULTONI:**

Ini sebuah bonus, atau sebuah pemikiran baru ketika melihat ada ruang-ruang kosong, yang sebetulnya bisa dilakukan MK. Kemudian ada empat kewenangan yang diberikan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu adalah: pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran suatu partai politik. Ada satu lagi kewajiban MK, memutus pendapat DPR tentang impeachment.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda sebaiknya MK mempunyai kewenangan sebanyak ini? Atau sebaiknya sebagian kewenangan ini diambil oleh MA sehingga MK konsentrasi saja pada judicial review?

**SULTONI:**

Idealnya memang begitu. Kewenangan yang diberikan kepada MK terlalu banyak. Sementara pada sisi lain hakimnya hanya sembilan orang. Kita bisa membayangkan misalnya dalam konteks

perselisihan hasil pemilu, ada begitu banyak kasus di tingkat kabupaten, propinsi sampai pemilihan presiden, bahkan ada konflik soal anggota DPD, sementara hakim MK hanya sembilan orang, tidak akan efektif.

**DENNY J.A.:**

Begitu bung, kita ambil kasus ekstrem. Kadang-kadang untuk menjadi wasit dan untuk meneliti perhitungan suara pemilu butuh waktu yang lama. Bagaimana bila terjadi misalnya pada pemilu presiden, presiden keburu dilantik sementara perselisihan penghitungan suara belum selesai. Tiba-tiba ketika hitungan ulang selesai, yang menjadi presiden ternyata kandidat lain ?

**SULTONI:**

Makanya di sinilah pentingnya Hukum Acara. Bagaimana hukum acara mendesain agar tidak sampai terjadi saat sudah pelantikan presiden, proses penghitungan suara baru selesai. Dan kalau ada penghitungan ulang, hasilnya sudah diketahui sebelum pelantikan dilakukan. Maka kemudian perlu diatur berapa lama pihak yang tidak puas bisa mengajukan gugatan. Di sini perlu ada kejelasan, misalnya saja KRHN mengusulkan maksimum 3x24 jam. Dalam waktu 3x24 jam sejak pengumuman hasil dilakukan, para pihak yang tidak puas dengan keputusan itu bisa mengajukan gugatan.

**DENNYJ.A.:**

Para pendengar Delta FM, tadi anda mendengar sendiri begitu banyak kewenangan MK Penting bagi kita untuk mengontrol agar semakin berkuasa sebuah lembaga, semakin bisa dikontrol oleh publik. Kita ingin menggambarkan satu persatu bagaimana

komplikasi kewenangan yang dimiliki mahkamah ini, misalnya kewenangan dalam membatalkan hasil perhitungan pemilu. Katakanlah misalnya ada pemiliban presiden, ada dua putaran, dan di putaran pertama diumumkan KPU ada dua pemenang tertinggi yang akan dipertandingkan lagi di ronde kedua. Tapi apa yang terjadi ketika ronde kedua sudah mulai berlangsung, hasil perbitungan di ronde pertama digugat. Begitu banyak gugatan sehingga mungkin waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gugatan jauh lebih panjang ketimbang break antara ronde pertama dan kedua. Kita hubungi Bung Sultoni untuk lebih jauh mengelaborasi berbagai dimensi masalah pemilu. Kalau kasusnya seperti itu, apakah memang bisa diatur penyelesaian sengketa suara baru selesai sebelumn ronde kedua

#### **SULTONI:**

Ketika kita mencoba mengatur perselisihan hasil pemilu, harus dikaitkan dengan aturan-aturan yang lain, misalnya pemilihan presiden. Ini sebuah kebarusan dan saya kira teman-teman DPR pun mencoba menyinkronkan itu, termasuk juga dengan aturan-aturan pemilu, misalnya. Karena memang saling terkait.

#### **DENNY J.A.:**

Kalau kita melihat jadwal waktunya, jarak antara ronde pertama dan kedua sekitar tiga bulan, sementara hasil perhitungan suara ronde pertama ini sudah makan waktu sebulan, kampanye juga mungkin sebulan, jadi ada waktu sebulan break untuk menyelesaikan semua sengketa.



**SULTONI:**

Betul. Untuk pemilihan presiden, kita mencoba menawarkan pembatasan waktu yang jelas. Pertama, waktu untuk gugatan kita batasi 3x24 jam. Setelah 3x24 jam didaftar, kemudian juga ada waktu masa pemeriksaan maksimum 14 hari. Setelah 14 hari kemudian ada putusan. Satu minggu setelah itu bisa dilakukan penghitungan suara ulang kalau memang ternyata dinyatakan oleh MK harus ada perhitungan ulang. Jadi membutuhkan waktu paling tidak satu bulan, maksimum selesai penghitungan ulang.

**DENNY J.A.:**

Jadi, memang diatur betul jadwalnya bahwa semua perselisihan harus selesai sebelum ronde kedua dimulai. Yang boleh menggugat apakah hanya partai politik atau gabungan partai politik? Ini juga menjadi dilema apakah tidak sebaiknya dibuka untuk semua konsumen politik yang dirugikan oleh pemilu atau justru harus lebih diketatkan lagi hanya untuk lembaga tertentu yang bukan partai supaya tidak partisan untuk mengadakan suatu masalah.

**SULTONI:**

Kalau saya prinsipnya mengacu pada konstitusi dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan pemilu. Pemilu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dengan demikian kontestan pemilu harus diberikan ruang untuk dapat mengajukan gugatan ke MK. Misalnya perorangan, calon anggota DPD juga harus diberi hak, kalau seandainya ternyata proses penghitungan di satu daerah dianggap tidak tepat sehingga menyebabkan calon anggota DPD gagal.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut anda, akses untuk mengadu hasil pemilu harus dibuka lebih luas lagi?

**SULTONI:**

Benar, harus dibuka seluas mungkin untuk perorangan terutama untuk calon anggota DPD. Kalau perlu yang mengawasi Panwaslu karena banyak mengetahui kecurangan atau kesalahan yang terjadi dalam proses penghitungan suara dan sebagainya. Mengapa Panwaslu tidak diberi kewenangan untuk itu?

**DENNY J.A.:**

Kalau hak menggugat hasil pemilu diperluas ke berbagai segmen publik atau pun pelaku-pelaku politik yang lebih kecil ketimbang partai, memang ada kesan ini jauh lebih demokratis. Cuma bagaimana dengan kemungkinan politisasi yang akhirnya membuat MK kebanjiran masalah. Tiba-tiba, misalnya ada 200 orang menggugat 200 lokasi pemungutan suara, dan semua gugatan harus dilayani, karena semua pihak mempunyai hak yang sama. Bagaimana bisa dituntaskan dalam waktu sebulan dengan sembilan hakim konstitusi?

**SULTONI:**

Ini menjadi problem tersendiri, terutama bagi mereka yang paling berkepentingan secara langsung terhadap hasil pemilu. Paling tidak calon anggota DPD harus diberi akses. Hal yang paling penting adalah MK harus mempunyai mekanisme agar masyarakat

yang menggugat tidak asal menggugat. Jadi ada semacam mekanisme prosedur atau dismissal procedure.

**DENNY J.A.:**

Ada ide, bung. Sebelum dibawa ke MK, ada lembaga independen yang menjadi filter pertama yang terdiri dari para pakar. Lembaga filter ini memilah-milah mana kasus yang relevan untuk diajukan ke MK, mana yang tidak.

**SULTONI:**

Saya kira, untuk filter itu adalah internal MK sendiri, bukan di luar MK. Jadi sudah masuk ke dalam MK dan dilihat apakah perorangan atau siapa pun memiliki kompetensi untuk mengajukan atau tidak. Ketika tidak punya hak, saya kira tidak dilanjutkan.

**DENNY J.A.:**

Tadi sudah kita bahas panjang lebar mengenai kewenangan MK dalam pembatalan pemilu. Kita coba gali kewenangan lainnya yang tak kalah penting, membatalkan undang-undang atau judicial review. Kita bayangkan misalnya UU Sisdiknas yang baru kita adopsi, yang begitu kontroversial. Apa jadinya ketika kita sudah begitu lelah bertarung untuk mengadopsi undang-undang tersebut, tiba-tiba di-review kembali oleh MK dan dibatalkan. Pastilah akan mempunyai efek yang besar sekali. Karena itulah, kewenangan MK harus ditata sedemikian rupa. Kita hubungi lagi pembicara di studio, Bung Sultoni dari KRHN.

Bung, mengenai kewenangan membatalkan undang-undang. Sebaiknya pihak yang berhak untuk mengajukan judicial review,

apakah satu pintu saja atau semua pihak warga negara berhak mengajukannya?

**SULTONI:**

Prinsip dasarnya semua orang mempunyai hak untuk mengajukan judicial review. Dalam arti ini, peran MK sebenarnya bagaimana menjaga agar hak-hak masyarakat terjaga, termasuk juga potensi pelanggaran. Hak Asasi Manusia dalam konteks kebijakan legislasi. Karena yang berkepentingan juga masyarakat secara umum, saya kira kurang ada relevansi jika pengajuan judicial review dibuat satu pintu. DPR membuat satu pintu melalui Komisi Ombudsman Nasional.

**DENNYJ.A.:**

Menurut anda sebaiknya tidak ada pintu itu, publik secara langsung bisa mengajukan undang-undang?

**SULTONI:**

Masyarakat harus mempunyai akses untuk itu, karena bisa jadi masyarakat yang terkena efek langsung. Kalau pun misal nya ada filter, kita mengusulkan bukan Komisi Ombudsman atau lembaga pintu, tapi masuk di dalam MK. Bagaimana kemudian MK mempunyai filter yang bisa menyeleksi apakah seseorang mempunyai kompetensi atau tidak. Sama halnya juga dengan yang saya sampaikan untuk perselisihan hasil pemilu.

**DENNY J.A.:**

Jadi memang ada filter ya? Apa bedanya jika filter ini di dalam atau di luar MK?

**SULTONI:**

Ketika filter itu diletakkan di luar, akan mereduksi hak dan kemerdekaan warga negara untuk ikut mengontrol kebijakan legislasi secara langsung, dengan hak untuk mengajukan gugatan kepada MK.

**DENNY J.A.:**

Karena ada kasus begini, tiba-tiba ada orang yang cuma sekedar ingin merepotkan saja, meminta MK me-review sekian undang-undang. Dan ini memang harus direspon MK. Kalau sepuluh orang seperti ini, MK akan menyelesaikan banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu direspon.

**SULTONI:**

Kita memerlukan filter di sini, dan sebenarnya bisa dilakukan di MK sendiri. Bisa dilakukan jika MK memiliki standar tentang syarat-syarat formal seseorang yang mempunyai kompetensi dan bisa mengajukan kasus ke MK atau tidak.

**DENNY J.A.:**

RUU menetapkan salah satu lembaga yang boleh mengajukan itu adalah Komisi Ombudsman Nasional, anda setuju?

**SULTONI:**

Sekali lagi saya kurang sependapat dengan gagasan ini dengan beberapa alasan. Pertama, sejak awal Ombudsman Nasional tidak didesain untuk itu, untuk menangani kasus konstitusi dan ketatanegaraan. Komisi Ombudsman hanya untuk menangani mal-administrasi. Ombudsman Nasional dibentuk dengan Keppres dan sampai sekarang pun belum efektif bekerja. Kedua, ketika kasus judicial review difasilitasi Komisi Ombudsman, hanya mereduksi kemerdekaan setiap warga negara untuk mengontrol kebijakan legislasi. Bisa juga Komisi Ombudsman menjadi broker untuk pengajuan judicial review.

**DENNY J.A.:**

Jika memang ide satu pintu ini akan diterima, supaya misalnya lebih tertata undang-undang yang akan di-review. Menurut anda lembaga yang paling berhak memfilter itu lembaga apa?

**SULTONI:**

Kita menyerahkan pada mekanisme yang ada di MK. Tidak perlu ada semacam filter itu, karena prinsip dasarnya adalah ini persoalan hak warga negara.

**DENNY J.A.:**

Di sisi lain, ada ketentuan bahwa MK hanya bisa me-review undang-undang setelah lahirnya MK Anda setuju itu?

**SULTONI:**

Ini menjadi perdebatan memang. Kalau di draft DPR RI , bukan hanya 90 hari saat MK ada, tapi undang-undang itu diajukan 90 hari sejak diundangkan atau ditetapkan menjadi undang-undang.

**DENNY J.A.:**

Ok, bung. Kita akan bicarakan lagi, apakah benar misalnya MK akan lebih baik jika dia juga me-review semua undang-undang yang ada sejak jaman kolonial, misalnya?

**DENNY J.A.:**

Kembali dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A dengan topik “Mahkamah Konstitusi Sebuah Monster Baru”. Tadi telah kita elaborasi secara lebih detail mengenai kewenangan MK, salah satunya adalah kewenangan untuk membatalkan undang-undang. Undang-undang yang perlu dibatalkan MK ada tiga pilihan. Pertama, undang-undang yang masa berlakunya 90 hari setelah diundangkan. Kedua, tidak dibatasi, jadi semua undang-undang yang berlaku, produk Orde Lama, Orde Baru, produk kolonial pun bisa di-review. Pilihan ketiga, yang boleh di-review adalah undang-undang yang lahir setelah MK berdiri.

**SULTONI:**

Mungkin ada satu pilihan lagi.

**DENNY J.A.:**

Apa itu?

**SULTONI:**

Undang-undang yang berlaku Sejak reformasi 1998.

**DENNY J.A.:**

Ok, katakanlah ada empat pilihan ini. Anda selaku pakar yang memang mendalami masalah ini, pillihan mana yang lebih ideal sebenarnya?

**SULTONI:**

Kalau bicara ideal, tidak perlu ada pembatasan. Karena kita beranggapan bahwa produk-produk undang-undang masa lalu pun masih ada beberapa problem yang bisa diuji. Karena persoalannya begini, pilihan ini merupakan persoalan pilihan pendekatan. Jika kita melihat suatu produk perundang-undangan di masa lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan kalau MK tidak diberi hak untuk mengujinya, maka pilihannya hanya satu, diubah melalui mekanisme yang ada di DPR.. Dan ini merupakan proses yang panjang, yang lebih rumit dan akan menyulitkan posisi publik sebagai qbyek dari undang-undang itu.

**DENNY J.A.:**

Memang jika tidak dibatasi undang-undang yang bisa diuji ulang, kesannya jauh lebih demokratis. Namun bagaimana dengan potensi politisasi oleh dua, tiga orang yang sekedar ingin membuat masalah? Dia meminta MK untuk me-review semua undang-undang dari kolonial sampai sekarang. Ada berapa puluh, berapa ratus itu?



**SULTONI:**

Iya, betul. Dan saya kira hal ini juga terjadi di beberapa negara pada saat MK hadir. Kemudian pertama kali yang terjadi adalah pembanjiran kasus untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dan saya pikir itu wajar. Semakin kebijakan legislasi itu dikontrol, saya yakin akan semakin baik. Bisa jadi membanjirnya pengajuan itu hanya pada saat awal-awal saja. Tapi ke depan masyarakat pun akan berpikir lebih substantif apakah suatu undang-undang layak diuji arau tidak, kalau kemungkinan itu melanggar hak-hak konsticusi warga negara.

**DENNY J.A.:**

Ide anda tadi tampaknya pas, tetap ada filter tapi di dalam MK.

**SULTONI:**

Karena bagaimana pun standar arau pun tolok ukur seseorang layak atau tidak layak, saya kira MK mempunyai kriteria yang jelas.

**DENNY J.A.:**

Dan apa kelemahan yang paling mendasar dari rancangan undang-undang kira yang hanya menerapkan bahwa hanya untuk undang-undang yang berumur 90 hari saja yang boleh diuji, yang lain tidak boleh?

**SULTONI:**

Perrama, sosialisasi undang-undang sangat sulit dilakukan dalam waktu 90 hari. Apakah dalam jangka waktu 90 hari orang

yang ada di pedesaan, di berbagai pelosok tanah air bisa mengakses keberadaan undang-undang yang baru disahkan? Masyarakat butuh waktu untuk mengerahui, apa sebenarnya undang-undang itu. Di Jakarta saja mungkin perlu waktu lama untuk mempengerahui undang-undang itu baik atau buruk. Apalagi yang di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Di sini 90 hari itu tidak realistis.

**DENNY J.A.:**

Dan apa buruknya jika pilihan kedua adalah, MK hanya me-review undang-undang serelah MK itu lahir?

**SULTONI:**

Kalau kita menemui produk perundang-undangan di masa lalu sebelum MK terbentuk, hanya ada satu mekanisme yang bisa dilakukan dan didorong, yaitu mekanisme amandemen terhadap undang-undang. Ini pekerjaan DPR dan pemerintah yang memakan waktu lebih lama dan lebih sulit. Sementara, bisa jadi pada suatu saat yang mendesak, seseorang dihadapkan kepada pilihan hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang tersebut.

**DENNY J.A.:**

Ok, bung. Isu lainnya dalam undang-undang ini adalah masalah aktif atau pasifnya MK. Pilihan yang dibuat oleh rancangan undang-undang sekarang, MK pasif saja, dia menunggu suatu pengaduan dari Ombudsman Nasional. Apakah sebaiknya MK juga aktif mencari-cari undang-undang mana yang harus di-review?

**SULTONI:**

Menurut hemat kami, ketika ada perundang-undangan yang menjadi problem masyarakat dan sesuatu itu sangat penting bagi keberlangsungan ketatanegaraan, dan ternyata tidak ada yang mengajukan, tidak ada persoalan jika MK juga mencoba menyelesaikan masalah ini. Perundang-undangan itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Tapi problemnya apakah diumpamakan saja pengadilan harus aktif berburu kasus?

**DENNY J.A.:**

Sementara ini anda setuju jika memang lebih baik didesain saja MK sebagai lembaga yang pasif sebagaimana pengadilan ya, menunggu kasus?

**SULTONI:**

Iya, betul.

**DENNY J.A.:**

Ok, baik Bung. Sebelum kita masuk lagi ke isu-isu kewenangan yang lainnya, kita mendapatkan SMS dari pendengar. Dia menanyakan, "Apakah kita dapat menemukan manusia bijak yang nanti duduk dalam hakim konstitusi ?.. Jadi karena lembaga ini sangat powerfull. pastilah mereka yang duduk di sana mempunyai kekuasaan yang sangat powerfull. apakah bisa mereka menjadi superman-superman yang baik?"

**SULTONI:**

Ini bukan menjadi sebuah jaminan. Apalagi kita mencoba melihat mekanisme yang coba diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi hakim MK itu berjumlah sembilan orang, tiga orang dari DPR, tiga orang dari Mahkamah Agung, dan tiga orang dari presiden. Dan semua diputuskan dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing lembaga, jadi terserah DPR, Mahkamah Agung dan Presiden.

**DENNY J.A.:**

Jadi rekrutmennya berbeda-beda?

**SULTONI:**

Terserah masing-masing lembaga, siapa yang akan duduk sebagai hakim konstitusi. Mekanismenya seperti ini. Mungkin kita ragu apakah kemudian kita bisa menghadirkan sosok-sosok hakim MK yang memiliki independensi, integritas dan bisa melaksanakan fungsi dan kewenangan MK secara baik.

**DENNY J.A.:**

Itu tadi pertanyaan dari Bung Agus di Pandeglang. Sekarang ini MK mempunyai hak-haknya yang sangat politis sifatnya, misalnya membatalkan hasil pemilu, membatalkan undang-undang, juga membubarkan partai politik. Bagaimana kita bisa mencari sembilan superman, sembilan hakim konstitusi yang benar-benar teruji integritasnya? Proses rekrutmen bagaimana yang harus dilakukan untuk itu?

**SULTONI:**

Prinsipnya proses rekrutmen dilakukan secara obyektif. Kemudian ada partisipasi masyarakat secara luas. Saya kira ketika dibatasi dalam mekanisme internal, tertutup sudah akses masyarakat untuk menilai. Oleh karena itu KRHN menawarkan yang sebuah panitia bersama. Bagaimana kemudian ketiga lembaga itu berbicara bersama, mungkin bisa diinisiatifi oleh presiden. Mereka kemudian membuat semacam standar tolok ukur, membuat sebuah kepanitiaan khusus yang nanti melakukan rekrutmen, melalui proses fit and proper test, uji kelayakan publik.

**DENNY J.A.:**

Di mana publik bisa terlibat lebih jauh?

**SULTONI:**

Prinsipnya adalah bagaimana publik bisa terlibat dalam proses rekrutmen.

**DENNY J.A.:**

Ok, baik Bung Sultoni. Terima kasih banyak atas berbagai gagasan yang tentu saja berbeda jika yang berbicara ini anggota DPR atau dari pemerintah. Jadi, para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, tadi kita sudah mendengar bahwa dalam waktu dekat kita akan mempunyai sebuah “monster” baru yaitu MK yang kekuasaannya sangatlah besar. Lembaga ini bisa membatalkan undang-undang, membubarkan partai politik, membatalkan pemilu dan juga bisa meng-impeach seorang presiden dan wakil presiden. Penting bagi kita berpikir bagaimana mengontrol kewenangan yang

besar itu, agar sang monster tidak berperilaku buruk tapi justru berperilaku baik sebagaimana MK di negara-negara demokratis yang matang.

Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, sampai jumpa lagi dalam dialog berikutnya bersama topik aktual lainnya, bersama saya, Denny J.A.

# **KEMBALINYA LEMBAGA RECALLING DI DPR-RI**

Tanggal : 16 Juli 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Bivitri Susanti (PSHK), Pramono Anung (PDIP)

Sejak awal era reformasi, gerakan reformasi terlalu memberikan perhatian kepada bagaimana membatasi kekuasaan eksekutif dan sekaligus bagaimana memberdayakan kekuasaan eksekutif. Kini ketika DPR sudah sangat berkuasa, seakan-akan dilupakan pentingnya membatasi dan mengontrol kekuasaan DPR. Selain berfungsi melakukan legislasi undang-undang, DPR juga berfungsi mengawasi kinerja presiden dan lembaga-lembaga eksekutif yang lain. Pertanyaannya kemudian siapa yang mengawasi lembaga pengawas? Karena lembaga pengawas harus diawasi juga agar tidak muncul kecenderungan yang semakin tidak terkontrol. Jika di masa lalu kita mengenal pemerintahan yang otoriter dan represif, bisa jadi pula hal yang sama sekarang terjadi pada penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Jangan sampai kemudian PR menjadi lembaga yang tak tersentuh oleh kekuatan apapun. Seberapa efektif Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan DPR membantu

kita untuk mengontrol kekuasaan DPR? Apakah lembaga recalling yang coba dimunculkan kembali oleh umur-unsur di DPR dapat memecahkan masalah tersebut?

**DENNY J.A.:**

Kembali dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. Dengan topik “Kembalinya Lembaga Recalling di DPR-RI”. Siapa yang mengontrol kekuasaan DPR berkaitan dengan disahkannya UU Tentang Susunan dan Kedudukan DPR? Sejak awal reformasi, kita terlalu memberikan perhatian kepada bagaimana membatasi kekuasaan presiden dan sekaligus memberdayakan kekuasaan DPR. Kini DPR sudah begitu berkuasa, dan kita terkesan lupa bagaimana harus membatasi dan mengontrol kekuasaan DPR. Sekarang DPR berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengawasi presiden, dan lembaga-lembaga lain. Pertanyaannya siapa yang mengawasi lembaga pengawas? Karena pengawas pun harus diawasi karena berbagai indikasi menunjukkan, ada kecenderungan DPR semakin tidak terkontrol, menjadi lembaga the untouchable. Misalnya, sedikit sekali anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang begitu penting, sehingga sering sidang paripurna dibatalkan karena tidak terpenuhinya quorum.

Hal lain yang juga bisa kita lihat adalah maraknya isu KKN di DPR. Padahal DPR diamanatkan untuk mengawal reformasi terutama untuk menghapuskan KKN. Kini justru isu KKN gonjang-ganjing di lembaga DPR. Tentu hal ini yang harus diperbaiki, tidak hanya demi tertibnya lembaga DPR, tetapi juga demi kepentingan publik yang jauh lebih luas. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar UU Susduk DPR membantu kita untuk mereformasi kembali DPR supaya sesuai dengan jalur yang sudah kita sepakati, mengusung



atau mengawal agenda reformasi? Apakah perlu adanya lembaga recalling, agar ada yang mengontrol DPR? Apakah DPR memang memerlukan hak untuk menyandera anggotanya misalnya, supaya kekuasaannya semakin berwibawa, dan mereka yang dipanggil DPR mau memberikan informasi karena adanya unsur paksa?

Recalling adalah satu mekanisme yang memberikan hak untuk memecat anggota DPR sebelum masa jabatannya selesai. Hak ini bisa dimiliki oleh parpol, bisa juga oleh Dewan Kehormatan di DPR. Kita ingin diskusikan lebih detail apakah lembaga recall bisa dihidupkan kembali lagi. Memang sebelum UU Susduk DPR disahkan sudah ada beberapa kontroversi. Ada yang melihat justru karena anggota DPR tidak terkontrol, justru karena dia tidak bisa dipecat di tengah jalan, maka anggota DPR bisa bekerja semaunya.

Bahkan mereka bisa melawan pimpinan partainya sendiri, seperti misalnya membangun partai baru, tanpa perlu khawatir dipecat sebagai anggota DPR. Dan itulah yang terjadi ketika Dimiyati Hartono yang sudah keluar dari PDIP membangun partai baru, tapi tetap duduk di DPR. Padahal di DPR dia mewakili PDIP. Atau misalnya almarhum Hartono yang bisa 'lepas' dari PBB tapi tetap tidak bisa diusik sebagai anggota DPR. Kita hubungi sekarang narasumber kita Bivitri Susanti dari PSHK.

Hallo selamat pagi Mbak.

**BIVITRI SUSANTI:**

Selamat pagi.

**DENNY J.A.:**

Kami ingin mendengar dulu dari anda pandangan umum tentang berlakunya UU Susduk DPR, di mana positif dan negatifnya secara makro?

**BIVITRI SUSANTI:**

Secara makro, undang-undang ini positif karena memang diperintahkan konstitusi. Termasuk mengatur tentang pertanggungjawaban secara moral maupun politis anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun sisi negatifnya saya kira lebih banyak, terutama soal recall tadi. Di satu sisi recall memang diperlukan, tapi di sisi lain ada satu pasal yang menumbuhkan oligarkhi partai, yaitu parpol bisa menarik anggotanya tanpa adanya persetujuan dari Badan Kehormatan. Kemudian kedua soal wewenang DPD yang sangat dilemahkan.

**DENNY J .A. :**

Secara makro, uu Susduk DPR akan membuat DPR menjadi lebih baik atau lebih buruk?

**BIVITRI SUSANTI:**

Well, secara umum DPR akan cenderung sama saja. Tadinya yang akan didorong PSHK dan rekan-rekan Koalisi Ornop untuk Perubahan Undang-undang Politik adalah masuknya unsur keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses di DPR, DPD dan DPRD. Namun kenyataannya hal ini tidak diadopsi.

**DENNY J.A.:**

Kita coba detailkan, isu apa menurut anda dan kawan-kawan yang tidak diadopsi itu?

**BIVITRI SUSANTI:**

Yang akan kita dorong adalah pembentukan undang-undang tentang DPR dan DPD unruk bekerja sama, di mana kita akan mengatur lebih detail agar masyarakat bisa ikut serta dalam setiap proses. Sidang DPR harus terbuka, terutama bagi media massa. Namun ternyata DPD hanya mempunyai hak untuk membahas saja. Kami mendorong, meskipun DPD hanya mempunyai hak untuk membahas, masukan-masukannya harus benar-benar dipertimbangkan oleh DPR, dan masyarakat bisa menilainya secara terbuka. Artinya kalau ternyata DPR memang terlihat tidak sungguh-sungguh, kita bisa melihat dari luar, dan kita bisa menekannya.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana mekanisme keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang yang anda sarankan?

**BIVITRI SUSANTI:**

Prosesnya antara lain dalam rapat dengar pendapat umum. Sekarang pembentukan undang-undang hanya di dalam rapat tata tertib saja. Jadi itu yang akan kita mainkan dalam undang-undang ini. Misalnya dalam pasal-pasal mengenai rapat dengar pendapat umum, disebutkan kewajiban untuk mengundang stakeholder dari undang- undang yang sedang dibahas. Kalau kita menyerahkan

persidangan ini kepada tata tertib DPR saja, akan sulit posisi masyarakat, karena tata tertib wewenang penuh DPR Nanti DPR akan membentuk aturan sendiri, sehingga tidak bisa ada tekanan dari luar.

**DENNY J.A.:**

Pertama yang anda katakan tadi dalam proses pembuatan undang-undang, publik dan DPD terbatas wewenangnya. Usulan apa saja yang tidak masuk dalam hal ini?

**BIVITRI SUSANTI:**

Hal lain yang tidak masuk misalnya soal quorum MPR dalam memutuskan keputusan tertentu. Yang kita dorong supaya quorum MPR yang tiga per empat itu, hitungannya adalah tiga per empat DPR dan tiga per empat DPD. Jadi bersifat proporsional, supaya DPD ada artinya dalam MPR. Sebab jumlah DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jadi pada saat pengambilan keputusan impeachment misalnya, kalau anggota DPR seluruhnya hadir, keputusan bisa diambil tanpa kehadiran anggota DPD. Ini yang ingin kita koreksi.

**DENNY J.A.:**

Kembali dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A dengan isu “Kembalinya lembaga recalling dan siapa yang mengontrol lembaga DPR”. Bagaimana lembaga recalling ini bekerja?

**BIVITRI SUSANTI:**

Pada dasarnya ada dua sebab untuk recall. Pertama yang otomatis, artinya tidak perlu proses, tinggal diresmikan oleh Keppres. Kedua yang harus melalui proses verifikasi oleh Badan Kehormatan DPR Yang tidak perlu proses ada lima sebab: meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, melanggar larangan rangkap jabatan yang juga termuat dalam UU Susduk DPR, dinyatakan bersalah oleh keputusan pengadilan, dan diusulkan oleh parpol yang bersangkutan.

**DENNY J.A.:**

Jadi kalau parpol mengusulkan tidak perlu lagi lewat jalur Badan Kehormatan?

**BIVITRI SUSANTI:**

Sementara harus melalui Badan Kehormatan. Itu sebabnya ada anggota DPR yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan reraf, kemudian tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota DPR, dan melanggar sumpah atau janji kode etik DPR. Ini saya kira cukup baik, karena nantinya masyarakat bisa mengadakan kalau ada anggota DPR yang buruk kinerjanya, atau tidak memberikan pertanggungjawaban politis kepada konstituen, bisa diajukan kepada Badan Kehormatan. Kemudian Badan Kehormatan akan melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi kepada yang bersangkutan supaya fair, kemudian diambil keputusannya. Kalau memang dinyatakan bersalah maka anggota yang bersangkutan di-recall.

**DENNY J.A.:**

Di mana menurut anda buruknya sistem recall sekarang ini?

**BIVITRI SUSANTI:**

Karena recall ada yang diusulkan oleh parpolnya. Ini memang rasional, karena dalam sistem pemilu kita anggota DPR basisnya adalah parpol, dengan sistem proporsional. Tapi seharusnya ada mekanisme dalam parpol yang terbuka dan diatur dalam pasal UU Susduk DPR. Agar kita sebagai pemilih bisa menilai apakah Partai A dalam mengambil keputusan obyektif atau tidak, demokratis apa tidak.

**DENNY J.A.:**

Sekarang kira sudah terhubung dengan Bung Pramono Anung dari PDIP. Selamat pagi bung, apa kabar?

**PRAMONO ANUNG:**

Selamat pagi Bung Denny J.A, kabar baik.

**DENNY J.A. :**

Kita ingin mendengar pandangan anda, insider orang partai. Dengan kembalinya lembaga recalling, sebagian mendukung sebagai upaya untuk mendisiplinkan anggota DPR. Mbak Bivitri mewanti-wanti. khawatir akan munculnya kembali oligarkhi partai karena kekuasaan partai untuk me-recall anggotanya. Bagaimana anda melihatnya?

**PRAMONO ANUNG:**

Saya sepakat kalau recalling atau pergantian antar waktu tidak boleh menjadi hak oligarkhi partai agar partai tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu harus ada aturan main. Pertama, harus diatur dalam AD-ART partai. Kedua yang lebih penting, recalling tidak boleh dilakukan kepada anggota fraksi yang kritis atau vokal, tetapi juga kepada anggota partai yang sudah pindah menjadi anggota partai lain atau anggota partai yang sudah terkena sanksi organisasi. Misalnya akibat politik uang ketika pemilihan kepala daerah. Mungkin, dalam praktek-praktek seperti itulah hak recalling bisa digunakan.

**DENNY J.A.:**

Sebaiknya aturan-aturan yang anda sebutkan tadi diatur di mana? Apakah di dalam AD-ART partai masing-masing? Atau di dalam tata tertib DPR yang seharusnya masuk dalam UU Susduk DPR?

**PRAMONO ANUNG:**

Pertama, ada Dewan Kehormatan DPR yang nantinya mempunyai kewenangan untuk memproses usulan lebih lanjut dari partai. Kedua, supaya partai tidak menjadi oligarkhi, harus ada aturan main dalam AD-ART partai.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, sebentar dengan Mbak Bivitri. Bagaimana dengan adanya indikasi akan ada platform partai yang membuat kekhawatiran anda mengenai oligarkhi partai tidak akan terjadi?

**BIVITRI SUSANTI:**

Baik sekali, kalau memang bisa keluar statemen seperti itu kepada publik. Karena isu ini sudah diangkat media massa, dan PDIP sudah menanggapi. Kekhawatiran saya adalah tidak semua partai seresponsif ini, atau tidak semua partai memberikan janji seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana mekanisme internalnya. Inilah yang saya khawatirkan kalau diserahkan kepada masing-masing partai.

**DENNY J.A.:**

Jadi begini Bung Pramono Anung, karena kita masih dalam evolusi awal pertumbuhan partai. Jika partai sudah demokratis dan terlembaga dengan baik, mungkin adanya hak partai ini tidak akan ada yang terlalu mengkhawatirkannya. Tetapi di awal pertumbuhannya, kita khawatir partai belum terlembaga, platformnya belum bekerja, masih didominasi elit segelintir yang dominan.

**PRAMONO ANUNG:**

Ya, kami memahami itu. Masyarakat diberikan kewenangan penuh untuk memilih parpol yang menerapkan sistem demokrasi, transparansi, dan sebagainya. Maka ketika sebuah parpol tidak menjalankan apa yang dijanjikan, tentunya masyarakat bisa memberikan hukuman dengan tidak memilih parpol itu. Kalau aturan main dibuat transparan dan anggota DPR benar-benar tidak mementingkan kepentingan pribadi, maka sebetulnya yang namanya recalling, selama itu dilakukan bukan untuk persoalan suka atau tidak suka, menurut saya hal yang baik. Karena kita menyadari sebagai orang-orang yang dipilih rakyat, kita ini masih



belum tertib, masih banyak kecenderungan untuk mengabaikan aturan main yang telah kita sepakati.

**DENNY J.A.:**

Di mekanisme internal, bagaimana dipastikan bahwa yang di-recall benar-benar mereka yang buruk secara kinerja, bukan elit yang konflik di dalam internal parpol?

**PRAMONO ANUNG:**

Begitu UU Susduk DPR dibuat, PDIP langsung membuat semacam aturan main dalam pergantian antar waktu. Kita tidak menginginkan UU Susduk dibuat untuk membunuh atau memotong lawan-lawan politik dalam internal partai. Maka kita membuat aturan main bahwa yang boleh pergantian antar waktu adalah karena pindah ke parpol lain, terkena sanksi organisasi, serta pembebasugasan atau pemecatan. Di luar itu maka harus mendapatkan ijin DPP partai. Karena kita memang harus menghindari jangan sampai ada kesewenang-wenangan DPC maupun DPD.

**DENNY J.A.:**

Apakah PDIP sudah mengambil inisiatif membuat aturan internal sendiri?

**PRAMONO ANUNG:**

Ya, dan itu sudah dilembagakan sesuai dengan aturan main AD-ART kita.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana Mbak Bivitri, anda melihatnya?

**BIVITRI SUSANTI:**

Saya tertarik dengan statemen yang disampaikan Pak Pramono tadi, bahwa untuk mencegah DPC dan DPD mengambil keputusan semena-mena, keputusan diserahkan kepada DPP partai. Apakah itu tidak mengembalikan semua keputusan diambil di pusat, bahkan untuk urusan daerah, terutama untuk yang di DPR pusat?

**PRAMONO ANUNG:**

Bukan begitu. Yang saya maksud adalah kalau seorang pimpinan DPC ingin melakukan pergantian antar waktu, maka kalau tidak masuk dalam dua kriteria yang sudah saya sebutkan tidak diperbolehkan, kecuali kalau mereka bisa memberikan alasan yang cukup, dan alasan itu diberikan kepada DPP partai. Setelah dievaluasi bahwa memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian antar waktu, baru diijinkan. Tetapi kami meyakini dengan aturan main yang lebih rinci, kesewenang-wenangan DPC dan DPD akan semakin mengecil.

**DENNY J.A.:**

Ok, baik Bung. Terimakasih atas waktu anda. Jadi kita harus mendorong agar ada kontrol yang ketat terhadap anggota partai di DPR, agar DPR tidak menjadi the untouchable. Tapi juga harus ada kontrol terhadap lembaga yang melakukan hak recall itu, agar tidak mengarah kepada oligarkhi partai yang justru bisa lebih memperburuk keadaan.

Kita tahu sekarang ini mempunyai lembaga baru, DPD, lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah. Di Amerika Serikat, mereka seperti para senator di Negara Bagian. Apakah undang-undang baru sudah memberikan porsi yang cukup bagi peran DPD dalam rangka kepentingan publik yang lebih besar, terutama Indonesia yang sangat plural. Anda melihat apakah undang-undang baru ini memberikan porsi yang selayaknya kepada DPD untuk kepentingan publik yang lebih luas?

**BIVITRI SUSANTI:**

Saya kira sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi permasalahan dasar yang sebenarnya adalah pasal 22D di amandemen ketiga tahun 2001, tapi tidak memberikan wewenang yang cukup kepada DPD. Jadi di dalam konstitusi sendiri, DPD sudah dikebiri sejak lahir. Dia hanya mempunyai wewenang turut membahas undang-undang tertentu, memberikan pertimbangan dalam pengawasan, juga dalam pembuatan undang-undang. Namun dalam pengesahan undang, DPD tidak ikut lagi. Jadi yang mempunyai kewenangan legislasi, seperti diatur dalam konstitusi, hanya DPR bersama-sama dengan presiden.

**DENNY J.A.:**

Jadi DPD bisa dibilang sebagai anggota legislasi “kelas duanya” ya?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya betul. Itu istilah yang sangat tepat. Bahkan kata beberapa orang ketika kami diskusi di berbagai daerah, DPD diplesetkan sebagai “Dewan Pertimbangan DPR”.

**DENNY J.A.:**

Banyak yang melihat DPD sengaja dibuat begitu, karena kita sejak awal sudah memilih negara kesatuan, yang memiliki problem dengan separatisme di daerah. Sehingga menurut mereka kalau DPD memiliki wewenang yang cukup besar, dikhawatirkan muncul kembali aspirasi politik lokal dan kepentingan lokal yang terlalu besar, sehingga tidak mengganggu keutuhan NKRI. Bagaimana menurut anda?

**BIVITRI SUSANTI:**

Saya melihatnya justru ada dua fungsi DPD. Fungsi dari DPD seperti ini yang mewakili wilayah, jadi basis pemilihannya wilayah. Adanya DPD justru untuk merekatkan secara internal, dia merekatkan masing-masing wilayah ini menjadi satu kesatuan. Dan karena inilah muncul bentuk Lembaga Perwakilan yang seperti ini dari hasil evolusi. Misalnya kita bisa melihat, awalnya pertama kali muncul di Amerika karena wilayahnya yang begitu luas. Jadi ini memang suatu necessity dari suatu negara yang mempunyai wilayah yang besar dan penduduk yang banyak dan plural seperti Indonesia, justru untuk merekatkan wilayah-wilayah itu. Karena dengan demikian aspirasi wilayah-wilayah bisa ditampung di tingkat pusat.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut anda dengan fungsi DPD yang dimaksimalkan justru bisa memberikan fungsi yang positif bagi integrasi nasional yang plural dan luas. Tapi mereka melihat pengalaman otonomi daerah, di samping daerah-daerah yang mempunyai wewenang yang memang lebih besar, tapi juga mereka melihat munculnya

sentimen putra daerah yang begitu besar, munculnya sentimen terhadap pendatang luar yang juga begitu besar. Sehingga akhirnya banyak sekali jabatan- jabatan yang diduduki bukan karena kinerja mereka yang dinominasikan, tapi lebih karena unsur putra daerahnya. Anda tidak khawatir kalau isu-isu lokal seperti yang terjadi di otonomi daerah dibawa oleh DPD ke forum nasional? Sehingga kalau diberi wewenang yang begitu besar, permasalahan pun akan menjadi besar dengan isu-isu lokal?

**BIVITRI SUSANTI:**

Saya kira justru kondisinya bisa dibalik. Artinya kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian bagaimana putra daerah, bagaimana friksi antar daerah muncul, justru karena tidak ada saluran untuk mengharmoniskan kebijakan di daerah dan di pusat. Jadi karena tidak ada saluran itulah maka mereka menjadi “raja-raja kecil” daerah. Kalau dia punya saluran di Jakarta, dan tentunya mereka terekspos oleh kehidupan politik yang dinamis di DPR dan DPD secara umum, saya kira kecenderungan seperti itu bisa diminimalkan.

**DENNY J.A.:**

Anda memberikan argumen yang sebaliknya. Yang dimaksimalkan justru integrasi nasional lebih terjaga. Arida setuju bahwa undang- undang ini tidak bisa melakukan hal lain karena sudah dikunci oleh konstitusi?

**BIVITRI SUSANTI:**

Pada dasarnya iya, tetapi sebenarnya waktu itu kami masih melihat beberapa peluang. Jadi meskipun wewenangnya sudah

dikebiri sejak lahir, tapi setidaknya-tidaknya, misalnya, bisa diberikan kewajiban bagi DPR untuk memberikan tanggapan atas segala pertimbangan DPD. Jadi dengan begitu kita bisa melihat apakah DPR menimbang dengan sungguh-sungguh pertimbangan dari DPD. Kemudian semua komunikasi antara DPR dan DPD, yang bersifat pertimbangan, dilakukan secara tertulis dan -yang lebih penting lagi- harus terbuka. Jadi masyarakat, terutama yang banyak menekan seperti media massa, bila melihat misalnya DPR menanggapinya secara “bercanda”, mereka bisa menekan dari luar. Akhirnya kita juga bisa menghukumnya secara politik.

**DENNY J.A.:**

Meskipun DPD mempunyai hak membahas dan mengajukan, tapi bisa dimaksimalkan jika DPR juga rajin membalas secara tertulis dan transparan kepada publik-komunikasi dua belah pihak ini. Bagaimana anda melihat undang-undang yang sekarang?

**BIVITRI SUSANTI:**

Memang ada beberapa masukan dari kami yang diterima, misalnya yang tertulis, itu diakomodasi. Tadinya pasal dalam UU Susduk tentang DPD ini sangat minim, hanya mengkopi konstitusi. Ini cukup berkembang, tapi dua hal yang menurut kami sangat penting, yaitu kewajiban keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Kedua, kewajiban DPR untuk memberikan tanggapan tidak diakomodasi. Karena ada keengganan DPR untuk memberikan wewenang kepada DPD.

**DENNY J.A.:**

Apakah karena DPD lembaga baru, dan DPR juga tidak ingin dikurangi porsi kekuasaannya? Apa ini bagian dari politik DPR?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya , saya setuju dengan itu.

**DENNY J.A:**

Satu lagi isu yang tidak kalah hot-nya mengenai undang-undang baru ini adalah, DPR diberikan instrumen hak supena tapi dengan satu warning -atau kata-kata yang menyeramkan- karena tiba-tiba menjadi isu DPR bisa menyandera pihak yang dipanggil, yang menolak misalnya selama 15 hari. Dengan sendirinya ini menjadi isu yang hot sekali, apa benar DPR telah melampaui wewenangnya masuk ke area yudikatif? Ataukah anggota DPR ini justru menjadi lunak dibandingkan undang-undang sebelumnya, dimana mereka bisa membuat seseorang dipenjara satu tahun lamanya? Kembali kita bersama Ibu Bivitri Susanti dari PSHK.

Secara makro dulu bagaimana anda menilai hak sandera dari DPR ini?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ada dua catatan bagi saya mengenai hal ini, tapi yang paling umum saya terangkan dulu bahwa hak supena ini dimiliki oleh parlemen di beberapa Negara, yang asumsinya eksekutif lebih kuat dari pada legislative -biasanya legislatif perlu “dipersenjatai” dengan hak ini.

Tapi pemasalahannya adalah karena ini menyangkut penyanderaan atau pelanggaran HAM seseorang, peraturannya dibuat sangat ketat. Misalnya perintah untuk membuat hal itu diberikan dulu dalam konstitusi, baru kemudian diterjemahkan dalam undang-undang atau tata tertib parlemennya.

**DENNY J.A.:**

Apa dalam konstitusi kita tidak diatur, tetapi lebih langsung di undang-undang?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya, betul. Kemudian yang perlu kita cermati ada dua kemungkinan, kalau ini dilaksanakan dalam hak angket. Dalam kerangka ini maka sebenarnya klausulnya adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada UU No.6 tahun 1954, mengenai hak angket -saya kira kalau menggunakan UU itu cukup adil. Karena di situ sangat ketat pengaturannya, bahkan kalau ada penyanderaan harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Artinya bukan DPR yang menangkap, tetapi dengan menggunakan kepolisian, kejaksaan, dan hakim; artinya cukup fair.

**DENNY J.A.:**

Dalam undang-undang, DPR tidak bertindak sendiri. Apa dalam menyandera juga menggunakan aparat kepolisian misalnya?

**BIVITRI SUSANTI:**

Masalahnya yang dikhawatirkan adalah kalau ada kreativitas



dalam menerjemahkan pasal ini, karena klausulnya sangat bersayap. Dikatakan bahwa hak ini bisa dilaksanakan kalau mereka mau meminta keterangan ‘tentang sesuatu hal’ perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Apakah ini hanya tentang hak angket atau tidak? Kreativitas bisa terbangun di sini, itu yang saya khawatirkan. Ada lagi klausul berikutnya yang menyatakan ketentuan selanjutnya diatur dalam tata tertib. Ini yang saya kira tidak fair, kalau ada kreativitas kemudian diatur tata tertib. Tata tertib seharusnya tidak bisa mengatur masyarakat.

**DENNY J.A.:**

Apakah yang mempunyai hak adalah DPR sebagai lembaga? Berarti Panitia Kerja-seperti Panja Sukhoi-tidak mempunyai hak ini?

**BIVITRI SUSANTI:**

Tidak, Itu harus diputuskan oleh Paripurna DPR

**DENNY J.A.:**

Misalnya seperti kemarin, Panja memanggil Rizal Ramli dan Setiawan Jody, dan mengancam dengan menggunakan hak tersebut. Apakah salah secara struktural? Terhadap undang-undang sebelumnya DPR juga mempunyai hak? Jadi menurut anda apakah hanya sidang paripurna yang boleh mengatasnamakan DPR untuk hal ini?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya, betul.

**DENNY J.A.:**

Dan kedua, menurut banyak kawan-kawan di DPR, dengan sandera 15 hari justru lebih 'lembut', yang sebelumnya bisa menghukum sampai 1 tahun?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya, itu ada dalam catatan saya berikutnya, karena dalam undang-undang sebelumnya diancam dengan pidana kurungan ini benar-benar dikriminalkan, berbeda dengan undang-undang baru nanti, itu sandera saja. Tetapi dalam undang-undang yang sekarang berlaku sebenarnya dikriminalkan, satu tahun pula. Kemudian pelaksanaan haknya juga diatur dalam tata tertib DPR dan DPRD. Jadi memang yang sekarang berlaku sangat buruk dibandingkan dengan yang akan berlaku nanti.

**DENNY J.A.:**

Apakah taktik DPR itu sebaiknya hanya untuk hal-hal teknis belaka untuk urusan internal?

**BIVITRI SUSANTI:**

Ya, betul. Untuk urusan internal, sidang, dan organisasi. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan dunia luar, terutama yang mengurangi hak-hak kewarganegaraan harus diatur dalam undang-undang.

Saya kira ada dua hal yang kurang disoroti oleh media massa, ini juga tergantung pada afirmasi-penguatan jawaban atas ketertutupan DPR. Jadi ada satu pasal yang menyebutkan bahwa anggota DPR itu tidak bisa dituntut karena pernyataan yang

dikeluarkan, kemudian di ayat berikutnya disebutkan, kecuali kalau memang pernyataan itu dikeluarkan dalam satu sidang tertutup. Artinya jika nanti ada wartawan misalnya, kalau memancing seorang anggota DPR untuk memberitahukan apa yang terjadi dalam ruang tertutup dalam Panja, nanti tidak bisa lagi. Ini kelihatannya remeh, tapi mencerminkan bahwa tidak ada semangat yang baru dari undang-undang ini. Kita ingin keterbukaan, indikasi adanya keterbukaan.

**DENNY J.A.:**

Apakah penting DPR dalam sidang tertutup? Ataukah semuanya harus terbuka untuk diketahui publik, dan harus ada punishment bagi yang melanggar?

**BIVITRI SUSANTI:**

Saya kira semuanya harus terbuka, karena mereka wakil kita, kita harus tahu ada apa. Kalaupun ada deal-deal politik, semuanya juga harus dilakukan secara fair.

**DENNY J .A. :**

Ok, terimakasih banyak Ibu Bivitri Susanti, atas perspektif anda, dari LSM yang saya kira memang lebih kritis, bila dibandingkan misalnya bila yang berbicara anggota parpol.

Jadi demikianlah para pendengar Delta FM di manapun anda berada. Kita sudah mempunyai undang-undang baru yang mengatur perilaku DPR. Masalahnya kita masih memerlukan waktu untuk mengkaji kembali, apakah undang-undang baru ini bisa membuat anggota DPR menjadi lebih baik kinerjanya, lebih buruk,

atau netral-netral saja? Karena setelah reformasi kita dikagetkan dengan hasil akhir, ternyata DPR gagal mengawal amanat yang diserahkan kepada mereka untuk mengawal reformasi. Misalnya isu KKN ternyata berkembang, bergenderang, serta terlalu rumit dan ribut di kalangan anggota DPR sendiri.

Baik para pendengar Delta FM, kita akan jumpa lagi pada rabu minggu depan, bersama saya Denny J.A dengan topik yang aktual selanjutnya dalam "Dialog Aktual".

# KOMPROMI CALON PRESIDEN MELALUI RUU PEMLIHAN PRESIDEN

Tanggal : 9 Juli 2003

Host: Denny J .A.

Narasumber : Hadar Gumay (CETRO), Teras Narang  
(Ketua Pansus UU Pilpres)

Bicara tentang RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), mau tidak mau kita juga berbicara tentang syarat-syarat untuk menduduki kursi RI 1. Maka partai politik pun berbondong-bondong mengajukan syarat-syarat menjadi presiden dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Jika syarat-syarat itu dikumpulkan dan diakomodasi, kita niscaya akan melihat tokoh-tokoh nasional yang malang melintang dalam politik nasional banyak terdiskualifikasi sebagai kandidat presiden. Presiden Megawati Sukarnoputri mustahil akan maju sebagai capres kembali karena terjegal oleh syarat minimal sarjana. Akbar 1anjung juga sulit untuk maju sebagai capres karena terjegal syarat tidak pernah terlibat dalam persoalan hukum. Bahkan Amin Rais pun -yang dianggap lokomotif reformasi- juga sulit untuk maju sebagai capres karena capres harus diajukan oleh partai atau gabungan beberapa partai yang memperoleh kursi minimal 20 persen di DPR. Tadinya kita mengira syarat-syarat ini lahir dari prinsip-prinsip dasar tentang kualitas pemimpin

nasional yang hendak serius diperjuangkan partai politik. Namun dalam perkembangannya ternyata syarat- syarat itu hanya kiat partai politik untuk menghadapi kompromi-kompromi yang harus dilakukan antar partai politik. Dan kini terbukti RUU Pemilihan Presiden menghilangkan syarat presiden/wakil presiden minimal sarjana, tidak pernah sebagai terdakwa, dan didukung minimal 15 persen kursi di DPR. Berarti Megawati, Akbar Tanjung, dan Amin Rais dapat melenggang ke pemilihan presiden tahun 2004. Apakah ini kompromi yang buruk bagi kehidupan politik di Indonesia di masa datang?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama anda yang berada di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar? Jumpa lagi dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A, kali ini dengan topik, “Kompromi Calon Presiden Melalui RUU Pemilihan Presiden”. Seberapa buruk kompromi ini bagi politik kita di masa datang? Sebelum kompromi ini dilakukan, awalnya kita melihat berbagai partai politik besar berusaha saling menguji atau saling menjegal capres partai lain. Beberapa parpol mengajukan syarat capres minimal harus sarjana yang tentu tidak menyenangkan bagi Presiden Megawati. Beberapa partai lain juga mengajukan syarat capres tidak boleh menjadi terdakwa dalam kasus hukum. Ada juga yang mengajukan syarat capres hanya mungkin diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15 persen kursi di DPR.

Begitu sulit menjadi presiden di Indonesia, begitu banyak syarat berat yang harus dipenuhi. Namun, kita jangan cepat terkecoh. Ternyata(a partai-partai besar tidak serius dengan syarat-syarat

capres yang mereka ajukan. Ternyata syarat-syarat ini hanya strategi untuk mempertahankan kepentingan capres versi masing-masing ketika antar partai politik harus berkompromi untuk merumuskan kriteria capres dalam UU Pilpres.

Sekarang kita sudah bersama Bung Hadar Gumay dari CETRO. Selamat pagi bung, terima kasih banyak atas kehadirannya.

**HADAR GUMAY :**

Selamat pagi Bung Denny, mohon maaf agak terlambat.

**DENNY J .A. :**

Secara umum dulu bung, bagaimana anda melihat kompromi politik di DPR mengenai RUU Pilpres ini ?

**HADAR GUMAY :**

Kita sudah mengetahui sejak awal bahwa persoalan threshold, tingkat pendidikan, dan persoalan terdakwa juga menjadi syarat capres, juga syarat debat wajib capres-cawapres. Syarat debat itu akhirnya memang disetujui sebagai bagian dari kampanye, tetapi bukan sesuatu hal yang wajib bagi capres-cawapres. Perdebatan tentang syarat capres/cawapres ini sudah memakan waktu hampir empat bulan dan didominasi oleh hal-hal semacam itu juga. Jadi memang betul-betul para politisi kita mengukur perubahan dalam pemilihan presiden untuk lima tahun ke depan ini, lebih kepada apakah calon saya bisa masuk atau tidak. Daripada untuk sesuatu yang jauh ke depan.

**DENNY J .A. :**

Lalu kalau mereka akan memperjuangkan syarat capres mereka sendiri sampai titik darah penghabisan, rancangan undang-undang ini tidak akan dapat disahkan karena posisi mereka saling berseberangan. Akhirnya kompromi dilakukan. Dan menurut mereka ini bukan pilihan yang ideal tetapi yang optimal. Bagaimana menurut anda bung?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira itu sah-sah saja, karena memang dalam politik kompromi itu biasa. Karena yang mereka cari adalah kekuasaan, melalui kursi presiden, orang nomor satu di Indonesia. Bahkan seringkali dikesankan mendapatkan kursi presiden itu lebih prestisius daripada menguasai parlemen.

**DENNY J .A. :**

Kira-kira apa kriteria kita untuk men-judgment apakah kompromi ini baik atau buruk ?

**HADAR GUMAY :**

Yang paling sering digunakan dan paling mendasar adalah apakah, hasil kompromi ini akan memberikan kesempatan yang sama bagi para capres? Apakah juga memberi kesempatan yang sama atau memberikan kekuasaan yang penuh bagi kita sebagai para pemilih? Saya kira itu ukuran-ukuran yang umum.



**DENNY J.A. :**

Atau mungkin juga ada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar?

**HADAR GUMAY :**

Ya, saya kira pasal-pasal dalam UUD 1945 ada yang dilanggar. Walaupun DPR mengatakan tidak, dan justru mereka beranggapan bahwa pasal-pasal UU Pilpres justru menjabarkan apa yang diamanatkan UUD 1945.

**DENNY J.A.:**

Kita memulai dulu dari satu hal, apakah ada pasal UUD 1945 yang dilanggar? Ataukah undang-undang baru ini bisa dibatalkan karena melanggar undang-undang di atasnya?

**HADAR GUMAY :**

Yang paling kelihatan adalah tentang syarat-syarat parpol seperti apa yang boleh mencalonkan presiden, mengenai electoral threshold. UUD 1945 hanya menyatakan bahwa capres dan cawapres hanya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Jadi berapa pun kursi yang dia peroleh, boleh mengajukan capres dan cawapres. Jadi apa yang disyaratkan dalam UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, karena undang-undang ini menyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol yang bisa mencalonkan capres-cawapresnya adalah yang memperoleh 15 persen kursi di DPR, atau 20 persen suara hasil pemilu legislatif untuk tahun 2009. Tetapi untuk pemilu 2004, pada pasal 101 (pasal transisi) mengatakan untuk pemilu kali ini tiga persen kursi di DPR atau lima persen suara dari pemilu legislatif.

**DENNY J.A.:**

Jadi undang-undang sudah mereduksi hak parpol yang perolehan suaranya di bawah tiga persen, yang di dalam konstitusi dilindungi untuk mencalonkan capres, tapi dikebiri dalam UU Pilpres.

Tadi Bung Hadar Gumay sudah membuat statemen yang sangat keras sekali, bahwa UU Pilpres yang baru ini potensial melanggar konstitusi. Jadi anda sangat yakin sudah terjadi pelanggaran konstitusi?

**HADAR GUMAY :**

Ya, karena dalam pasal 6 UU Pilpres dinyatakan bahwa capres dan cawapres itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.

**DENNY J.A.:**

Ada yang menarik, anggota DPR juga pasti mempunyai banyak resources dan juga ahli hukum tata negara yang membantu mereka. Apakah ini benar-benar melanggar konstitusi atau apakah sebuah perbedaan tafsir saja?

**HADAR GUMAY :**

Jujur memang perkembangannya demikian. Kita juga melihat ada beberapa pakar berpendapat pengaturan atau pembatasan yang lebih teknis seperti tentang syarat capres ini memang harus di tingkat undang-undang. Tapi banyak pakar yang lain mengatakan, sesungguhnya dalam UUD 1945 sudah jelas dan tidak perlu ada interpretasi lain melalui undang-undang di bawahnya.

**DENNYJA. :**

Apakah perlu judicial review demi mempertahankan perintah konstitusi itu?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira itu gagasan yang menarik, beberapa teman pun sudah membicarakan. Hanya saja kita juga harus menghitung, jangan sampai masalah ini mengacaukan proses yang lebih besar. Kita juga harus realistis karena proses judicial review harus melalui Mahkamahi Konstitusi yang sekarang belum terbentuk. Sudah ditugaskan jugai dalam konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi akan dibentuk paling lambat 17 Agustus mendatang. Sebelum mahkamah ini terbentuk tugasnya dibebankan ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau itu tidak terbentuk hingga 17 Agustus, menjadi pertanyaan apakah masih Mahkamah Agung yang mengambil peran itu atau kosong sama sekali?

**DENNY J .A. :**

Anda memberi rekomendasi demi alasan praktis sebaiknya diterima saja UU Pilpres? Nanti kita review dalam tahun 2004 misalnya?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira belum sampai untuk menganjurkan seperti itu. Mari kita menghitung dahulu, karena pelaksanaan Pemilu 2004 sudah begitu dekat, jangan sampai menjadi berantakan gara-gara upaya judicial review.

**DENNY J.A. :**

Apakah partai yang kurang dari tiga persen suaranya bisa bergabung dengan partai-partai lain untuk dapat tiga persen itu?

**HADAR GUMAY :**

Tentu, aturan dalam konstitusi kita tentang tata cara Pilpres akan mengarahkan seperti itu. Jadi tanpa ada aturan threshold pun juga akan mengarah ke sana.

**DENNY J.A. :**

Ok bung, kita sudah membahas masalah pelanggaran konstitusi, tapi alasan praktis membuat kita masih ragu-ragu apakah akan membawanya ke judicial review. Yang kedua isu yang tidak kalah kontroversialnya adalah kemungkinan terdakwa hukum bisa menjadi capres/cawapres. Bagaimana anda melihatnya ?

**HADAR GUMAY :**

Sebetulnya ini bukan sesuatu yang ingin diperjuangkan dalam titik darah penghabisan oleh partai. Syarat ini hanya sebagai strategi untuk menaikkan posisi bargaining di depan partai lain yang mempunyai masalah dengan syarat itu. Dan kita sudah mengetahui hasilnya bahwa syarat terdakwa itu ternyata tidak begitu masalah. Bahkan terpidana itu juga tidak masalah, sejauh mempunyai aturan hukuman tetap dan ancaman penjaranya kurang dari lima tahun.

**DENNY J.A. :**

Kawan-kawan di DPR mengarakan bahwa terdakwa/terpidana sekalipun sejauh belum ada keputusan hukum tetap, juga dilarang

konstitusi untuk menjadi capres/cawapres. Tapi tidak ada satu pasal pun dalam UU Pilpres yang membahas tentang itu?

**HADAR GUMAY :**

Menariknya mereka selalu me-refirs ke UUD 1945 tentang syarat terdakwa/terpidana itu. Tapi pada giliran membahas threshold mereka melupakan bunyi UUD 1945 Kehormatan. Tapi kalau kita mengikuti, sebenarnya berapa besar kekecewaan publik mengenai pasal terdakwa ini, itu menunjukkan sebetulnya para anggota dewan kita sangat tidak aspiratif.

**DENNY J.A :**

Ada juga yang mengarakan bahwa ada contoh di Thailand. Perdana Menteri Thaksin pernah mengajukan sebagai calon Perdana Menteri tapi posisinya sebagai terpidana juga sudah diputus oleh Pengadilan Negeri. Dia terus maju karena diperbolehkan, dan dia terpilih, kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Kalau Thailand yang demokratis bisa mengapa di Indonesia tidak bisa?

**HADAR GUMAY :**

Mungkin kita juga perlu bertanya kepada mereka, mengapa di Lampung, Gubernur yang sudah terpilih, statusnya baru diputuskan sebagai tersangka, tetapi dia akhirnya juga tidak pernah dilantik bahkan “diculik”. Padahal DPRD yang mempunyai wewenang sudah memilih dan menyatakan dia yang menang. Apakah itu artinya peraturan di tingkat bawah lebih baik daripada peraturan untuk pilpres? Jadi tidak usah jauh-jauh kita mengambil contoh sampai ke Thailand segala. Ternyata di dalam negeri juga ada hal yang serupa dilakukan.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda DPR sebaiknya menjadi filter agar kriteria-kriteria capres bisa standard secara moral?

**HADAR GUMAY :**

Betul, dan bukan ukuran-ukuran kelompok yang digunakan. Setelah jadi kriterianya, diserahkan kepada masyarakat, sehingga mereka akan mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan. Karena pilihannya banyak dan luas, orang-orang yang masuk itu harus betul-betul orang bersih.

**DENNY J.A.:**

Kalau kita melihat, sekarang DPR tidak konsisten. Pertama dia ingin memperluas pilihan dengan menghilangkan syarat tidak pernah menjadi terdakwa, tetapi di sisi lain pilihan itu justru dipersempit dengan membatasi partai yang suaranya kurang dari dua persen. Jadi sebenarnya apa yang menjadi ideologi utama DPR dalam undang-undang ini?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira nyata-nyata kepentingan jangka pendek partai besar, terutama supaya calon-calon mereka bisa lolos, baik yang bukan sarjana maupun yang terdakwa.

**DENNY J.A.:**

Baik bung Hadar. Para pendengar Delta FM, tadi anda mendengar sendiri, sebenarnya DPR mungkin melakukan hal yang baik sekali

jika dia ingin memberikan filter yang luas kepada capres untuk bisa tampil seluas-luasnya. Bahkan misalnya memberikan kesempatan kepada terdakwa, karena publik luas juga yang akan memilih. Tapi kita juga meragukannya apakah itu yang menjadi motif utama DPR, karena ternyata partai yang mempunyai suara kurang dari tiga persen tetapi sebagai peserta pemilu, juga dibatasi hak-haknya. Padahal dalam UUD 1945 disebutkan bahwa parpol-parpol itu diberi hak yang sama. Jadi terasa sekali dibelakang berbagai kriteria yang telah disepakati, bukanlah suatu upaya untuk mduaskan para capres untuk dipilih oleh publik luas, Tetapi lebih karena ada kepentingan parpol besar, dan menimbang berbagai situasi yang menimpa pemimpin masing-masing parpol.

**DENNY J.A. :**

Kembali kita bersama Bung Hadar. Bung ada isu lain yang menjadi kontroversi mengenai diterimanya syarat bahwa capres bisa minimal SMA, tidak lagi minimal sarjana. Bagaimana anda melihatnya?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira ini salah satu contoh lagi, pasal yang penuh kompromi ternyata bisa lolos juga karena da kepentingan partai besar di sana.

**DENNY J.A. :**

Apa yang penting bila seorang capres harus lulus SLTA atau sarjana?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira sangat penting, apalagi kalau .memang kita masih berpegang bahwa pendidikan menjadi salah satu ukuran yang penting untuk mengukur kualitas seorang pemimpin. Kalau prinsip itu masih kita pegang tentu kita ingin syarat pendidikan yang lebih tinggi.

**DENNY J.A. :**

Ok, sekarang kita hubungi Bung Teras Narang, Ketua Pansus RUU Pilpres. Halo bung, apa kabar?

**TERAS NARANG :**

Halo juga bung, kabar baik.

**DENNY J.A. :**

Ada dialog publik mengenai dagang pasal antara PDI-P dan Golkar; yang satu membiarkan syarat capres minimal SMA dipenuhi, dan satunya membiarkan syarat bukan terdakwa dipenuhi. Bagaimana anda melihatnya ?

**TERAS NARANG :**

Apapun pandangan dari masyarakat, itu adalah satu pandangan yang positif dalam rangka untuk kita memperbaikinya ke depan. Tetapi fakta yang tidak dapat kita pungkiri, itu salah satu hasil yang sudah dicapai oleh Pansus, dan sudah tentu apa yang sudah dikatakan terkait dengan hasil Pansus ini adalah suatu butir-butir sejarah yang sudah barang tentu merupakan bagian dari semangat demokrasi di negara kita.



**DENNY J .A. :**

Jadi kompromi ini tidak bisa terhindari agar terjadi kesepakatan dalam undang-undang?

**TERAS NARANG :**

Masalah kompromi, DPR ini adalah lembaga politik, jadi tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Saya juga bisa memahami keinginan yang ideal dari para pengamat dan kritikus, karena itu memang suatu hal yang kita butuhkan untuk memperbaiki bangsa dan negara kita.

**DENNY J .A. :**

Mengenai kompromi tentang syarat pendidikan minimal dan kasus terdakwa ini tidak terlalu kontroversi karena tidak ada pasal dalam UUD 1945 yang dilanggar. Tetapi syarat tiga persen itu, menurut sebagian kalangan melanggar pasal 6 ayat (2) konstitusi kita. Bagaimana anda melihatnya?

**TERAS NARANG :**

Ya, kita juga harus bisa memahami pasal 6 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa 50 persen plus satu, kemudian tersebar di sejumlah propinsi sekurang-kurangnya 20 persen. Itu memang dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari perhitungan-perhitungan yang terkait dengan presentase. Ini juga merupakan satu hal yang harus kita pikirkan ke depan. Karena memang UUD 1945 kita baru diubah, dan sekarang merupakan momentum pertama bagi kita terkait dengan masalah tata cara pemilihan presiden dan wapres.

**DENNY J.A. :**

Bukankah UUD 1945 sebenarnya menjamin semua parpol peserta pemilu?

**TERAS NARANG :**

Begitu Bung Denny, kita melihat di situ ada tiga persen dari jumlah kursi, atau lima persen dari jumlah suara sah. Artinya siapa pun parpol peserta pemilu 2004 bisa bergabung sama-sama untuk memperoleh jumlah suara sah lima persen itu.

**DENNY J.A. :**

UUD 1945 menyatakan, bahkan partai peserta pemilu walaupun sendirian dan tidak memperoleh suara sampai tiga persen, dia diberi hak untuk mempunyai capres menurut tafsir dari pasal 6 ayat (2). Bagaimana menurut anda ?

**TERAS NARANG :**

Partai politik peserta pemilu juga harus melalui satu proses verifikasi.

**DENNY J.A. :**

Bukan itu, tapi semua parpol peserta pemilu yang sudah disahkan oleh KPU itu diberi hak mempunyai capres?

**TERAS NARANG :**

Ya, dalam batas lima persen suara itu.

**DENNY J.A. :**

Dalam undang-undang baru sudah direduksi menjadi parpol atau gabungan partai yang mendapat tiga persen saja minimal suaranya yang dapat mempunyai capres?

**TERAS NARANG :**

Itu adalah parpol atau gabungan parpol. Sekarang kita mengembalikan kepada parpol itu.

**DENNY J.A. :**

Begitu bung, dalam UU Pilpres yang baru mensyaratkan bahwa parpol yang boleh mengajukan capres minimal memperoleh tiga persen suara, sementara menurut UUD 1945 pasal 6A ayat (2) parpol atau gabungan parpol peserta pemilu berhak mengajukan capres. Bagaimana ini?

**TERAS NARANG :**

Begitu Bung Denny, kita berdebat terhadap suatu masalah, tapi akhirnya kita berinterpretasi. Sekarang suatu fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa syarat ini sudah merupakan satu keputusan. Bahkan untuk tahun 2009 akan datang itu lebih tinggi lagi -sekitar 15-20 persen- karena yang kita inginkan adalah multi partai sederhana, dan itu sudah tertuang dalam UU No.31 Tahun 2002.

**DENNY J.A. :**

Ok, baik Bung. Jadi anda menganggap ini sebagai sebuah kontroversi tentang tafsir UUD 1945?

**TERAS NARANG :**

Saya tidak mengatakan ini sebuah kontroversi, tetapi merupakan suatu hal yang merupakan bagian penting dari proses pembahasan ini.

**DENNY J.A. :**

Ok, sekarang kita mencoba menghubungi Bung Hadar, bagaimana anda menganggap hal ini bung?

**HADAR GUMAY :**

Jadi saya memahami UUD 1945 mengatakan bahwa mengajukan capres adalah hak semua peserta pemilu dan diumumkan sebelum pemilu itu sendiri. Dan peserta pemilu dikatakan yang memenuhi syarat UU Parpol, memenuhi syarat ikut pemilu yang akan diverifikasi KPU, cukup seperti itu saja. Jadi tidak lagi dibatasi ada berapa persen suara, threshold, baik parpol itu sendiri maupun gabungan parpol. Saya kira itu sudah cukup jelas. Saya agak heran kalau ini dihubungkan dengan bahwa nanti presiden terpilih itu harus 50 persen dan seterusnya. Jadi sepertinya di belakang ada bayang-bayang bahwa ini harus selesai dalam satu putaran, mekanisme yang sudah diatur dalam UUD 1945 itu nanti pun dalam putaran kedua akan terpilih dalam kriteria yang dimaksudkan dalam konstitusi.

**DENNY J.A. :**

Jadi Bung, memang tadi sangat banyak sekali cara pandang. Nanti pakar hukum tata negara yang akan memverifikasi mana yang benar. Dan sekarang ini kita banyak sekali mendapatkan SMS,

yang salah satunya mengatakan, “Kawan-kawan di DPR dengan kompromi ini ternyata bukanlah para negarawan yang bergerak dengan prinsip-prinsip dasar, tetapi para politisi yang senang berkompromi”. Yang terakhir juga mengatakan, “DPR akhirnya tidak bisa dipercayai karena pelanggaran konstitusi.”

Ada sedikit waktu lagi, mungkin anda ingin berbicara mengenai isu dana kampanye?

### **HADAR GUMAY :**

Ya, ada satu hal lagi yang agak luput dari perhatian. Dan keputusan mengenai dana kampanye ini, baik di Pansus maupun di Panja DPR sudah banyak dilakukan. Ini juga menunjukkan bahwa perhitungan-perhitungan jangka pendek menghasilkan satu pengaturan yang tidak demokratis. Bahkan pemilunya bisa seperti itu jadinya, karena peraturannya juga tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu terkait dengan pengaturan dana kampanye. Dana kampanye ada tiga sumbernya. Dalam undang-undang disebutkan, dari parpol atau gabungan parpol pendukung, dari capres, kemudian dari pihak luar. Dari pihak luar bisa perseorangan atau badan hukum swasta. Yang diberi batasan itu dari pihak luar yang perseorangan dan badan hukum swasta. Tetapi tidak dari mereka sendiri, jadi tidak ada pembatasan sebagai modal maupun sebagai pengeluarannya. Arti dari batasan dari pihak luar tadi tidak ada maknanya, karena dia mulai sekarang bisa menyumbang kepada parpol dan kepada calon, dan itu nanti bisa diakui sebagai modal mereka sendiri.

**DENNY J.A. :**

Kalau di Amerika Serikat, sejauh ini dana untuk kampanye diri sendiri juga dibatasi?

**HADAR GUMAY :**

Sayangnya kita bukan Amerika Serikat, ini konteks yang mesti kita lihat. Kalau model seperti sekarang ini diterapkan, saya khawatir kita semua akan terperangkap dalam memilih calon-calon yang mempunyai banyak uang, karena dia yang akan menguasai media bisa membagi-bagikan souvenir, kaos, sembako, bahkan mungkin amplop. Jadi dengan adanya model seperti ini, kita akan diarahkan memilih calon yang banyak uang tapi kualitasnya masih belum tentu KKN pun bisa dilakukans secara terbuka dengan tidak ada pengaturan yang ketat dari mereka.

**DENNY J.A. :**

Ok Bung Hadar, tampaknya isu ini masih perlu satu session lagi, karena masih sangat kompleks untuk didetailkan. Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, tadi kita sudah mendengar bersama berbagai kontroversi dan problem mengenai kompromi politik di DPR Dan tampaknya akan senantiasa menjadi bahan unnlk berdebat. Dan kita selaku pengamat dari luar mengatakan bahwa sejauh UU Pilpres tidak melanggar UUD 1945, masih bisa diterima dan masih bisa untuk dipertahankan. Tapi jika sudah melanggar pasal UUD 1945, maka dia layak menjadi subjek dari judicial review atau contempt of constitution, pelecehan konstitusi. Mungkin tema itu yang perlu kita angkat lagi di kesempatan mendatang. Karena masih banyak isu-isu penting yang memang harus kita antisipasi dari awal sekali berbagai kemungkinannya. Termasuk kemungkinan

UU Pilpres di-judicial review karena banyak sekali pihak-pihak yang kecewa atas adanya pelanggaran konstitusi ini.

Terima kasih atas perhatian anda. Sampai jumpa lagi bersama saya Denny J .A. dalam “Dialog Aktual” Rabu minggu depan dengan isu yang hangat di minggu itu.

## **PENETAPAN PARTAI PESERTA PEMILU**

Tanggal : 3 Desember 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Samsuddin Haris (Pengamat LIPI), Indria Samego  
(Peneliti LIPI), Nazaruddin Syamsudin (Ketua KPU),  
Ray Rangkuti (KIPP)

Tanggal 7 Desember 2003, KPU Pusat akan mengumumkan jumlah partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2004. Karena ketatnya seleksi dan verifikasi, tampaknya peserta pemilu 2004 akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peserta pemilu pada tahun 1999. Jika pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, mungkin pemilu 2004 hanya diikuti sekitar 20 partai politik. Disamping diverifikasi secara hukum oleh Depkeh, partai politik juga diverifikasi di KPU dengan kriteria-kriteria sah peserta pemilu yang sangat berat. Di sini bisa muncul komplikasi masalah. Sangat mungkin partai-partai yang dinyatakan tidak lolos verifikasi KPU akan melakukan perlawanan sengit. Apalagi dari beberapa segi kinerja KPU dalam mempersiapkan tahap-tahap pemilu memang mengecewakan banyak pihak. Namun verifikasi yang tak kalah berat sesungguhnya adalah verifikasi dari publik ketika pemilu berlangsung. Verifikasi ini akan menentukan apakah sebuah partai



mempunyai wakil di parlemen, dan apakah perwakilan itu bisa mendirikan fraksi tersendiri. Pada pemilu 1999, kita melihat pada akhirnya hanya enam partai politik yang lolos electoral threshold, mempunyai kursi minimal dua persen dari total kursi DPR, sebagai syarat mendirikan fraksi sendiri. Pada pemilu 2004 jumlah fraksi DPR mungkin akan berkurang karena electoral treshold justru dinaikkan menjadi tiga persen.

**DENNY J.A. :**

Para pendengar di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Makassar, Bandung, Manado dan Medan, apa kabar ? Jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A, kali ini dengan topik, “Penetapan Partai Peserta Pemilu, Seberapa Jauh Partai-Partai Dapat Mengobati Kekecewaan Publik Atas Reformasi ?”

Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam diskusi, saya berikan dulu background-nya. Jika kita melihat panggung politik nasional, kita menemukan berbagai variasi status partai. Pertama, partai yang berdiri sebagai bagian dari hak warga-negara membentuk partai politik, jumlahnya ratusan. Kedua, partai yang mempunyai badan hukum, dan disahkan melalui verifikasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Partai yang lolos dari verifikasi hukum ini mungkin sekitar 40 sampai 50 partai. Ketiga, status partai peserta pemilu. Tidak semua partai yang berbadan hukum mempunyai hak mengikuti pemilu karena harus melalui verifikasi faktual dari KPU. Pada pemilu 1999 partai yang mengikuti pemilu berjumlah sekitar 48 partai politik, dan pada pemilu 2004 nampaknya jumlah partai akan jauh lebih kecil. Dan keempat, partai yang mempunyai fraksi di parlemen, atau partai yang lulus threshold. Jika pada pemilu 1999 hanya panai yang mendapatkan minimal dua persen dari

total kursi DPR yang bisa mendirikan fraksi, maka pada pemilu 2004 batas electoral threshold itu dinaikkan menjadi tiga persen. Dan mungkin partai yang lolos dari electoral threshold ini nanti hanya lima atau enam partai.

Sekarang kita hubungi dulu pengamat politik Bung Samsuddin Haris. Halo bung, apa kabar?

**SAMSUDDIN HARIS :**

Halo, kabar baik.

**DENNY J .A. :**

Komentar anda secara umum dulu, tampaknya jumlah partai yang lolos menjadi peserta pemilu jauh lebih sedikit dibandingkan Pemilu 1999 ?

**SAMSUDDIN HARIS :**

Saya melihat itu positif agar tidak kelewat membingungkan bagi masyarakat. Kedua, tentu kita mesti percaya pada KPU sebagai lembaga pelaksana pemilu yang lebih independen dibandingkan Pemilu 1999 yang lalu. Ketiga, ini menjadi semacam warning, peringatan bagi elit politik kita untuk tidak mudah membuat partai politik Karena ketentuan dalam UU Pemilu maupun UU Partai Politik untuk pemilu 2004 memang lebih ketat dibanding dengan pemilu 1999. Saya melihat ini sifatnya transisional saja, mungkin ke depan akan ada kerjasama yang lebih meningkat di kalangan elit politik kita sehingga tidak mesti masing-masing elit membuat partai yang berbeda.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda, untuk demokrasi yang stabil dalam pemilu sebaiknya partai yang kokoh jumlahnya berapa?

**SAMSUDDIN HARIS :**

Dalam konteks pemilu legislatif, kita sebetulnya membutuhkan suatu kekuatan mayoritas di parlemen, baik tingkat nasional maupun lokal. Supaya politik ke depan lebih stabil, dan proses pengambilan keputusan tidak berbelit-belit dan tidak menghambat manajemen pemerintahan yang berlangsung. Semakin sedikit pemain di parlemen semakin mudah melakukan negosiasi dan koalisi.

**DENNY J.A. :**

Bersama kita tersambung Bung Nazaruddin Syamsudin, Ketua KPU yang terhormat. Selamat pagi bung, apa kabar?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Selamat pagi, Baik. Minal Aidin Wal Faizin.

**DENNY J.A. :**

Sama-sama, ini ada pertanyaan yang kritis dari publik dan partai yang mungkin tidak lolos pemilu, seberapa jauh verifikasi faktual KPU dapat dipercaya?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Kita mempunyai satu komitmen bersama untuk mengadakan pembaruan politik secara jujur dan adil, transparan. KPU dasarnya itu saja.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana mekanisme mengontrol kerja KPU daerah supaya data partai diseleksi secara akurat ?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Semua anggota KPU, termasuk ketuanya turun lapangan. Kita mengunjungi sampai KPU Kabupaten, bahkan turun ke desa, melihat bagaimana mereka bekerja. Pengalaman saya sendiri, ketika mengunjungi ke satu kecamatan di mana ada satu ranting sebuah partai. Kita melihat kantornya, semua serba darurat, seperti hasil dari simsalabim. Kemudian saya bertanya kepada toko-toko yang lain, "Apa betul sekretariat partai X di ruko itu?" "Kemarin tidak ada pak." Bagaimana kalau seperti ini? Jika hal ini kita sampaikan kepada partai yang bersangkutan, mereka akan menjawab, "Masak begitu orang saya ?" Itu masalahnya.

**DENNY J .A.:**

Masalah check and recheck dari KPU Pusat, apakah secara random atau seluruh populasi diamati?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Kita hanya memilih daerah-daerah yang kita perhitungkan ada masalah. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain, sampai ke Maluku. Kita juga mengecek ke lapangan. Apa yang disinyalir di media massa itu benar, bahwa ada kartu anggota orang yang sudah meninggal sekian tahun dimasukkan, kemudian ada KTA yang ditulis tangan, apakah itu sah? Pengecekan ini berdasarkan sampel, sekitar 10 persen.

**DENNY J.A. :**

Akhirnya peserta pemilu 2004 jauh lebih sedikit? Dan hanya enam partai saja yang mempunyai fraksi di DPR?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Saya kira masyarakat mengharapkan demikian. Masyarakat bingung dengan jumlah partai yang demikian banyak. Tahun 1999 ada 141 partai politik, kemudian yang ikut peserta pemilu 48. Dari 48 itu hanya 21 partai yang terwakili, kurang dari 50 persen. Dan sekarang memang DPR hanya akan mempunyai enam fraksi.

**DENNY JA. :**

Ada kritik dari KIPP, kerja KPU tidak diawasi oleh Panwaslu dalam verifikasi?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Bagaimana dengan adanya bentrok antara KPU dan Panwaslu di daerah-daerah? Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana pengawasan itu berlangsung. Jadi tolonglah jangan asal mengkritik, tetapi lihat juga realita-realita di lapangan. Bukan artinya saya anti kritik.

**DENNY J.A. :**

Dan tampaknya waktunya agak sedikit molor, tanggal 2 Desember 2004 belum diumumkan secara penuh?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Ya, tetapi ini pilihan KPU antara mengumumkan yang ada atau menunggu sampai verifikasi selesai total baru diumumkan. Bagi saya lebih baik menunggu, bedanya paling satu-dua hari, yang penting ada kepastian kepada masyarakat bahwa minimal sudah ada 12 partai peserta Pemilu 2004. Dan kami sudah membuat deadline tanggal 7 Desember final pengumumannya.

**DENNY J.A. :**

Kalau kita mencoba melihat lebih jauh lagi masalah pada partai yang akan mengikuti pemilu, apakah jumlahnya masih belum pasti? Apakah seperti yang diduga Kompas, hanya sekitar 20 nantinya?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Saya no comment untuk berita-berita di mass media seperti itu. Dasarnya apa, siapa yang mereka wawancarai, saya tidak mengetahuinya. Pokoknya saya berpegang kepada data, dan itu yang saya omongkan kepada masyarakat.

**DENNY J.A. :**

Dan sekarang kepada partai-partai yang merasa dirugikan, upaya apa yang mereka bisa lakukan untuk naik banding?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Kita sekarang sedang mengarah pada normalisasi sistem. Daripada mereka berunjuk rasa ke KPU lebih baik menempuh jalur hukum. Tetapi saya sudah mendapat jaminan dari beberapa ketua umum partai, apapun keputusan KPU, mereka respect.

**DENNY J .A. :**

Siapa yang bisa mengoreksi kerja KPU jika ada kesalahan kerja dalam verifikasi?

**NAZARUDDIN SYAMSUDIN:**

Apapun lembaga yang melakukan pengawasan itu selalu tidak efektif, seperti Panwaslu, DPR, DPRD dan sebagainya. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan oleh masyarakat. Silahkan masyarakat mengawasi, silahkan masyarakat memberikan masukan-masukan. Tetapi itulah, jangan coba-coba membangun kritik, kritik membangun always welcome-lah.

**DENNY J .A. :**

Ok, pak, terima kasih banyak waktunya.

**NAZARUDDIN SYARNSUDIN:**

Terima kasih kembali.

**DENNY J .A. :**

Jika kita membaca UU Pemilu, memang ada beberapa syarat dan kriteria partai yang boleh ikut pemilu. Pertama-tama partai harus

mempunyai pengurus lengkap di 213 jumlah seluruh propinsi. Karena jumlah propinsi kita sekitar 32 propinsi, maka minimal partai mempunyai pengurus di 22 propinsi. Kemudian di setiap propinsi, partai juga mempunyai pengurus lengkap minimal di 2/3 jumlah kabupaten, dan partai di setiap kepengurusan mempunyai minimal 1000 kartu tanda anggota. Di samping itu partai juga harus mempunyai sekretariat yang lengkap berdiri, layak sebagai sebuah kantor. Dengan empat kriteria ini kita melihat KPUD telah bekerja untuk mengecek di lapangan dan KPU pusat melakukan pengecekan ulang secara random, misalnya diteliti partai mana yang mempunyai kartu anggota sebanyak yang disyaratkan, dan seperti apa kondisi kartu anggota itu.

Memang itulah situasi yang terjadi di lapangan dan akibatnya KPU baru bisa mengumumkan sementara baru sekitar 12 parpol yang layak menjadi peserta pemilu. Pengumuman secara menyeluruh terlambat dari jadwal sebelumnya, 2 Desember 2004.

Sekarang kita membaca beberapa SMS yang masuk dari pendengar Delta FM; Salah satunya mengatakan, “Sebenarnya tidak ada masalah jika seribu partai sekalipun ikut pemilu, toh nantinya rakyat sendiri yang memilih.”

Kedua, dari Bung Endang di Utan Kayu, mengatakan, “Sungguh pun publik kecewa pada era reformasi, tetapi kalau kembali ke era Soeharto nanti dululah, karena kurs dolar Rp 12 ribu, dan itu bukan solusi yang baik.”

Ketiga dari Bung Ana Bemon di Bandung, mengatakan, “Sejak reformasi saya merasa prihatin dengan situasi negeri yang tercinta.”

Sekarang kita sudah terhubung dengan Bung Indria Samego. Halo bung, apa kabar ?



**INDRIA SAMEGO:**

Halo, Bung Denny. Kabar baik. Selamat lebaran.

**DENNY J .A. :**

Sama-sama. Komentar anda secara umum dulu bung. Tampaknya partai peserta pemilu 2004 akan jauh lebih sedikit?

**INDRIA SAMEGO:**

Sudah pasti itu. Kalau melihat perkembangan sampai 7 Desember ini, baru kira-kira separuh dari jumlah partai yang harus diverifikasi secara faktual. Karena memang kesulitan dihadapi partai-partai dibandingkan 1999. Dulu tidak ada verifikasi faktual. Orang bisa mengatakan seenaknya, mengklaim bahwa partainya ada di mana-mana, sekarang tidak bisa, itu kesulitannya.

**DENNY J .A. :**

Dan kalau anda melihat secara normatif, apakah memang sebaiknya peserta pemilu lebih sedikit jumlahnya?

**INDRIA SAMEGO:**

Saya kira normatif dan politis juga. Karena di samping mendirikan partai politik mahal biayanya, sebenarnya pemilu merupakan sebuah kontes, partai mana yang sungguh-sungguh mempunyai akar. Kalau kita sudah mengetahui bahwa akarnya tidak ada, mestinya tidak usah ikut pemilu. Tetapi namanya juga hak, jadi boleh-boleh saja orang mendirikan partai, yang penting sekarang KPU bekerja benar.

**DENNY J.A. :**

Dari 12 partai sekarang, ada enam partai lama dan enam partai baru. Bagaimana anda melihat prospek partai baru ini bung, untuk mempunyai efek yang signifikan dalam politik Indonesia?

**INDRIA SAMEGO:**

Mungkin akan terjadi seperti tahun 1999, dari 48 partai politik akhirnya tidak lebih dari 10 partai politik yang masuk di Senayan. Dan dari 10 partai itu hanya enam yang bisa melewati electoral threshold yang di atas angka sekarang. Pada pemilu 2004 saya kira akan lebih berat, walaupun ada banyak partai politik, tetapi kalkulasi-kalkulasi rasional nampaknya tidak mudah untuk bisa memperoleh tiga persen. Dan bagaimana pun juga ada semacam pola di kalangan pemilih kita yang masih kebanyakan tradisional voter, yang banyak dipengaruhi pertimbangan yang belum terlalu rasional.

**DENNY JA. :**

Kalau kira menengok ke Turki, di sana ada partai baru sekaligus bisa menjadi partai dominan, mengapa di Indonesia tidak bisa terjadi?

**INDRIA SAMEGO:**

Kembali kepada persoalan perilaku pemilih kita yang masih patronize. Kalau kira kembali pada sejarah, mungkin Golkar yang bisa melakukan Kehormatan, tapi sayang sekali Golkar di masa lalu terlalu ambisius dan menggunakan militer serta birokrasi sipil untuk memenangkan pemilu. Masa seperti itu sudah lewat Bung

Denny. Di Turki ada satu partai gabungan dari birokrat dan militer yang mendukung politisi. Di kita, itu sudah lewat.

**DENNY J.A. :**

Jadi menurut anda, walau ada banyak partai baru dalam pemilu 2004, tampaknya parlemen nanti tetap dikuasai partai lama? Bagaimana dengan calon presiden, bung? Apakah sirkulasi elitnya juga masih para pemain lama?

**INDRIA SAMEGO:**

Terap dikuasai enam partai politik yang ada sekarang. Demikian juga dengan pilpres, faktor figur sangat penting. Akibatnya mereka yang tidak muncul dalam politik keseharian agak sulit. Masyarakat kita sebagian besar tidak mau mencoba-coba dan masih konvensional, bahkan tradisional, pilihan-pilihannya yang penting aman.

**DENNY J.A.:**

Dengan seluruh pengetahuan anda. Jika ada pimpinan partai baru minta advice ke anda, apa yang mesti dilakukan untuk masuk lima besar atau enam besar?

**INDRIA SAMEGO:**

Mereka harus berkoalisi untuk menjadi sebuah kekuatan yang cukup menyaingi partai lama. Dan koalisinya tentu saja pada program oriented bukan pada ideologi.

**DENNY J.A. :**

Tampaknya susah sekali untuk menjangkau 140 juta pemilih di seluruh Indonesia, karena partai baru belum dikenal, perlu marketing, dan bermacam cara.

**INDRIA SAMEGO:**

Perlu biaya banyak terutama bagi partai-partai baru membutuhkan dua sampai tiga kali pemilu, untuk settle.

**DENNY J.A. :**

Jika terus berulang seperti ini, tampaknya pelan-pelan kita menuju mayoritas partai, multi partai yang sederhana, hanya tiga, empat, atau lima partai saja yang bertahan?

**INDRIA SAMEGO:**

Itu rasional, bahwa pada akhirnya pemilih pun menyadari yang kita butuhkan bukan sekedar kebebasan, dan partai-partai yang tumbuh begitu banyak, tetapi juga apa yang diusung oleh partai itu. Sekarang mungkin ada ketidakpercayaan bahwa ideologi masih mempunyai peran. Tetapi sometime, ideologi harus dijadikan dasar, walaupun tidak secara vulgar. Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat kan tidak vulgar juga, karena mereka mengusung ideologi dalam bentuk program. Ketika terjadi pematangan politik, “sentrum”nya bukan pada figur ketua umum, tapi pada platform partai.

**DENNY J.A. :**

Ok, bung Indria Samego, terima kasih banyak perspektif anda.

**INDRIA SAMEGO:**

Ok, terima kasih, Bung Denny.

**DENNY J.A. :**

Kita menghubungi sekarang salah satu tokoh aktivis dari KIPP Bung Ray Rangkuti, selamat pagi bung, apa kabar?

**RAY RANGKUTI:**

Selamat pagi Mas Denny. Kabar baik, alhamdulillah.

**DENNY J.A. :**

Komentar anda tentang kerja KPU yang mengumumkan 12 partai lolos pemilu. Tetapi KPU berjanji pada tanggal 7 Desember semuanya akan final bung?

**RAY RANGKUTI:**

Pertama, saya menyangkan sekali keterlambatan pengumuman ini. Karena keterlambatan ini bagaimana pun akan menyulitkan partai politik untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Ditetapkan tanggal 7 Desember 2003 tetapi tanggal 9 Desember sudah masuk pada pengambilan formulir untuk caleg. Sebenarnya mepet sekali waktunya bagi partai politik.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda mengapa KPU sampai terlambat?

**RAY RANGKUTI:**

Itulah yang saya diskusikan dengan Pak Nazar tadi pagi. Mengapa hampir setiap target, tahapan demi tahapan persiapan pemilu, KPU “molor” terus dari jadwal yang ditentukan. Misalnya P4B sampai sekarang belum ditentukan, berapa jumlah final daftar pemilih Indonesia, alokasi kursi daerah pemilihan, kemudian aturan kampanye dan sebagainya. Pertama yang harus kita lihat memang muatan kerja KPU yang begitu besar dan dilakukan dengan serentak dalam waktu yang sangat sempit. Sebetulnya persiapan waktunya hanya satu tahun sejak UU Pemilu diselesaikan. Dengan sangat terburu-buru KPU dibentuk, Panwaslu dibentuk dan sebagainya. Volume kerja yang begitu besar, alokasi waktu yang sangat sempit, dengan sumber daya yang berbeda-beda. Kalau tingkat nasional mungkin tidak ada masalah, tetapi kita tidak bisa membayangkan dan menyamaratakan kemampuan semua anggota KPU di hampir semua wilayah dan daerah.

**DENNY J.A. :**

Salah satu faktor yang saya dengar, keberatan partai politik terhadap verifikasi ini adalah memang interpretasi yang berbeda-beda anggota KPU terhadap juklak yang ditentukan oleh KPU. Hal itu menyulitkan partai politik di tingkat tertentu. Bisa anda contohkan, bung, interpretasi apa yang berbeda dan signifikan sekali efeknya?

**RAY RANGKUTI:**

Saya baru mendengar dari Pak Dimiyati soal anggota KPUD Lampung. Sebagaimana diketahui di juklak pertama KPU meminta agar KPUD menempatkan pengurus partai politik di satu tempat

tertentu, baru KPU mendatangi. Tetapi radiogram yang dikirim itu berbalik seratus persen, justru KPU yang didatangi pengurus partai politik.

**DENNY J .A. :**

Kalau itu situasinya, apakah anda menduga tanggal 7 Desember nanti akan terjadi gempa politik tertentu, begitu banyak partai yang tidak lolos verifikasi dan akan protes dengan sangat keras?

**RAY RANGKUTI:**

Protes mungkin alami, sesuatu yang tidak kita harapkan dan sesuatu yang juga jangan dibatas-batasi. Ada beberapa catatan saya terhadap protes-protes itu. Pertama, protes dilakukan dengan akurasi data yang cukup. Kalau partai politik ini merasa apa yang telah dilakukan KPU sesuatu yang tidak logis, tidak lumrah, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, wajar mereka melakukan protes. Kedua, harus ada wadah di mana protes ini bisa ditampung dengan cepat dan bisa diselesaikan dengan segera. Protes-protes partai politik terhadap kinerja KPU dalam proses verifikasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang cepat. Mengenai wadahnya, di dalam undang-undang, pada bab Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Tahapan Pemilu, ada mekanisme penyelesaian masalah sampai 14 hari, melalui peradilan hukum biasa, cuma ada deadline waktu penyelesaian kasus.

**DENNY J .A. :**

Anda sendiri melihat dengan semakin sedikitnya jumlah partai peserta pemilu ini apakah lebih baik bagi politik Indonesia?

**RAY RANGKUTI:**

Ini debatable, sulit memprediksinya. Salah satu semangat reformasi itu banyak partai politik. Begitu banyaknya partai politik, banyak orang yang merasa tersesat. Tetapi yang pasti partai politik yang akan bertarung pada 2004 tidak akan seramai partai politik 1999. Artinya, kita telah mengalami satu proses di mana partai politik melakukan proses secara natural yang semakin mengecil. Tetapi catatan saya, jangan sampai kita mempunyai semangat untuk mengatakan, “Ya sudahlah nggak usah banyak-banyak partai politik.” Itu bertentangan dengan semangat kita menggulirkan reformasi kemarin.

**DENNY J.A. :**

Ok, Bung Ray, Terima kasih banyak. Para pendengar Delta FM, terima kasih atas perhatian anda di pagi ini. Kita jumpa lagi pada segmen berikutnya minggu depan dalam “Dialog Aktual” kembali bersama saya Denny J.A.



**BAB II**  
**KOMPLIKASI MEMILIH**  
**PEMIMPIN BARU**

## **PERTARUNGAN TLGA PUTRI BUNG KARNO**

Tanggal Tayang : 17 Desember 2003

Host : Denny J.A

Narasumber : Reni Soewarso (FISIP UI). Pramono Anung  
(DPP PDIP)

“Darah biru politik” adalah fenomena yang wajar di dunia politik. Jika di Indonesia ada klan Soekarno dan klan Soeharto, di India ada klan Nehru. di Filipina ada klan Aquino. Di negara modern seperti Amerika Serikat juga muncul klan Bush dan klan Kennedy. Perbincangan tentang klan politik ini semakin relevans karena publik Indonesia saat ini dihadapkan pada tiga perempuan calon presiden, dari tiga parpol berbeda, namun ketiganya adalah kakak-beradik anak Soekarno: Megawati, Rahmawati dan Sukmawati. Ketiganya menyandang nama keluarga: Soekarnoputri. Sebuah nama keluarga yang masih memikat dan mempunyai daya magnetik sangat kuat pada kalangan grass root di Indonesia, dan berhasil mengantarkan Megawati sebagai salah-satu tokoh politik terdepan di Indonesia beberapa tahun terakhir: Pentas politik Indonesia diwarnai oleh tiga Soekarnoputri. Apakah masih cukup ruang bagi mereka untuk bertarung untuk mendapatkan suara yang signifikan?

Apa konsekuensi dari munculnya dua Soekarnoputri lainnya yang cenderung bersikap oposisi terhadap Megawati dan PDIP? Apakah dukungan pada Megawati akan melemah, karena adik-adiknya juga mengusung pengaruh Bung Karno pada partai masing-masing?

**DENNY J.A. :**

Selamat pagi para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Medan. Apa kabar? Jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A kali ini dengan topik yang sangat hot minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, “Pertarungan Tiga Putri Bung Karno.”

Sebelum kita diskusi dengan narasumber, saya berikan dulu background-nya. Sekitar 35 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1965-1966, kekuasaan Bung Karno berakhir. Namun pengaruh Bung Karno, kharismanya, dan gagasannya terus hidup. Pengganti Bung Karno, Pak Harto terus mencoba mengurangi pengaruh Bung Karno dalam pentas politik formal. Upaya ini sebagian berhasil, sebagian lebih banyak gagalannya karena diam-diam di bawah permukaan, ikatan emosi publik kepada Bung Karno terus tumbuh dan ditumbuhkan. Kini, 35 tahun setelah itu, Megawati Soekarnoputri, putri Bung Karno, menjadi Presiden Indonesia yang ke-5. Tentu saja embel-embel Soekarnoputri dibelakang Megawati memberikan dukungan akar rumput yang begitu luas dan juga dukungan publik yang juga mengakar. Kini muncul Soekarnoputri yang lain. Apakah masih cukup ruang bagi tiga putri Bung Karno untuk bertarung dan mendapatkan suara yang banyak? Apa konsekuensi munculnya dua Soekarnoputri lainnya terhadap PDIP terhadap Megawati, dan terhadap politik Indonesia secara menyeluruh? Dan apakah dukungan pada Megawati justru melemah, bukan karena lawan-

lawan politik yang lain, tapi justru karena adik-adiknya sendiri? Inilah topik yang akan kita bahas kali ini.

Bersama kita sudah hadir Reni Soewarso dari politik UI. Selamat pagi Reni.

**RENI SUWARSO :**

Selamat pagi Bung Denny dan para pendengar Delta FM.

**DENNY J .A. :**

Kita mulai dulu dari komentar umum anda. Munculnya tiga Soekarnoputri dalam politik Indonesia, melalui tiga partai yang berbeda, bagaimana anda melihatnya?

**RENI SUWARSO :**

Saya melihat ada dua hal yang positif dan satu hal yang negatif. Positifnya, pertama, fenomena ini memperlihatkan adanya keterbukaan proses verifikasi di KPU, karena siapapun yang mampu memenuhi persyaratan, dia pasti bisa lolos untuk mengikuti pemilu 2004. Kedua, fenomena ini memperlihatkan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Karena hadir partai politik yang dipimpin oleh dua saudari Presiden RI yang jelas-jelas oposan terhadap presiden sendiri. Kalau kehadiran mereka dihalangi justru bisa membunuh prinsip demokratisasi. Sisi negatifnya, sangat disayangkan bahwa kekuatan reformasi terpecah-pecah. Kalau kita melihat 24 partai yang lulus verifikasi, ada sekitar 17 yang bau-bau Orba. Hanya 7 yang reformis termasuk partainya tiga Soekarnoputri ini. Kalau mereka bisa berkoalisi, sebetulnya memperjuangkan hal yang sama, tentu kekuatannya menjadi lebih besar.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat munculnya Sukmawati dan Rahmawati Soekarnoputri karena mempunyai platform yang berbeda atau lebih karena persaingan yang sifatnya pribadi?

**RENI SUWARSO :**

Dua-duanya mungkin. Saya bangga sebetulnya, ada tiga partai politik yang dipimpin oleh tiga perempuan walaupun terus terang sebenarnya hanya mengandalkan figur bapaknya. Tetapi soal platform, saya tidak yakin, karena PNI Marhaen dan Partai Pelopor itu baru. Partai yang baru membutuhkan pengalaman dan proses. Kalau tiba-tiba mendominasi atau keluar sebagai pemenang, sepertinya sulit.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat idealnya ada kesepakatan keluarga, bahwa satu saja yang muncul mewakili mereka?

**RENI SUWARSO :**

Setuju. Toh perjuangannya sama. Tapi mungkin taktik dan strategi perjuangannya berbeda. Kalau Megawati sudah terbaca. Kalau sebelum pemilu selalu teriak membela wong cilik, setelah pemilu apakah taktik dan strateginya betul-betul membela wong cilik? Yang dua ini harus dibuktikan. Tapi memang ada persaingan pribadi antara mereka bertiga.

**DENNY J.A. :**

Apakah dua Soekarnoputri lainnya akan mengurangi suara Megawati di pemilu 2004?

**RENI SUWARSO :**

Kita mau uji teori dulu, apakah mereka berkompetisi berdasarkan platform atau mengandalkan figur ayahnya.

**DENNY J.A. :**

Ok. Reni. Pendengar Delta FM, kita membahas munculnya tiga Srikandi dengan Soekarnoputri sebagai nama belakangnya. Apa pengaruhnya bagi politik Indonesia di masa mendatang? Apakah efeknya akan mengurangi dukungan kepada Megawati karena diambil oleh Soekarnoputri yang lain?

Munculnya tiga Soekarnoputri dalam politik Indonesia, membuktikan bahwa klan Bung Karno masih mempunyai tempat sendiri dalam politik Indonesia. "Darah biru politik" akan mewarnai politik Indonesia sebagaimana terjadi di India dengan keluarga Nehru, juga terjadi di Amerika Serikat dengan Kennedy. Kita akan gali lagi masalah ini ke Bung Pramono Anung dari DPP PDIP. Hallo Bung Pramono Anung. Apa kabar?

**PRAMONO ANUNG :**

Selamat pagi Bung Denny, Alhamdulillah baik.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana komentar anda tentang tiga Soekarnoputri dalam pentas politik Indonesia?

**PRAMONO ANUNG:**

Munculnya tiga putri Soekarno merupakan hal yang baik bagi pendidikan politik dan juga bagi proses untuk memilih pimpinan bangsa. Di era demokrasi seperi ini, siapa pun yang memenuhi syarat undang-undang dapat menjadi calon pemimpin bangsa. Persoalan ini sudah muncul pada tahun 1999 di mana Mbak Sukma sudah menjadi Ketua Umum PNI Supeni, dan ada salah satu anak Bung Karno menjadi simbol partai politik lain. Dalam konteks itu munculnya tiga putri Bung Karno ini bisa menjadi sparring partner yang menarik dalam proses pemilihan pemimpin bangsa di kemudian hari.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana dengan klaim Rahmawati bahwa Megawati tidak benar-benar membawa aspirasi keluarga Bung Karno, sehingga dia perlu menjadi ketua umum partai yang lain?

**PRAMONO ANUNG :**

Ini bagian dari rivalitas dalam keluarga Soekarno. Kita tidak perlu melihatnya sebagai persoalan yang besar. Saya yakin semua dilakukan untuk kepentingan bangsa, semua akan baik-baik saja.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat ada rivalitas dalam keluarga atau ada perbedaan dalam memahami Soekarnoisme di antara putri-putri Bung Karno?

**PRAMONO ANUNG:**

Sebenarnya di antara mereka tidak ada perbedaan signifikan dalam melihat ajaran Bung Karno. Tetapi penerapan ajaran Bung Karno harus disesuaikan dengan konteks yang baru karena jaman telah berubah.

**DENNY J.A. :**

Tampaknya Megawati lebih modern memahaminya, karena dekat dengan ekonom-ekonom yang modern. Sementara Rahmawati lebih tradisional memahaminya. Menurut anda?

**PRAMONO ANUNG :**

Persoalannya bukan tradisional atau tidak. Tetapi Mbak Mega sudah masuk dalam konteks pemerintahan dan mempunyai pengalaman lebih dibandingkan dua putri lainnya. Harus ada penyesuaian dengan perubahan lingkungan global yang mempengaruhinya.

**DENNY J.A. :**

Pendukung Megawati dan PDIP banyak dari kaum nasionalis dan pengagum Bung Karno. Apakah munculnya dua Soekamo lain akan mengurangi dukungan kepada PDIP dan Megawati?

**PRAMONO ANUNG :**

Pemilu tahun 1999 yang lalu, dari 48 partai politik, ada 12 partai politik yang mengusung nama Bung Karno dan mengaku sebagai partai nasionalis. Sekarang tinggal 8 partai. Dari segi jumlah mengalami penurunan. Saya tetap yakin yang paling utama adalah



simbol dari figur Megawati itu sendiri. Kedua adalah jaringan organisasi. Dalam konteks ini Mbak Mega mempunyai banyak keunggulan karena jaringannya sudah sampai dengan tingkat anak ranting yang tidak dimiliki oleh partai lain.

Ketiga, sebenarnya tidak bisa dipungkiri politik aliran bangsa ini masih sangat kental sehingga simbol-simbol yang mendukung PDIP tidak lepas dari lahirnya fusi partai pada tahun 1973 lalu.

**DENNY J.A :**

Secara signifikan tidak terlalu besar pengaruhnya bagi PDIP dan Ibu Mega dengan kehadiran dua Soekamoputri lainnya, bung?

**PRAMONO ANUNG:**

Saya jujur ingin mengatakan tidak terlalu banyak pengaruhnya karena yang diperebutkan adalah suara-suara yang dulu tidak terakomodasi.

**DENNY J .A: :**

Ok Bung Pramono Anung, terima kasih banyak perspektif anda dari insider.

Bu Reni, menurut Pramono Anung, tidak terlalu besar pengaruh dua Soekarnoputri lain terhadap dukungan Megawati ataupun PDIP. Bagaimana pendapat anda?

**RENI SUWARSO :**

Sebelum memberikan komentar. Pertama, saya ingin menyatakan ketidaksetujuan dengan Ibu Rahma yang mengatakan

Megawati tidak membawa aspirasi keluarga Bung Karno. Secara politis, siapapun pemimpin politik Indonesia harusnya membawa aspirasi rakyat Indonesia, bukan menjunjung keluarga. Satu hal mengomentari pendapat Bung Anung ketika mengatakan pemilih Indonesia masih menerapkan politik aliran, justru di situ terlihat perilaku pemilih Indonesia ini akan ke mana. Misalnya tradisi keluarga Marhaen, mungkin akan cenderung memilih PNI Marhaen-nya Mbak Sukma. Partai Pelopor menjanjikan tidak akan kompromi untuk para pelanggar HAM, mungkin korban-korban HAM akan memilih Mbak Rahma. Atau PDIP dengan modelnya yang lain. Terjadi diversifikasi pemilih.

**DENNY J.A. :**

Politik Indonesia semakin kompleks dilihat dari politik aliran. Ada telepon dari pendengar, kita terima dulu. Hallo Pak Agus, silahkan Pak!

**AGUS:**

Sebagai satu alternatif partai-partai di luar PDIP dua partai keluarga Bung Karno itu menjadi harapan masyarakat, karena PDIP telah gagal meneruskan aspirasi masyarakat. Mereka berjanji kepada masyarakat soal penegakan hukum, keadilan kesejahteraan, ternyata semakin lama hidup semakin sulit. Kedua, Rahmawati maupun Sukmawati jangan menyebut diri Srikandi. Srikandi adalah seorang tokoh pewayangan yang berani menegakkan keadilan. Harus dibuktikan dulu. Nanti orang-orang Jawa heran, ini Srikandi yang mana? Ketiga, saudara Denny, anda sebagai intelektual jangan menggiring orang untuk mendukung Megawati. Saya tidak tahu Anda caleg PDIP atau bukan?

**DENNY J.A. :**

Bapak salah besar kalau mengira saya simpatisan PDIP. Sekedar bukti, survey kami mengatakan pemenang pemilu 2004 adalah Golkar. Kita melakukannya berulang-ulang.

Tapi terima kasih atas kritiknya. Selanjutnya saya bacakan dulu beberapa SMS yang masuk. Pertama Bung David mengatakan. "Tiga putri Soekarno sebaiknya bersatu untuk melawan Orde Baru yaitu Tutut Soeharto yang punya cita-cita mengembalikan Indonesia ke masa lalu. Tiga Soekarnoputri harus melawan satu Tutut Soehartoputri."

SMS kedua mengatakan "Sayang sekali keluarga Soekarno. Jika mereka tidak bisa mengakurkan tiga orang. bagaimana mengakurkan rakyat Indonesia yang jutaan banyaknya. Bukan main!"

Ketiga dari Bung Heru. "Baguslah tiga-tiganya muncul. karena jika yang satu jatuh yang lainnya masih eksis. Teknik bertahan di atas. Makin banyak di atas, makin aman rupanya".

Ok. kita kembali ke narasumber kita. Reni, mengapa yang muncul putri Soekarno bukan putra Soekarno? Apa yang putri lebih punya kharisma?

**RENI SUWARSO :**

Bagaimana kalau kita melihat tiga putri Soekarno ini, apakah mereka benar-benar telah menjunjung nilai demokrasi? Sejauh mana mereka memperjuangkan quality, justice, fairness atau freeddom? Apakah mereka sudah menjunjung harkat perempuan? Karena merekalah tiga perempuan yang berhasil menjadi pimpinan partai politik dan lulus verifikasi.

**DENNY J.A. :**

Bukan main.

**RENI SUWARSO :**

Kalau kita bicara keluarga Soekarno sebenarnya semuanya Soekarno. Pemilih bingung siapa yang dipilih. Saya menekankan. Kita harus mempunyai nilai plus. Plusnya apa? Platform. Karena mereka adalah pemimpin perempuan, apakah keterwakilan 30 persen perempuan sudah terpenuhi pada partai mereka? Karena sebetulnya banyak masalah-masalah perempuan yang belum terakomodir, misalnya mengenai angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi.

**DENNY J.A. :**

Reni, anda melihat dari 24 partai yang ada, hanya 3 partai saja yang dipimpin oleh perempuan dan tiga-tiganya belum mencerminkan kebijakan yang lebih pro perempuan?

**RENI SUWARSO :**

Saya meragukan tiga-tiganya sensitif gender.

**DENNY J.A. :**

Ok kita kesampingkan dulu masalah gender. Kembali ke masalah darah biru dalam politik Indonesia. Mengapa hanya anak-anak Bung Karno yang muncul? Di mana anak Hatta, anak Syahrir, anak Pak Agus Salim, dan seterusnya?

**RENI SUWARSO :**

Saya juga melihat yang sama. Tetapi kalau kita ingin terjun ke kancah politik, tidak hanya butuh nama besar, tetapi juga skill, informasi, jaringan, pengalaman dan pengetahuan. Dan satu hal lagi, karena pemilih di Indonesia masih memandang kharisma, mungkin dibandingkan Hatta, Syahrir dan yang lain, kharisma Bung Karno masih lebih tinggi.

**DENNY J .A. :**

Ok, Reni, kita terima dulu telepon dari Pak Budi.

**BUDI :**

Selamat pagi. Terus terang saja, lucu mendengar tiga putri Soekarno yang ikut berkecimpung dalam politik. Ingin menjadi apa? Presiden? Saya tidak mengerti gejala apa ini sebetulnya? Gejala latah mungkin. Jabatan presiden cuma satu, tapi semua ingin menjadi presiden.

**DENNY J.A. :**

Menurut Bapak, apakah ini lebih baik buat politik ke depan?

**BUDI :**

Saya tidak mengerti. Padahal keterpurukan Indonesia sudah semakin jelas dan sudah ketinggalan dengan negara-negara lain. Apa yang mereka perbuat sekarang?

**DENNY J.A. :**

Ok. Terima kasih banyak. Saya bacakan lagi beberapa SMS yang masuk:

“Apa pun namanya, dalam satu keluarga saja begitu, apalagi nanti dalam memimpin negara”.

“Negara ini kok seperti warisan Bung Karno saja. Kok sampai diperebutkan oleh tiga anaknya sekaligus.”

“Apa sih hebatnya Bung Karno? Kalau mereka merasa pemimpin yang besar, anak-anaknya itu tidak perlu membawa nama-nama ayahnya”.

Kembali kepada Reni. Bagaimana anda melihat tiga-tiga-nya tampil dengan platform yang nasionalis. Memang segmen politik nasionalis cukup besar untuk mereka perebutkan sekarang?

**RENI SUWARSO :**

Kalau melihat platform tiga-tiganya, saya sebetulnya pesimis, Tampaknya elit politik Indonesia masih loyal terhadap kepentingan diri mereka sendiri, terhadap ambisi-ambisi mereka sendiri. Rakyat hanya dimanfaatkan.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat, dari 24 partai yang ada masih banyak didominasi oleh warna-warna politik aliran? Partai-partai modern menjadi agak tersisihkan, begitu?

**RENI SUWARSO :**

Masih, misalnya memanfaatkan agama. Ada sekian partai yang mengusung nilai Islam atau Kristen, atau Katolik, sampai Pancasila. Tetapi saya melihat orang-orang reformis sejati yang punya kualitas seperti itu justru ada di luar parpol. Yang membuat saya sedih juga, yang dominan adalah barisannya Soeharto dan barisannya Soekarno, yang lainnya penggembira saja.

**DENNY J .A. :**

Anda melihat ada jarak yang cukup memprihatinkan antara mereka yang kita anggap kompeten, yang biasanya tidak mempunyai dukungan politik di bawah, dan yang mempunyai dukungan, tidak terlalu sibuk dan tidak terobsesi oleh isu-isu modern?

**RENI SUWARSO :**

Benar. Tetapi mungkin karena mereka tidak mempunyai dana. Kalau kita terjun ke dunia politik, harus mempunyai dana. Nah, yang mempunyai dana ini hanya orang-orang tertentu atau lebih tepatnya, keluarga-keluarga tertentu.

**DENNY J .A. :**

Menurut anda, segmen nasionalis ini masih cukup besar atau sudah terlalu sempit untuk diperebutkan oleh tiga putri Soekarno ini?

**RENI SUWARSO :**

Sulit untuk menjawabnya, kita lihat saja ke depan.

**DENNY J.A. :**

Tahun 2004 nanti, akan menentukan seberapa besar publik tetap setia kepada ikatan-ikatan aliran termasuk juga dukungan terhadap kaum nasionalis, kaum agama. Seberapa besar juga partai-partai baru mencoba membawa platform modern?

Saya bacakan lagi beberapa SMS yang masuk.

SMS pertama dari Jay ABK mengatakan, “Kalau Megawati tidak mampu mengatasi konflik keluarga, itu menjawab mengapa prestasi Megawati sebagai presiden jeblok”. Kedua, SMS dari Taufiq di Bogor mengatakan, “Saya tidak melihat bahwa tiga Soekarnoputri itu menggunakan pikiran besar Soekarno. Mereka hanya menjual nama besar Soekarno”.

Sekali lagi dikatakan bahwa nama besar Soekarno yang digunakan dalam politik tiga putri ini. Bukan gagasan gagasan besarnya, tapi kharisma pribadi Soekarno. SMS ketiga mengatakan, “Masyarakat sudah semakin dewasa, ikatan primordial sudah tidak lagi jamannya”.

Sekarang juga kira terima telepon dari Bapak Halid di Sunter. Hallo Pak Halid.

**HALID :**

Assalamu’alaikum.

**DENNY J.A. :**

Wa’alaikum salam. Silahkan.



**HALID:**

Saya melihat kira ini satu negara yang mayoritas Islam. Saya bukan anti wanita untuk menduduki dan mengejar emansipasi, tetapi dari hal yang sudah terjadi, kira melihat kegagalan yang sudah ada. Selama 25 tahun merdeka bangsa kita tetap sengsara, karena Soekarno juga lebih mementingkan polirik. Terapi sekarang rakyat sudah jenuh. Rakyat sudah semakin susah hidupnya. Sebaiknya kira cari pemimpin yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat. Terutama, yang mampu bertindak tegas. Artinya jangan dibiarkan terus-menerus elit politik yang bisa koar-koar saja.

**DENNY J .A. :**

Tetapi tidak ada masalah walaupun perempuan ya Pak? Siapa pun asal dia kompeten?

**HALID :**

Benar, asal betul-betul mementingkan rakyat dan dia berani tegas, silahkan saja. Artinya selama dia membawa garis-garis besar haluan negara.

**DENNY J.A. :**

Di samping saya ada seorang perempuan yang mempunyai ideologi perempuan juga. Dia agak sedikit cengar-cengir mendengarkan Bapak bilang soal perempuan tadi.

**RENI SUWARSO :**

Tapi sekarang saya sudah tersenyum.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana Reni? Banyak sekali SMS dan telepon yang masuk, yang agak kritis kepada munculnya tiga Soekarnoputri di dunia politik.

**RENI SUWARSO :**

Saya juga agak sedih SMS-nya negatif. Sebagai akademisi, kita melihat segala sesuatu dari dua sisi, dari negatif dan positifnya. Tetapi saya masih melihat positifnya ada, minimal Megawati memperlihatkan sosok yang demokratis. Tetapi satu hal, menjual ajaran Bung Karno, saya tidak yakin. Saya akan memilih partai yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, bukan memperjuangkan ajaran Bung Karno. Karena, kalau kita membuat partai politik untuk memperjuangkan nilai demokrasi, kita sudah melihat buktinya. Minimal, kalau kita membandingkan politik di Indonesia dengan politik di negara lain.

**DENNY J.A. :**

Anda tampaknya pro terhadap berbagai policy yang modern. Untuk kebijakan bagi perempuan atau demokrasi. Dari 24 partai yang ada, apakah terwakili kebijakan yang anda ingin diperjuangkan itu?

**RENI SUWARSO :**

Karena waktu terbatas. Saya hanya ingin melihat partai yang sensitif gender. Saya masih melihat partai politik di Indonesia belum sensitif gender. Ada beberapa partai politik yang selalu mengedepankan persoalan-persoalan perempuan, tetapi masih basa-basi. Kita tunggu sebentar lagi, melihat dari daftar caleg,

apakah mereka memperjuangkan keterwakilan 30 persen perempuan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi perempuan di politik?

**DENNY J .A. :**

Menurut anda, siapapun yang menang pemilu, tampaknya semua partai tidak ada yang benar-benar bicara spesifik?

**RENI SUWARSO :**

Betul. Mereka masih memperjuangkan diri mereka sendiri. Terutama lima partai besar itu.

**DENNY J .A. :**

Walaupun anak Soekarno tiga-tiganya perempuan, menurut anda mereka tidak memperjuangkan politik perempuan?

**RENI SUWARSO :**

Belum. Saya tegas nih.

**DENNY J .A. :**

Ok, terakhir Reni, apakah ada yang ingin anda sampaikan kepada para pendengar Delta berhubung dengan adanya tiga Soekarnoputri, politik perempuan atau lainnya?

**RENI SUWARSO :**

Saya ingin menasehati pemilih di Indonesia, tolong ketika anda memilih agar benar-benar memperhatikan platform partai. Jangan

hanya melihat figur. Kita belajar sedikit dewasa secara politik. Walaupun pendidikan politik di Indonesia sangat lemah setelah 32 tahun kita dibuat mengambang, jauh dari urusan politik. Sekarang tiba-tiba secara instan kita harus berenang di konflik politik, kita harus pandai-pandai membawa diri supaya di masa depan bisa memperjuangkan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

**DENNY J .A. :**

Ok. Terima kasih banyak Reni Suwarso dari politik UI. Para pendengar Delta FM, demikianlah, kita mendengar satu percakapan yang beragam tentang fenomena munculnya tiga Soekarnoputri. Memang dalam alam demokrasi, siapapun bisa tampil sebagai calon pemimpin. Apakah Soekarnoputri, Soehartoputri, atau dari keluarga lainnya. Akhirnya rakyat sendiri yang akan menjadi hakim tertinggi melalui bilik-bilik suara pada tahun 2004 nanti. Namun, suka tidak suka pengaruh darah biru dalam politik Indonesia, apakah itu anak Soekarno atau mungkin juga cucu-cucu Soekarno, akan terus menjadi bahan diskusi yang mendalam. Sehingga para pemain politik bisa saja menggunakan mereka hanya untuk kepentingan yang lain.

Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Rabu minggu depan bersama saya, Denny J.A., dalam “Dialog Aktual” dengan isu aktual lainnya.

## **CALON PRESIDEN DARI KALANGAN MILLITER**

Tanggal: 1 Oktober 2003

Host: Denny J. A.

Narasumber: Muhammad Qodari (Direktur Riset LSI), Djuanda  
(Pengamat Militer)

Pada masa awal reformasi, publik sangat anti terhadap Orde Baru dan militer: Namun empat tahun kemudian, kelihatannya public mood sudah mulai berubah. Publik pada segmen tertentu justru merindukan kondisi-kondisi Orde Baru, dan pada sisi lain bahkan semakin merindukan kepemimpinan militer: Menjelang pemilihan presiden tahun 2004, Calon presiden dan calon wakil presiden dari purnawirawan TNI semakin populer: Di alam demokrasi, memang tidak ada yang salah dengan figur pemimpin dari purnawirawan TNI karena mereka sudah kembali menjadi warga sipil dan mempunyai hak menjadi pemimpin aktif dalam sistem politik. Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, merupakan sosok purnawirawan yang sangat populer dan mempunyai peluang mengalahkan Megawati yang incumbent presiden dalam pemilihan presiden 2004. Tidak ketinggalan, Amien Rais pun sempat menginginkan wakil presiden dari kalangan tentara. Terakhir dalam konvensi Partai Golkar,

Wiranto sebagai purnawirawan TNI posisinya juga semakin kuat. Mengapa publik sepertinya merindukan figur militer? Apakah ini satu pesan bahwa publik menginginkan seorang pemimpin yang lebih tegas dan lebih menjamin stabilitas politik?

**DENNY J.A. :**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Kita bertemu lagi dalam “DialogAktual” bersama saya Denny J.A., kali ini dengan topik yang semakin hot belakangan, “Calon Presiden Dari Kalangan Militer”. Mengapa para purnawirawan TNI semakin populer sebagai calon pemimpin nasional? Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, merupakan sosok purnawirawan yang sangat populer dan mempunyai peluang mengalahkan Megawati. Tidak ketinggalan, Amien Rais pun menginginkan wakil presiden dari kalangan tentara. Terakhir dalam konvensi Partai Golkar, Wiranto selaku purnawirawan posisinya semakin kuat. Mengapa publik sepertinya merindukan figur tentara? Apakah ini satu pesan bahwa publik menginginkan seorang pemimpin yang lebih tegas dan lebih menjamin stabilitas politik?

Bersama kita, Bung Muhammad Qodari, Direktur Riset Lembaga Survey Indonesia (LSI). Menurut survey anda, bagaimana posisi SBY sebenarnya?

**MUHAMMAD QODARI :**

Posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang menarik. Menurut survey yang baru saja dilakukan LSI, SBY berhasil menjadi runner-up setelah Megawati, itu menjadi sangat signifikan karena SBY yang belum didukung partai besar telah berhasil mengungguli

popularitas kandidat dari partai besar lainnya, seperti Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid, atau Hamzah Haz dan Amien Rais.

**DENNY J.A.:**

Bukan Main. SBY tidak mempunyai parpol tetapi bisa mengunguli ketua umum dari berbagai partai besar. Sebelum lebih mendetail, kita ingin mengetahui sampel yang anda punya. Apakah hanya wakil dari kalangan perkotaan?

**MUHAMMAD QODARI:**

Tidak. Kita mengadakan jajak pendapat nasional, kecuali propinsi NAD dengan alasan keamanan. Karakteristik dari populasi kita menyerupai karakteristik populasi Indonesia, baik dari aspek proporsi perkotaan pedesaan, pendidikan, maupun pendapatan, bahkan sampai pada komposisi etnis.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda, responden ini yang menjadi miniatur dari pemilihan riil nantinya?

**MUHAMMAD QODARI :**

Ya, insya Allah. Tentu akan berbeda dengan survey yang hanya dilakukan di perkotaan. Kita tahu mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Jika survey hanya dilakukan di perkotaan maka dia kurang mencerminkan realitas publik Indonesia secara keseluruhan.

**DENNY J.A. :**

Ok bung, sekarang kita ingin lebih mendalam lagi. SBY bukan

ketua partai besar, tetapi popularitasnya melampaui ketua partai lainnya kecuali Megawati. Apa yang membuat purnawirawan ini menjadi populer?

**MUHAMMAD QODARI :**

Purnawirawan yang satu ini harus kita akui sedikit banyak diuntungkan oleh posisinya sebagai pejabat, sebagai seorang menteri utama dalam kabinet yang sekarang. Kita mengetahui beliau menduduki jabatan sebagai Menkopolkam. Dan beberapa waktu terakhir, banyak isu nasional bahkan internasional seperti misalnya isu terorisme, gerakan separatis Aceh maupun gerakan Papua Merdeka yang memberikan momentum buat beliau untuk tampil. Kita mengetahui pejabat-pejabat negara pun mendapatkan kesempatan yang sama besarnya untuk tampil di media massa, tetapi kenapa popularitasnya tidak meningkat sepesat SBY? Tidak lain dan tidak bukan karena komunikasi publik SBY lebih bisa diterima kalangan publik.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana kita mengetahui popularitas SBY ini gejala sesaat atau permanen atau permanen menjelang 2004 nanti?

**MUHAMMAD QODARI :**

Kita hanya dapat berbicara berdasarkan time frame yang sudah lalui sampai saat ini. Bagaimana ke depan tentu tergantung pada momentum yang bisa memberi kesempatan kepada SBY untuk tampil dan bagaimana SBY merespon isu. Tetapi kalau kita mendasarkan pada data-data sebelumnya tampak bahwa popularitas SBY meningkat secara gradual. Kalau boleh mengutip



survey yang lain, misalnya yang dilakukan Danareksa Institute bulan Oktober 2002, peringkat SBY masih di bawah 3 besar. Namun pada bulan Februari atau Maret 2003, sudah menduduki tiga besar. Survey terakhir pada bulan Juli 2003, SBY sudah menduduki nomor dua.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat berbagai survey dan menemukan trend yang hampir sama bahwa SBY semakin lama semakin populer. Megawati semakin lama semakin populer juga atau sebaliknya?

**MUHAMMAD QODARI :**

Popularitas Megawati tetap paling tinggi dibandingkan para kandidat lainnya, namun secara gradual popularitas putri Bung Karno ini menurun. Jadi ada kecenderungan yang berbalik antara popularitas SBY dan Megawati.

**DENNY J.A. :**

Kalau grafik ini konstan bahwa SBY terus meningkat dan Megawati terus menurun hingga tahun 2004 nanti, tampaknya SBY akan melampaui Megawati?

**MUHAMMAD QODARI :**

Bisa jadi bung, apalagi kalau kita melihat 1 fenomena menarik dari survey LSI, SBY baru dikenal oleh 65 % pemilih, sementara Megawati sudah dikenal lebih dari 95 % pemilih. Andai kata SBY dikenal lebih banyak pemilih, katakanlah 95 % setara dengan Megawati, mungkin popularitasnya lebih tinggi.

**DENNY J.A. :**

Ok, Bung Qodari. Nanti kita didetailkan lagi. Para pendengar Delta FM, gejala yang menarik, SBY seorang purnawirawan yang tidak punya parpol, juga bukan ketua umum partai besar, begitu populer melampaui semua ketua umum partai lainnya kecuali Megawati. Apakah yang sebenarnya terjadi ? Apakah ini refleksi lebih luas dari kerinduan publik akan seorang figur yang lebih keras dan tegas untuk menjamin sebuah stabilitas politik?

Bung Qodari, sebelum lebih jauh, publik tampaknya ingin mengetahui, sebenarnya apa yang akan anda cari dengan survey ini?

**MUHAMMAD QODARI :**

Sebetulnya sudah ada sekian lembaga yang melakukan survey, namun pada hemat kami belum ada satu lembaga yang betul-betul mendedikasikan diri pada kegiatan survey. Sementara survey, khususnya survey politik merupakan sebuah hal yang necessary bagi sebuah negara demokratis, karena dengan survey kita bisa mengidentifikasi “pulsa” demokrasi atau denyut jantung demokrasi sebuah bangsa. Berdasarkan denyut demokrasi, kita bisa mengidentifikasi kalau ada sesuatu yang salah dalam demokrasi secara keseluruhan maupun dalam pembuatan kebijakan publik. Khusus menjelang pemilu 2004, kami kira isu yang paling relevan untuk dikaji adalah pemilihan parpol dan pemilihan presiden, dan disinilah kemudian muncul temuan-temuan yang berkaitan dengan tema yang kita bahas kali ini.

**DENNY J.A. :**

Anda yakin bahwa 145 juta pemilih bisa diwakili hanya oleh 2000 sampel?

**MUHAMMAD QODARI :**

Di Amerika, responden yang diteliti tidak mencapai 2000, kadang. kadang hanya mencapai 1000 atau 1500. Namun sejarah jajak pendapat di Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah responden yang sekitar 1000 atau 2000 itu ternyata bisa memprediksi dengan cukup akurat kecenderungan pemilih selama kurang lebih 50 tahun dengan tingkat kesalahan hanya sekitar satu koma sekian persen. Kita yakin bahwa dalam konteks Indonesia itu bisa dilakukan dalam keterbatasan tertentu.

**DENNY J .A. :**

Hasil jajak pendapat anda mengatakan bahwa SBY semakin lama semakin populer. Apakah ini ada hubungannya dengan posisi beliau sebagai purnawirawan?

**MUHAMMAD QODARI :**

Boleh jadi bung, kita memang sedang mengolah jawaban dari responden karena kita juga menanyakan kepada responden “Mengapa anda memilih capres ini atau itu?” Namun dari berbagai questioner yang masuk yang sempat saya lihat, dan sekilas muncul jawaban bahwa responden memilih SBY karena dia berkompeten, berwibawa penampilannya, juga karena beliau dari TNI.

**DENNY J.A. :**

Ada semacam kerinduan terhadap strong leadership, yang bisa menjamin stabilitas politik. Amien Rais membuat satu klaim bahwa ia menginginkan cawapres yang berasal dari TNI, bagaimana anda mengomentari hal ini?

**MUHAMMAD QODARI :**

Kita harus kembali kepada statement Amien Rais sendiri, mengapa ia menghendaki seorang wapres dari TNI. Amien Rais mengatakan sebagai pemimpin Islam, dia tidak cukup menjual. Selain itu seorang wakil presiden dari TNI dibutuhkan untuk menjaga integrasi bangsa. Dari pernyataan tersebut ada dua catatan. Pertama, sebagai pemimpin Islam dia merasa kalah populer dibandingkan dengan Hamzah Haz dan Abdurrahman Wahid terutama di kalangan NU. Kedua, biasanya seorang pemimpin Islam mencari kombinasi komplementer dari kalangan nasionalis, tetapi mengapa Amien Rais lebih spesifik kepada kalangan TNI. Mungkin dari kalangan nasionalis, partainya lebih besar dari partai Amien Rais sendiri. Seperti PDIP atau partai Golkar, yang jauh di atas PAN perolehan suaranya.

**DENNY J .A. :**

Mustahil kandidat dari partai besar itu untuk mau ke kursi kedua begitu?

**MUHAMMAD QODARI :**

Benar, mustahil meminta Akbar Tanjung atau Megawati menjadi wakil presidennya Pak Amien. Terpaksa mencari dari kalangan lain.

**DENNY J .A. :**

Posisi Amien Rais dalam survey anda bagaimana?

**MUHAMMAD QODARI :**

Sebetulnya tidak terlalu buruk. Berdasarkan ranking presentase, beliau menduduki posisi ke 6. Namun posisi ke 3,4,

5 dan 6 bahkan sampai ke 7, sebetulnya posisinya relatif sama kuat karena masih di dalam margin of error yang sama. Misalnya Hamzah Haz dan Abdurrahman Wahid perolehannya delapan koma sekian persen. Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra tujuh koma sekian persen. Relatif sama kuat.

**DENNY J.A. :**

Tetapi mereka dibanding Megawati dan SBY tampaknya mulai agak jauh?

**MUHAMMAD QODARI :**

Ketika dibandingkan dengan perolehan suara Megawati dan SBY, maka perolehannya menjadi signifikan secara statistik.

**DENNY J.A. :**

Lalu seberapa besar pengaruh wapres terhadap Amien Rais, apakah jika TNI wakil presidennya bisa mendongkrak suara Amien Rais.

**MUHAMMAD QODARI :**

Tergantung siapa calon dari TNI yang dipilih Pak Amien. Karena kita mengetahui wakil dari TNI sekalipun track record-nya ada yang baik ada yang tidak, di mata publik domestik maupun internasional, TNI yang mempunyai catatan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya. Jangankan mendongkrak popularitas, jangan-jangan malah menurunkan.

**DENNY J.A.:**

Bung Qodari tadi anda mengatakan bahwa Amien Rais membuat satu perhitungan rasional memilih wakil presiden dari tentara karena menginginkan integrasi bangsa. Seberapa tepat alasan ini?

**MUHAMMAD QODARI :**

Alasan ini tidak selalu tepat kalau dihubungkan dengan mood publik Indonesia secara keseluruhan. Hasil survey LSI menunjukkan, krisis ekonomilah yang dipersepsi masyarakat Indonesia sebagai masalah yang paling serius.

**DENNY J.A. :**

Isu krisis ekonomi sebagai prioritas?

**MUHAMMAD QODARI :**

Betul. Diprioritaskan oleh 65% responden. Isu keamanan hanya tujuh koma sekian persen dan isu krisis politik hanya empat koma sekian persen. Ini mengindikasikan, sebetulnya bagi masyarakat Indonesia, masalah keamanan dan politik sudah selesai. Yang dicari masyarakat Indonesia adalah pemimpin yang bisa mengatasi masalah ekonomi. Jadi kalau Pak Amien Rais ingin mencari seorang calon presiden dari kalangan TNI, jangan yang kuat pada integrasi nasionalnya, tapi yang kuat pada kompetensi ekonominya.

**DENNY J.A. :**

Kita juga ingin mendengar pandangan dari Pak Djuanda. Selamat pagi bung, anda kita kenal dekat dengan kalangan tentara. Mengapa isu capres ataupun wapres dari purnawirawan semakin populer?

**DJUANDA:**

Masyarakat sudah pandai membandingkan dan membangun confident dan true trust, sehingga dalam 5 tahun ini masyarakat sudah bisa menilai dan membangun kepercayaan kepada siapa kepercayaan itu akan diberikan.

**DENNY J .A. :**

Menurut anda hal ini disebabkan oleh kelemahan pemimpin sipil?

**DJUANDA:**

Saya berbicara bukan saja kelemahan, tetapi juga ketidakmampuan membangun kepercayaan. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang dipercayakan kepada mereka sebagai pemimpin dan negarawan.

**DENNY J .A. :**

Apakah ini sebagai protes terhadap situasi sekarang?

**DJUANDA:**

Bukan protes, karena masyarakat kita berdiri pada dua pandangan yaitu konsep ketakutan dan konsep harapan, saat berhadapan dengan masa depan yang sifatnya misterius itu.

**DENNY J .A. :**

Di samping fakta, kalau anda ingin evaluasi dengan semakin rindunya publik akan figur-figur purnawirawan militer, apakah ini sebuah gejala yang menyenangkan atau justru mengkhawatirkan?

**DJUANDA:**

Ada 2 sisi, yaitu apabila nanti calon pemimpin purnawirawan bisa memberikan kepemimpinan dan kenegarawanan kepada negara ini, kita bersyukur. Ada juga ketakutan ketika kemudian kepemimpinan mereka menjadi bersifat partisan, otoritarian dan membuat negara menjadi negara polisi.

**DENNY J.A. :**

Dari calon purnawirawan, menurut anda ada yang prospektif bagi demokrasi ada juga rang sebaliknya?

**DJUANDA:**

Saya melihat yang sekarang maju adalah pak Wiranto dan pak SBY. Sepengetahuan saya, dua-duanya ada komitmen untuk demokrasi dan perubahan. Ada kualitas-kualitas yang boleh dikatakan generalis, kualitas kemauan untuk mendengar orang. Bukan tipe diktator.

**DENNY J.A. :**

Bung Djuanda terima kasih. Bung Qodari, Pak Djuanda menyebut nama yang lebih tegas, SBY dan Wiranto, dua-duanya adalah purnawirawan. Bagaimana anda mengevaluasi ini?

**MUHAMMAD QODARI :**

Kalau untuk SBY kita sudah bicara cukup banyak. Berbicara mengenai Pak Wiranto, kebetulan kemarin saya hadir dalam acara sosialisasi bakal calon presiden dari Golkar. Saya melihat sambutan terhadap Pak Wiranto jauh lebih heboh dibandingkan dengan



kandidat lainnya. Beliau mempunyai program KTA (Kenyang Tenang dan Aman). Jika menjadi presiden nanti akan mengatasi masalah kenyang, tenang, dan aman. Menjadi relevan dengan pembicaraan mengenai rezim Orde Baru, kita mengetahui bahwa Pak Harto adalah seorang mantan purnawirawan jenderal, bahkan ketika menjadi presiden posisinya masih sebagai seorang militer aktif. Rezim Orde Baru juga diasosiasikan mampu mengatasi persoalan KTA ini.

**DENNY JA. :**

Melihat respon internasional, bagaimana anda membandingkan antara Wiranto dan SBY?

**MUHAMMAD QODARI :**

Terlepas dari komentarnya Pak Juanda tadi yang melihat keduanya relatif setara atau sepadan, tetapi dalam konteks internasional kita melihat perbedaan yang cukup kontras. SBY beberapa waktu lalu berkunjung ke Amerika Serikat, dan sambutan di sana khususnya di Washington luar biasa, cukup meriah. Misalnya di forum USINDO (Forum Masyarakat Indonesia Amerika), forum penuh dihadiri oleh mereka yang berminat mendengarkan SBY, walaupun harus membayar.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda respon internasional sangat berbeda antara SBY dan Wiranto?

**MUHAMMAD QODARI :**

Benar, Pak Wiranto sempat diusulkan akan dibawa ke Pengadilan Internasional, dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

**DENNY J .A. :**

Ada penelepon masuk. Halo apa kabar bung?

**PENELEPON :**

Halo bung, saya termasuk orang yang akan mendukung SBY, orangnya tenang, tegar. Menurut saya orang yang akan mendukung pak SBY bukan karena figur purnawirawannya tetapi lebih melihat penampilan SBY yang tenang, yang tegar. Terima kasih.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana Bung Qodari? SBY menjadi populer, menurut penelepon bukan karena purnawirawan, tetapi kemampuan individunya yang membuat orang tenang dan aman.

**MUHAMMAD QODARI :**

Memang ada yang melihat figur SBY sebagai seorang yang tegas, tenang dan mungkin penampilannya juga sudah presidensial istilahnya. Sudah cukup meyakinkan kalau menjabat sebagai presiden. Tetapi tidak bisa dinafikan orang-orang yang memang memilih SBY, senang dengan SBY bukan karena latar belakang purnawirawannya tersebut.

## **DENNY J.A. :**

TNI yang moderat menjadi image SBY. Para pendengar, anda mendengar sendiri tadi bahwa semakin populernya calon-calon presiden dari kalangan purnawirawan dan nama yang sekarang menonjol yaitu SBY dan Wiranto, dua-duanya mungkin menjadi presiden. Namun menurut Bung Qodari, respon internasional kepada mereka berdua sangat bertolak belakang.

Kita bacakan respon dari publik melalui SMS. SMS pertama mengatakan “Saya sebetulnya memilih diktator kuat dan berhati baik. Ini contoh buat tentara yang rajin sholat, puasa, tidak jadi backing dan tidak mau menerima suap.” SMS kedua, mengatakan “Salut pada popularitas ABRI, layak dan mantap jadi kandidat presiden secara universal. SMS ketiga mengatakan,”Laporan dari hasil konvensi Golkar Kabupaten Sukabumi pada tanggal 20 September, dua terpilih dari TNI: Wiranto ranking pertama, Prabowo ranking keempat.”

Apa yang menjadi sebab populernya mantan-mantan pimpinan tentara sebagai calon presiden. Kembali kita berhubungan dengan Bung Qodari yang memiliki data dari Lembaga Survei Indonesia. Sekali lagi bung anda melihat ada Wiranto di sana, ada SBY, ada Prabowo, mereka semua para purnawirawan. Ada nuansa yang berbeda di antara mereka. Bagaimana anda membedakannya?

## **MUHAMMAD QODARI :**

Pertama kita bisa melihat perbedaan nuansa itu dari latar belakang masing-masing kandidat. Kedua, aspek orientasi politik mereka. Kita tahu dari orientasi politik Pak SBY salah satu konseptor utarna dalam cetak biru reformasi TNI. Pak Wiranto adalah orang yang dikenal sebagai TNI yang konservatif, namun juga ada track

record di mana ketika pada tahun 1998 Pak Harto mengundurkan diri, sebetulnya Pak Wiranto mungkin bisa mengambil alih situasi, namun beliau tidak memanfaatkan situasi. Sementara Pak Prabowo konon saya mendengar laporan dari konvensi Golkar, beliau terang-terangan menyatakan tipe kepemimpinan yang terbaik untuk Indonesia adalah seperti yang dipraktekkan oleh mantan mertua beliau, yaitu presiden Soeharto.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda dari berbagai tokoh purnawirawan ini tampaknya SBY yang paling kurang terkena kasus?

**MUHAMMAD QODARI :**

Tampaknya begitu. Dan tampaknya yang paling moderat. Tetapi masalahnya dia tidak memiliki partai politik. Problem terbesar bagi pak SBY adalah tiadanya partai yang cukup besar untuk, pertama, memobilisasi dukungan terhadap beliau sehingga tingkat keterkenalan atau tingkat informasi terhadap beliau meningkat dari angka 65% menjadi di atas 90 %. Kedua, kendaraan itu harus mampu mengantar beliau kepada proses pencalonan, karena kita tahu bahwa untuk menjadi seorang calon partai politik minimal memperoleh sekitar 5% kursi suara nasional dan 3% kursi di DPR.

**DENNY J.A. :**

Menarik sekali. SBY hampir mengalahkan Megawati walau beliau dikenal oleh 65% responden. Sementara Megawati sudah dikenal lebih dari 90% responden. Kalau SBY dikenal responden yang sama banyaknya, beliau bisa melampaui Megawati.

**MUHAMMAD QODARI :**

Dalam survey kita juga menanyakan misalnya Pak Akbar Tanjung tidak dicalonkan sebagai calon presiden dari Golkar karena tersangkut dengan masalah hukum, maka siapakah kira-kira yang paling pantas untuk diajukan oleh partai Golkar? Mayoritas dari responden menyatakan SBY.

**DENNY J.A. :**

Bukan main. Jadi suara dari konvensi partai Golkar yang memberikan hak kepada kurang dari 600 pimpinan di daerah untuk memilih, berbeda dengan suara kehendak dari pemilih.

**MUHAMMAD QODARI :**

Kita belum tahu persis bung, karena memang yang 600 orang ini sedang dalam proses membuat keputusan. Keputusan akhir mereka belum kelihatan, walaupun sudah ada indikasi-indikasi seperti SMS yang tadi. Sudah diberitakan di media massa, bahwa pada akhir Oktober akan ada lima nama yang akan dicalonkan dan pak Wiranto sudah muncul di beberapa kabupaten sebagai peringkat nomor 1.

**DENNY J.A. :**

Kita mengetahui para purnawirawan semakin populer. Apa yang menjadi sebab utama dari hal ini?

**MUHAMMAD QODARI :**

Nampaknya ini berkaitan dengan mood publik Indonesia secara keseluruhan, khususnya yang terkait dengan dua aspek.

Pertama, semakin menurunnya sikap anti terhadap rezim Orde baru. Menurut catatan kami pada tahun 2001 mereka yang anti terhadap rezim Orde baru jumlahnya mencapai 60%. Setahun kemudian menurun secara signifikan hanya menjadi 39%. Pada survey tahun 2003 tinggal 26%. Kita tentu mengaitkan rezim Orde baru ini dengan kepemimpinan presiden Soeharto yang seorang purnawirawan militer. Kedua, nampaknya juga berkaitan dengan penurunan sikap anti rezim militer aktif yang pada tahun 2001 mencapai 54%, tahun 2002 menjadi 47,7%, dan tahun 2003 turun lagi menjadi 39%.

**DENNY J.A. :**

Ok Bung Qodari. Anda sudah mengatakan dua hal. Populernya capres purnawirawan disebabkan oleh bergesernya sentimen publik yang lebih merindukan stabilitas dan image dari Orde baru.

Sebuah fakta, purnawirawan semakin populer, baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Bahkan Amien Rais nyata-nyata mengatakan, ia belum tahu siapa wakil presidennya, yang dia tahu harus dari kalangan tentara. Apa yang menjadi sebabnya? Satu hal yang mungkin dapat menjadi renungan kita bahwa mungkin publik merindukan tampilnya kembali seorang leader yang bisa membuat kita merasa stabil dan nyaman.

Para pendengar setia Delta FM di mana pun anda berada, terima kasih atas kebersamaanya. Sampai jumpa lagi bersama saya Denny J.A. dalam "Dialog Aktual" Rabu depan.

# HEBOH MBAK TUTUT SEBAGAI CALON PRESIDEN

Tanggal: 10 Desember 2003

Host: Denny J .A.

Narasumber : J. Kristiadi (CSIS), Ari Mardjono (Sekjen PKPB),  
Bomer Pasaribu (DPP Golkar)

Menjelang pemilu 2004, keluarga mantan Presiden Soeharto kembali menjadi sorotan. Terutama sekali Siti Hardiyanti Rukmana biasa dipanggil Mbak Tutut yang disebut-sebut sebagai salahsatu kandidat presiden. Tentu saja ini sebuah fenomena, sebuah berita yang seksi bagi pers. Muncul berbagai komentar, analisis, dan spekulasi tentang pencalonan Tutut. Apakah arti kehebohan menyambut tampilnya kembali Tutut dalam kancah politik ini? Apakah ini hanya gejala biasa yang akan cepat menghilang? Atau benar-benar sebuah skenario politik yang akan semakin bergulir dan semakin signifikans pengaruhnya secara politik? Apakah kemunculan dinasti Soeharto ini suatu pertanda kegagalan lima tahun reformasi? Apakah pencalonan Tutut menyiratkan kerinduan publik terhadap figur yang kuat, salah satunya dari dinasti Soeharto, yang mampu memberikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana peluang Tutut selanjutnya?

**DENNY J .A:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan, apa kabar? Jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J .A. dengan topik yang mungkin paling hot pagi ini “Heboh Mbak Tutut Sebagai Calon Presiden”.

Tak banyak figur publik yang mendapatkan perhatian seperti Tutut. Berturut-turut Tutut menjadi perhatian pers, tidak hanya berita biasa tapi juga berita headline bahkan cover story berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Tentu bagi pers ini sebuah isu yang seksi. Kemudian Tutut dihadap-hadapkan terutama dengan Megawati Soekamoputri. Tutut putri dari Soeharto, Megawati putri dari Bung Karno, dua pemimpin yang mungkin terbesar dalam sejarah politik Indonesia modern. Lebih dari itu, Bung Karno dianggap sebagai bagian dari era besar Orde Lama, Soeharto juga dianggap sebagai bagian dari era besar Orde Baru. Jadi pertarungan dua putri ini dianggap juga pertarungan wakil-wakil terbaik dari dua orde yang panjang itu. Tidak heran kemudian berbagai komentar, analisa, dan spekulasi mewarnai berbagai berita seputar Tutut.

Apakah kehebohan ini sebenarnya gambaran dari hal yang lebih dalam, bahwa ada kerinduan publik terhadap figur yang kuat seperti Soeharto, atau dinastinya, yang mampu memberikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi? Apakah kemunculan dinasti Soeharto dalam kancah politik ini pertanda kegagalan lima tahun reformasi? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana peluang Tutut ke depan?

Kita akan menggali ini dari berbagai narasumber. Yang pertama, kita akan menghubungi Bung J. Kristiadi dari CSIS. Selamat pagi bung, apa kabar?



**J. KRISTIADI :**

Halo bung. Selamat pagi, kabar baik.

**DENNY J .A. :**

Komentar umum dulu, mengapa pers heboh sekali memberitakan kemunculan kembali Mbak Tutut?

**J. KRISTIADI :**

Begini mas, saya setuju dengan yang diberitakan Majalah Tempo paling baru, bahwa sebetulnya Golkar Lama muncul dalam partai baru. Mestinya harus dijelaskan kepada masyarakat apa itu Golkar Lama? Golkar Lama adalah Golkar yang betul-betul menjadi instrumen dan alat kekuasaan yang luar biasa. Kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang merepresi rakyat, kekuatan yang sudah memonopoli kebenaran. Masih ingat, sebelum Pak Harto turun ada perwira tinggi yang mengomentari pendapatnya Pak Muladi mengenai pasal yang ada di dalam UUD 1945 yang mengatakan presiden yang sudah dipilih bisa dipilih kembali, harusnya dua kali. Perwira tinggi yang baru saja selesai penataran P4 di Istana Bogor mengatakan, itu pendapat yang subversif.

Itu mengerikan. Dan Mbak Tutut itu bukan sekedar keluarga mantan Presiden Soeharto, tapi merupakan bagian dari kekuasaan yang represif. Ini penting bagi kekuatan reformis, kemenangan tokoh itu berarti kiamat bagi politik Indonesia.

**DENNY J .A. :**

Jadi anda anggap kemunculan Mbak Tutut ini wakil dari ideologi lama dan terlama?

**J. KRISTIADI :**

Jelas seperti klaim mereka sendiri bahwa mereka adalah Golkar dalam partai baru. Jika mereka berkuasa luar biasa.

**DENNY J.A. :**

Bung, bagaimana prospeknya jika memang Tutut dicalonkan sebagai presiden?

**J. KRISTIADI :**

Tergantung dari orang-orang yang mengaku reformis yang sekarang ini berkuasa. Kalau mereka hanya reformis dalam retorika, tergulung dengan kekuatan seperti itu. Mbak Tutut mendapat dukungan dari masyarakat yang tuntutananya sangat sederhana yaitu supaya dapat hidup aman, makan cukup dan sebagainya. Dan ini peringatan agar mereka yang berkuasa sekarang, tidak cuma berkoar-koar reformis tapi KKN-nya tidak kalah dahsyat dengan masa Orde Baru dulu. Terus persepsi masyarakat, kalau sampai Tutut menang, akan mengatakan bahwa rezim sekarang lebih buruk dari pada rezim Orde Baru.

**DENNY J.A. :**

Dan menurut anda, peluang kemenangan Mbak Tutut itu ada?

**J. KRISTIADI :**

Saya kira selalu ada. Di bekas negara Uni Soviet dan negera-negara bekas komunis, yang muncul juga penjelmaan dari partai komunis, dan itu mengerikan sekali.

**DENNY J.A. :**

Heboh munculnya Tutut karena publik juga kecewa dengan hasil reformasi?

**J. KRISTIADI :**

Benar, reformasi tidak memberikan apa-apa pada masyarakat kecuali kesengsaraan baru dan juga kemunafikan dalam melakukan KKN. Bahkan bisa dikatakan lebih dahsyat dari Orde Baru. Luar biasa, tidak ada kasus-kasus KKN yang di-handle dengan baik, dan jika sudah masuk instrumen hukum juga tidak karu-karuan arahnya.

**DENNY J.A. :**

Kerinduan pada figur yang kuat seperti Pak Harto yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi membuat Tutut mendapat sambutan?

**J. KRISTIADI :**

Ya, saya rasakan itu. Saya kalau bertemu dengan orang-orang, di mana saya menemui sambil lalu, seperti sopir taksi, bakul sayur, tukang cukur dan tukang becak, semuanya berpendapat seperti itu. Golkar Lama sangat cerdas menangkap situasi seperti ini. Apalagi dalam lima tahun ini, manajemen pemerintahan sangat amburadul, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat.

**DENNY J.A. :**

Dan juga menurut Bung Hartono, satu suara kritis seperti Bunh Kristiadi ini hanya di kalangan elite, tapi masyarakat luas tetap

menyambut Tutut. Bagaimana bung?

**J. KRISTIADI :**

Tapi kita berkewajiban menyadarkan masyarakat. Kalau memang yang berkuasa partai yang merupakan bagian dari kekuatan yang menindas rakyat dan mematikan hak-hak sipil, kita lawan habis-habisan, sebab kalau tidak bisa kiamat.

**DENNY J.A. :**

Sekarang kita menjumpai Sekjen Partai Karya Peduli Bangsa, Bun Ari Mardjono. Selamat pagi bung, apa kabar?

**ARI MARDJONO :**

Halo, selamat pagi. Kabar baik.

**DENNY JA :**

Komentar umum dulu Pak Ari. Bagaimana menjelaskan pers yang begitu heboh dengan kemunculan Tutut sebagai calon presiden?

**ARI MARDJONO :**

Jadi sebetulnya pada waktu mengadakan syukuran, kita mengundang Mbak Tutut untuk hadir. Kemudian di situ kita menyampaikan permintaan masyarakat di daerah yang begitu besar agar Mbak Tutut mau dicalonkan sebagai presiden. Ini disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PKPB, Bapak Hartono.

**DENNY J.A. :**

Berarti sudah melalui pertimbangan yang cukup matang untuk memunculkan isu Mbak Tutut sebagai presiden dari partai bapak?

**ARI MARDJONO :**

Ya. Ada kerinduan terhadap figur yang kuat seperti Pak Harto, dan kerinduan itu bisa ditangkap saat mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Mungkin waktu jaman Presiden Soeharto kehidupan para petani begitu baik, sampai bisa mengekspor beras dan seterusnya. Kita hanya sekedar menangkap aspirasi mereka. Mereka tidak mengatakan kecewa terhadap reformasi, hanya mereka merasa hidup semakin lama semakin susah.

**DENNY JA. :**

Tadi Bung J. Kristiadi mengatakan tampilnya kembali Mbak Tutut dan Partai PKBP sebagai warning munculnya ideologi represif Orde Baru, bagaimana bapak menanggapinya?

**ARI MARDJONO :**

Sebetulnya kalau kita mau melihat bangsa ini sebagai suatu bangsa yang besar, kita tidak perlu sampai membuat sekat-sekat Orde Lama, Orde Baru dan sebagainya. Sebab kalau seseorang sudah berada pada satu orde, biasanya dia menganggap orde yang lain lebih buruk.

**DENNY J.A. :**

Saya mengerti pak. Dan kalau menurut bapak sendiri, atas pertimbangan apa Mbak Tutut dianggap sebagai solusi yang lebih baik daripada calon presiden yang lain?

**ARI MARDJONO :**

Ya, saya tidak mengatakan begitu, tetapi boleh juga kan kita mencalonkan, karena kita juga melihat ada satu kapasitas pada diri beliau.

**DENNY JA. :**

Ada beberapa komentar yang saya harapkan juga ditanggapi. Pertama dari Probosutedjo yang dimuat Rakyat Merdeka, dia meminta sebaiknya Mbak Tutut untuk tidak dulu mencalonkan diri sebagai capres karena sekarang ini publik merindukan tokoh yang kompeten, bukan sekedar merindukan kharisma dari ayahnya?

**ARI MARDJONO :**

Sewaktu pernyataan itu disampaikan kepada Mbak Tutut, dia mengatakan akan pikir-pikir dulu. Tapi saya tahu sifat beliau kalau mengatakan “aku sepertinya bisa,” dia akan maju. Tapi seandainya beliau mengatakan “sepertinya ini belum saatnya,” mungkin juga tidak akan maju.

**DENNY J.A. :**

Ada komentar lain yang mengatakan jika Tutut maju sekarang, justru dapat mencelakakan ayahnya sendiri karena kekuatan anti Soeharto bangkit kembali dan meminta Soeharto untuk diadili?

**ARI MARDJONO :**

Dalam hati kami juga berpikir mengapa tuntutan mengadili Pak Harto baru muncul kembali setelah Mbak Tutut muncul. Ada apa ini, apakah ada yang merasa gerah atau bagaimana? Menurut

pendapat saya tidak ada masalah dengan pencalonan Mbak Tutut. Bukankah nanti ada tim dokter yang akan menilai apakah bapak masih layak untuk diperiksa kembali kesehatannya dan diadili.

**DENNY J .A. :**

Komentar lain mengatakan sebaiknya Mbak Tutut mencalonkan diri tahun 2009 saja, karena tahun 2004 masih terlalu cepat.

**ARI MARDJONO :**

Saya pikir wajar saja jika ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya mengatakan sekali lagi bahwa Mbak Tutut pun akan berpikir begitu.

**DENNY J .A. :**

Jadi memang belum ada kepastian bahwa tahun 2004 Tutut akan maju?

**ARI MARDJONO :**

Kita akan mengadakan rapat pimpinan nasional pada medio Januari. Kita akan menanyakan kepada daerah-daerah, siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden. Tentu nanti di situ Mbak Tutut akan menjawab secara tegas.

**DENNY J .A. :**

Tentang partai bapak sendiri, sering dikatakan partai ini representasi dari Golkar Lama. Dan menurut Pak Hartono, inilah Golkar yang asli. Bagaimana detailnya pak?

**ARI MARDJONO :**

Sebetulnya kalau kita membaca pada paradigma baru Golkar tahun 1998 yang diterbitkan, di situ ada tiga hal penting yang disampaikan. Pertama adalah partai Golkar sudah disconnection, artinya putus sama sekali dengan Golkar Lama. Saya sebagai orang Golkar Lama menjadi merasa sudah putus hubungan.

Kedua, Partai Golkar sekarang tidak mengakui lagi adanya Dewan Pembina Golkar, waktu itu ketuanya Bapak Soeharto. Ketiga, Partai Golkar sekarang akan mandiri, tidak akan lagi ada tiga jalur A, B dan C. Itulah tiga pokok yang dirumuskan dalam paradigma baru Partai Golkar. Jadi kita sudah bukan bagian dari Partai Golkar.

**DENNY J.A. :**

Dan partai bapak ini kembali menyambung tiga hal itu? Mengambil alih isu-isu atau publik dari Golkar Lama dan kembali touch dengan Dewan Pembina Pak Harto dan mengambil alih jalur ABRI-Birokrasi?

**ARI MARDJONO :**

Oh, tidak. Kami hanya ingin terus terang saja, seharusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari sekarang.

**DENNY J.A. :**

Dan yang lain mengatakan bahwa politik 2004 akan kejam sekali terhadap partai baru, karena tidak mudah bagi partai baru untuk mendapatkan suara dan dikenal publik luas. Mungkin ada yang ingin bapak sampaikan kepada pendengar Delta FM?



**ARI MARDJONO :**

Kami menyampaikan bahwa Partai Karya Peduli Bangsa dalam kiprahnya nanti tidak akan mencari musuh. Kita ingin bergandengan tangan bersama-sama membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Hari esok Insyaallah lebih baik dari hari ini.

**DENNY JA. :**

Baik pak, terima kasih banyak atas partisipasinya.

**ARI MARDJONO :**

Ya, sama-sama.

**DENNY J .A. :**

Kita mendengar tadi perspektif dari Pak Ali Mardjono, Sekjen dari Partai Karya Peduli Bangsa yang mengatakan, bahwa di balik kemunculan partai ini dan Mbak Tutut, ada keprihatinan mendalam bahwa hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Dan partai ini menawarkan satu platform, satu visi, satu pemimpin alternatif, untuk Indonesia pada masa datang yang jauh lebih baik.

Ada beberapa SMS yang kita bacakan dulu, salah satunya mengatakan, "Alhamdulillah Mbak Tutut tampil, mudah-mudahan saling melengkapi. Tidak ada gunanya dipertentangkan, tiap orde mempunyai kelemahan masing-masing." Dari Bung Sugeng, Bogor.

Yang lainnya mengatakan, "Go ahead, mbak Tutut, kalau bisa lebih baik mengapa tidak? Setiap warga negara mempunyai hak." Dari Dwi di Bekasi.

Tapi juga ada yang kontra dengan mengatakan, “Ternyata reformasi gagal, Pak Harto belum dibawa ke pengadilan, sekarang anaknya sudah tampil kembali.”

**DENNY J.A. :**

Sekarang kita sudah tersambung dengan Pak Bomer Pasaribu dari Golkar. Selamat pagi pak, apa kabar?

**BOMER PASARIBU :**

Selamay pagi Denny, Alhamdulillah baik.

Ya, sebetulnya kita masih berada dalam proses transisi menuju konsolidasi organisasi. Di mana salah satu mekanisme yang lazim dikenal secara universal adalah melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi gonjang-ganjing dalam gelanggang politik demokrasi pada saat siklus lima tahunan atau siklus pemilu tiba, sebetulnya tidak luar biasa dalam transisi demokrasi.

**DENNY J.A. :**

Tapi bagaimana dengan kemunculan Tutut sendiri? Apalagi Tutut di-back up oleh PKPB yang merupakan Golkar Lama? Bagaimana bapak dari Golkar melihatnya?

**BOMER PASARIBU :**

Kalau disebut Golkar Lama-Golkar Baru itu harus dalam perspektif yang lebih mengarah kepada visi, misi, serta mekanisme organisasi. Disebut Golkar Lama itu dari perspektif apa? Golkar Lama-Golkar Baru itu dipersepsikan sebagai apa? Pada waktu timbul reformasi, sebetulnya semua kekuatan lama harus mengadakan

reformasi. Maka di situlah kami mengadakan perubahan platform, memperbaharui visi dan misi atas tuntutan reformasi. Antara lain dengan meninggalkan sentralisasi kekuasaan peran Angkatan Bersenjata, serta Pegawai Negeri Sipil yang harus netral. Padahal selama ini Golkar yang kita bangun adalah berbasis ABG yaitu ABRI, Pegawai Negeri Sipil dan Golkar sendiri. Karena tuntutan reformasi, semua itu sudah dihapus karena harus dikembalikan pada netralitasnya. Mau tidak mau kita harus mengadakan reformasi pada tubuh Golkar. Oleh karena itu kami tampil sebagai Golkar Baru sebagai kelanjutan cita-cita pada waktu dilahirkan 20 Oktober 1964.

**DENNY J .A. :**

Tadi Pak Ari Mardjono, Sekjen dari PKBP mengatakan Golkar yang sekarang disconnected dengan Golkar lama. Tidak lagi bersandar pada Dewan Pembina Golkar, Pak Harto, sehingga yang merasa kelompok lama terpaksa mencari partai baru, terbentuklah PKPB. Apakah partai ini akan mengambil suara dari massa Golkar?

**BOMER PASARIBU :**

Pak Ari benar sewaktu mengatakan bahwa kita sudah disconnected dengan sistem lama, di mana sentral sirkulasi kekuasaan ada pada dewan pembina. Sebagai tuntutan dari reformasi, itu memang harus diubah. Era baru sekarang adalah persaingan dan kerja sama, competition dan cooperation. Jadi kami melihat di satu pihak PKPB adalah pesaing -semua partai adalah pesaing bagi kita, itu adalah bagian dari demokrasi di dalam perebutan suara hati rakyat- tapi di pihak lain dia adalah bagian dari cooperation. Jadi kita bersaing tapi juga bekerjasama. Terbuka peluang itu karena di politik semua serba mungkin.

**DENNY J.A. :**

Sebelum ke bapak lagi kita menghubungi dulu Bung J. Kistiadi. Halo bung. Bagaimana anda melihat kemungkinan PKPB mengambil suara Partai Golkar?

**J. KRISTIADI :**

Kalau masyarakat tidak disadarkan bahwa PKPB adalah penjelmaan Golkar Lama yang sudah direvisi sendiri oleh para tokoh Golkar yang sekarang, PKPB bisa mendapatkan banyak suara. Tadi Pak Ari mengatakan tidak boleh mengambil sekat-sekat. Harus ada sekat-sekat itu, harus ada beda. Kita ini kacau-balau karena semua yang mengaku reformis masih juga dari stok lama, bahkan yang baru pun mengadopsi nilai-nilai lama. Jadi memang sekat itu harus ada, harus belajar. Tapi saya kira yang sangat arif adalah Pak Probosutedjo untuk mengingatkan Siti Hardiyanti Rukmana, supaya memang betul-betul hati-hati. Suara Pak Probo ini mencerminkan suara dari keluarga Pak Harto. Jangan kemudian justru Mbak Tutut dijadikan komoditi oleh orang-orang sekitarnya yang sebetulnya ingin memanfaatkannya saja. Mbak Tutut harus belajar dari Pak Harto bagaimana sebenarnya dia ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah dibesarkannya. Jangan sampai dia terperosok di situ.

**DENNY J .A. :**

Karena PKPB mempunyai dana yang cukup besar dan jaringan yang kuat, potensial mengambil suara Golkar?

**J. KRISTIADI :**

Bukan cuma dana yang besar, tapi sebetulnya juga karena kegagalan rezim yang baru ini. Kita harus mempertahankan diri

agar kebebasan yang didapat oleh masyarakat karena perjuangan-perjuangan rakyat sendiri. Kebebasan itu jangan sampai hilang karena gara-gara ada orang-orang yang memang mempunyai potensi untuk bisa mengambil alih kebebasan itu.

**DENNY J.A. :**

Kita ke Pak Bomer lagi. Bagaimana dengan kemungkinan diambil-alihnya suara Golkar oleh PKPB?

**BOMER PASARIBU :**

Kami tidak anggap PKPB sebagai sesuatu yang berbahaya, karena soliditas Golkar dalam lima tahun terakhir yang dibangun dengan paradigma terbarunya sudah memiliki akar yang sangat kuat. Kaderisasi kita dengan platform yang terbaru ini sangat kuat.

**DENNY J.A. :**

Anda tidak khawatir Tutut dan PKPB ini meraih suara yang besar sekali, karena reformasi gagal, dan mereka mempunyai dana dan jaringan?

**BOMER PASARIBU :**

Dana hanya satu faktor di antara sekian banyak faktor. Waktu juga sangat menentukan, 90 hari tidak cukup untuk mengkonsolidasikan segala-galanya. Sedangkan pertarungan yang sangat keras di dalam perebutan suara sudah di ambang pintu. Kami melihat dan menyarankan, kalau mungkin Mbak Tutut sebaiknya hati-hati dan berpikir ulang seperti yang disarankan Pak Probo. Apakah tidak seyogyanya dipertimbangkan dalam waktu yang lebih matang untuk konsolidasi?

**DENNY J .A. :**

Sekarang kita kembali ke Pak Kristiadi lagi. Menurut Pak Bomer tidak perlu khawatir dengan kemunculan PKPB dan Mbak Tutut, karena masing-masing partai sudah mempunyai lahan sendiri.

**J. KRISTIADI :**

Ya, yang paling penting untuk pemilu yang akan datang adalah Partai Golkar-nya Pak Pasaribu melawan partainya Nyonya Hardianti Rukmana. Masyarakat harus disadarkan, tren perubahan ini sudah betul, cuma kita harus menjaga jangan sampai partai yang merupakan manifestasi dari ideologi represif menjadi pemenang. Bagaimana melawannya? Kita memilih orang yang bisa membuktikan secara konkret reformasi berhasil membangun kehidupan masyarakat yang lebih bagus.

**DENNY J .A. :**

Anda tadi tidak setuju dengan pendapat Pak Ari Mardjono mengenai sekat-sekat Orde Lama, Orde Baru dan reformasi tidak membuat situasi lebih baik?

**J. KRISTIADI :**

Harus ada sekat yang jelas sekarang. Pemilu besok harus bisa memperjelas mana Orde Baru yang tetap mempertahankan KKN, mana Orde Reformasi yang mau menghancurkan KKN bersama kekuatan reformasi yang lain. Sekat itu harus jelas.

**DENNY J .A. :**

Kalau ada sekat itu, bagaimana anda menempatkan Golkamya

Pak Bomer yang baru ini, apakah Orde Lama, Orde Baru atau Orde Reformasi?

**J. KRISTIADI :**

Saya kira mereka mencoba memperbaiki diri karena tekanan-tekanan publik sudah tidak bisa ditahan lagi. Tetapi saya kira harus dikaji secara terus menerus. Kita sebaiknya menilai politisi bukan dari omongannya tapi dari perbuatannya.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana Pak Bomer, sekat-sekat ini harus dihapus atau dipertahankan ? Ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi?

**BOMER PASARIBU:**

Ya dan tidak. Ya, artinya kalau ada hal-hal yang paling buruk dari mekanisme dan sistem yang lama harus disekat bahkan harus di-disconnect. Tapi hal-hal yang bersifat kesinambungan nilai-nilai dasar, misalnya Golkar tetap setia kepada Pancasila, UUD 1945, tetap sebagai partai tengah dan sebagai partai terbuka, itu ada connection terus menerus. Tapi kalau hal-hal yang tadi disebutkan Bung Kristiadi memang harus ada disconnected, harus ada sekat. Jadi tidak terlalu hitam putih.

**J. KRISTIADI :**

Tapi saya ingin menanggapi Bung Bomer sebentar. Sebaiknya sekarang tidak usah memakai terminologi Orde Lama, Orde Baru, atau Orde Reformasi. Pokoknya orde yang bisa memberantas KKN itu yang harus menang. Dan orde apa pun yang KKN-nya tetap luar biasa, harus kita lawan.

**DENNY J .A. :**

Ok. Ini ada hasil survei nasional LSI. Yang menyebutkan sistem reformasi sekarang ini lebih baik hanya sekitar 20 persen responden, sementara yang mengatakan sistem pemerintahan Orde Baru lebih baik justru sekitar 60 persen responden. Bagaimana anda menanggapi?

**J. KRISTIADI:**

Ini persepsi masyarakat yang juga saya. alami sendiri. Tokoh-tokoh yang sudah diberikan kepercayaan dan mandat oleh rakyat untuk mengurus negeri itu harus betul-betul sadar akan persepsi masyarakat itu. Orang yang diberikan mandat, kepercayaan dan kehormatan itu harus berjuang habis-habisan untuk membuktikan, bahwa sekarang ini ada harapan dan sedikit-demi sedikit ada perbaikan.

**DENNY J .A. :**

Isu KKN di mata responden hanya mendapat poin lima persen yang menganggap penting, sementara 60 persen menganggap yang paling penting adalah ekonomi, yaitu pengangguran dan harga-harga yang membumbung, sehingga mungkin justru ini yang membuat Mbak Tutut dan PKPB mempunyai lahan.

**J. KRISTIADI :**

Ya, tapi kehancuran karena KKN sangat luar biasa. Masyarakat lupa ada korupsi, nepotisme dan kolusi yang luar biasa daya rusaknya, masyarakat harus tahu itu. Dan elit pemerintahan yang merumuskannya menjadi kebijakan-kebijakan alternatif.



**DENNY J.A. :**

Pak Bomer, bagaimana kalau hanya sedikit sekali yang mengatakan era reformasi lebih baik, sebaliknya menurut mayoritas pemilih Orde Baru justru lebih baik?

**BOMER PASARIBU :**

Memang untuk sebagian yang berada di sektor riil, Orde reformasi tidak lebih bagus dari pada Orde Baru. Dalam tataran yang lebih spesifik bahkan. KKN-nya lebih parah lagi. Kalau sebelumnya, dari 73 negara yang diteliti, kita menduduki peringkat ke-10, peringkat ke-9 pernah sekali. Tapi sekarang yang diperiksa adalah 107 negara, kita menduduki peringkat ke-6. Jadi sebetulnya kalau sampelnya tetap 73 negara, kita sudah menjadi nomor 1 negara terkorup di seluruh dunia. Jauh lebih jelek. Golkar tetap sebagai partai tengah, partai kekaryaan. Fokusnya adalah pada masalah-masalah kesejahteraan rakyat, pengangguran, mengatasi krisis ekonomi riil, tidak hanya di tataran makro ekonomi.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana pesan anda terhadap munculnya fenomena Mbak Tutut?

**J. KRISTIADI :**

Yang harus disadari masyarakat bahwa kita sudah ada dalam arah yang benar tapi kita harus hati-hati kepada kekuatan-kekuatan lama represif yang akan muncul. Dan kemudian juga secara pribadi saya menyampaikan pesan kepada Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, cernalah nasihat Pak Probosutedjo, yang saya kira mencerminkan

pendapat keluarga, jangan sampai anda dijadikan komoditi politik oleh orang-orang di sekitar anda.

**DENNY J.A. :**

Ok, sekarang Pak Bomer.

**BOMER PASARIBU :**

Kita mengharapkan semua dipikirkan dengan matang, terutama kemunculan Mbak Tutut sebagai calon presiden. Dan kami berharap PKPB di satu pihak kompetitor kami tapi di lain pihak adalah menjadi cooperation dengan kami. Dan dengan itu kita maju ke depan memperbaiki yang lama, apapun yang sudah kita rasakan bersama.

**DENNY J.A. :**

Ok, Pak Bomer dan Bung Kris, terima kasih banyak atas pandangan anda. Para pendengar Delta FM kita dengar tadi berbagai ragam opini baik dari pengamat politik, dari tokoh partai dan juga dari Pak Ari Mardjono sendiri, Sekjen PKPB, fenomena di balik kehadiran Mbak Tutut.

Ada SMS yang masuk, mengatakan, “Mbak Tutut boleh jadi presiden asal melepaskan seluruh bisnisnya.”

Atau yang lain mengatakan, “Kiamat muncul karena Mbak Tutut, ya kiamatnya para politikus dan kiamatnya para pengamat, tapi kami rakyat biasa perlu makan, jika Mbak Tutut bisa lebih baik mengapa tidak, karena reformasi hasilnya nol besar.”

Beragam sekali pandangan publik di seputar fenomena munculnya Mbak Tutut. Juga karena memang hasil yang abu-abu dari reformasi, di satu sisi reformasi memberikan apa yang kita inginkan yaitu kebebasan, demokrasi. Di sisi lain reformasi justru membuat ekonomi lebih terpuruk dan KKN jauh lebih meluas. Di balik isu munculnya PKPB yang mengklaim sebagai Golkar Lama. Di mana mereka juga mengatakan bahwa mereka lebih diinginkan publik yang merasa telah dikecewakan oleh reformasi.

Bagaimana selanjutnya? Kita akan menunggu pemilu 2004 yang membuktikan apa yang akan dipilih rakyat, dan bagaimana pengadilan rakyat pada Golkar Lama atau pun Golkar Baru, ataupun kepada Mbak Tutut atau tokoh-tokoh reformasi lainnya? Para pendengar Delta FM di manapun anda berada, demikianlah dialog kita pagi ini. Sampai jumpa lagi Rabu minggu depan dalam “Dialog Aktual” bersama saya, Denny J .A.

## **KONVENSI PARTAI GOLKAR MENGAPA GOLKAR SEBAGAI PARPOL SEMAKIN POPULER NAMUN CALON PRESIDENNYA BELUM POPULER?**

Tanggal: 22 Oktober 2003

Host: Denny J .A.

Narasumber: Saiful Mujani, Marzuki Darusman

Melalui konvensi Partai Golkar, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melihat calon presiden Indonesia datang dari kalangan yang beragam dan dipilih dengan mekanisme yang cukup terbuka dan partisipatif. Tidak hanya diikuti politisi konvensional seperti ketua umum partai atau gubernur, tapi juga kalangan pengusaha dan mantan pemimpin militer. Dari tujuh nama dalam Konvensi Partai Golkar, kita bisa sebut wakil dari partai ada Akbar Tandjung, dari pemimpin pemerintahan ada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dari mantan militer ada Wiranto dan Prabowo, dari pengusaha ada Abu Rizal Bakrie, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Menariknya, konvensi Partai Golkar ternyata menyita perhatian besar publik nasional dan menjadi semacam selling point tersendiri bagi sebuah partai yang sempat mengalami krisis popularitas yang hebat pada awal-awal era reformasi. Beberapa survey menunjukkan, Golkar semakin populer sebagai partai, tapi

menariknya, calon-calon presiden dari Golkar tetap saja relatif tidak dikenal publik. Konvensi yang diselenggarakan, tampaknya lebih memberikan berkah untuk partai daripada berkah untuk calon presidennya.

**DENNY J .A. :**

Selamat pagi para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar? Jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J .A. Topik kita kali ini adalah “Konvensi Partai Golkar, Mengapa Sebagai Parpol Golkar Semakin Populer, Namun Calon Presidennya Belum Populer?”

Tadi malam, setelah konvensi Golkar ditutup dan tujuh calon presiden sudah ditetapkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita melihat calon presiden Indonesia datang dari kalangan yang beragam. Tak hanya ada politisi konvensional seperti ketua umum partai, tapi juga kalangan pengusaha dan mantan pemimpin militer. Dari tujuh nama itu bisa kita sebut wakil dari partai ada Akbar Tandjung, dari kepala pemerintahan ada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dari mantan militer ada Wiranto dan Prabowo, dan dari pengusaha ada Abu Rizal Bakrie, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Apa bedanya jika calon-calon itu terpilih nantinya? Apakah ada pengaruh style of leadership karena mereka datang dengan background yang berbeda? Dan mengapa pula, bersandar pada hasil survey, Golkar semakin populer sebagai partai tapi calon-calon presidennya belum populer? Konvensi ini tampaknya lebih memberikan berkah terhadap partai daripada berkah terhadap calon presidennya.

Bersama kita ada Saiful Mujani, intelektual dari Lembaga Survey Indonesia (LSI). Bagaimana Bung Saiful melihat semakin

beragamnya latar belakang sosial para calon presiden melalui konvensi Partai Golkar?

**SAIFUL MUJANI :**

Saya kira itu logis dalam alam demokrasi seperti sekarang ini. Keterbukaan yang semakin luas, masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda mempunyai kesempatan relatif sama untuk mobilisasi vertikal mereka. Adanya keragaman dari satu partai sendiri, misalnya seperti tadi ada yang berlatar belakang dari politisi murni seperti Akbar Tandjung atau gubernur misalnya, ada juga pengusaha dan seterusnya seperti Abu Rizal Bakrie, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Cuma yang perlu ditekankan di sini ada satu hal, bisa jadi latar belakang mereka akan mempengaruhi gaya, style kepemimpinan nasional kalau mereka terpilih. Prediksi kita para pengusaha akan lebih teknokratik, lebih sebagai problem solver. Sementara militer lebih menekankan pada masalah solidarity, kesatuan, isu-isu security dan sebagainya. Persoalan kepemimpinan, apapun latar belakangnya harus ada plus-nya. Kalau dia seorang tentara, dia harus ada nilai plus-nya, tidak sekedar latar belakang ketenteraannya yang dominan. Demikian juga pengusaha, tidak cukup kemampuan teknokratiknya, pengalaman bisnis dan jaringan bisnisnya yang kuat, itu tidak cukup untuk pemimpin nasional, tetapi harus ada plus-nya. Demikian juga politisi murni seperti Akbar Tandjung.

Kepemimpinan ke depan sebenarnya tidak mesti sepenuhnya ditentukan oleh latar belakang seseorang. Akbar Tandjung misalnya, walaupun politisi murni, belum tentu dia betul-betul seorang politisi murni dalam pengertian kemampuan negosiasi, menyelesaikan masalah dengan kompromi, tetapi juga dituntut mempunyai kemampuan untuk menegakkan security dan stability.

**DENNY J .A. :**

Bung Saiful. Kita membuktikan di era demokrasi, yang terpilih menjadi presiden adalah mereka yang belum mempunyai banyak pengalaman di birokrasi seperti Gus Dur dan Megawati. Apakah ini problem bagi sebuah pemerintahan yang solid dan tertata?

**SAIFUL MUJANI :**

Saya melihatnya bukan persoalan pengalaman di birokrasi, karena ini masalah leadership. Birokrasi itu biasanya relatif stabil. Tetapi kalau kepemimpinan, apalagi kepemimpinan nasional, itu jabatan politik yang bisa datang setiap saat, kapan saja tergantung pada situasi dan perkembangan politik. Megawati dan Abdurrahman Wahid, dianggap kurang berhasil bukan berarti seorang politisi mumi buruk semuanya, kebetulan saja kasusnya kurang bagus.

**DENNY J .A. :**

Kalau kita melihat di Amerika Serikat, di situ juga terbuka, melalui jenjang partai, tetapi umumnya yang masuk menjadi calon presiden sudah mempunyai pengalaman menjadi gubernur, wakil presiden, anggota senat atau pemimpin militer. Dengan terlalu terbuka seperti kita sekarang apakah akan terekruit kembali orang-orang yang belum terlalu matang dalam organisasi dan semacamnya?

**SAIFUL MUJANI :**

Tidak mesti demikian, karena ukuran kematangan juga harus dilihat dari sejauh mana popularitas dia. Kematangan itu tidak menjawab banyak masalah, justru popularitas harus diperhitungkan

di situ. Makanya kalau dibuka kesempatan, akan lebih banyak peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

**DENNY J.A.:**

Ok, Bung Saiful. Nanti kita gali lebih detail lagi masalah ini. Apakah latar belakang sosial dari seorang calon presiden bisa mempengaruhi style of leadership, ditambah lagi kematangannya dalam berorganisasi.

Dari hasil survey LSI, bagaimana anda menjelaskan Golkar semakin populer sebagai partai tetapi calon presidennya belum populer?

**SAIFUL MUJANI :**

Popularitas Golkar itu dalam pengertian naiknya proporsi orang yang kemungkinan akan memilih Golkar kalau diadakan pemilu sekarang. Terutama terkait dengan kinerja pemerintah sekarang. PDIP, pemerintah sekarang, menurut evaluasi masyarakat dianggap kurang berhasil, tak memenuhi harapan masyarakat selama ini.

**DENNY J.A.:**

Berarti Golkar populer bukan karena prestasinya, tetapi karena buruknya pemerintah sekarang?

**SAIFUL MUJANI :**

Di dalam politik ini biasa. PDIP nampaknya menurun popularitasnya karena, pertama, di mata publik dianggap terlalu lambat, kurang bisa memecahkan masalah-masalah mendesak. Kedua, partai-partai reformasi yang lain tidak cukup populer untuk



mendongkrak popularitas mereka. Usaha-usaha yang dilakukan selama ini belum berhasil. Karena kecenderungan masyarakat terhadap partai ini relatif stabil, seperti PKB dan PAN, maka Golkar naik, sedang PDIP turun. Penempuran sesungguhnya terjadi antara partai Golkar dan PDIP.

**DENNY J.A. :**

Karena public mood yang agak kecewa terhadap hasil reformasi, akibatnya PDIP dan berbagai partai-partai yang mengusung semboyan reformasi kena punishment?

**SAIFUL MUJANI :**

Benar. Mengapa kemudian mereka beralih ke Golkar? Mengapa tidak ke yang lain? Karena masyarakat membutuhkan kepastian dalam melihat arah kehidupan mereka ke depan. Kepastian itu mereka dapatkan dari pengalaman, tidak dari yang datang tiba-tiba. Katakanlah 30 tahun sebelum reformasi, Golkar relatif mampu menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang relatif baik, walaupun pada ujungnya tidak bisa dipertahankan. Tetapi masyarakat tampaknya telah melupakan itu, telah melupakan kegagalan Golkar mempertahankan sukses pembangunan. Di sisi lain, begitu buruknya keadaan sekarang, sehingga orang akan mudah berkata, "Sudahlah walaupun Orde Baru itu buruk, Golkar buruk waktu itu, dibanding sekarang, mereka tetap lumayan lebih baik". Golkar menjadi lebih populer di masyarakat.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda, kerinduan publik akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan politik yang stabil, membuat publik lebih

mengasosiasikan Golkar pada waktu itu. Lalu mengapa banyak partainya yang populer?

**SAIFUL MUJANI :**

Sistem kepartaian kita relatif baru. Kalau ada partai yang relatif lama seperti Golkar, dia akan sangat kuat dibanding yang lainnya.

Sementara yang baru biasanya tokohnya yang akan lebih mendominasi. Misalnya seperti PAN, orang lebih mengenal bukan karena PAN-nya tapi Amien Rais-nya, atau misalnya PKB, Gus Dur-nya bukan PKB-nya dan seterusnya. Itu untuk partai yang baru. Biasanya partai dibentuk dari tokoh-tokohnya. Untuk kasus Golkar lain, Golkar sudah berumur lebih dari 30 tahun, jadi pelembagaan politiknya sudah sangat kuat, sudah sangat mengakar mungkin sudah sampai pada tingkat kecamatan, kalau pun bukan desa. Pada Pemilu 1999 mereka tiarap karena memang situasinya sangat memalukan bagi para pendukung Golkar, sehingga mereka mengalihkan pilihan ke partai lain. Tetapi waktu itu masih ada sekitar 22 persen yang setia dengan Golkar, itu masih sangat besar.

Lalu mengapa tokohnya tidak populer? Karena di Golkar tokoh itu sebetulnya ikut saja. Di Indonesia, sistem presidensialnya relatif baru. Selama ini agak berbau parlementer, segala sesuatu dijagokan oleh partai, sekarang pun masih begitu kenyataannya. Ini menyebabkan tidak populemya tokoh-tokoh di Golkar. Akbar Tandjung dikenal oleh masyarakat secara luas. Lebih dari 90 persen masyarakat tahu Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar. Tetapi karena dia ada masalah, bagi para politisi nasional mungkin tidak besar, tetapi harus diingat dia seorang politisi publik. Tokoh publik yang dibawa ke pengadilan tidak ada. Mungkin yang lain

korupsinya lebih besar, tetapi tidak dibawa ke penjara dan diadili seperti Akbar Tandjung.

Kedua, terkait dengan konvensi, Golkar tidak cepat mengeluarkan siapa yang harus menjadi calon definitif. Seperti dikatakan Surya Paloh, elit-elit Golkar terutama yang daerah terlalu berorientasi ke partai, kurang melihat politik secara nasional. Tidak mau berpikir kemungkinan adanya gap antara eksekutif dan legislatif.

**DENNY J.A. :**

Anda menganggap, ada resiko Golkar menang di parlemen tetapi akan kalah dalam pemilihan presiden ?

**SAIFUL MUJANI :**

Benar, kalau pengumuman capres definitif ditunda-tunda bisa seperti itu.

**DENNY J .A. :**

Tampaknya setelah nanti dipilih pada bulan April atau Mei, jarak sosialisasi Partai Golkar untuk calon presiden akan kecil sekali?

**SAIFUL MUJANI :**

Akan rendah dan kecil. Kalau Akbar Tandjung terbukti tidak bersalah karena dia sudah cukup populer, mungkin dia akan lebih cepat disosialisasikan.

**DENNY J.A. :**

Ok, Bung Saiful. Sebelumnya saya baca SMS yang masuk berbunyi, "Golkar dengan konvensi ini bisa kehilangan momentum,

tapi ada baiknya Golkar tidak usah berpikir soal eksekutif Perkuat saja fungsi kontrol legislatif karena selama ini Golkar mampu". Ini memperkuat sinyalemen yang baru saja kita analisis bahwa Golkar mungkin sekali menang di parlemen tetapi kalah di pemilihan presiden. Bung Saiful, apa akibatnya jika Golkar memang di parlemen tetapi di kabinet justru kalah?

**SAIFUL MUJANI :**

Dikhawatirkan akan terjadi deadlock. Ada semacam divided government antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang belum stabil. Perbedaan eksekutif dengan legislatif dari partai yang berbeda bisa menjadi sangat sulit bagi jalannya pemerintahan yang akan datang.

**DENNY J.A. :**

Sekarang kita hubungi Bung Marzuki Darusman, salah satu tokoh Golkar, juga seorang pemikir. Selamat pagi, Bung.

**MARZUKI DARUSMAN :**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A. :**

Ada banyak survey yang menunjukkan Partai Golkar semakin populer sebagai partai, tapi calon-calon presidennya belum populer. Bagaimana anda meresponnya bung?

**MARZUKI DARUSMAN:**

Itu yang kita harus hadapi sebagai fakta hidup. Kenaikan suara itu juga bukan karena upaya Golkar sendiri tetapi lebih banyak ketidakpuasan kepada keadaan umum. Ini harus disadari oleh Golkar.

**DENNY J .A. :**

Dengan dimundurnya pemilihan calon presiden setelah pemilu legislatif, menambah sinyalemen bahwa Golkar semakin kuat di parlemen tetapi untuk pemilihan presiden menjadi semakin sedikit perslapannya.

**MARZUKI DARUSMAN :**

Kesannya demikian. Apa yang terlihat adalah Golkar menitikberatkan pada kemenangan pemilihan umum dan kurang pada pemilihan presiden. Ini dinamika yang terjadi sebagai akibat dari evaluasi dari daerah-daerah., tetapi hasil akhir konvensi kepresidenan sudah harus dilupakan dan sekarang titik beratnya pada kegiatan menghadapi pemilu.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda, ini by design atau memang kecelakaan secara kolektif yang akhirnya membuat Golkar kurang siap dalam menghadapi pemilu presiden?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Sedikit banyak hal itu karena sikap pragmatis dari daerah. Kemudian tiadanya ketegasan pimpinan pusat untuk memberikan

bimbingan dan arahan atas keputusan yang diambil. Adanya sentralisasi baru dalam tubuh partai, tidak di pusat, tapi di daerah tingkat satu yang mengambil alih hasil dari tingkat dua.

**DENNY J.A. :**

Untuk kepentingan Golkar sendiri. Setelah pemilu legislatif ada hasilnya karena jarak waktu sangat pendek untuk pemilihan presiden, apa lagi yang bisa dilakukan Golkar supaya bisa menang dalam pemilihan presiden?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Ada satu rangkaian proses yang bisa kita visualisasikan. Hasil pemilihan umum barangkali tidak akan segera diterima publik karena KPU-nya agak lemah, dan hasil pemilu akan ditolak oleh banyak pihak. Karena itu, jika Golkar menang, maka dia juga berkepentingan untuk mengesahkan pemilihan umum. Sehingga harus lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah untuk menguatkan hasil pemilihan umum. Dengan demikian mendekatkan Partai Golkar dengan pemerintahan yang ada. Atau menumbuhkan berbagai koalisi atau kerjasama yang bisa memberi wama kepada susunan calon-calon presiden yang akan bertarung.

**DENNY J.A. :**

Misalnya Golkar menang dalam pemilu legislatif bulan April, apakah akan ada Rapim lagi untuk menghadapi capres?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Benar.

**DENNY J.A. :**

Kemungkinannya membangun skenario koalisi dengan partai-partai kuat ?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Kurang lebih begitu.

**DENNY J.A. :**

Anda selaku orang dalam, mempunyai harapan koalisi bagaimana yang paling mungkin untuk demokrasi yang stabil sekarang? Golkar dengan siapa misalnya?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Saya melihat koalisi dengan PDIP tidak selalu menjamin kestabilan nasional. Partai Golkar sebenarnya masih partai pembangunan, sedangkan PDIP partai umum. Karena itu kita lebih cocok untuk bekerjasama dengan corak panai pembangunan, antara lain PKB bisa disebut sebagai partai pembangunan karena dia hendak melakukan modernisasi di dalam tubuh kelompok kultural dan tradisional. Ini memang belum bisa tersosialisasi di dalam partai, tetapi harusnya cenderung bekerjasama dengan partai sejenis daripada partai yang lain.

**DENNY J.A. :**

Ok, jika koalisi terjadi dan Golkar pemenang pemilu, apakah Golkar harus mendapat kursi presiden?

**MARZUKI DARUSMAN :**

Kalau kita menang, tentu kita akan memaksa partai untuk merebut kursi presiden.

**DENNY J.A. :**

Berbagai jajak pendapat memperlihatkan belum ada tokoh Golkar yang populer. Apakah ada skenario lain ? Misalnya Golkar menguasai kabinet 90 persen, tetapi kursi presiden diberikan kepada tokoh yang sudah populer di publik luas.

**MARZUKI DARUSMAN :**

Itu satu kemungkinan yang bisa terjadi dan sebenarnya bagi kita yang terpenting ada proses-proses kebijakan yang baik di negara ini, di pemerintahan. Kalau kabinet tersusun dari mayoritas yang berasal dari satu partai secara kokoh, ada kemungkinan dia masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Saya memperkirakan sampai saat ini popularitas Ibu Megawati masih tinggi, dan kita masih memperhitungkan kepresidenan masih diperoleh oleh PDIP. Harus ada realisme semacam itu. Tetapi siapapun yang akan muncul sebagai calon presiden Partai Golkar tidak akan bisa memenangkan partai karena pribadinya, itu merupakan kerja organisasi. Tetapi Ibu Megawati masih bisa didorong gerak dinamikanya karena popularitas pribadinya.

**DENNY J.A. :**

Ok, Bung Marzuki Darusman, terima kasih banyak atas perspektif anda.

**MARZUKI DARUSMAN :**

Sama-sama, terima kasih.



**DENNY J .A. :**

Para pendengar, anda dengar sendiri satu perspektif dari inside story, dari orang dalam yang mengatakan bahwa memang ada kecemasan Golkar menang di parlemen tapi kalah dalam pemilihan presiden. Karena itu berbagai skenario terobosan mesti dibuat, bahkan seandainya pun Golkar tidak duduk sebagai presiden, asalkan mempunyai dominasi dan ikut mengatur kebijakan yang lahir dari pemerintahan eksekutif kelak.

Bung Saiful bagaimana anda mendengar respon dari Bung Marzuki? Tampaknya Golkar lebih konsentrasi kepada pemilu parlemen bukan pemilu presiden.

**SAIFUL MUJANI :**

Saya melihat respon yang sangat realistis. Cuma ada semacam perasaan sudah kalah. Dia mengatakan, “Sudah lupakan konvensi itu dan sudahlah Megawati yang jadi presiden.” Artinya sudah tidak ada harapan lagi. Itu artinya juga men-discourage calon-calon sekarang, yang masih mau bersaing dan mau mengeluarkan uang banyak untuk sungguh-sungguh jadi calon presiden. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena harus dihitung betul, apakah Golkar serius sebagai mesin untuk menggolkan seseorang menjadi presiden. Soalnya kalau tidak, akan mengecewakan banyak orang maupun politisi (calon presiden) yang sudah mengeluarkan banyak dana. Menurut saya jangan dibuat discourage tapi harus di-encourage meski tetap harus realistis. Kalau sudah tidak mungkin, dari sekarang harus diambil sikap. Kalau mau koalisi, koalisi dari sekarang supaya lebih eksis dan lebih baik ke depan.

**DENNY J.A. :**

Ok, Bung Saiful. Kita gali lagi itu berikutnya. Sekarang kita dengar dulu dari Bapak David Aspira dari Manado. Halo Bung.

**DAVID ASPIRA :**

Selamat siang Bung Denny. Mengapa Golkar semakin populer daripada kandidat presidennya? Saya melihat sejak Soeharto berkuasa beliau tidak memberi kesempatan luas bagi sipil atau pun militer untuk menjadi kandidat presiden menggantikan dia. Merupakan kesalahan dari Golkar juga terus mendukung Soeharto menjadi presiden berulang kali. Akibatnya di dalam Golkar tidak ada yang berani mencoba tampil menjadi tokoh yang akan menggantikan Soeharto. Hal itu mempengaruhi perjalanan Golkar yang tidak memiliki stok calon pemimpin masa depan yang solid. Saya melihat manuver konvensi Partai Golkar untuk menunda-nunda konvensi mungkin ada calon bukan dari sipil, sebab Golkar sudah mempunyai paradigma civil society akan berbenturan misalnya dengan Pak Wtranto, jadi agak ditunda-tunda. Mungkin Pak Wtranto membawa paradigma militer yang tidak sesuai dengan masyarakat sipil masa mendatang di Golkar.

**DENNY J.A. :**

Anda melihat ini produk lama dari era Golkar di jaman Pak Harto yang tidak siap dengan satu tokoh alternatif begitu?

**DAVID ASPIRA :**

Saya melihat di tubuh Golkar sendiri ada kdompok reformis dan kelompok konservatif yang masih ingin mempertahankan

kebijakan-kebijakan Orde Baru. Di tubuh militer ada juga kdompok seperti itu yang tidak senang dengan Pak Wiranto.

**DENNY J .A. :**

Ok, Bung David. Terima kasih banyak, sudah tertangkap pesannya. Kembali ke Bung Saiful. Ke depan penting bagi kita mempunyai demokrasi yang terkonsolidasi dan juga leadership yang kuat baik di eksekutif maupun di legislatif. Jika Golkar mendominasi parlemen, tentu dia harus mengambil inisiatif yang banyak supaya ada politik yang kuat di parlemen dan di presidensial. Menurut anda, apa yang Golkar bisa susun dari sekarang?

**SAIFUL MUJANI :**

Masalahnya adalah kemampuan untuk koalisi dari partai lain juga ada. Kalau sudah begitu keadaannya, tidak terserah pada Golkar saja, tapi juga tergantung pada partai lain.

**DENNY J .A. :**

Koalisi sebagai kuncinya?

**SAIFUL MUJANI :**

Benar, cuma siapa dengan siapa. Yang jelas, Golkar kemungkinan akan mendapatkan kursi paling banyak di parlemen. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kans lebih besar untuk mengambil posisi eksekutif, dalam hal ini presiden, harus ada keinginan yang kuat untuk membangun koalisi dengan Golkar. Misalnya kalau PDIP yakin dapat posisi presiden, mengapa tidak mulai sekarang melakukan koalisi dengan Golkar ?

**DENNY J.A.:**

Bung Saiful, katakanlah Golkar di parlemen nomor satu, kemudian berkoalisi dengan PDIP mungkin tidak Golkar mengambil posisi wakil presiden? Presidennya dari PDIP tapi di kabinet didominasi oleh Golkar misalnya?

**SAIFUL MUJANI :**

Wakil presiden dari Golkar? Mungkin saja terjadi seperti itu. Tetapi sejauh ini kita belum melihat langkah-langkah ke sana, padahal waktunya tinggal enam bulan.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda, apakah bagus unruk Golkar memikirkan langkah-langkah itu?

**SAIFUL MUJANI :**

Seperti Marzuki bilang, “sudah lupakan itu konvensi”. Artinya sudah selesai, dan Golkar tidak mungkin merebut kursi presiden. Oleh karena itu tidak ada jalan lain yang lebih progresif dari membangun koalisi.

**DENNY J.A. :**

Adakah kemungkinan dengan calon presiden lain yang populer, Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya?

**SAIFUL MUJANI :**

Bisa. Artinya kalau radi ada ungkapan lupakan konvensi, konvensi sudah tidak dipakai lagi, maka orang seperti Susilo Bambang bisa dipertimbangkan.

**DENNY J.A. :**

Ok Bung Saifu<sup>1</sup>, rerima kasih banyak atas waktu dan perspektif anda. Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, anda dengar sendiri satu inovasi yang baik dari Golkar dengan Konvensi Parrai Golkar. Cuma inilah data yang ada, ternyata Golkar semakin populer sebagai partai tapi calon presidennya belum populer sehingga sangat mungkin Golkar menang di parlemen tapi kalah dalam pertarungan memperebutkan kursi presiden. Ini bisa menjadi buruk bagi demokrasi kita yang stabil. Maka saatnya Golkar sebagai calon pemenang parlemen unruk mengambil inisiatif. Bagaimana caranya agar Golkar dominan di kabinet, misalnya dengan skenario menjadi wakil presiden atau hanya menjadi menteri utama tetapi tetap mendominasi kabinet dan memunculkan tokoh-tokoh presiden yang sudah populer di luar tokoh-tokoh konvensi Partai Golkar sendiri.

Sampai jumpa lagi minggu depan dalam Dialog Aktual dengan topik yang aktual lainnya bersama saya Denny J .A.

## MENJADI PRESIDEN VERSI SMS

Tanggal: 7 Januari 2004

Narasumber: Akhir Matwa Harahap (Dosen Metodologi Riset-UI),  
Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS), Ibnu Hamad  
(Pakar Komunikasi Massa)

Menjelang pemilu 2004 suhu politik sudah mulai menghangat. Berbagai fenomena dan perkembangan baru terus terjadi dan menyemarakkan situasi politik nasional. Salah-satu fenomena yang menarik adalah munculnya berbagai jajak pendapat versi SMS. Tidak hanya di media cetak, tetapi juga di media televisi. Jajak pendapat tersebut menunculkan calon presiden favorit versi SMS. Sayangnya secara metodologi jajak pendapat ini lemah, sehingga cenderung memunculkan berita yang distortif. Tidak menggambarkan opini publik yang sebenarnya, karena hanya mengangkat pendapat segmen tertentu yang terbatas jumlahnya. Namun bukan tak mungkin hasil polling tersebut mempunyai efek politik serius terhadap popularitas para kandidat dan terhadap preferensi masyarakat dalam pemilu. Karena hasil polling SMS dikemas dan dipresentasikan layaknya hasil polling yang serius dan rigid.

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, jumpa lagi dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J .A. Dengan topik yang sangat hot minggu ini “Menjadi Presiden Versi SMS”. Siapakah, yang akan diuntungkan atau dirugikan dengan meluasnya jajak pendapat menggunakan SMS? Bersama kita, badir seorang narasumber yang netral, professional, Dosen UI di bidang metodologi riset, Bung Akhir Matwa Harahap. Selamat pagi bung.

**AKHIR MATWA HARAHAHAP:**

Selamat pagi Pak Denny

**DENNY J.A.:**

Seperti biasa sebelum kita diskusi, saya berikan dulu background-nya. Dua bulan lagi kita akan menuju pemilu 2004 dan suhu politik sudah mulai mengbangat. Diramaikan tidak hanya oleh manuver dari berbagai partai politik, tetapi juga oleh munculnya berbagai hasil jajak pendapat versi SMS. Tidak hanya di media cetak, tetapi juga di televisi swasta muncul siapa calon presiden favorit menurut publik, versi SMS. Mungkin tahun 2004 nanti kita akan mempunyai dua presiden. Pertama Presiden Indonesia yang riil terpilih oleh pemilih yang sebenarnya. Kedua presiden versi SMS. Nampaknya dua presiden ini merupakan dua tokob yang berbeda, karena datang dari dua metodologi yang berbeda. Persoalannya presiden versi SMS ini ditayangkan setiap hari di media cetak dan televisi. Dengan sendirinya walaupun secara metodologi mungkin meragukan, tetapi cukup mempunyai efek politik. Maka siapakah kira-kira yang diuntungkan atau dirugikan oleh polling SMS ini? Apakah jajak pendapat jenis ini merupakan bagian dari pendidikan

politik atau sebaliknya? Bung Akhir, bagaimana anda melihat fenomena polling SMS?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Menurut pengamatan saya. terutama tiga tahun terakhir, polling merupakan suatu gejala yang baik. Tetapi dari beberapa cara yang dilakukan. Misalnya jajak pendapat dengan metode SMS, perlu menjadi perhatian serius terutama jika dikaitkan dengan metodologinya. Karena polling itu juga menggiring opini publik untuk memilih. Para pembuat polling SMS mungkin hanya bermaksud untuk membuat hiburan. Tetapi hasilnya bisa menjadi rujukan bagi pemirsa atau pembaca.

**DENNY J.A.:**

Apa jajak pendapat versi SMS ini harus diperhatikan, karena meskipun secara metodologi sangat lemah tetapi secara politik mempunyai efek yang cukup besar?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Ya, betul.

**DENNY J.A.:**

Kita melihat banyak sekali jajak pendapat di media cetak dan televisi seperti Rakyat Merdeka, Media Indonesia, atau di SCTV pemenangnya berbeda-beda. Di Rakyat Merdeka pemenangnya SBY, di Media Indonesia Surya Paloh, di SCTV Hidayat Nur Wahid. Bagaimana publik memahami munculnya pemenang yang berbeda-beda ini?



### **AKHIR MATWA HARAHAP:**

Kalau jajak pendapat dilakukan pada kondisi dan situasi yang benar, maka hasilnya barangkali bisa diperbandingkan satu sama lain. Tetapi kalau polling SMS -terutama dalam media elektronik- bisa sangat tergantung pemirsanya siapa? Kalau misalnya saya lebih suka pada stasiun televisi A, barangkali saya lebih suka mengakses ke stasiun tersebut untuk memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan lewat SMS. Akan berbeda seandainya kita mau melihat opini publik yang sesungguhnya, di mana harus memperhatikan siapa yang menjawab pertanyaan kita. Tidak memberikan satu stimulan sehingga orang merespon. Jadi ada batasan tadi, misalnya kalau dia menonton televisi tertentu maka dia akan memiliki akses. Atau misalnya mengapa segmen-segmen responden bisa berbeda-beda? Kalau dengan menggunakan SMS barangkali akan berbeda dibandingkan jika harus dilakukan wawancara tatap muka.

### **DENNY J.A.:**

Jadi menurut anda kalau metodologinya SMS, sudah pasti hasilnya akan berbeda-beda, karena ini bukan gambaran dari populasi sebenarnya, tergantung dari siapa yang aktif di media cetak atau televisi yang melakukan hal itu? Untuk publik umum, di mana letak kesalahan metodologi SMS bagi jajak pendapat presiden favorit?

### **AKHIR MATWA HARAHAP:**

Pada dasarnya metode SMS bisa diterapkan, hanya saja barangkali kita harus tahu bagaimana kita meletakkannya. Misalnya kalau kita akan melakukan dengan SMS, tentunya pemilik

yang mungkin bisa mengirim lewat SMS itu siapa, karena itu sudah merupakan persoalan pertama. Dibandingkan kalau kita ingin melihat persepsi semua orang tentang kandidat tertentu. Masalah yang kedua adalah bahwa hasil apapun sebenarnya, kalau lewat SMS seperti ini, jika dipublikasikan secara langsung tanpa harus diberikan suatu aba-aba bisa menjadi referensi bagi orang lain. Itulah saya kira yang mempunyai efek lebih besar secara politis.

**DENNY J.A.:**

Oke bung, kalau bisa kita urut sekarang. Menurut anda secara metodologi sebenarnya survey lewat SMS ini sangat lemah ya? Dia hanya menggambarkan populasi aktif saja, bagi pemilik handphone saja. Berapa persen kira-kira pemilik handphone di Indonesia?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Kurang tahu pasti, tapi sangat sedikit. Kalau kita melihat di kota akan kelihatan sangat menonjol, tetapi rakyat Indonesia tidak hanya di kota, tetapi juga di pedesaan. Di kota saja tidak semuanya memiliki pendapatan yang cukup untuk memiliki handphone, atau mempunyai pendapatan tapi mungkin tidak terlalu peduli terhadap handphone.

**DENNY J.A.:**

Berdasarkan data yang kita miliki, pemilik handphone sekitar 17 juta, 10% dari populasi Indonesia. Tentu saja tidak semua pemilik handphone bersedia aktif dalam polling-polling SMS ini, jadi dapat dikatakan bahwa polling SMS mewakili segmen yang sangat kecil dari populasi. Karena itu hasilnya bukanlah gambaran riil dari pemilu 2004 nanti. Apa polling SMS mempunyai efek politik yang

besar karena dilakukan berulang-ulang di televisi, radio dan media cetak?

**AKHIR MATWA HARAHAHAP:**

Sebenarnya ini justru yang menjadi kegalauan saya. Karena dilakukan secara berulang-ulang, mungkin ada “sesuatu” di sana. Apa tujuan polling tersebut? Namun saya lebih melihat sisi metodologi jajak pendapat lewat SMS ini. Siapapun pemenangnya saya tidak terlalu concern, tetapi sebagai pemerhati dan juga peminat metodologi riset, itu sangat mengganggu pikiran saya.

**DENNY J.A.:**

Para penggemar Delta FM sekalian, kita tahu bahwa sekarang begitu ramai sekali jajak pendapat calon presiden favorit ataupun partai favorit melalui SMS, dan ini diulang berkali-kali di berbagai media massa sehingga mempunyai efek politik yang lumayan besar. Sayangnya metodologi jajak pendapat ini sangat lemah, sehingga melahirkan berita yang distortif. Bukan menggambarkan opini public yang sebenarnya, tetapi lebih kepada segmen yang terbatas dari publik. Sekarang kita sudah terhubung dengan Bung Hidayat Nur Wahid, seorang tokoh yang beberapa kali menjadi presiden yang paling favorit versi SMS. Selamat pagi bung. Apa kabar?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Selamat pagi bung. Alhamdulillah baik.

**DENNY J.A.:**

Komentar umum dulu, bagaimana anda menanggapi berbagai polling SMS di mana anda menjadi calon presiden favorit?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu hal yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, proporsional saja. Itu adalah bagian dari aspirasi warga. Tapi itu warga yang menggunakan SMS, sekalipun kita semua juga mengetahui bahwa teknologi SMS atau teknologi handphone bukan lagi barang yang sangat eksklusif. Para penjual jamu gendong di daerah Wonogiri juga sudah menggunakan teknologi telepon genggam itu, juga para petani di Jawa Tengah. Jadi semuanya bukan hal yang luar biasa, sebagaimana survey yang sudah biasa dibuat Bung Denny J.A.

**DENNY J.A.:**

Apakah polling SMS menggambarkan kekuatan riil di lapangan, atau hanya sebagian saja dari segmen populasi?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Ya pasti seluruh hasil polling tidak bisa digeneralisir, karena hanya menggambarkan realita yang ada. Tetapi juga tidak serta merta realita yang ada itu bisa dinafikan hanya karena dia diperoleh melalui SMS.

**DENNY J.A.:**

Apakah anda yakin bahwa angka yang akan anda peroleh di pemilu 2004 hasilnya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan hasil survey SMS?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Mengenai hal itu kita memakai realita pemilu tahun 1999 saja, saat suara Partai Keadilan sudah 1,4 juta lebih. Padahal dari polling

SMS kemarin, maksimal untuk partai saya baru 145.000. Jadi baru 10 % dari apa yang kami peroleh pada pemilu 1999.

**DENNY J.A.:**

Dari segi presentase perbandingan dengan tokoh-tokoh dari partai lain bagaimana?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Kalau presentase tentu bukan menggambarkan angka yang sesungguhnya, kita tahu persis itu, termasuk seperti yang dilakukan lembaga anda. Dan terakhir yang dilansir Majalah Tempo dalam edisi terbaru, ternyata selalu disebutkan bahwa hampir seluruh partai perolehan suaranya menurun tahun 2004 nanti, kecuali suara PKS yang akan naik, sekalipun tidak signifikan. Ada indikasi publik memberikan apresiasi pada penampilan PKS.

**DENNY J.A.:**

Ada tendensi suara PKS akan naik. Lalu menurut anda, kalau anda memahami secara mendalam, mengapa dalam polling-polling SMS ini, anda dan PKS yang nomor satu?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Ada beberapa kemungkinan, pertama ini adalah cara di mana publik bisa mengapresiasi apa yang mereka inginkan secara langsung, tanpa didatangi oleh petugas survey, tanpa mereka dipusingkan oleh pertanyaan yang mungkin mereka tidak mengerti. Mereka hanya diberi pertanyaan, misalnya siapakah calon presiden yang anda senangi? Apa pula partai yang paling anda senangi? Dan

kalau kita melihat dari pertanyaannya saja, adalah pertanyaan yang sangat terbuka dan berlaku untuk umum. Partai apa atau calon presiden mana yang paling anda senangi? Dan itu dilansir untuk seluruh publik, seluruh pemirsa, siapapun bisa mengakses. Tidak bisa kemudian dikatakan bahwa teknologi komputer tidak bisa melakukan seleksi, kalau dari luar PKS tidak boleh masuk, atau orang PKS saja yang bisa masuk. Dan jelas sekali bahwa peminat program berita di mana polling SMS disisipkan, apalagi di SCTV satu hari bisa empat kali melakukan pemberitaan, sangat besar.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana dengan adanya satu review yang mengatakan bahwa memang segmen pemilih PKS lebih militan dalam soal SMS, dibandingkan dengan pemilih partai lain?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Itu fakta yang harus dibuktikan juga. Saya tidak yakin yang mengirim SMS untuk saya dan PKS adalah mayoritas kader. Tim kami mendapatkan berbagai informasi di lapangan. justru yang apresiasi kepada kami adalah kelompok-kelompok yang tadinya bukan captive market PKS. Ini sebagian dari realita yang ada di publik. sehingga tidak perlu ditanggapi secara positif berlebihan atau secara negatif berlebihan, proporsional saja.

**DENNY J.A.:**

Jika kita bandingkan dua hasil survey. penama survey SMS di SCTV di mana anda memperoleh suara yang tinggi sekali di atas 25%, tetapi di Majalah Tempo yang baru-baru juga terbit, suara

anda sekitar 1,6% saja. Menurut anda mengapa jauh sekali perbedaannya?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Media Tempo ada dua bentuk, yaitu Majalah Tempo dan Tempo Interaktif Dalam Tempo Interaktif perolehan suara saya sangat tinggi, bahkan jika dibandingkan nomor dua pun lebih dari 20.000 suara selisihnya. Dan kemudian yang disampaikan oleh Majalah Tempo yang hasilnya anda sebutkan tadi. Tapi bukan masalah, karena dua lembaga ini agaknya melakukan survey dengan metodologi yang berbeda. Jadi tentu saja setiap metodologi bisa mempunyai karakter yang berbeda, dengan hasil yang berbeda. Ini tidak perlu dipertentangkan. Artinya ada realita yang terkait dengan sesuatu yang dimunculkan dari hasil polling, dan ada realita yang dimunculkan dari hasil survey. Itu semua realita yang akan diuji keabsahannya pada pemilu nanti.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda mana yang paling mendekati kenyataan dalam pemilu 2004 nanti, apa polling SCTV yang menempatkan anda di atas 25% atukah polling Majalah Tempo yang meletakkan anda hanya 1,6%?

**HIDAYAT NUR WAHID:**

Ada hal lain yang harus kita pertimbangkan, apakah pemilu nanti benar-benar akan dilakukan *luber jurdil*? Ini problem yang lain. Kita mengetahui sebagian besar permasalahan pemilu adalah pada tingkat validasi dari hasil pemilu. Pada pemilu 1999 saja diyakini suara di Jakarta, tingkat validitasnya tidak lebih dari 35%.

Bagaimana kemudian kita sepenuhnya bisa menggantungkan pada hasil pemilu bila pelaksanaannya ternyata tidak luber jurdil? Jadi saya berkeyakinan kalau pemilu benar-benar luber jurdil, hasil polling-polling akan bisa digabungkan dan kemudian diambil garis rasionalnya.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, kita ucapkan selamat pada anda, sebagai pemimpin partai baru yang populer, minimal di televisi-televisi dan SMS.

Demikianlah para pendengar Delta FM, bincang-bincang dengan Bung Hidayat Nur Wahid, yang sangat berbeda sekali perolehan suaranya dalam polling SMS di SCTV dan dalam polling Majalah Tempo dengan metode tatap muka di lima kota besar. Di SCTV Hidayat Nur Wahid memperoleh peringkat pertama dengan perolehan suara cukup besar di atas 25%. Sementara di Majalah Tempo sangat kecil, jauh sekali dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain, yakni hanya 1,6%. Sebuah perbedaan yang sangat lebar. Mengapa ini terjadi, kita akan gali lagi bersama narasumber di studio, Bung Akhir Matwa Harahap.

**DENNY J.A.:**

Siapakah yang diuntungkan dan dirugikan dengan banyaknya jajak pendapat menggunakan SMS? Di hadapan saya banyak sekali SMS yang masuk. Pertama dari Bung Rio yang mengatakan, "Polling-polling yang ada di televisi dan media cetak tidak sesuai dengan metodologi umum, karena respondennya tidak jelas. Jadi itu bukanlah pendidikan politik, tapi justru merusak pembelajaran politik".



Kedua mengatakan, “Jika radio dan televisi berbohong siapa yang bisa mendeteksinya?” Yang lainnya mengatakan, “Apakah polling SMS dapat dikatakan mencuri start kampanye? Karena kita tahu siapa pemilik media itu, sehingga hasilnya tidak mencerminkan pilihan rakyat.” Dan keempat dari Bung Zaky di Jakarta, “Pilihan terhadap Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid dalam polling itu adalah keinginan untuk memiliki presiden yang bersih”.

Kemudian dari Ibu Lili di Medan mengatakan, “Terus terang Pak Denny J .A., saya mempunyai tiga nomor telepon, ketiga-tiganya saya pilih untuk satu capres favorit saya, sekaligus membantu sang capres memperoleh suara terbanyak”.

Jadi memang ada kasus, seorang yang mempunyai tiga nomor handphone, ketiganya dikirimkan kepada satu nama, sehingga satu nama memperoleh tiga suara.

Yang terakhir berupa pujian, mengatakan, “Negara kita membutuhkan orang-orang yang berpola pikir seperti anda, jika ditambahkan dengan solusi, tentu makin sukses”.

Sebelum kita membaca SMS yang lain, kita kembali dulu kepada Bung Akhir Matwa Harahap. Bagaimana anda menanggapi kasus Hidayat Nur Wahid di SCTV nomor satu dengan suara di atas 25%, tetapi di Majalah Tempo yang metodologinya menggunakan tatap muka memperoleh nomor yang sangat kecil, sekitar 1,6%-1,7%?

#### **AKHIR MATWA HARAHAAP:**

Kalau melihat perbedaan itu semestinya kita harus bertanya, metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Karena biasanya antara satu metode dengan metode yang lain tidak setimpang itu. Kalau metode dengan SMS fokusnya adalah penyelenggara.

Katakanlah di sini SCTV, presenter mengumumkan, lalu orang mengaksesnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, dari SMS yang dibacakan Pak Denny J.A. bisa jadi kita tidak bisa mengontrol suara atau poin. Apakah dari tangan satu orang yang memiliki sejumlah handphone. Bisa jadi yang mengirim SMS umumnya kurang dari 17 tahun, misalnya untuk di kota-kota. Apakah mereka yang kita harapkan untuk memberikan opini dalam jajak pendapat itu?

**DENNY J.A.:**

Jadi dalam populasi pemilu nanti pemilih usianya di atas 17 tahun. Sementara pemilik SMS ada anak-anak SMA dan SMP, yang usianya di bawah 17 tahun. Kedua, dalam pemilu nanti satu orang mempunyai hak satu suara, sementara dalam SMS ini ternyata satu orang bisa mempunyai dua sampai empat suara?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Betul. Atau misalnya saya mempunyai ketertarikan kepada sesuatu hal. Saya bisa mengumpulkan handphone teman-teman untuk mengakses itu, padahal yang dikirimkan dari handphone teman-teman itu adalah pendapat saya. Kalau dalam jajak pendapat SMS titik tolaknya dilihat dari sudut penyelenggara, dalam survey titik tolaknya adalah responden. Sewaktu kita mengunjungi responden dan melakukan tatap muka, kita bisa mengontrol siapa yang seharusnya diharapkan untuk menjawab pertanyaan. Akan berbeda dengan jajak pendapat SMS, kita tidak bisa mengontrol.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, sekarang sudah terhubung bersama kita, Bung Ibnu Hamad, seorang pakar komunikasi. Selamat pagi bung, apa kabar?

**IBNU HAMAD:**

Selamat pagi Mas Denny, kabar baik.

**DENNY J.A.:**

Kita ingin mendengar komentar anda dulu, sehubungan dengan maraknya jajak pendapat melalui SMS.

**IBNU HAMAD:**

Saya ingin melihatnya bukan karena sekedar acara polling. Tapi sebagai cara partisipasi berbagai media dalam menyemarakkan demokrasi. Karena kalau dilihat hanya dari metodologinya saja akan terlihat carut-marutnya. Tapi kalau kita melihat manfaatnya akan lebih bagus, untuk mendorong proses demokrasi dan lebih memperkaya pilihan. Jadi kalau dilihat dari segi demokrasi saya rasa sudah cukup bagus, tapi dari segi metodologi polling memang kurang bisa akurat, karena masyarakat kita heterogen.

**DENNY J.A.:**

Kembali kepada Bung Akhir Matwa, jadi menurut anda apakah secara metodologi polling SMS cacat? Tapi secara politik bisa mempunyai pengaruh yang cukup besar?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Ya, secara metodologi sangat lemah, tapi secara politik pengaruhnya cukup besar. Itu yang menjadi runyam, kalau misalnya metodologi yang merupakan metode akademik yang netral digunakan untuk situasi yang salah. Mungkin SCTV juga bermaksud benar, tetapi pada situasi yang tidak tepat. Ini yang seharusnya

menjadi perhatian, karena tidak semua metodologi hasil jajak pendapat bisa diungkapkan. Ada hasil riset yang sesungguhnya benar, tetapi hasilnya tidak bisa otomatis dipublikasikan. Misalnya sewaktu ada riset tentang seks pra nikah di Jawa Tengah. Ketika mau diumumkan, para orang tua tidak sependapat.

**DENNY J.A. :**

Kembali kita sambung lagi dengan Bung Ibnu Hamad seorang pakar komunikasi massa. Bagaimana dengan pandangan yang mengatakan publik umumnya tidak paham bahwa hasil polling itu tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya?

**IBNU HAMAD:**

Mudah-mudahan dengan adanya wacana di media massa tentang kritik terhadap metodologi yang dilakukan dalam polling-polling, ikut memperkaya wawasan masyarakat mengenai makna dari polling. Namun setiap media perlu membuat disclaimer yang menyatakan di mana kelemahan dari metodologinya. Setiap media lebih baik mengatakan keterbatasan riset mereka apa adanya.

**DENNY J.A.:**

Seperti misalnya pada produk rokok ada disclaimer-nya, “Rokok ini dapat menyebabkan kanker.”

**IBNU HAMAD:**

Tapi saya tidak setuju kalau polling SMS dihentikan, karena ini dalam wacana pengembangan demokrasi. Yang perlu dihindarkan adalah adanya penyesatan informasi bahwa seakan-akan polling ini mencerminkan suara yang sebenarnya.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut anda perlu disclaimer yang menyatakan polling ini hanyalah mewakili para pemilik telepon yang aktif?

**IBNU HAMAD:**

Ya, jadi sekalipun survey lapangan harus mengeluarkan disclaimer juga. Saya kira syarat semua penelitian adalah menunjukkan disclaimer.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda dengan disclaimer berarti dua hal telah terpenuhi. Pertama ekspresi demokrasi jalan terus. Kedua publik tidak diberikan informasi yang mentah?

**IBNU HAMAD:**

Saya kira demikian, jadi suara yang diam ini dimediasikan. Sementara selama ini suara demokrasi dimediasikan oleh kalangan elit. Ada elit pemerintahan, elit partai, intelektual, dan sebagainya. Sekarang suara masyarakat bisa terbawa, walaupun pemilik SMS hanya anak SMP misalnya. Ini bukan masalah, karena mereka juga warga negara yang harus didengar suaranya.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana menurut anda kalau media tidak mau membuat disclaimer?

**IBNU HAMAD:**

Saya kira dengan adanya lembaga-lembaga riser yang membuar disclaimer, sementara yang lainnya tidak, bisa menjadi wacana bagi masyarakat. Sehingga kalau yang lain tidak membuat, masyarakat akhirnya akan tahu juga. Seandainya semua membuat, itu bisa lebih baik.

**DENNY JA.:**

Ok, terima kasih Bung Ibnu Hamad, saya kira ini pandangan yang cukup moderat dan perspektifnya cukup mencerahkan. Bagaimana bung Akhir Matwa cara mengontrol yang lebih elegan dengan munculnya berbagai macam jajak pendapat kehormatan yang kacau balau metodologinya ini?

**AKHIR MATWA HARAHAP:**

Sebenarnya ada benarnya juga, kira harus menggunakan disclaimer bahwa setiap hasil polling mengandung kelemahan. Sebenamya kelemahan jajak pendapat kehormatan SMS sangat parah, karena tidak bisa mendefinisikan populasi. Berbeda dengan teknik survey tatap muka, di mana kira bisa mengontrol populasinya, sepperri apa responden atau sampelnya.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda apakah perlu satu konsorsium berbagai lembaga jajak pendapat. Itu yang membuat kode etik untuk mengontrol standar jarak pendapat itu?

### **AKHIR MATWA HARAHAP:**

Mestinya iya, karena ini merupakan lahan yang luas, yang mudah disalahgunakan. Negara maju, terutama Amerika Serikat, sudah mempunyai asosiasi riset untuk menyusun suatu kode etik. Kalau kita tidak mempunyai asosiasi, bagaimana mau melangkah ke masalah kode etik. Karena ada persoalan yang seperti tadi, apakah jajak pendapat SMS boleh diumumkan, ini masalah etik.

### **DENNY J.A.:**

Ok Bung Akhir Matwa Harahap, terimakasih banyak atas perspektifnya. Anda mewakili pandangan profesional, yang memang ahli dalam metodologi riset dan bukan seorang yang partisan, itu yang penting.

Demikianlah para pendengar. Kita tahu bahwa sekarang ini begitu banyak jajak pendapat versi SMS, di media cetak dan elektronik. Apa daya inilah era demokrasi, era kebebasan, di mana semua pihak tentu boleh melakukan banyak hal, kecuali melanggar hukum. Dan melakukan jajak pendapat melalui SMS tidak melanggar hukum, tapi tentu saja agar publik yang tidak paham metodologi disajikan informasi yang benar, sangat baik sekali kalau masing-masing media, terutama yang berpengaruh mulai membuat disclaimer, dengan mengatakan bahwa jajak pendapat melalui SMS hanya bersifat hiburan belaka. Tanpa disclaimer, publik cenderung beranggapan hasil polling SMS itulah kenyataan yang sebenarnya, dan publik mempunyai kecenderungan untuk membela atau mendukung mereka yang dianggap menang. Padahal yang menang di SMS belum tentu menang dalam pemilu yang riil, bahkan mungkin sangat bertolakbelakang sekali dengan pemilu yang riil.

Baik para pendengar Delta FM, sampai jumpa lagi rabu minggu depan, bersama saya Denny J.A.



## **KEMUNGKINAN KEMBALINYA PARA POLITISI HITAM MELALUI PEMILU 2004**

Tanggal: 24 Desember 2003

Host: Denny J .A.

Narasumber: Farid Faqih (Government Watch), Syaiful Mujani (LSI),  
Franky Sahilatua (Seniman)

Pemilu 2004 belum lepas dari bayang-bayang politisi hitam: para politisi yang mempunyai catatan negatif berkaitan dengan aktivitas mereka di masa lalu yang sarat dengan fakta dan indikasi korupsi, penyalahgunaan jabatan, malpraktek birokrasi dan mungkin juga pelanggaran HAM dalam berbagai bentuknya. Dalam konteks inilah beberapa LSM menggabungkan diri dalam gerakan bersama menentang munculnya kembali para politisi hitam dalam kancah politik di Indonesia. Mereka menyusun kriteria-kriteria politisi hitam dan menyodorkannya kepada partai politik yang sedang menyusun daftar caleg maupun capres/cawapres menjelang pemilu 2004. Mereka bahkan menyusun daftar nama-nama politisi hitam itu. Namun pada saat yang sama, survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa isu-isu korupsi dan politisi hitam bukan isu yang prioritas bagi masyarakat. Isu terpenting bagi masyarakat yang telah sedemikian lama terhimpit

oleh krisis ekonomi tersebut adalah isu pengangguran, kenaikan harga, kemiskinan dan seterusnya.

Jika kecenderungan seperti ini yang muncul pada masyarakat menjelang pemilu 2004, sangat mudah bagi para politisi yang lihai dalam mengemas kampanyenya dengan isu-isu pemulihan ekonomi untuk menarik simpati publik. Jika ini yang terjadi, mungkinkah semua gerakan yang disusun oleh LSM untuk menentang munculnya para politisi hitam akan sia-sia? Sejauhmana kehidupan politik dan pemerintahan ke depan dapat diselamatkan dari dominasi para politisi hitam?

**DENNY J.A. :**

Selamat pagi para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar? Jumpa lagi dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A., dengan topik yang sedang hot kali ini, “Kemungkinan Kembalinya Para Politisi Hitam Melalui Pemilu 2004”. Saat ini berbagai parpol sedang menyusun daftar calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil presiden. Apa yang dapat publik lakukan agar daftar caleg dan capres/cawapres itu tidak kembali didominasi para politisi hitam? Bagaimana agar politik Indonesia pasca tahun 2004 tidak jatuh ke dalam genggaman para politisi hitam? Bersama kita kali ini tampil Bung Farid Faqih, pemimpin Government Watch (Gowa). Selamat pagi bung.

**FARID FAQIH :**

Selamat pagi Bung Denny, selamat pagi pendengar.

## **DENNY J.A. :**

Belakangan ini ada dua event yang menarik perhatian kita berhubungan dengan kampanye politisi hitam. Yang pertama adalah koalisi berbagai LSM, yang sekarang sedang menyusun daftar politisi hitam. Beberapa kriteria yang ditetapkan di sana, bahwa calon legislatif tidak boleh mempunyai record negatif dalam hal korupsi atau pernah membuat rugi keuangan negara. Koalisi juga berencana memasukkan daftar itu ke dalam sebuah list yang akan disebarluaskan ke masyarakat. Diharapkan dalam pemilu 2004 nanti kita tidak memilih para politisi hitam. Juga dengan target yang lebih jauh bahwa Indonesia serelah 2004 tidak lagi didominasi oleh para politisi hitam. Jelas ini sebuah upaya yang berharga dan inovatif untuk memerangi korupsi. Event kedua, justru fenomena yang sebaliknya, adalah hasil survey Lembaga Survey Indonesia yang baru saja menjadi headline, misalnya di Jakarta Post. Survey ini memperlihatkan bahwa ternyata pemilih Indonesia tidak terlalu peduli pada isu korupsi. Responden yang menganggap korupsi itu sebagai agenda utama reformasi hanya lima persen saja. Penyebabnya karena sekarang masyarakat Indonesia sedang dililit krisis ekonomi, sehingga 70 persen responden menganggap agenda yang paling penting untuk diperjuangkan adalah isu ekonomi yang terutama sekali berhubungan dengan kesempatan mencari kerja, harga-harga kebutuhan hidup yang mahal. Isu-isu ini membuat mereka agak mengabaikan pentingnya isu korupsi. Jika kesadaran ini yang dominan menjelang pemilu 2004, sangat mudah bagi para politisi hitam yang lihai mengemas kampanye dengan isu-isu pemulihan ekonomi untuk menarik simpati publik. Jika ini yang terjadi maka semua gerakan yang disusun LSM kurang mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Karena itulah mungkin gerakan ini hanya efektif jika didukung oleh

voter education, pendidikan pada pemilih. Sehingga bagi pemilih tidak hanya ekonomi yang penting, tetapi korupsi pun penting untuk diberantas. Karena korupsi juga menjadi bagian dari yang menyebabkan Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi.

Bung Farid, bagaimana anda menanggapi koalisi LSM yang sedang menyusun dafrar politisi hitam untuk disebarakan kepada publik?

**FARID FAQIH:**

Sebuah gerakan yang baik sekali sebagai bagian dari pendidikan politik, supaya rakyat juga tahu bahwa calon-calon pemimpin itu tidak layak dipilih. Apalagi kalau misalnya daftar itu disebarakan sampai ke tingkat RT/RW. Kita mendengar bahwa Steve Chia—politisi di Singapura— mengundurkan diri karena memotret setengah bugil pembantunya yang juga seorang TKI. Dan menariknya yang membuka kisah ini kepada media adalah istrinya. Di sana kalau sudah begini biasanya politisinya mundur. Kalau di kita kan tidak, mereka tetap ngotot bahwa dia tidak merasa bersalah. Memang kalau kita melihat UUD 1945, kita sudah memposisikan legislatif jauh lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif. Jadi kita memerlukan orang-orang yang benar-benar bersih, untuk duduk di legislatif. Sehingga dia tidak menggunakan lembaga itu unik mengembangkan terus kekotorannya.

**DENNY J.A:**

Jadi menurut anda membersihkan legislatif merupakan suatu pilihan yang sangat strategis untuk bisa membersihkan pemerintahan kita selanjutnya?

**FARID FAQIH :**

Betul. Kalau kita melihat dari laporan-laporan yang masuk, hampir semua masalah di DPRD sekarang, selalu berhubungan dengan pihak kejaksaan dan kepolisian, sehingga membuat gelisah. Dan laporan-laporan yang masuk kepada kami, sejak pemilihan seorang kepala daerah, penyusunan anggaran daerah, termasuk APBN dan pembelanjanya, sering diwarnai dengan tekanan-tekanan dan pemerasan yang dilakukan anggota legislatif.

**DENNY J A. :**

Menarik bung, karena anda di Gowa dan berhubungan dengan berbagai praktek politik hitam di lapangan. Bisa anda menceritakan satu-dua kasus?

**FARID FAQIH:**

Yang pertama, pemilihan salah satu bupati di Lampung, kebetulan yang menang kawan saya sekolah. Saya menanyakan bagaimana dia bisa menang? Dia menjawab bahwa dia harus membayar anggota DPRD Rp. 200 juta per kepala, total menghabiskan Rp. 8 miliar. Dari mana dia mendapat uang itu? Sebagian dari tabungan, sebagian dari aset pribadi, menjual harta istri, keluarga dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana uang itu kembali? Dia menjawab dengan terus-terang itu diambilnya dari proyek-proyek. Kasus kedua, saya baru kembali dari Tembilahan, Riau. Kami menginvestigasi pemilihan gubernur di sana. Disebutkan bahwa pada detik-detik terakhir pemilihan, terjadi operasi subuh dan bertebaranlah uang-uang dolar Singapura yang diberikan kepada masing-masing anggota DPRD Propinsi Riau. Di Tembilahan kita sudah memberikan bukti-bukti tertulis seperti

surat pernyataan dan kwitansi uang yang diberikan salah seorang calon kepada anggota DPRD yang jumlahnya antara Rp.100-200 juta. Dan yang menarik, seorang calon untuk bisa dicalonkan saja, mereka harus membeli 'perahu'. Apa itu 'perahu'? Maksudnya fraksi-fraksi, dan nilai jual fraksi itu mencapai Rp. 1 miliar. Dan sekarang di Jakarta untuk menjadi calon juga harus mengeluarkan uang untuk membayar pengadilan dan macam-macam.

**DENNY J.A. :**

Para pendengar sekalian, memang setelah reformasi praktek politik hitam sangat nil, terjadi di berbagai tempat. Di lembaga legislatif —sebagai lembaga yang semakin powerfull setelah reformasi-- ternyata beredar uang yang banyak sekali berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Gerakan anti politisi hitam menjadi sangat strategis. Masalahnya bagaimana mengemasnya agar bisa menghasilkan efek yang positif?

Bung Farid, apa yang bisa dilakukan koalisi LSM supaya bisa mempengaruhi pemilih?

**FARID FAQIH :**

Pertama, tentunya list yang mereka buat harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan fakta dan informasi yang cukup. Kedua, gerakan anti politisi hitam juga harus digerakkan sampai tingkat desa, kecamatan dan kota. Karena merekalah yang melakukan pemilihan. Saya mendengar bahwa gerakan ini sudah dimulai di Jember. Kalau bisa bekerja dengan kelompok Karang Taruna, RT, RW, akan sangat efektif.

**DENNY J.A.:**

Ok, sekarang kita sudah terhubung dengan Bung Syaiful Mujani dari LSI. Selamat pagi bung. Apa komentar anda mengenai koalisi berbagai LSM yang sedang menyusun daftar politisi hitam agar tidak dipilih dalam pemilu 2004 nanti?

**SYAIFUL MUJANI:**

Selamat pagi Mas Denny. Saya melihat ini satu upaya yang sangat positif. Namun saya belum tahu persis kesiapan kita yang tidak menginginkan para politisi hitam kembali. Karena ini menyangkut masalah yang sangat krusial, dalam pengertian orang-orang ini akan di-list secara lengkap dan terbuka. Saya kira di situ akan muncul ketegangan yang sangat kuat dan kita harus siap betul menghadapinya. Para politisi hitam itu dalam beberapa hal mempunyai resources yang mungkin lebih besar, dan segi uang, segi jaringan, mungkin tukang pukul, dan sebagainya. Oleh karena itu perlawanan terhadap mereka harus benar-benar bisa menjadi gerakan nasional yang besar.

**DENNY J.A.:**

Kita juga agak heran dengan hasil survey yang anda publikasikan, bahwa publik yang peduli dengan isu korupsi hanya lima persen saja. Bagaimana anda menjelaskannya?

**SYAIFUL MUJANI:**

Saya kira karena survey itu menggunakan populasi nasional: masyarakat umum yang notabene mempunyai hak suara dalam pemilu nanti. Mereka mungkin tidak melihat hubungan secara langsung persoalan ekonomi yang mereka hadapi dengan

masalah korupsi. Padahal menurut kita, sebagai masyarakat yang cukup terpelajar, salah satu unsur utama yang membuat krisis ekonomi adalah korupsi itu sendiri. Di tingkat massa itu tidak tergal. Masyarakat umum tidak melihat itu secara langsung. Jadi survey itu mencerminkan situasi kultur dan semacamnya, tingkat keterpelajaran masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu yang menjadi kekhawatiran saya adalah kalau masyarakat tidak melihat kaitan antara korupsi dengan krisis ekonomi, maka ada peluang bagi politisi hitam untuk memanipulasi isu-isu ekonomi. Jadi harus selalu dikampanyekan bahwa persoalan krisis ekonomi pun tidak bisa dipisahkan dengan persoalan korupsi yang selama ini terjadi di negara kita.

**DENNY J.A. :**

Apakah gerakan perlawanan koalisi LSM akan menjadi kurang gaungnya nanti?

**SYAIFUL MUJANI :**

Saya belum tahu seberapa besar gerakan ini akan menggelinding. Oleh karena itu harus melibatkan tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin sosial yang besar. Kalau tidak, kita harus mengakui bahwa inisiatif yang bagus hanya berkembang dalam kelompok-kelompok kecil. Tapi efektivitasnya membutuhkan sosialisasi dengan gerakan-gerakan, dengan menggunakan jaringan-jaringan yang sudah ada, yang memungkinkan ide itu bisa tersosialisasi secara luas. Karena pemilih kita sangat besar, sekitar 140 juta, dari mana kita memulainya dan seterusnya. Mungkin tadi seperti Bung Faqih sebutkan, perlu sosialisasi di tingkat RT-RW, kelurahan dan seterusnya. Tapi coba bayangkan pekerjaan ini



dalam waktu hanya tiga bulan, apakah kita mampu? Tapi apapun hasilnya harus dilakukan. Minimal ada inisiatif dan gerakan. Cuma yang saya agak cemas, karena saya setuju dan sangat mendukung gerakan itu, betul-betul akan berhadapan dengan politisi-politisi yang punya resources sangat besar. Kita berharap terjadi seperti di Thailand misalnya, pengacara yang berada di belakang gerakan anti para politisi hitam sangat massive. Sehingga masyarakat dan aktivis gerakan pun merasa secure untuk melakukan gerakan tersebut. Karena satu faktor yang penting, berhasilnya sebuah gerakan adalah ada optimisme di kalangan aktivis, bahwa gerakan yang mereka lakukan adalah aman, setidaknya untuk diri mereka sendiri.

**DENNY J.A. :**

Ok, terimakasih banyak, satu perspektif yang cukup baik dari Bung Syaiful. Dan kita akan meminta tanggapan dari Bung Farid. Pertama, soal kemungkinan resistensi dari para tokoh yang dimasukkan ke dalam daftar hitam. Kedua, berkaitan dengan hasil survey LSI tadi, bagaimana memanipulasi situasi supaya publik menganggap bahwa korupsi juga menyebabkan krisis ekonomi dan menempatkan masyarakat sebagai korban.

**FARID FAQIH:**

Kalau kita berbicara dengan rakyat bawah, mereka mengatakan lebih baik jaman dulu. Dulu mereka bisa sekolah, bisa makan, aman, tidak ada keributan, semuanya bisa mereka lakukan. Saat itu korupsi juga banyak. Tapi sekarang korupsi juga ada, dengan kondisi ekonomi yang lebih menyusahkan rakyat kecil. Itu sebabnya mereka menganggap Law environment terhadap koruptor tidak

bisa dilakukan secara tepat. Pencuri ayam dihukum tiga bulan, tetapi para koruptor kelas kakap tidak tersentuh. Jadi semakin banyak anda korupsi, maka anda semakin tidak tersentuh di muka hukum.

**DENNY JA.:**

Sekarang kita sudah terhubung dengan seniman, Bang Frangky Sahilatua. Selamat pagi Bang Franky, apa kabar? Saya mendengar anda terlibat dalam rencana gerakan nasional melawan politisi hitam. Menurut anda, seberapa efektif gerakan ini?

**FRANKY SAHILATUA:**

Selamat pagi Bung Denny.

Keterlibatan saya unituk bisa memberikan ruh bagi gerakan ini dengan menghadirkan nyanyian. Jadi keterlibatan dari aspek kultural, agar gerakan mi tidak menjadi kering. Kalau cuma sekedar data, sudah terlalu banyak.

**DENNY J.A.:**

Disitulah peran anda dari kalangan seniman, agar bisa mengemasnya secara lebih kultural yang bisa diterima oleh publik luas. Permintaan dari pendengar lagu “Cucakrowo” yang sudah anda gubah syairnya

**FRANKY SAHILATUA:**

Terus terang sebetulnya itu bukan lagu “Cucakrowo”, lagu aslinya berjudul “Child Be Coming Around The Mountain,” Lagu Amerika, lagu para penambang emas, terus di Eropa judulnya “Happy-Happy

Yeah”. Kemudian di Batam, Tapanuli atau Sumatera Utara menjadi “Si Bual-Bual”. Kemudian di Jawa belakangan mi dikenal dengan “Cucakrowo”. Lagu “Si Bual-Bual” adalah lagu perjuangan. Saya kembalikan spirit lagu “Si Bual-Bual” sebagai lagu perjuangan dengan membuat syair yang berisi perjuangan juga, perjuangan dalam konteks kekinian, melawan korupsi. Begini syairnya:

*Jangan, jangan pilih mereka*

*Berpolitik untuk korupsi.*

*Jangan, jangan pilih mereka.*

*Berpolitik menipu rakyat.*

*Jangan, jangan pilih mereka*

*Yang merampok uang negara*

*Jangan, jangan pilih mereka.*

*Yang membuat rakyat sengsara*

*Ambil saja uang mereka.*

*Tapi jangan pilih mereka.*

*Ambil saja uang mereka*

*Tapi jangan pilih mereka.*

**DENNY J.A:**

Kata-katanya simple, tapi mengena betul dengan tema kampanye anti politisi hitam.

**FRANKY SAHILATUA:**

Ya, saya membuat lagu mi karena ada sebuah kemarahan yang menggumpal, di dada banyak orang Indonesia.

**DENNY J.A. :**

Apakah rencananya lagu ini akan direkam di kaset atau dinyanyikan di acara TV untuk disebarakan?

**FRANKY SAHILATUA :**

Saya ingin lagu ini berjalan natural saja. Berbeda dengan karya-karya saya yang memang harus diproduksi dalam bentuk kaset. Tapi lagu ini sebenarnya sudah mengalami penyebaran, lewat syair-syairnya saja. Karena dalam syairnya saya memberikan kata-kata “ingat lagu Cucakcrowo”, kalau orang menangkap lagu Cucakrowo, mereka pasti sudah hafal nadanya.

**DENNY JA:**

Dengan cara mengemas ke dalam lagu, lebih mudah untuk mensosialisasikannya ke masyarakat, karena banyak yang sudah mengenal lagu ini?

**FRANKY SAHILATUA :**

Ya, karena lagu ini sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia. Karena rekan-rekan produser sudah membuat lagu “Cucakrowo” dalam 12 versi bahasa daerah.

**DENNY JA.:**

Ok, terima kasih banyak Bung Franky atas partisipasi anda. Bagaimana pandangan Bung Farid, ini kampanye lewat lagu-lagu dengan 12 bahasa daerah?

**FARID FAQIH :**

Ini cara yang cerdas, dan kawan-kawan memang sudah membantu Mas Franky. Kita memfotokopi lagu itu dan menyebarkanluaskannya ke masyarakat luas. Jadi masyarakat didesak untuk tidak memilih orang-orang yang memeras negara dan orang-orang yang telah menyengsarakan rakyat. Pesan-pesan itu harus dikemas sesederhana mungkin, enak untuk didengar dan pas untuk diulang-ulang menjadi slogan perjuangan. Syukur kalau ada yang mensponsori sehingga bisa diputar di media televisi.

**DENNY J.A.:**

Ok para pendengar, tadi kita sudah mendengar sendiri berbagai upaya yang dilakukan para aktivis dan juga para seniman untuk mengampanyekan gerakan anti korupsi, gerakan untuk tidak memilih para politisi hitam dengan berbagai cara. Ada yang membuat survey, bagi para akademisi. Ada yang melakukannya dengan membuat list daftar politisi hitam, dan menyebarkannya, bagi para. aktivis LSM. Ada juga Bung Franky Sahilatua yang menggubahnya dalam lagu dengan link yang mudah dicerna, gampang diulang-ulang, dengan pesan agar masyarakat tidak memilih politisi yang merampok uang negara.

Sebelum kembali ke Bung Farid Faqih saya bacakan dulu SMS yang masuk, salah satunya mengatakan, "LSM mengumumkan

daftar politisi hitam, tapi tokoh LSM sendiri harus putih terlebih dahulu.”

Kedua, dari Bung Ilyas Jakarta, mcngatakan, “Untuk memulihkan ekonomi memang harus memberantas korupsi. Tapi bagaimana kedua hal ini dapat dipahami sebagai hal yang berhubungan satu sama lain di mata pemilih?”

Juga ada yang mengatakan, “Saya hanya ibu rumah tangga, hanya lulus SMA, tapi saya setuju untuk membeberkan hitamnya para politisi itu. Namun sebisa mungkin buktinya jangan hanya ‘katanya’ atau kabarnya’, tapi didetailkan data-data yang ada kepada masyarakat melalui majalah, surat kabar dan tabloid ke seluruh Indonesia, sehingga para ibu rumah tangga seperti saya bisa memilih yang terbaik.”

Kemudian ada lagi yang mengatakan, “Salah satu materi pendidikan politik untuk grass root, bahwa pertumbuhan ekonomi di era Soeharto, yang sekarang ini diidolakan itu ternyata semu belaka, karena ujung-ujungnya bocor, dan krisis ekonomi.”

Juga dari Bung B.J. Kun yang mengatakan, “Itulah kenyataan politik di Indonesia. Pokoknya ujung-ujungnya adalah duit, atau UUD”

Juga ada SMS untuk Bang Farid, “Teruskan dan kami terus dukung penghancuran politisi hitam. Walaupun sekarang hanya lima persen dari publik yang peduli.”

Juga dari Bung Effendi yang mengatakan, “Harus diimbangi dengan jaringan mahasiswa secara luas untuk pemberantasan korupsi.”

Dan beberapa komentar untuk Bang Franky yang sudah menggubah lagu dan menyanyikannya, mengatakan, “Bung Franky, well, thank you very much.”

Yang kedua dari Wahyu Wibowo di Depok mengatakan, “Bung Franky, anda tidak sendiri, saya pun geram dengan para politisi hitam. Tapi saya tidak punya media untuk menyuarakannya.”

Bagaimana Bung Farid, untuk mengantisipasi jika para politisi yang masuk dalam daftar hitam itu, tiba-tiba melakukan reaksi, menuntut ke pengadilan, dan melakukan mobilisasi sumber daya yang mereka punyai. Apa yang bisa kita lakukan menghadapinya?

#### **FARID FAQIH:**

Well, pertama saya ten rank dengan salah satu SMS tadi, bahwa dirinya sendiri harus bersih. Ini kunci utama bagi orang-orang yang berjuang di sana. Juga tidak mempunyai keterkaitan yang baik dengan partai politik yang sekarang berkuasa, ataupun dengan praktek-praktek korupsi, manipulasi, atau penyuapan yang mereka lakukan. Kalau tidak ada trust dari masyarakat terhadap itu tidak mungkin. Yang kedua, bahwa datanya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini menyangkut hak-hak politik orang, menyangkut nama baik, jangan sampai salah tuduh. Dari pengalaman-pengalaman saya sendiri meskipun datanya sudah cukup kuat, tapi orang-orang bermasalah itu mempunyai kekuatan yang lebih dari kita. Dia mempunyai uang, koneksi dengan jaksa, dengan hakim dan segala macam, mempunyai pengacara yang kuat. Jadi walaupun kita mempunyai data yang kuat, kita juga bisa kalah di pengadilan. Itu yang saya kira harus diperhatikan. Dan yang ketiga, perlu melibatkan begitu banyak orang yang sangat dekat dengan grass root, yang tahu secara detil apa yang memang

terjadi pada orang per orang. Saya kira itu lebih mudah, karena mereka bisa melihat perkembangan si A, si B, dengan data yang cukup. Berikutnya adalah support pada Bung Franky, kalau bisa ada dukungan dari berbagai media massa —radio, surat kabar, terutama televisi— yang memberikan iklan layanan masyarakat dengan kalimat yang seperti tadi, simple dan cukup mengena.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda kampanye ini akan jauh lebih efektif jika media massa ikut terlibat?

**FARID FAQIH :**

Betul, tidak mungkin tanpa mereka, dan jangan lupa bahwa pemilih-pemilih adanya di tingkat kecamatan sampai ke tingkat RT, yang hanya mungkin dijangkau dengan media radio dan televisi.

**DENNY J.A:**

Anda bisa membayangkan jika nanti begitu banyak politisi hitam yang masuk di pemerintahan, bisa berakhir dengan tuntutan balik kepada para LSM dengan tuduhan pencemaran nama baik misalnya?

**FARID FAQIH :**

Itu bisa ramai. Kalau di Thailand misalnya karena back-up dari pengacara terhadap gerakan anti politisi hitam begitu kuat, sehingga gerakan itu terus berjalan. Tapi jangan lupa ada satu hal, bahwa tujuannya adalah bagaimana mengingatkan rakyat, “Jangan memilih Si A, karena Si A memang koruptor, melakukan kejahatan di masa lalu.”



**DENNY J A. :**

Kalau LSM tidak ingin terjebak dalam kesalahan fatal yang akibatnya justru bisa mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah misalnya, sumber informasi dan data ini sebaiknya seperti apa? Apakah sekedar pengadilan? Apakah sekedar berdasarkan percakapan di depan meja?

**FARID FAQIH :**

Saya kira harus ada hitam-putihnya. Yang paling kuat tentunya adalah putusan pengadilan. Yang kedua bisa pula kalau mereka mempunyai bukti-bukti tertulis, misalnya kita mempunyai data Si A, Si B anggota DPRD yang menerima uang sogok. Ada surat pernyataan, ada kwitansinya, ada macam-macam. Pokoknya harus akurat, tidak bisa hanya percakapan warung kopi, yang tak bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.

**DENNY J.A.:**

Kita teringat dengan kasus Tempo melawan Tommy Winata misalnya, di mana Tempo akhirnya digugat Tommy Winata karena dianggap tidak mempunyai bukti-bukti tertulis.

**FARID FAQIH:**

Ya. Dan sekarang politisi itu 'diatur' oleh para investor, orang-orang yang mempunyai uang. Saya jadi teringat dengan Irma Hutabarat misalnya. Walaupun begitu kuat data saya, tetapi di tingkat perdata pengadilan Gowa kalah, di tingkat pidananya polisi tidak melanjutkan. Tetapi sekarang Pak Sutiyoso sudah menunjuk pengacara untuk menuntut kembali uang tersebut dari Irma Hutabarat. Dan saya mendengar Irma Hutabarat akan menjadi

caleg PDIP, dan akan menjadi orang pertama yang diumumkan oleh teman-teman sebagai politisi hitam supaya jangan dipilih. Tapi pesan saya, kawan-kawan koalisi harus mempunyai data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

**DENNY J.A.:**

Para aktivis LSM juga harus membuktikan bahwa mereka juga bersih.

**FARID FAQIH:**

Mereka harus mempunyai track record putih. Karena mereka bisa dituntut balik oleh para politisi hitam. Misalnya dia mengatakan, "Dulu kamu saya bayar juga!", misalnya. Atau mungkin dia mempunyai bukti-bukti investigasi yang lain. Karena reputasi LSM sekarang sudah menurun. Kalau saya mungkin mengusulkan supaya ada aturannya ke depan. Sebab reputasi individu yang lebih berkembang. Misalnya anda lebih dikenal sebagai Denny J.A., ketimbang program acaranya. Tapi ada satu yang akan kita ingatkan, bahwa pemilu ini bukan pemilu kita 100 persen, karena walaupun orang tidak dipilih oleh rakyat, tapi dia dipilih parpolnya untuk bisa menjadi anggota tegislatif. Itu yang kita harus hati-hati.

**DENNY J.A.:**

Seperti yang anda lihat sekarang, gerakan anti korupsi memang meluas didukung NU, Muhammadiyah, dan KPK. Apakah anda optimis korupsi di masa depan akan semakin berkurang?

**FARID FAQIH:**

Harus bisa, dan gerakan ini memang harus bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah sebagai lembaga yang besar. Tapi jangan lupa tindakan-tindakan preventif harus juga kita lakukan kepada koruptor. Misalnya seorang ibu mengatakan kepada anaknya, “Nak, kamu sudah bisa naik kelas, karena Mama sudah membayar”, dan ini dikatakan dengan sadar ini sebenarnya menanamkan benih-benih penyuaipan kepada anaknya. Dan di sini mungkin lembaga semacam NU dan Muhammadiyah yang mempunyai akar ke bawah bisa berbuat lebih banyak. Seperti NU bisa membersihkan Departemen Agama yang banyak orang NU-nya, dan Muhammadiyah membersihkan Depdiknas yang banyak orang Muhammadiyahnya. Jika berhasil sungguh prestasi yang sangat besar. Jadi fokus dulu pada dua departemen itu dengan baik. Dan kita menyarankan NU dan Muhammadiyah membantu koalisi ini, karena mereka mempunyai 40-50 juta warga.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, terima kasih banyak atas kehadiran anda. Baik para pendengar Delta FM, kita sudah mendengar cukup panjang lebar, isu yang memang setelah reformasi justru menjadi raksasa, yaitu isu korupsi. Sekarang kita melihat manuver terakhir yang dibuat kawan-kawan koalisi LSM adalah menyusun daftar hitam para calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam pemilu 2004 nanti. Dan juga daftar negatif calon-calon presiden. Daftar ini akan disosialisasikan seluas mungkin kepada para pemilih, agar tidak dipilih pada pemilu nanti. Sehingga politik Indonesia di tahun 2004 mengakhiri masatransisi yang panjang, terutama dengan menyingkirkan unsur-unsur koruptor, pemakan uang rakyat dari semua lini pemerintahan.

Sampai jumpa lagi pada Rabu minggu depan, bersama saya Denny J.A. dengan topik yang aktual di minggu itu dalam “Dialog Aktual”.

**BAB III**

**SISTEM PEMILU BARU,  
KONFLIK POLITIK BARU**

## KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK MENJELANG PEMILU

Tanggal: 4 Februari 2004

Host: Denny J.A.

Narasumber : Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif KIPP),  
Sophan Sophian (PDIP)

Enam puluh hari menjelang pemilu 5 April 2004, ICPU mengumumkan secara resmi daftar calon anggota DPR? Partai-partai besar menyerukan agar publik memilih gambar saja, bukan nama calon anggota legislatif. Muncul gelombang protes, terutama dari calon legislatif yang berada di nomor bawah. Karena kampanye mencoblos tanda gambar membuat peluang mereka untuk terpilih menjadi mengecil. Sementara mereka yang berada di nomor bawah daftar caleg itu notabene adalah kader dan tokoh senior partai yang sudah berasa banyak kepada kemajuan partai. Terutama sekali kerumitan ini terjadi pada tubuh PDIP Bahkan para kader PDIP yang merasa dirugikan oleh kebijakan partai itu berencana membuat sebuah wadah yang mereka sebut “Dewan Penyelamat Partai”, dengan Sophan Sophian sebagai ketua. Mengapa konflik internal demikian menonjol di PDIP? Mengapa perkembangan persiapan pemilu sejauh ini diwarnai isu-isu yang justru mengondisikan perpecahan internal partai?

## **DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Medan. Kembali bersama saya Denny J.A. dalam “Dialog Aktual” dengan topik “Konflik Intemal Parrai Politik Menjelarig Pemilu”. Mengapa konflik intemal partai lebih menonjol di PDIP sebagai partai pemenang pemilu 1999 ? Bersama kita Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Seperti biasa sebelum diskusi, pertama saya akan memberikan background topik kita. Sekarang 60 hari menjelang pemilu 5 April 2004, KPU sudah mengumumkan secara resmi daftar calon anggota DPR. Partai-partai besar, terutama PDIP sudah mengampanyekan agar publik hanya memilih gambar saja, bukan nama calon anggota legislatif. Muncul gelombang protes, terutama dari calon legislatif yang berada di nomor bawah. Karena kampanye mencoblos tanda gambar membuat mereka lebih sulit untuk terpilih. Problemnya, mereka yang di nomor bawah itu kebanyakan adalah tokoh-rokoh senior partai yang merasa sudah berjasa kepada kemajuan parrai politik. mi terutama terjadi terutama pada tubuh PDIP. Dan kader partai yang kecewa itu berencana membuat wadah yang mereka sebut “Dewan Penyelamat Partai”. Sophan Sophian di plot menjadi ketua. Tentu publik luas bertanya-tanya, mengapa konflik intemal lebih menonjol di PDIP? Mengapa sistem pemilu sekarang melahirkan isu-isu yang justru mengondisikan perpecahan intemal partai?

Bung Ray Rangkuti, bagaimana anda mengomentari himbauan partai besar agar publik hanya mencoblos tanda gambar?

**RAY RANGKUTI:**

Pertama, masalah ini muncul sebagai implikasi dari undang-undang kita yang lebih menghajatkan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana orang diajak untuk lebih memilih partai politik daripada memilih kandidat. Kedua, dominasi gambar partai politik yang lebih besar dibandingkan gambar kandidat-kandidatnya. Dan simulasi-simulasi yang pernah kita lakukan, dengan melibatkan hampir 95 persen mahasiswa yang rata-rata semester 7, ternyata hanya 35 persen yang mencoblos partai politik dan mencoblos nama, 65 persennya hanya mencoblos tanda gambar.

Rata-rata pemilih hanya diberi waktu 5 sampai 7 menit. Dengan waktu yang sempit tidak mungkin bisa memilih dengan baik, apalagi mereka berhadapan dengan 7760 lebih nama kandidat dan hanya 4 yang dipilih. Mereka ternyata mengambil simpelnya saja.

**DENNY J.A. :**

Efeknya membuat konflik internal partai, yang ada di urutan bawah kemungkinan terpilih lebih kecil karena kampanyenya hanya mendorong pencoblosan tanda gambar.

**RAY RANGKUTI :**

Sudah pasti. Karena di undang-undang menyebutkan akumulasi sisa suara yang diperoleh partai politik yang bersangkutan akan diberikan kepada nomor urut satu, sekali pun nomor terakhir sisa suaranya lebih besar dibandingkan nomor yang di atasnya. Ada beberapa partai politik yang mencoba menyalahi kemungkinan ini, dengan membuat perjanjian internal. Sebenarnya hal tersebut



melanggar undangundang, karena yang mendapat tambahan sisa suara adalah nomor urut satu.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda sistem pemilu sekarang memicu konflik internal partai.

**RAY RANGKUTI :**

Benar.

**DENNY J.A. :**

Pendengar Delta FM, anda mendengar bahwa sistem yang sekarang sangat ambigu dan bisa memancing konflik internal partai karena memberikan porsi yang sangat besar kepada nomor urut dan partai sendiri cenderung mengkampanyekan mencoblos tanda gambar. Akibatnya banyak calon legislatif di nomor bawah terutama tokoh-tokoh senior marah. Masalahnya mengapa respon yang paling keras terjadi di PDIP yang menang pemilu 1999. Bagaimana Bung Ray?

**RAY RANGKUTI:**

PDIP mungkin masih dominan dalam pemilu 2004 sehingga kursinya jelas lebih diperebutkan dibandingkan kursi partai politik lain.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, sekarang kita sudah tersambung dengan Bung Sophan Sophian dari PDIP.

Partai-partai mengampanyekani coblos tanda gambar saja, tetapi justru menimbulkan konflik di PDIP. Apa yang terjadi scsungguhnya?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Masalah pencalonan anggota legislatif merupakan masalah yang paling menonjol di tubuh partai, terutama di PDIP. Pimpinan partai tidak pernah memberi penjelasan akurat. Sebagaimana anda ketahui sekitar 100 anggota DPR dari PDIP rerlempar ke nomor tidak jadi, hanya 50 orang yang mendapat nomor jadi.

**DENNY JA.:**

Mengapa mereka terlempar padahal mereka telah berjasa pada partai?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Karena tidak ada komunikasi yang terbuka antara pimpinan dengan kader-kader di bawah. Ada unsur like and dislike. Misalnya ada anggota DPR begitit aktif di DPR, aktif mengikuti sidang komisi, sidang paripurna, rapat pansus, memberikan kontribusi yang luar biasa, mengangkat citra partai, tetapi dia mendapat nomor 4 atau 5. Sedang ada anggota yang datang saja tidak pernah, mendapat nomor urut pertama. mi menimbulkan keresahan dan akhimya memuncak menimbulkan konflik intemal yang luar biasa.

**DENNY J.A. :**

Bagaimana denga.n pandangan yang mengatakan bahwa banyak tokoh yang berjasa di PDIP, tetapi secara kualitas lebih rendah dibanding tokoh-tokoh baru?

**SOPHAN SOPHIAN :**

Perlu diketahui PDIP lahir dari orang-orang pinggiran era Orde Baru di mana saat itu semua tokoh yang berkualitas tidak bersedia atau tidak berani duduk di dalam partai yang mempunyai cita-cita menegakkan demokrasi. Orang-orang PDIP waktu itu adalah orang-orang pinggiran. Mereka menganggap dirinya paling berjasa. Padahal di dalam sebuah partai modern yang diprioritaskan bukan berjasa atau tidak, tetapi bagaimana orang berkualitas bisa melahirkan satu partai modern yang berorientasi ke program bukan kepada figur. Ketika saya menjadi ketua fraksi, selalu menekankan hal ini.

**DENNY J.A. :**

Ada problem yang sangat akut di PDIP di mana banyak tokoh yang berjasa tetapi sebenarnya tidak terlalu berkualitas dari segi SDM, begitu ?

**SOPHAN SOPHIAN :**

Tidak juga. Orang-orang yang berjasa ini juga mempunyai kemampuan yang cukup baik. Bahkan mereka sangat kritis memberikan wama dan kedekatan partai dengan rakyat.

**DENNY J.A. :**

Menurut anda posisi ketua umum dengan hak prerogatifnya, terlalu besar untuk PDIP?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Benar dan itu tidak boleti terjadi. Dalam Kongres Bali dan Semarang saya sudah memperingatkan, berbahaya bagi kehidupan

demokrasi jika hak prerogatif ketua umum bisa mengintervensi langsung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan undang-undang dasar di partai.

**DENNY J.A.:**

Jika memang berbahaya, mengapa diberikan kepada Ibu Megawati?

**SOPHAN SOPHAN:**

Inilah, terkadang teman-teman kurang berpikir ke depan. Saya yakin keputusan itu diambil secara emosional.

**DENNY J.A.:**

Atau situasi yang memang menghendaki karena PDIP sangat rawan perpecahan sehingga dibutuhkan figur yang bisa merekatkan?

**SOPHAN SOPHAN:**

Tidak. Perpecahan terjadi karena tidak adanya komunikasi antara pimpinan dengan kader di bawah. Saya mengambil contoh pemilihan kepala daerah. Secara anggaran rumah tangga, calon harus ditentukan melalui rapat kerja daerah khusus. Sebenarnya kalau pimpinan parrai menghendaki orang PDIP mundur, sampaikan secara baik-baik jika memang konstelasi negara dan politik belum memungkinkan untuk itu.

**DENNY J.A.:**

Kebijakannya rasional, tetapi tidak dikomunikasikan secara baik begitu?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Benar. Mereka disurub bersandiwara melakukan rapar kerja daerah khusus untuk memilih calon, tetapi setelah terpilih lalu dicuekin. Ini menyakitkan kader di bawah dan membuat malu yang luar biasa.

**DENNY J.A.:**

Pendengar Delta FM, anda mendengar Bung Sophan Sophian, tokoh yang dianggap mempunyai moral yang tinggi di PDIP, dan bergerak berdasarkan prinsip. Menurut dia, kasus yang muncul di PDIP karena kurangnya komunikasi politik, di samping peran kerua umum partai yang terlalu besar untuk ukuran partai modern.

Bung Ray mengatakan PDIP masih besar sehingga calon legislatif mengetahui ada banyak nomor jadi yang bisa diperebutkan di situ. Semakin besar sebuah partai semakin rentan konflik. Bung Sophan Sophian juga mengatakan karena terlalu besarnya hak prerogatif ketua umum dan kurangnya kemampuan komunikasi politik menjadikan PDIP rentan dengan konflik internal.

Kembali kepada Bung Ray Rangkuti. Bagaimana bung ?

**RAY RANGKUTI :**

Saya setuju pernyataan Bung Sophan. Sebetulnya tidak hanya menimpa PDIP, tetapi juga partai-partai politik lain. Mekanisme pemilihan calon legislatif tidak transparan dan demokratis,

meskipun jelas undang-undang mengamanatkan, setiap partai politik yang melakukan pencalegan, proses rekrutmennya harus demokratis dan transparan.

**DENNY J A. :**

Ada pemilu internal di masing-masing partai begitu ?

**RAY RANGKUTI :**

Iya seperti itu. Dan pernyataan Bung Sophan menegaskan pemilu internal itu tidak demokratis dan transparan di lingkungan PDIP.

**DENNY J A. :**

Baik, kita cek ke Bung Sophan. Halo bung. Bung Ray mengatakan di PDIP tidak berlaku pemilu internal dalam menyusun caleg-caleg itu. Bagaimana menurut anda ?

**SOPHAN SOPHAN :**

Pencalegan di PDIP melalui mekanisme rapat kerja daerah. Saya pernah dihubungi, berdasarkan rapat kerja daerah DKI saya dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Artinya secara demokrasik organisatoris sudah dilakukan, tetapi semua keputusan akan diputus ulang oleh DPP. Keputusan DPP inilah yang tidak transparan.

**DENNY J.A.:**

Jadi ada banyak kasus DPP menyusun ulang susunan caleg yang telah dibuat di daerah

**SOPHAN SOPHIAN:**

Betul. Karena adanya hak prerogatif ketua umum.

**DENNY J.A.:**

Akan dibentuk Dewan Penyelamat Partai. Anda ditunjuk sebagai ketuanya. Bagaimana menurut anda?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Ada hal yang tidak benar. Ada serarus anggota yang kurang berkenan dengan cara-cara DPP menetapkan calon anggota legislstatif. Memang mereka berkumpul, berbicara, melakukan analisis, dan sebagainya. Dan ingin menyelamatkan partai atau mengembalikan fungsi partai sebagaimana mesrinya. Mereka menemui saya, tetapi saya mengatakan tidak mempunyai wewenang apa-apa. Saya tidak mempunyai kompetensi untuk bergabung dengan mereka.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda apakah diperlukan sebuah dewan penyelamat partai?

**SOPHAN SOPHIAN:**

Tergantung situasi dan kondisj partai. PDIP terlalu banyak melakukan hal yang keluar darl komitmen. Diperlukan pemikiran ulang untuk mengembalikan ke komitmen awal.

**DENNY J.A.:**

PDIP harus kembali ke khittah bung?

**SOPHAN SOPHAN:**

Benar. Apa khittah-nya? PDIP adalah partai rakyat, berjuang menegakkan demokrasi melalui jalur hukum.

**DENNY J.A. :**

Dewan Penyelamat yang akan mengembalikan PDIP melalui khittah, menurut anda sebaiknya di dalam struktur atau di luar struktur partai?

**SOPHAN SOPHAN :**

Di dalam mekanisme partai tidak ada yang disebut dewan penyelamat partai. Bukan struktur resmi melainkan sekumpulan orang yang ingin meluruskan rd I partai. Menurut saya ini wajar saja terjadi dalam sebuah organisasi yang demokratis.

**DENNY J.A:**

Jika ada sekelompok orang yang anda hormati seperti Abdul Madjid, Abdul Gani, merasa perlu membentuk dewan ini dan meminta anda yang memimpin ?

**SOPHAN SOPHAN :**

Saya harus melihat apakah badan ini benar-benar dibentuk untuk menyelamatkan partai atau karena rasa kecewa ? Harus dibedakan. Kalau untuk menyelamatkan partai, saya dan teman-teman sudah melakukan kritik yang cukup keras kepada partai, bahkan sudah mengirim surat secara resmi, semacam surat mosi tidak percaya.



**DENNY J.A. :**

Anda masih anggota PDIP ?

**SOPHAN SOPHIAN :**

Masih. Saya turut mendirikan partai mi. Saya tidak mungkin meninggalkannya.

**DENNY J.A.:**

Secara obyektif, menurut anda konflik internal paling terasa adalah di PDIP bung ?

**SOPHAN SOPHIAN :**

Konflik tidak hanya terjadi di PDIP, melainkan di seluruh partai. Apa penyebabnya, bisa dikatakan sebagai bagian dari kerusakan moral bangsa.

**DENNY J.A.:**

Ok bung Sophan Sophian terima kasih atas yang perspektif yang diberikan kepada publik yang ingin mengetahui mengapa konflik lebih menonjol di PDIP Kembali ke Bung Ray. Bagaimana anda mendengar komentar dari Bung Sophan Sophian?

**RAY RANGKUTI:**

Dari penjelasan Bung Sophan, di tingkat bawah proses rekrutmen terjadi secara demokratis dan transparan. Tetapi begitu sampai di tingkat DPP semuanya mentah karena harus melalui keputusarian DPP yang otonom dan top-down. DPP pun masih dikembalikan lagi

kepada hak prerogatif ketua umum partai. Menurut saya hal ini tidak demokratis.

Ada masalah teknis penyampaian nama-nama calon anggota legislatif kepada KPU. Sejuahmana calon anggota legislatif mengenal dan mengetahui awal posisi mereka di setiap pencalegan yang telah dilakukan sebelum diserahkan kepada KPU. Dan sejuahmana mereka yang telah ditetapkan oleh DPP masing-masing mengetahui proses revisi yang dilakukan oleh DPP partai ketika terjadi proses revisi di tingkat KPU. Hal yang tidak diketahui secara pasti, karena penyerahan berkas-berkas dari partai ke KPU adalah hak mutlak DPP. Ada beberapa kandidat yang tidak mengetahui calon dan nomor berapa, tetapi mengetahui kalau dia dicalonkan.

#### **DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada. Hal ini segmen kita yang terakhir, dan seperti biasa kita selalu memberikan harapan, rekomendasi, solusi yang bisa membuka masa depan kita lebih baik.

Kembali kepada Bung Ray. Enam puluh hari lagi pemilu nasional akan dilaksanakan. Dari semua konflik internal yang ada menurut anda, what should be done, apa yang masih bisa kita kerjakan agar pemilu nanti menjadi lebih baik?

#### **RAY RANGKUTI :**

Tiga hal. Pertama, partai politik harus mengoptimalkan waktu untuk mensosialisasikan kandidat mereka dan kita berharap mereka tidak terjebak model kampanye yang hanya mencoblos tanda gambar. Selain tidak menguntungkan internal partai

politik seperti di PD1P yang menimbulkan konflik, secara umum kampanye itu tiadak menumbuhkan kesadaran pemilih untuk lebih bertanggung jawab mempergunakan hak pilih mereka, yaitu untuk memilih para kandidat. Ini erat kaitannya dengan keinginan kita untuk mendesain sebuah pemilu di mana antara para pemilih dengan wakil-wakil mereka terjadi semacam kontrak politik untuk lima tahun ke depan.

Kedua, soal KPU. Dalam ketentuan pasal undang-undang disebutkan dua bulan sebelum pelaksanaan pemilu, KPU harus sudah menetapkan calon legislatif dan mengumumkannya kepada masyarakat. Kalau tanggal 5 April 2004 kira melakukan pemilu, berarti penetapannya harus tanggal 4 Februari.

**DENNY J.A. :**

Jika tidak ada pengumuman dari KPU, KPU bisa dianggap melanggar undang-undang?

**RAY RANGKUTI :**

Jelas, karena melebihi persyaratan undang-undang. Tetapi menurut saya sangat penting mengingat batas waktu yang sangat singkat untuk memperkarakan para calon legislatif. Dan yang lebih penting, KPU tidak memberikan batas waktu kepada calon legislatif untuk mensosialisasikan dirinya sendiri. Sebetulnya tanggung jawab KPU sangat besar. Ini keretanya partai politik supaya dikenal oleh masyarakat, agar caleg-caleg dikenal masyarakat dan yang paling penting juga agar masyarakat memiliki waktu untuk menguji kandidat mereka. Kalau tidak, maka model sosialisasi mencoblos tanda gambar saja yang akan marak tahun 2004 ini.

**DENNY J.A. :**

Pertama tugas dari partai, kedua KPU dan ketiga ?

**RAY RANGKUTI:**

Ketiga dari sisi Masyarakat. Masyarakat jangan terjebak kepentingan sesaat. Artinya hanya memilih partai politik karena implikasinya sangat besar.

**DENNY J.A. :**

Ok bung sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan SMS dulu. Dari Adrian yang mengatakan, “Sebenarnya bukan konflik internal partai yang lebih menonjol di PDIP, tapi motif yang ingin menjadikan PDIP menjadi partai yang bersih”. Kedua, dari Bung Hans yang mengatakan, “PDIP seperti kapal penyeberangan, dipenuhi oleh penumpang yang mempunyai tujuan berbeda-beda dengan nahkoda yang tidak punya teadershzw”. Ketiga, yang lebih optimis dari Bung Yudi mengatakan, “Biarkan saja proses pendewasaan partai yang nanti akan beres sendiri lima tahun lagi”. Ada SMS lain mengatakan, “Begitulah kalau partai yang masih menguliskan orang tanpa melihat kemampuannya mengelola organisasi”. Bung Hari di Bogor mengatakan, “PDIP rakut kalah karena tidak mempunyai program untuk rakyat dan calon legislatifnya banyak yang mementingkan dirinya sendiri”. Ada lagi yang mengatakan, “Ada tiga hal, rebutan rejeki, peruk jadi ratu dan ada pacar atau partai baru. Tetapi tampaknya dua hal pertama menjadi biangnya, karena mereka menjadi rakus dan tidak layak menjadi politikus”. SMS terakhir berbunyi, “Yang penting niatkan untuk menjadikan PDIP sebagai partai yang berwibawa”.

Itulah opini publik lewat SMS. Kembali ke Bung Ray. Enam puluh hari menjelang pemilu, masih adakah harapan bagi partai-partai lain termasuk PDIP untuk menyelesaikan konflik internal partai ? Karena setelah 5 April mungkin akan muncul konflik berikutnya, konflik antar partai misalnya.

### **RAY RANGKUTI:**

Betul. Begitu KPU mengumumkan caleg-caleg kepada publik, dengan sendirinya ada kesempatan bagi caleg-caleg tersebut untuk memperkenalkan kepada publik. Walaupun kemauan partai politik hanya mengampanyekan partainya, tidak ada masalah karena banyak calon legislatif yang mengampanyekan dirinya tidak diintervensi oleh partai-partai. Mengapa ? Karena caleg akan berkampanye dengan dana sendiri. Artinya dia mempunyai kemampuan untuk lebih menonjolkan diri daripada partainya.

### **DENNY J.A. :**

Terima kasih Bung Ray Rangkuti, sudah satu jam bersama kita. Para pendengar Delta FM, demikianlah diskusi panjang kita mengenai konflik internal parpol menjelang pemilu, dan mengapa konflik lebih menonjol di PDIP, partai pemenang pemilu 1999. Banyak poin yang sudah kita dapatkan dari Bung Ray dan Bung Sophan. Tentang pentingnya mekanisme internal partai untuk menyusun calon legislatif dan juga pentingnya komunikasi politik terutama dari figur seperti Ibu Megawati yang mempunyai hak prerogatif yang besar di partainya. Lima April 2004 nanti kita akan memasuki hari pencoblosan, dan 11 Maret hari kampanye. Mungkin akan terjadi perubahan situasi. Dan konflik internal partai seperti yang marak sekarang ini akan menuju konflik antar pengikut partai pada 11 Maret nanti.

Sampai jumpa lagi pada “Dialog Aktual” berikutnya bersama saya Denny J.A. dengan topik yang aktual lainnya.

## **KONFLIK INTERNAL PARTAI SOAL CALON ANGGOTA DPR**

Tanggal: 14 Januari 2004

Host: Denny J.A.

Narasumber: Hadar Gumay (CETRO), Anis Matta (Sekjen PKS),  
Nurul Arifin (Caleg Golkar)

Proses penyusunan daftar calon legislatif(caleg) di berbagai palpol menyulut konflik intemal yang serius menjelang pemilu 2004. Di berbagai daerah, banyak kantor cabang parpol diblokade oleh kademya sendiri yang kecewa, protes dan tidak puas atas susunan caleg yang secara sepihak ditentukan oleh pimpinan pusat. Pimpinan pusat meletakkan nama-nama artis atau tokoh eksternal non-kader dalam daftar nomor jadi caleg, dengan mengusur keberadaan kader-kader terbaik dan berjasa dalam pengembangan parpol di daerah. Tidak ada mekanisme yang transparans dan partisipatif dalam proses seleksi dan perankingan caleg. Apakah aspek kualitas dan loyalitas yang dikedepankan? Atau jangan-jangan hanya aspek popularitas? Belum lagi jika di pertimbangkan banyaknya caleg yang bermasalah. Harlan Media Indonesia pada satu edisinya menyebutkan ada sekitar 20 persen calegyangmemalsukan ijazah. Lalu ada caleg politisi busuk, dan

juga adalah Inasalah daftar caleg yang tidak memenuhi quota caleg perempuan ,30 persen. Dengan kontestasi yang seperti ini, apakah kita masih bisa optimis pemilu 2004 akan melahirkan DPR yang lebih berkualitas ?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama anda yang berada di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar ? Kembali dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya, Denny J.A. Kali mi kita akan angkat topik yang hot minggu mi, “Konflik Intemal Partai Soal Calon Anggota DPR”. Akankah DPR hasil pemilu 2004 nanti lebih baik? Bersama kita hadir seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya, Bung Hadar Gumay darl CETRO. Selamat pagi Bung, apa kabar?

**HADAR GUMAY:**

Selamat pagi Bung Denny. Kabar baik.

**DENNY J.A.:**

Seperti biasa sebelum diskusi akan saya sampaikan dulu backgroundnya. Di depan saya ada surar kabar Republika yang mcletakkan foro besar sekali tentang protes caleg PDIP. Diberitakan di sini banyak sekali kader daerah yang datang beramai-ramai ke pusar, mereka kecewa dan protes atas susunan caleg partai. Hal mi terjadi tidak hanya di PDP tetapi juga di berbagai partai yang lainnya. Mereka misalnya kecewa mengapa ada arris yang belum berkeringat untuk partai, tapi diletakkan di nomor urur yang lebih ringgi ketimbang pemimpin lokal parrai yang sudah truji clan berjasa bagi parrai. Merekajuga kecewa dengan banyaknya caleg



yang diimpur clan pusat di nomor jadi, mengalahkan akritis, tokoh, dan pemim pin lokal yang terbukti berjasa di daerah. Belum lagi terhitung banyaknya caleg yang bermasalah. Bahkan surat kabar Media Indonesia menyebutkan ada sekitar 20 persen caleg yang ada memalsukan ijazahnya. Ditambahkan lagi ada persoalan caleg politisi busuk dan daftar caleg yang tidak memenuhi quota caleg perempuan 30 persen. Apakah kita bisa optimis serelah pemilu 2004 kim akan mendapatkan DPR yang lebih baik?

Bersama kita Bung Hadar Gumay dari CETRO. Komentar umum dulu mengapa banyak sekali konflik intenal parpol mengenai penyusunan caleg.

#### **HADAR GUMAY:**

Pertama, semua konflik intenal parpoi itu menunjukkan bahwa parpol-parpol kita belum dewasa. Mereka belum memiliki arau menerapkan proses pencalonan yang demokratis, yang bisa diterima semua pengurus dan anggota. Kedua, konflik tersebut sangat terkait dengan sistem pemilu kita yang sangat mementingkan daftar urut calon. Hal yang dianggap paling penting adalah memastikan seseorang akan terpilih.

Ketiga, terkait dengan poin perta ma, elit parpol ingin sepenuhnya menguasai dan mengontrol para anggotanya yang menjadi walcil rakyat. Kedekatan atau dukungan dari masyarakat pemilih lebih dinomorduakan.

#### **DENNY JA.:**

Jadi anda lebih melihat faktor masih sentralistisnya parpol ?

**HADAR GUMAY :**

Ya, masih ada.

**DENNY J.A.:**

Ok, kita kembah ke nomor dua tadi, bahwa ada pertarungan nomor urut akibat desain politik yang agak salah. Bisa anda lebih detailkan lagi di mana masalah ini ada konsekuensi buruknya ?

**HADAR GUMAY :**

Kita kembali ke dalam sistem pemilihan, khususnya anggota DPR/ DPRD. Di dalam undang-undang dikatakan sistemnya proporsional dengan daftar calon terbuka. Akan tetapi di pasal-pasal lain, khususnya mengenai pencalonan, dikatakan calon diusulkan oleh parpol berdasarkan ranking atau nomor urut. Umumnya sistem terbuka itu tidak lagi mengenal nomor unit, jadi parpol hanya mencalonkan orang-orang terbaiknya. Nomor unit itu tidak ada, hanya nomor tetap yang ada. Tetapi itu hanya undian saja untuk mengidentifikasi calon, misalnya sesuai dengan abjad.

**DENNY J.A.:**

Seandainya siapa yang terpilih semata-mata ditentukan oleh pemilih, bukan oleh nomor urut, mungkin konflik parpol tidak sebesar sekarang ya?

**HADAR GUMAY:**

Saya kira begitu. Kalau caleg dinyatakan sebagai pemenang betulberul berdasarkan suara yang dia peroleh dari pendukung. Tetapi masalahnya sistem kita tidak demikian.

**DENNY J.A.:**

Ada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), misalnya 300.000, tetapi bila calon tersebut tidak memenuhi, maka suara itu jatuh ke parrai dan partai menjatuhkan pilihannya pada nomor urut tertinggi?

**HADAR GUMAY:**

Ya, beginilah. Partai yang menentukan, dan itu berdasarkan nomor urut.

**DENNY J.A.:**

Karena nomor urut mi sangat menenrukan, maka terjadilah perrarungan unruk memperebutkannya. Menurut anda seringkali terjadi kesalahan persepsi atau konflik kepentingan antara cut lokal dan elir pusat tentang siapa yang harus duduk di urutan tertinggi?

**HADAR GUMAY:**

Betul. Itu terkait dengan sistem masing-masing parpol dalam pencalonan mi. Saya memperhatikan, hampir keseluruhan parpol sangat mengandalkan keputusan orang-orarig tertentu saja, atau tingkatan pengurusan yang lebih tinggi. Jadi tidak menggunakan sebagian besar keseluruhan komponen-komponen parpol.

**DENNY J.A.:**

Banyak kisrah terjadinya justru di parpolparpol besar, mengapa? Apa karena parpol besar lcbih menarik perhatian pers?

**HADAR GUMAY :**

Saya kira kombinasi. Selain karena faktor pers, memang rentu kesempatan untuk menjadi anggota legislatif jauh lebih besar di partai-partai besar, walaupun saya tidak mengarahkan di partai kecil peluangnya tidak ada. Sehingga mereka ingin betul memberikan kursi atau urutan di atas itu.

**DENNY J.A. :**

Para pendengar Delta FM, tadi kita mendengar bagaimana kisruh caleg pada berbagai pascal, yang mungkin tidak benar-benar disebabkan oleh kepentingan tentang siapa yang berkualitas yang seharusnya dipilih arau diletakkan di nomor unit jadi. Tapi lebih karena masalah power dan kepentingan elit lokal dan elit pusat dalam berbagai partai besar.

Saya bacakan dulu, sudah ada SMS yang masuk. Pertama yang mengatakan, tanpa nama, "Wah, dari isunya sudah Kehormatan ditangkap bahwa DPR Indonesia yang akan datang akan lebih rusak."

Kedua, Rio di Senayan mengatakan, "Nomor urur kepala atau sepatu, sebenamya bukan masalah, karena rakyat langsung yang mencoblos nama atau foto caleg Kehormatan. Yang ribut pasti kader yang tidak punya massa dan tidak merakyat".

Ketiga Bung Heru di Bidakara mengatakan, " Bangsa ini tampaknya akan semakin terpuruk. Ada politisi busuk, ada caleg ijazah palsu, ada yang sakit jiwa. Bagaimana kalau negeri ini di-outsourcing-kan saja.,

Keempat tanpa nama mengatakan, “Menurut saya DPR/DPRD 2004 ini tak akan berbobot karena orang-orang kebanyakan bukan ahlinya, seperti para arris atau kyai.”

Bagaimana Bung Hadar, sedikit anda memberi komentar dulu ?

**HADAR GUMAY :**

Itu gambaran begitu kecewanya masyarakat kita karena banyak sekali calon yang berm asalah. Saya berharap caleg berm asalah bisa dipotong, konflik Intemal Partai Soal Calon Anggota DPR itu terlihat oleh penyelenggara pemilu langsung dipotong saja, tidak lagi masuk dalam daftar.

**DENNY J.A.:**

KPU mempunyai otoritas untuk mendiskualifikasi ?

**HADAR GUMAY:**

Kalau caleg secara jelas terbukti menggunakan ijazah palsu, atau sakit jiwa dengan keterangan surat dokter yang mengatakan demikian misalnya.

**DENNY J.A.:**

Untuk definisi politisi busuk, KPU agak susah bertindak ?

**HADAR GUMAY:**

Benar, itu betul-betui di tangan pemilih nantinya. Tetapi kalau nyata-nyata melanggar syarat-syarat yang ada dalam undang-undang biarpun keputusan KPU tentang pencalonan, KPU bisa

membatalkan lalu menolaknya. Jadi mengenai outsourcing saya kira tidak mungkin. Yang jelas semua anggota dewan harus WNI. Gagasan ini saya kira hanya ekspresi kekecewaan saja.

**DENNY J.A.:**

Tampaknya memang ada konflik yang semakin menganga antara DPP dengan elit lokal. Kita melihat pemerintahan sudah mulai terdesentralisasi, tetapi partai justru masih tersentralisasi. Bagaimana anda melihatnya ?

**HADAR GUMAY:**

Jelas sekali kalau kita melihat mekanisme internal parpol sebagian besar keputusan soal caleg diambil oleh sedikit pengurus di tingkat atas atau pusat. Dan kita ketahui ada parpol seperti PDIP, ketuanya mempunyai hak prerogatif untuk mencabut, menambah dan sebagainya, ini luar biasa. Jadi itu bukan standard demokrasi.

**DENNY J.A.:**

Ok, Sekarang ada telepon dari pendengar kita, BungAlwi di Medan. Halo selamat pagi.

**ALWI:**

Sebenarnya sedih melihat bangsa yang besar, kaya, dengan calon-calon legislatif yang tidak berbobot. Mereka motivasinya hanya untuk mencari uang. Ini menunjukkan krisis moral, mental, dan bangsa yang sudah begitu rerpuruk. Apalagi kira melihat caleg-caleg kadang tidak berbobot, bahkan ada, yang dari preman.

**DENNY J.A.:**

Anda pesimis dengan caleg DPR kita nanti ?

**ALWI:**

Sangat berat. Jarak sosial si miskin dan kaya semakin jauh. Mereka mengorbankan uang untuk menjadi caleg, jadi akan berpikir untuk mengembalikan uangnya.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana Bung Hadar mengomentari telepon ini ?

**HADAR GUMAY:**

Memang hampir keseluruhan parpol menerapkan sumbangan, syarat untuk mendaftar, juga perjanjian bahwa sebagian dari gaji anggota DPR disumbangkan ke partai, dan sebagainya. Dalam kaitan ini uang memang menjadi satu faktor. Akibatnya hanya mereka yang mempunyai modal -entah dari mana modal itu- yang bisa masuk daftar caleg. Padahal belum tentu kualitas mereka terjamin.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda melihat faktor uang juga menyebabkan konflik parpol?

**HADAR GUMAY:**

Saya kira itu faktor yang ikut menunjang konflik. Konflik Internal Partai Soal Calon Anggota DPR

**DENNY J.A.:**

Konflik antara pimpinan pusat dan lokal, mengenai nomor urut siapa yang berhak jadi, apakah ini terjadi pada semua partai atau partai tertentu saja ?

**HADAR GUMAY:**

Ini dialami sebagian besar parpol. 'Walaupun ada partai tertentu yang sudah sejak awal menerapkan sistem yang lebih demokratis, dalam arti keputusan betul-betui diserahkan kepada pengurus dan keanggotaan di tingkat bawah. Jadi ditingkat yang lebih tinggi tidak turut campur. Keputusan mereka hanya dalam membuat kriteria. Dan ini terjadi misalnya di Partai Keadilan Sejahtera, mereka ada pemilu internal, yang sudah dilakukan selama tiga bulan untuk waktu yang lalu.

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM, tadi kita sudah mendengar sendiri. Yang menyebabkan kisruh soal caleg karena ketika pemerintahan sudah mulai terdesentralisasi, banyak partai, terutama partai-partai besar, masih sangat sentralistis dan menyerahkannya kepada hak prerogatif ketua umum. Ini menyebabkan konflik internal berlarut-larut dan membuat gonjang-ganjing pemilu kita. Sebelum kembali ke Bung Hadar Gumay, kita jumpai dulu Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bung Anis Matta. Selamat pagi Bung Anis, apa kabar ?

**ANIS MATTA:**

Selamat pagi, alhamdulillah sehat



**DENNY J.A.:**

Komentar anda mengenai banyaknya konflik internal partai soal caleg?

**ANIS MATTA:**

Secara umum menunjukkan, parpol-parpol yang ada belum satu pun yang suatu mekanisme pencalonan yang transparan dan memberikan ruang partisipasi kepada semua pihak yang terlibat. Kalau di PKS ada mekanisme musyawarah yang memberikan ruang partisipasi kepada semua kader di tingkat bawah. Caleg kita terdiri dari dua unsur, unsur kader dan tokoh eksternal. Yang dari kader itu seluruhnya dipilih melalui mekanisme pemilihan internal di daerah masing-masing. Semua pimpinan ranting mengajukan daftar calon, kemudian daftar calon dilempar lagi ke bawah untuk mereka pilih.

**DENNY J.A.:**

Seandainya di ranting tidak terjadi kesepakatan mengenai siapa yang akan diajukan ke atas, bagaimana solusinya ?

**ANIS MATTA:**

Untuk DPD, urutannya ditentukan berdasarkan ranking suara yang dia peroleh. Untuk DPRD II ditentukan oleh DPW sedangkan untuk DPRD I ditentukan dulu oleh DPP kemudian untuk DPR pusat ditentukan oleh Panitia Nasional yang akan diratifikasi oleh Majelis Pertimbangan Partai.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana mekanisme dalam PKS sendiri untuk memasukkan tokoh eksternal?

**ANIS MATTA:**

Tokoh eksternal diusulkan DPD-DPD, sesuai dengan tingkatannya, baik untuk DPRD II, DPRD I, maupun DPR. Jadi kalau dia diusulkan oleh DPRD II, maka keputusannya ditetapkan oleh DPP, begitu seterusnya.

**DENNY J.A.:**

Dengan mekanisme ini apakah anda sudah membuat satu formula tokoh eksternal dan kader dalam daftar calon ? Selama ini tidak ada masalah ?

**ANIS MATTA:**

Selama ini belum ada masalah, karena komposisinya berimbang. Kemudian kita menentukan ranking unruk tokoh eksremai dan internal. Tergantung dari keputusan musyawarah berdasarkan tingkat pengaruh tokohnya. Misalnya kader intemal yang memenuhi suara tertinggi, ternyata popularitasnya kaiah dengan tokoh eksternal yang diusulkan. Maka kita mendahulukan tokoh eksternal itu. Misalnya di Sulsel, tmsil Linrung di urutan pertama. Karena tokoh-tokoh intemal yang diusulkan dari daerah itu secara kapasitas dan popularitas di bawah beliau.

**DENNY J.A.:**

Siapa yang mempunyai ukuran seorang tokoh lebih berpengaruh dari yang lain ?

**ANIS MATTA:**

Semuanya dipilih kader. Jadi urutannya, pertama diusulkan oleh DPP untuk DPR pusat. Setelah itu DPP menjanging semua informasi yang terkait dengan orang tersebut.

**DENNY J.A.:**

Untuk kasus PKS misalnya kader-kader eksternal untuk di urutan tertinggi ada berapa persen ? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan rekan-rekan kader di daerah ?

**ANIS MATTA:**

Kita tidak mempunyai jumlahnya, secara langsung ada yang di urutan 1,2, dan seterusnya. Thpi memang sangat besar. Kecemburuan tidak signifikans karena semua tokoh eksternal diusulkan oleh daerah masing-masing.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana Bung Hadar, anda melihat cara PKS mengantisipasi dan memberikan mekanisme dalam rangka menjanging tokoh eksremal?

**HADAR GUMAY:**

Yang pertama komponen-komponen partai dari tingkar bawah betul-betul dilibatkan. Kedua, saya memperkirakan proses seleksinya terbuka. Setiap elemen tahu mekanismenya seperti apa. Cuma saya ingin tahu juga, apakah ada uang pungut bagi calon ?

**ANIS MATTA:**

Tidak ada sama sekali.

**DENNY J.A.:**

Kita tahu kampanye ini mahal sekali. Bagaimana cara PKS mengumpulkan dana, bukankah sumbangan dari anggota sangat kecil sekali ?

**ANIS MATTA:**

Jadi setelah caleg seluruhnya dipilih dan dijelaskan urutannya, biasanya kita memberikan kesempatan komplain. Karena boleh jadi ada informasi tentang orang tertentu yang tidak diketahui DPP. Misalnya-untuk caleg DKI Jakarta diberikan kesempatan komplain selama dua minggu. Hasil komplain ini bisa berupa pemberitahuan lisan dan seterusnya tentang orang ini.

**DENNY J.A.:**

Apakah pernah terjadi komplain yang bisa mengubah caleg ?

**ANIS MATTA:**

Ada, misalnya ada caleg I DKI Jakarta yang tadinya punya nomor urut 1 untuk DPRD, akhirnya turun menjadi nomor 3 karena ada sepuluh komplain yang masuk tentang dia. Ada juga yang dikomplain, tetapi setelah diklarifikasi kembali ternyata komplainnya tidak benar.

**DENNY J.A.:**

Terima kasih banyak Bung Anis Matta. Kira mendapatkan banyak sekali perspektif dari anda, bagaimana sebuah partai membuat mekanisme internal, agar tidak terjadi konflik internal partai mengenai siapa yang panras di urutan atas.

Ok kita sudah terhubung dengan Mbak Nurul Arifin. Selamat pagi mbak, apa kabar ?

**NURUL ARIFIN:**

Selamat pagi, alhamdulillah balk.

**DENNY J.A.:**

Anda saat ini masih caleg ya?

**NURUL ARIFIN:**

Ya, masih caleg. Di daerah Karawang Purwakarta, nomor urut tiga.

**DENNY J.A.:**

Apakah ini nomor jadi ?

**NURUL ARIFIN:**

Mudah-mudahan. Kalau menurut saya ini nomor kritis. Jadi kalau saya tidak berjuang secara maksimal, bisa saja saya tidak akan memenuhi BPP.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana anda menilai terjadinya banyak sekali konflik internal mengenai siapa seharusnya yang menempati caleg nomor 1,2, dan seterusnya ?

**NURUL ARIFIN:**

Setiap orang merasa berhak nomor 1, 2, dan seterusnya. Kalau yang utama adalah penilaian mengenai loyalitas, perlu ditanyakan seberapa besar loyalitas itu, kepada siapa diberikan, dan apakah diukur dari kontribusi program atau materi ? Tetapi ketika saya bertemu dengan orang nomor satu di atas saya -memang orang tersebut sudah lumayan- dia hanya ingin sekali lagi di DPR. Saya tidak tahu mengapa dia ingin sekali lagi, karena dia sudah dua periode di DPR.

**DENNY J.A.:**

Anda dulunya bukan aktivis Golkar, apakah anda merasa ada tantangan yang besar sebelum anda masuk ?

**NURUL ARIFIN:**

Oh jelas, ada pro dan kontra, itu biasa. Karena mereka bilang popularitas bukan segalanya. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah keahlian, dan yang ketiga baru popularitas. Dan sebetulnya saya pun tidak mengandalkan popularitas saja. Jadi popularitas sebuah kebetulan, meskipun aspek positifnya banyak juga.

**DENNY J.A.:**

Ada kritik yang mengatakan, ada artis yang dimasukkan dalam caleg dan diletakkan di atas nomor saya. Sementara saya ini kader partai yang sudah berkeringat untuk partai. Bagaimana anda menanggapinya ?

**NURUL ARIFIN:**

Ya, ini juga yang terjadi pada saya. Tetapi pimpinan partai mengatakan bahwa rekrutmen dilakukan tidak hanya dari kader-kader. Boleh juga dari para tokoh nasional atau tokoh-tokoh di luar partai dan dilihat kuantitasnya. Saya juga menyadari kalau memang banyak artis-artis yang menggunakan popularitasnya tanpa kualitas.

Belum teruji secara publik apa yang akan dilakukan atau diberikan kepada masyarakat. Bahkan untuk programnya pun belum terdengar.

**DENNY J.A.:**

Kami pernah mendengar anda sempat kecewa terhadap partai karena nomor urutnya tidak terlalu tinggi ?

**NURUL ARIFIN:**

Ya, tetapi kemudian saya harus lebih realistis, bahwa perjuangan saya bukan pada nomor. Dan saya pun akan berjuang terus walaupun tidak dapat. Tapi kemudian yang membuat kecewa ketika ada artis-artis lain yang tidak membuat program tetapi dapat nomor jadi.

Saya menghormati sekali kader-kader partai yang merangkak dari bawah, kemudian tidak diakomodir dengan baik. Loyalitasnya tinggi, tapi mengapa tidak mendapat nomor jadi.

**DENNY J.A.:**

Mungkin Bung Hadar mau mengajukan pertanyaan kepada Mbak Nurul ?

**HADAR GUMAY:**

Saya ingin tahu, kira-kira faktor apa saja yang membuat Mbak Nurul dipilih untuk dicalonkan oleh Golkar ?

**NURUL ARIFIN:**

Saya tidak tahu penilaian obyektifnya seperti apa. Tapi ketika kami dipromosikan atau dicalonkan sebagai kandidat yang potensial sebagai caleg, kami waktu itu maju sekitar 10 orang, kemudian kami mempresentasikan sedikit program dan alasan-alasan mengapa kami sampai lolos menjadi caleg yang potensial. Akhimya mungkin penilaian-penilaian tersebut yang dilakukan oleh partai, yang akhimya melamar orang-orang' yang dijual' itu, mungkin istilahnya begitu.

**HADAR GUMAY:**

Tidakkah Mbak Nurul punya dokumen bahwa Golkar mempunyai kriteria calegnya?



**NURUL ARIFIN:**

Pertama adalah komitmen, kedua loyalitas, dan ketiga popularitas. Jadi komitmen yang saya pegang adalah komitmen ke masyarakat.

**DENNY J.A.:**

Ok Nurul, terima kasih banyak atas pandangnya. Semoga anda terpilih dan menjadi wakil artis yang memberikan kontribusi cukup besar bagi DPR 2004 nanti.

**NURULARIFIN:**

Ok, terima kasih banyak. Insya Allah

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM, kita mendengar sendiri berbagai pandangan dari perspektif yang berbeda. Mulai dari orang partai dan juga caleg, mengenai kisruh tentang caleg. Tampaknya memang PKS memberikan satu mekanisme tersendiri, dengan melakukan mekanisme inremal terlebih dahulu sehingga calon yang tersusun itu merupakan kesepakatan dari partai, kader dan pemimpin yang lebih luas. Dan ini mengurangi konflik-konflik yang mungkin terjadi.

**HADAR GUMAY:**

Dan ada mekanisme kontrol, ada uji intenal, serta uji publik. Saya kira itu yang juga menjadi faktor mengapa kekisruhan tidak ada pada PKS. Dan ini tidak ada di dalam proses pencalonan yang terbuka di KPU kita. Di mana dalam pemilu sebelumnya ada daftar calon sementara yang diuji-publikkan dan sekarang tidak ada.

**DENNYJ.A.:**

Sebelum kita kembali diskusi dengan Bung Hadar Gumay saya bacakan dulu SMS yang masuk. Pertama dari Prasetyo di Tangerang, dia mengatakan, “Keinginan menjadi anggota legislatif itu lebih karena kekayaan sehingga si caleg itu lebih didasari masalah uang. Dalam masalah uang mana ada yang mengalah.”

Kedua Bung Amal Al-Gozali mengatakan, “Politik itu akhimya yang dihitung jumlah kepala, bukan isi kepala.”

Ketiga Ibu Yati di Depok mengatakan, “Siapa pun mereka yang duduk di dewan kalau masih percaya pada Tirhan pasti kerjanya benar dan baik.” Benar sekali Ibu Yati, tapi masalahnya sulit sekali memilih caleg yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Banyak pihak mengklaim percaya kepada Tuhan, tetapi tindakannya justru bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan juga dari Muammar di Gorontalo mengatakan, “Kisruh itu sah-sah saja yang penting penyelesaiannya, karena semua ini dalam rangka proses demokrasi.”

Kembali lagi ke Anda Bung Hadar, ada poin yang bagus sekali dari Bung Anis Matta, bahwa sebelum caleg PKS diresmikan, ada uji publik kepada para caleg sebagai masukan. Mungkin ada 1,2,3 atau banyak caleg yang cacat atau perlu diganti atau perlu diubah nomor urutnya. Bagaimana menurut anda?

**HADAR GUMAY:**

Saya kira ini mekanisme yang penting. Dalam proses demokrasi memang harus ada koreksi yang terus menerus. Yang hilang dalam proses pencalonan versi KPU adalah proses uji publik tersebut. Dari kalangan parpol, kira baru mendengar baru PKS yang melakukannya.

Kita belum mendengar parpol yang lain melakukannya. Harusnya KPU melakukan juga. Jadi begitu mereka menerima nomor urut atau pendaftaran dari setiap parpol, mereka mengumumkan seperti adanya, dan dalam jangka waktu 2 minggu misalnya, masyarakat dipersilahkan memberikan masukan.

**DENNY J.A.:**

Mengapa KPU tidak melakukannya ? Apakah KPU merasa jika uji publik ini dibuat justru akan bermasalah dengan berbagai parpol yang mengajukan para caleg itu ?

**HADAR GUMAY:**

Saya kira ada faktor itu juga. Jadi terkait dengan mendesaknya waktu, juga karena beban kerja, karena mereka akan kerepotan melayani semua masukan. Tapi uji publik tetap sangat penting, sehingga kualitas tidak bisa terabaikan gara-gara berkurangnya tahapan ini.

Pada pemilu 1999 sebenarnya sudah dilakukan uji publik, harusnya sekarang juga dilakukan.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Hadar, mungkin ada yang ingin dikatakan kepada pendengar sebelum kita mengakhiri diskusi ?

**HADAR GUMAY:**

Saya sangat respek pada SMS yang masuk, saya kira ini pencerahan. Inilah yang ingin saya angkat. Marilah kita melihat bahwa proses pencalonan caleg merupakan proses yang sangat

penting bagi kita sebagai pemilih, juga ada aspek pendidikan politik bagi calon pemilih kita. Jadi kita harus mengikutinya dengan seksama, jangan hanya melihat bahwa pemilu nanti hanya mencoblosnya saja. Kita harus melihat partai-partai yang ribut-ribut soal caleg, caleg yang pakai ijazah palsu, caleg yang bermasalah, dan seterusnya. Ini harus menjadi bahan pegangan untuk memilih. Termasuk partai-partai yang kurang kuota perempuannya misalnya, harus menjadi pertimbangan publik dalam memilih.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Hadar Gumay dari CETRO, terima kasih atas waktu anda untuk membahas berbagai isu-isu penting menyangkut calon legislatif. Kita melihat kantor beberapa parpol di daerah digembok oleh kademya sendiri yang kecewa, protes dan tidak puas atas susunan caleg yang secara sepihak dKehormatanmuskan oleh DPP atau pimpinan partai pusat. Hal baik yang telah kita peroleh dari diskusi tadi adalah kita mendapatkan satu insight, bahwa seharusnya memang ada pemilu intenal dulu di masing-masing partai untuk menyusun caleg. Tidak hanya mengurangi jumlah konflik yang muncul, tetapi juga partai akan mengajukan putra-putri terbaik dari partainya masing-masing. Yang kedua juga perlunya uji publik bagi calon-calon itu sebelum diresmikan. Juga KPU seharusnya meletakkan rahapan uji publik ini sebagai tahapan yang penting, supaya sebelum politisi-politisi bertarung, mereka sudah diuji publik, dan dikukuhkan pencalonannya. Hanya dengan cara ini mekanisme yang paling rasional dan sistematis bisa dilakukan kontrol, agar pemilihan DPR 2004 benar-benar menjadi momentum sebuah reform pemerintahan yang sebenarnya.

Para pendengar Delta FM, sampai jumpa lagi bersama saya Denny J.A dalam “DialogAktual” Rabu depan dengan isu yang hot di minggu itu.

## KONFLIK INTERNAL PDIP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

Tanggal: 30 Juli 2003

Host: DennyJ.A.

Narasumber: Indra J. Piliang (Peneliti CSIS)

Dalam perhembangannya, isu pemilihan gubernur banyak dikaitkan dengan pertarungan menuju pemilihan presiden 2004. Kemenangan pemilihan gubernur dianggap sebagai jalan yang strategis untuk memenangkan perebutan sward dalam proses pemilihan presiden di propinsi bersangkutan. Tetapi justru di sinilah hemtt dian timbul masalah pelik. Seringkali skenario dari pimpinan pttat sebuah partai berbeda dengan skenario pimpinan partai di daerah tempat pemilihan gubernur berlangsung. Seperti yang terjadi dalam tubuh PDIP dalam pemilihan Guberrur Lampung, Jawa Tbngh dan beberapa propinsi yang lain. Pimpinan Pusat PDIP mengajukan kandidatnya sendiri yang notabene berlatar-belakang militer. Sementara pimpinan daerah cenderung memajukan kader internal yang sudah menjabat sebagai pimpinan DPD partai atau menjabat sebagai pimpinan DPRD. Lalu terjadi berbagai peristiwa menarik: tiba-tiba pimpinan pusat memerintahkan kader di daerah

tuntut melawan kadernya sendiri, atau untuk menafikan kadernya sendiri di daerah. Sejauhmana implikasi dan komplikasi konflik internal PDIP ini terhadap partai bersangkutan, serta terhadap masa depan ekonomi daerah dan demokrasi?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makasar, Manado dan Medan. Kembali bersama saya, Denny J.A., dengan topik yang lagr hot”Konflik Intemal PDIP dalam Pemilihan Gubemur”, dengan tamu kita pagi ini Bung Indra J. Piliang. Selamat pagi bung ?

**INDRA J. PILIANG:**

Selamat pagi.

**DENNY J.A.:**

Sebelum ke Bung Indra, saya berikan dulu background dari masalah ini. Kita tahu bahwa isu pemilihan gubemur akan tampak lebih hot atau strategis jika dikaitkan dengan pertarungan menuju pemilihan presiden 2004. Dan kita tahu semua partai besar, termasuk PDIP ingin tokohnya ada yang terpilih menjadi presiden. Hal ini jauh lebih mudah jika terlebih dahulu mereka mampu merebut kursi gubemur. Nantinya gubemur terpilih inilah yang ditugaskan untuk mengamankan calon presiden partai di wilayahnya masing-masing. Tetapi justru di sinilah masalahnya, karena seringkali skenario pimpinan pusat PDIP berbeda dengan skenario pimpinan partai di daerah tempat pemilihan gubemur berlangsung. Misalnya di Lampung dan JawaTengah. Pimpinan pusat PDIP lebih strka memilih gubemur yang sudah menjabat terutama yang

memptnyati background militer, dengan satu asumsi mereka lebih berpengalaman dalam memimpin pemerintahan dan mempunyai kans untuk memellangkan pemilihan gubemur diwilayahnya. Sementara pimpinan partai di daerah ingin memajukan kademya sendiri, terutama jika kader itu sebelumnya sudah menjadi ketua DPRD atau pimpinan partai di daerah. Terjadilah situasi unik, tiba-tiba pimpinan pusat memerintahkan pimpinan di daerah untuk menafikan kademya sendiri di daerah. Ini terjadi di Lampung dan JawaTengah. Di Lampung, pimpinan pusat gagal karena yang menang adalah calon pilihan pengurus daerah. Namun di Jawa Tengah calon pilihan pimpinan pusat yang berhasil.

Apa implikasi konflik intemal PDIP ini rerhadap partai bersangkutan, serta terhadap masa depan otonomi daerah dan demokrasi. Ini topik kita kali ini.

Bung Indra, secara umum mengapa di berbagai propinsi pimpinan PDIP justru tidak mencalonkan kademya sendiri?

### **INDRA J. PILIANG:**

Karena di internal PDIP ada problem sumber daya manusia, sepperri yang selalu diungkapkan kalangan peringgi PDIP sendiri. Karena dalam beberapa pemilihan kepala daerah khususnya di tingkat kabupaten dan kota, kader-kader PDIP yang sudah terpilih dalam perkembangannya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah sehingga memunculkan sikap antipati dari publik.

### **DENNY J.A.:**

Kondisi yang sangat memprihatinkan di mana parrai terbesar justru kekurangan SDM.



## **INDRA J. PILIANG**

Ya, pertama karena dalam pemilu 1999, PDIP tidak menyangka akan memenangkan pemilu, sehingga siapa pun yang masuk ditempatkan pada posisi yang paling atas sehingga menyebabkan problem SDM tadi. Kedua memang menjelang pemilu 2004 terjadi semacam konsolidasi partai, bukan hanya PDIP, dengan cara menerapkan disiplin partai. Ketiga, hal ini semakin didukung disahkannya UU Susduk DPR, DPD, DPRD, serta MPR yang memberikan hak terhadap partai politik untuk melakukan recall. Dengan demikian posisi pimpinan partai semakin kuat. Mengapa di Bali akhirnya calon gubernur dari DPD PDIP mundur dan mendukung calon dari DPP PDIP ? Saya melihat lebih karena kekhawatiran untuk di-recall.

## **DENNY J.A.:**

Kita lihat dari segi SDM. Ada problem SDM di PDIP jika pimpinan partai mengajukan calon yang bukan kader, lebih karena mereka khawatir nanti jika kadernya yang terpilih tidak kompeten, ataukah mereka khawatir jika mengajukan kader yang tidak kompeten, mereka akan kalah dengan calon-calon lain ?

## **INDRA J. PILIANG:**

Saya kira lebih karena faktor yang pertama. Apabila yang terpilih tidak kompeten, muncul beberapa argumen dari petinggi PDIP. Misalnya pak Mardijo di JawaTengah. Pimpinan partai menganggap dia lebih cocok menjadi legislatif atau menjadi pimpinan partai di JawaTengah. Kalau mencalonkan diri menjadi gubernur, dan akhirnya menang, lalu siapa yang mengurus partai ? Begitu argumentasi pimpinan pusat.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda lebih karena kompetensi. iika nantinya mereka terpilih. Sementara banyak pihak mengatakan bahwa jika kader PDIP yang dimajukan, justru tidak akan terpilih karena akan dikalahkan calon-calon yang lebih kuat, misalnya dari segi money politics.

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira dengan kemenangan pak Mardijo kemarin di Jawa Tengah yang merupakan calon dari DPD PDIB demikian juga dengan kemenangan pak Imam Utomo di Jawa Timur, juga yang terjadi di Kalimantan Timur. Dari segi komposisi suara tidak ada masalah sebetulnya bagi PDIP untuk memenangkan kursi kepala pemerintahan daerah. Cuma, apakah kademya bagus atau tidak, didukung oleh publik apa tidak, akan mampu mengurus partai di daerah atau ridak ?

**DENNY J.A.:**

Di harian Kompas hari ini (30107103), pak Taufik Kiemas mengatakan bahwa PDIP lebih mendukung kader lain dengan tujuan jangka panjang dalam rangka terpeliharanya NKRI dan pluralisme di mana gubemur dari kalangan militer lebih berpengalaman untuk menjaga wilayah teritori tertentu. Anda setuju?

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira dikotomi sipil-militer sudah tidak cocok lagi. Karena mantan TNI sesungguhnya sudah menjadi masyarakat sipil. Terpilihnya kepala daerah dari kalangan militer juga belum tentu menjamin stabilitas politik. Misalnya sala Jakarra, meskipun

sudah dipimpin figur militer, angka kriminalitas tetap tinggi dan membutuhkan partisipasi publik untuk memberantasnya. Tapi fenomena PDIP mencalonkan kepala daerah dari kalangan militer menjadi menarik dalam rangka konsolidasi menjelang pemilu 2004. Yang paling dekat dengan ideologi nasionalismenya PDIP memang militer atau mantan militer yang patuh dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**DENNY J.A.:**

Berkaitan dengan kelembagaan partai di daerah, apakah ada efek yang signifikan dengan dikalahkannya kader PDIP sendiri dalam proses pemilihan gubernur di provinsi-provinsi strategis?

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira sangat tergantung pada partainya. Konflik dalam tubuh partai seperti PDIP tidak begitu berpengaruh terhadap loyalitas pemilih. Massa PDIP dikenal loyal, tipe pemilih tradisional, patriarkhis dan tidak mudah lari.

**DENNY J.A.:**

Kalau melihat style leadership PDIP di mana pimpinan pusat begitu determinan dalam menentukan siapa calon gubernur, apakah hal ini masih pas untuk era otonomi daerah?

**INDRA J. PILIANG:**

Menurut saya di sini justru letak masalahnya. Era otonomi daerah menuntut otonomi kepartaian, desentralisasi internal partai. Pengambilan keputusan di tingkat cabang, wilayah dan

ranting mestinya sudah didesentralisasikan. Karena orang-orang daerah yang tahu konstituennya dan masalah-masalah di tingkat lokal. Pimpinan nasional menurut UU Otda lebih banyak mengurus masalah-masalah pertahanan, hubungan luar negeri, APBN, masalah ketatanegaraan secara umum, dan bukan masalah-masalah lokal.

**DENNY J.A.:**

Orang pusat mempunyai argumen bahwa pusat sudah menyerahkan seluruh wewenang kepada daerah, kecuali isu-isu penring termasuk pemilihan gubernur. Mereka ingin pusat mempunyai hak veto dalam isu-isu yang dikecualikan ini.

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira yang menarik di PDIP adalah yang dipertaruhkan adaiah kursi seorang gubernur. Padahal fungsi seorang gubernur di era otonomi daerah tidak terlalu penring. Tidak signifikan I Gubernur bahkan tidak begitu dipatuhi lagi oleh bupati/walikota. Otonomi daerah memberikan kewenangan banyak pada tingkat II bukan tingkat propinsi. Jadi kalau PDIP merebur massa di tingkat propinsi dengan cara menekan kader-kademya sendiri, akan timbul masalah. Mestinya kader-kader dan isu-isu di tingkat kabupaten/kota yang harus dikuasai pimpinan pusat PDIP.

**DENNY J.A.:**

Jadi kalau perlu hak veto justru di daerah tingkatII ya?

**INDRA J. PILIANG:**

Iya, karena dalam perkembangannya ke depan kemungkinan besar fungsi gubernur hanya bersifat administratif.

**DENNY J.A.:**

Namun pimpinan pusat PDIP mempunyai pandangan bahwa gubernur yang ada sekarang masih mempunyai kekuatan untuk mobilisasi guna memenangkan partai di wilayah provinsi ?

**INDRA J. PILIANG:**

Itu kalau mengambil paradigma lama. Misalnya, ketika di Jawa Tengah dulu terjadi kuningisasi. Kalo sekarang hendak diadakan merahisasi, pasti tidak akan didukung DPRD, tidak akan didukung oleh partai-partai politik di Jawa Tengah. Kecuali di Jakarta, karena memang ibu kota negara, tidak ada DPRD tingkat II, yang ada DPRD tingkat I.

**DENNY J.A. :**

Jadi anda menganggap kesalahan strategi jika PDIP pusat terlalu konsentrasi untuk merebut kursi gubernur di berbagai provinsi?

**INDRA J. PILIANG:**

Betul, karena peran gubernur sudah tidak terlalu penting di zaman otonomi daerah, kecuali untuk Aceh, Papua dan Jakarta, karena otonominya di tingkat propinsi. Sementara daerah-daerah lain otonominya di tingkat kabupaten/kota. Yang banyak diributkan partai Golkar .justru itu.

**DENNY J.A.:**

Tapi di sisi lain anda melihat manufer PDIP pusat juga tidak banyak berpengaruh terhadap popularitas Megawati?

**INDRA J. PILIANG:**

Betul, karena massa ada di tingkat bawah, dan biasanya yang terlibat dalam proses perebutan kursi gubernur ini adalah elit-elit partai di tingkat lokal dan nasional. Secara keseluruhan masyarakat tidak melihat pilkada sebagai faktor penting bagi kehidupan mereka, asalkan secara nasional kebijakan partai melindungi kepentingan mereka. Misalnya, kasus 27 Juli, masih dianggap lebih penting bagi massa PDIP yang ada di Jakarta ketimbang pemilihan gubernur Suryoso. Ini yang tidak disadari pimpinan PDIP.

**DENNY J.A.:**

Lalu para petinggi PDIP mengatakan bahwa justru dengan tidak mendukung kader PDIP yang di daerah, menunjukkan bahwa PDIP tidak benar-benar ingin mengutamakan PDIB tapi lebih pada satu konsep nasional yang lebih besar?

**INDRA J. PILIANG:**

Kalau konsep nasional mestinya pemilihan presiden, bukan pemilihan gubernur. Kalau untuk kursi gubernur, sudah pasti PDIP mempunyai kepentingan, dalam arti menjaga konstituennya. Dengan kata lain, kontrol di tangan pimpinan pusat jauh lebih penting daripada kontrol di tangan pimpinan daerah.

**DENNY J.A.:**

Bung Indra, ada fenomena yang juga unik. Sebelum pemilihan gubernur, ada sejumlah anggota DPRD yang tiba-tiba dikarantina pengurus pusat di sebuah hotel. Katanya dalam rangka menghindari serangan fajar, dalam arti money politic.

**INDRA J. PILIANG:**

Money politic baunya sangat menyengat, dan selalu kita dengar informasinya. Tapi dalam konteks karantina anggota DPRD, menurut saya terjadi kebohongan publik. Karantina itu tidak mungkin, karena masih ada telepon, SMS, masih ada kurir yang bisa keluar-masuk.

**DENNY J.A.:**

Kabarnya SMS pun dihindari dengan cara meminta handphone para anggota DPRD itu. Akses internet dan telepon juga dijaga ketat. Sampai sebegitu jauh karantinanya?

**INDRA J. PILIANG:**

Iya, namun beberapa hari sebelum pemilihan atau sesudah pemilihan masih mungkin terjadi deal-deal tertentu. Karantina ini cuma sekadar konsumsi publik yang tidak berdampak pada pemilihan. PDIP kadang-kadang juga kehilangan suara satu atau dua orang. Atau partai lain seperti yang terjadi di Jawa Timur, PAN sudah menyatakan seluruh anggota PAN akan mendukung calon yang tidak terpilih. Kenyataannya yang dibotakin pertama kali di Jawa Timur adalah orang PAN. Bagaimana mungkin ada jaminan politik? Partai sudah menjamin, bahkan memba'at para kadernya, namun kenyataannya tetap berbeda.

**DENNY J.A.:**

Jadi bai'at pun bisa dilawan dengan money politic?

**INDRA J. PILIANG:**

Bukan money politic saya pikir, karena sebagai anggota DPRD mempunyai hak sebagai individu. Artinya fraksi menjadi ukuran nomor dua. Tapi mungkin ada perrimbangan-pertimbangan lain bahwa dengan mendukung calon yang kemungkinan besar akan menang, mereka akan mendapatkan sesuatu.

**DENNY J.A :**

Dan kalau melihat bentuknya, karantina anggota DPRD ini memang ekstrim sekali. Namun seberapa jauh hal ini berkorelasi dengan bentuk pemilihan gubernur oleh DPRD?

**INDRA J. PILIANG:**

Kalau partai sekarang merasa berhak menjaga dan mengendalikan orang dalam konteks pemilu 1999, karena menurut undang-undangnya, kendali memang di tangan partai. Namun kalau dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka, saya kira keterwakilan dari masyarakat terhadap anggota DPRD, jauh lebih kuat ketimbang hasil Pemilu 1999. Namun akan jauh lebih kuat lagi apabila kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sekalipun ada semacam money politic. Di mana-mana politik memang butuh uang, butuh kaos, spanduk, dan justru krrena itu distribusi uang "politik akan tersebar lebih merata ke publiik ketimbang hanya ke segelintir orang.



**DENNY J.A. :**

Betul. Kalau kita bandingkan dengan negara lain. Sebenarnya tidak ada masalah eksekutif dipilih oleh legislatif sebagaimana terjadi dalam sistem parlementer. Tetapi yang menjadi masalah di Indonesia adalah kultur money politic itu.

**INDRA J. PILIANG:**

Money politic di mana-mana ada. Kita pernah mendengar James Riyadi membantu Bill Clinton. Artinya yang ingin kita lihat sekarang adalah berapa jauh posisi jabatan DPRD atau kepala daerah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal-hal yang berbau politik uang susah dihindarkan. Bagaimanapun juga ini kenyataan, dan saya lihat dalam berbagai penelitian rakyat tidak begitu alergi terhadap korupsi. Publik Indonesia sudah terbiasa dengan korupsi, cuma jangan terlalu besar.

**DENNY J.A.:**

Sekarang untuk membuar efek money politic tidak terlalu besar ada dua pilihan. Pertama, pemilihan gubernur tercap oleh DPRD dengan pengawasan yang maksimal. Kedua, kita lakukan perubahan total di mana gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira pilihan kedua jauh akan menutup money politic daripada pilihan pertama DPRD. Dan nanti kalau gubernur, bupati dan walikota dipilih secara langsung, juga diusulkan oleh partai yang ada di daerah. Karena kepala daerah membutuhkan DPRD dalam penyusunan APBD, peraturan daerah, maka kepala daerah

harus didukung oleh partai. Mirip dengan pemilihan presiden kita sekarang.

**DENNY J.A.:**

Ok, menurut anda kira-kira kapan waktu yang paling ideal untuk proses pemilihan gubernur secara langsung?

**INDRA J. PILIANG:**

Saat undang-undangnya disahkan tahun 2004. Kalau di Aceh kan sudah. Menurut saya semestinya sekarang keluar semacam Perppu (Peraturan Pemcrintah Pengganti UU) unruk mengganrikan proses pemilihan kepala daerah di daerah-daerah sambilmenunggu undang- undang baru menyangkut pemilihan kepala daerah.

**DENNY J.A.:**

Ok, Bung Indra, sebelum kita lebih jauh membahas masalahnya, apakah melalui Perppu ataukah revisi UU Otonomi Daerah, kita akan lihat dulu misalnya apakah timing-nya dipilih secara langsung oleh ralqrat setelah presiden dipilih secara langsung atau sebelum presiden dipilih langsung.

Pendengar Delta FM, kembali bersama saya Denny J.A. daiam diaiog aktual tentang “Konflik Intemal PDIP Dalam Pemilihan Gubemur”. Bung Indra, kita sambut duii beberapa SMS dari pendengar yang menanyakan ‘Apakah tepat di era otonomi daerah sekarang ini ketua PDIP terlalu menggunakan hak prerogatifnya selaku ketua umum untuk menentukan kriteria gubernur?’

**INDRA J. PILIANG:**

Sulit menjawabnya dengan pasti. Karena yang terjadi sesungguhnya komunikasi politik antara pimpinan PDIP dengan daerah Kehormatan kurang. Hai ini mengagetkan juga. Karena kita tahu bahwa mbak Mega sering ke daerah-daerah, dan sebaliknya orang-orang PDIP daerah ke Jakarta. futinya mungkin ini yang mcnjadi dasar munculnya masalah sehingga kesannya tiba-tiba sa.ia terjadi konflik. Kedua, saya kira harus ada lembaga arbitrase di tubuh parrai-partai politik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut kesenjangan hubungan antara daerah dengan pusat, kesenjangan antara kader dengan pengurus. Karena lembaga seperti ini harr.rs independen di luar kepentingan ketua umum atau di luar kepentingan faksi-faksi yang bersaing dan harus dilakukan proses legalnya.

**DENNY J.A.:**

Jadi menarik kalau kita melihat konflik di daerah lebih kepada persoalan komunikasi politik antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Kalau menyangkut kebijakannya sendiri memang ada reason-nyakalau kita baca di Kompas. Seperti Pak Taufik Kiemas bilang bahwa kebijakan ini diambil lebih karena tujuan yang lebih jauh di luar kepentingan partai dan tampaknya idak di-share dengan pimpinan di daerah.

**INDRA J. PILIANG:**

Komunikasi politik jauh lebih gampang sekarang. Cuma persoalannya mengapa tiba-tiba publik dihadangkan dengan satu fragmen misalnya, “Mardijo menangis berangkulan”, “Pembakaran posko-posko PDIP”, “Pembakaran kartu anggota”. Ini menandakan bahwa konflik itu sudah dalam.

**DENNY J.A.:**

Terkesan kebijakan dari pusat terlalu mendadak dilakukan, tanpa disosialisasikan dalam waktu yang cukup di daerah.

**INDRA J. PILIANG:**

Iya karena pada akhinya Mardijo sendiri juga mengatakan : “Tolong jangan melakukan anarkhi, saya terima ini sebagai satu proses pemilihan yang demokratis”. Artinya dari sikap individu, dia sangat menghargai hasil pemilihan gubernur. Orang politik kalau sudah maju selangkah, dan tiba-tiba disuruh mundur, itu kan susah. Bagaimana dia mau bertahan sebagai seorang politisi yang tegar? Dan siapapun politisinya tidak akan mudah mundur kalau tidak mau dianggap publik sebagai orang yang tidak mempunyai sikap.

**DENNY J.A.:**

Kalau kita lihat Bung Indra, nampaknya ini memang kelemahan ibu Megawati sebagai seorang pemimpin partai, juga seorang presiden. Lemah dalam komunikasi politik.

**INDRA J. PILIANG:**

Iya. Kalau dulu itu ada wacana presiden butuh seorang juru bicara, presiden butuh komunikator bukan hanya sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Namun yang terjadi adalah presiden kita mempunyai komunikator tetapi di Lenteng Agung. Inikan salah dari segi aturan beenegara. Keliru sekali kalau seorang presiden dibela di Lenteng Agung, mestinya kan dibela di Istana Negara.

**DENNY J.A.:**

Di samping masalah komunikasi politik, ini lebih ke leadership seorang tokoh. Nah, masalah mekanisme internal partai sendiri misalnya. Seberapa harus kita memodifikasi hak prerogatif pemimpin partai supaya kebijakan partai lebih bottom up?

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira hak prerogatif itu harus dipotong. Tidak lagi menonjolkan urusan ketua umum, melainkan urusan tim. Dan tim ini bisa gabungan antara pusat dengan daerah. Karena kalau diserahkan kepada ketua umum sebuah partai politik, bagaimana kalau ketua umum ini tidak mempunyai informasi yang seimbang. Artinya untuk kapasitas seorang ketua umum seperti Megawati yang mempunyai banyak sekali pekerjaan di istana, tidak mungkin mempunyai informasi yang balance. Sehingga informasi terakhir yang diambil untuk membuat keputusan belum tentu tepat. Misalnya dia tidak mendukung Mardijo dan mendukung Mardiyanto juga akan menimbulkan resistensi dari partai politik lain.

**DENNY J.A.:**

Dan ini juga tergantung dari lingkaran terdekat Mega, yakni para pembisiknya sendiri akhirnya ?

**INDRA J. PILIANG:**

Iya, akhirnya Mega akan sangat tergantung dari para pembisiknya.

**DENNY J.A.:**

Sekarang pengalaman di partai politik lain, menurut pengetahuan anda apakah ketua umum partai-partai lain juga memiliki hak prerogatif sebagaimana di PDIP ?

**INDRA J. PILIANG:**

Partai lain seperti Golkar juga mengenal hak semacam itu, tapi tidak disampaikan secara eksplisit, artinya proses sudah berjaJan menurut mekanisme kepartaian. Seperrri PKB yang sering juga kita dengar, misalnya kasus bupati Sampang.

**DENNY J.A.:**

Sebelum anda lanjutkan, ini ada SMS dari Rio Jakarta. Dia setuju dengan Megawati karena memang kader PDIP tidak mampu secara SDM. Jadi demi kepentingan nasional, ibu Mega tidak harus memajukan kader PDIP sendiri tapi kader partai lain dalam rangka tujuan yang lebih besar.

**INDRA J. PILIANG:**

Saya kira itu yang menjadi alasan. Nah, ini salah satu bentuk simpati dari publik. Karena kita tidak tahu, apakah Mardijo memiliki prestasi yang sangat bagus untuk ralryat Jawa Timur. Untuk PDIP mungkin karena perannya sangat besar waktu kasus Mega Bintang bersama Mudrik, antara PPP dan PDI Mega tahun 1997. Tetapi untuk konstituen di Jawa Tengah, apakah Mardijo tepat. Jadi kemampuan di bidang politik belum tentu sama di bidang pemerintahan. Biasanya hal ini ditutupi oleh profesionalisme dari lingkungannya, artinya dia merekrut orang-orang expert untuk duduk di pemerintahan. Seorang politisi yang ditemani

orang-orang profesional. Tapi itu juga sangat bergantung pada pribadinya sendiri.

**DENNY J.A.:**

Menarik sekali Bung Indra, di era reformasi yang baru berumur empat tahun ini, kita melihat partai politik mengalami kegamangan. Disamping masalah SDM yang kurang, mekanisme internal partai juga perlu dimodifikasi berkaitan dengan hak recall dan kekuatan partai yang begitu besar. Tinggi sekarang bagaimana menciptakan mekanisme internal yang sangat demokratis, kalau bisa bersifat bottom up. Pemilihan gubernur sekarang ini belum menampilkan mekanisme yang demokratis, dan juga masih memiliki masalah komunikasi politik. Apa yang anda sarankan kepada PDIP supaya di masa mendatang dalam pemilihan gubernur di provinsi lain tidak terjadi masalah yang sama ?

**INDRA J. PILIANG:**

Proses penjadwalan dalam pemilihan gubernur, walikota atau bupati sudah semestinya dilakukan 2-3 bulan sesudah melakukan penjangkaran calon. Atau dibikin semacam konvensi di tingkat daerah. Kalau kita bicara konvensinya Partai Golkar atau PKS sudah cukup bagus menurut saya, tapi perlu diatur secara lebih panjang. Jangan tiba-tiba saja ketika pemilihan baru muncul surat pembatalan. Itu yang dianggap tidak demokratis dan tidak eris secara prosedural.

**DENNY J.A.:**

Baik Bung Indra dan pendengar Delta FM. Kita angkat masalah PDIP ini tidak dalam rangka menyerang PDIP atau membela PDIP

Murni karena kasusnya menarik untuk melihat perilaku partai di era awal reformasi. Kita melihat misalnya ada persoalan SDM yang membuat partai tidak mudah mengajukan kadernya sendiri, di samping juga persoalan mekanisme internal dalam pengambilan kebijakan di partai. Apalagi di era sekarang di mana partai memiliki hak recall, juga faktor kharisma ketua umum yang sangat besar, penting sekali partai mengembangkan mekanisme internal agar kebijakan yang diambil benar-benar demokratis dan bottom up. Semoga pemilihan gubernur yang kabarnya masih 10 kali lagi tahun 2004, tidak lagi diwamai berbagai kehebohan, apalagi kehebohan yang disebabkan kurangnya komunikasi politik antara pimpinan pusat dan pimpinan partai di daerah.

Sampai jumpa lagi dalam dialog aktual minggu depan bersama saya Denny J.A. dengan topik yang aktual berikutnya.



# KEMELUT PEMILIHAN GUBERNUR

Tanggal: 17 September 2003

Narasumber: Andi Malarangeng, Johermansyah Johan

Anggota DPRD Sumatera Selatan datang berbondong-bondong ke Depdagri dan mempertanyakan alasan Depdagri menunda atau membatalkan pelantikan gubernur Sumatera Selatan. Padahal secara resmi DPRD Sumatera Selatan sudah menetapkan gubernur baru dan menganggap pemilihannya sah. Apakah keputusan itu hanya masalah teknis belaka atau ada masalah lain? Sebelum ini, juga terjadi hal serupa dalam pemilihan Gubernur Lampung, Maluku Utara, juga Bali. Apakah ada standar ganda dalam kebijakan Mendagri atau Presiden Megawati dalam hal ini? Mengapa pelantikan gubernur dilahukan atau tidak diumumkan di suatu provinsi, tidak pernah jelas benar apa pertimbangan-pertimbangannya. Salah-satu penyebabnya karena undang-undang yang ada tidak secara detail dan operasional mengaturnya.

**DENNY J.A.:**

Jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” bersama saya DennyJ.A.. Kali ini dengan topik “Kemelut Pemilihan Gubernur”. Mengapa pemilihan gubener selalu heboh, seperti yang sekarang melanda Sumatera Selatan ? Kali ini tamu kita sangat istimewa, Dr. Andi Malarangeng, pakar otonomi daerah, pemimpin partai politik, dan juga alumni host dari acara ini. Selamat pagi Bung Andi.

**ANDI MALARANGENG:**

Selamat pagi, Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Terima kasih banyak atas kehadiran anda. Sebelum kira elaborasi bersama Bung Andi, saya berikan dulu background dari topik kita. Kemarin, berbondong-bondong anggota DPRD Sumarera Selatan datang kepada Mendagri dan mempertanyakan apa alasan pelantikan gubernur dibatalkan atau ditunda, padahal secara resmi DRPD Sumatera Selatan sudah menetapkannya dan menganggap pemilihannya sah. Apakah ini masalah teknis belaka atau ada masalah lain? Misalnya yang lebih politis, ada permainan politik yang mungkin juga bisa mengganggu citra presiden Megawati sendiri. Dan kita tahu sebelum Sumatera Selatan, juga terjadi kasus serupa dalam pemilihan Gubernur Lampung, Maiuku Utara, dan Bali. Apakah ada standar ganda dalam hal kebijakan Mendagri atau Presiden Megawati ? Atau ada hal lain yang tidak kita ketahui ?

**ANDI MALARANGENG:**

Jadi kalau kita sekarang melihat beberapa kali pelantikan gubernur ditunda, pelantikan guberur bermasalah, lalu muncul

bermacam-macam isu, biasanya politik uang dan kesalahan-kesalahan prosedur dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Tetapi yang menarik sebenarnya adalah pertanyaan orang, mengapa yang ini ditunda dan yang itu dilantik? Padahal persoalannya tidak kalah kalau kita bandingkan, misalnya dengan Lampung, yang gubernurnya juga ditunda pelantikannya karena yang bersangkutan menjalani persoalan-persoalan hukum. Di Bali ada persoalan juga. Ada dugaan money politics, bahkan ada keputusan dari PTUN supaya menundanya, tapi anehnya tetap dilantik juga. Di Kalimantan Timur sampai diberitakan pengakuan anggota DPRD mendapatkan uang dari gubernur terpilih, tapi si gubernur tetap dilantik. Sekarang di Sumatera Selatan ada dugaan kesalahan prosedur pemilihan gubernur, tapi tetap dilantik juga. Jadi orang melihat tampaknya ada ketidakkonsistenan, dan setelah kita lihat patternnya, yang dilantik adalah calon yang didukung oleh presiden. Walaupun bermasalah dia tetap dilantik. Tapi kalau tidak didukung presiden, dia tidak dilantik walaupun tidak mempunyai masalah apa-apa.

**DENNY J.A.:**

Jadi karena tidak ada srandar yang sama dalam cara Pemerinrah pusat merespon hasil pemilihan gubernur, ekse yang muncul seperti tadi

**ANDI MALARANGENG:**

Betul. Di Lampung, misalnya, meskipun gubenur terpilih dari PDIB tapi bukan dia yang direkomendasi pemerintah. Di Bali, gubernu yang terpilih didukung karena direkomendasi oleh presiden. Di Kalimantan Timur gubernur terpilih akhirnya dilantik

juga karena direkomendasi oleh presiden. Di Sumatera Selatan, yang diberi rekomedasi adalah gubernur yang menjabat, tapi yang menang yang lain.

**DENNY J.A.:**

Ok. bung. Kalau kira lihat kasus per kasus, di Sumatera Seiatan dulu, apakah penundaan pelantikan gubernur bersandar pada mumi aruran dan juga prinsip-prinsip otonomi daerah ? Apakah memang ada hal-hal yang membuat presiden diperbolehkan untuk menunda pelantikan ?

**ANDI MALARANGENG:**

Menurut undang-undang, gubernur Kehormatan ketika pencalonan harus dikonsultasikan kepada presiden. Kerika presiden sudah memberikan persetujuan, calon itu diajukan ke DPRD. lalu DPRD memilih. Tetapi hasil pemilih, DPRD terap irarus membutuhkan pengangkatan, SK dari presiden.

**DENNY J.A.:**

Jadi undang-undang yang ada sekarang memberikan peluang manuver kepada presiden untuk menunda pelandkan gubernur, tapi tidak membatalkan ?

**ANDI MALARANGENG:**

Benar, tidak membatalkan. Mestinya kalau pun ada penundaan, alasannya harus jelas dan koridornya sangat sempit. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan tertentu yang membuat prosedur batal, pengangkatan itu batal dan harus konsisten. Dan diterapkan sama

di propinsi lain. Misalnya kalau ada dugaan money politics, apakah yang bersangkutan dilantik atau ditunda pelantikannya sampai menunggu hasil penyidikan. Bagaimana kalau hasil penyidikan berlarut-larut sampai satu atau dua tahun tidak selesai-selesai, misalnya. Apakah pelantikan ditunda juga, ataukah harus dilantik dulu tapi kemudian diberikan waktu, atau dilantik dulu lalu penyidikan jalan terus, atau penyidikan dilakukan selama 30 hari atau 60 hari, setelah itu ada atau tidak ada hasil penyelidikan, dilantik.

**DENNY J.A.:**

Jadi sekarang ini ada kekosongan aturan yang mengatur apa yang memperbolehkan presiden untuk menunda pelantikan, berapa lama dan bagaimana cara solusinya?

**ANDI MALARANGENG:**

Sebenarnya kekosongan ini disengaja karena Peraturan Pemerintah No.151 tidak memuat aturan semacam itu. Kita tahu bahwa kalau ini semakin besar discretionary power semakin besar pula kesewenang-wenangan.

**DENNY J.A.:**

Kasus Sumatera Selatan ini, menurut anda berapa lama presiden masih bisa ditoleransi untuk menunda pelantikan gubernur?

**ANDI MALARANGENG:**

Dalam banyak aspek, sesungguhnya tidak ada alasan untuk menundanya. Di Bali sudah ada putusan PTUN untuk menunda,

dan tidak ditunda. Di Sumatera Selatan tidak ada putusan PTUN, tidak ada putusan kejaksaan, tapi justru ditunda.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda sarankan sebaiknya Gubernur Sumatera Selatan ini dilantik selekasnya, lalu persoalan yang kontroversial itu diusut secara terpisah?

**ANDI MALARANGENG:**

Diusut secara terpisah, dan ini bisa dilakukan. Atau sekarang PP-nya dibuat yang jelas, batas penyidikan itu berapa hari, 30 hari. Sehingga jangan sampai seperti Gubernur Lampung, yang bertahun-tahun belum dilantik-lantik.

**DENNY J.A.:**

Masalah besar yang dihadapi Mendagri dan Presiden saat ini adalah tak adanya standar konsisten yang bisa dimengerti publik. Mengapa pelantikan dilakukan atau tidak dilakirkan di berbagai propinsi, dan sebuah satu oenyebabnya juga karena Peraturan Pemerintah yang tidak secara detail dan operasional mengatur hal ini. Kasus Sumatera Selatan ini mungkin cerminarr buruknya komunikasi politik, karena kita tidak mendengar aiasan yang memadahi dari Mendagri.

**ANDI MALARANGENG:**

Komunikasi politik juga menjadi persoalan karena Mendagri menyatakan ditundanya pelantikan karena SK-nya beium selesai. Lalu mengerjakan apa .saja orang-orang di Setneg itu seiama ini?

Dan untuk Depdagri, mengapa membuat SK saja tidak selesai-selesai? Bukankah SK pelantikan gubernur sudah standar, tinggal diganti nama, diganti propinsi, dan masa jabatan, selesai.

Saya kira ada alasan yang jauh lebih politis, bahwa yang menang bukanlah orang yang diharapkan untuk menang oleh presiden. Dan hebatnya lagi Gubernur Sumatra Selatan yang sekarang ini, Pak Rosihan, didukung oleh PDIP dan Golkar. Dua-duanya mendukung dan kalah oleh calon yang didukung oleh sebuah fraksi kecil, fraksi gabungan. Yang lucunya lagi, ketika Gubernur terpilih batal dilantik, yang diberikan perpanjangan masa jabatan adalah yang kaiah, Pak Rosihan. Di Lampung agak lain, ketika Pak Aizair tidak jadi dilantik, Depdagri mengangkat pejabat gubernur.

**DENNY J.A. :**

Ok, bung, ini juga masalah image Mendagri sendiri, kita melihat adanya dua kasus yang tampaknya kontradiktif, kasus di Bali dan kasus di Sumatera Selatan. Di Bali dilantik, di Sumsel tidak dilantik. Bagaimana anda melihatnya?

**ANDI MALARANGENG:**

Kalau di Sumatera Selatan kasusnya ada orang yang sakit kemudian waktu masuk di bilik dibantu oleh anaknya, itu yang dipersoalkan. Tapi bukankah kalau pemilu pun kita yang sakit bisa dibantu ke bilik suara oleh petugas atau orang yang dipercaya.

**DENNY J.A.:**

Jadi di Sumsel ini ada persoalan prosedur yang sebenarnya tidak substansial ?

**ANDI MALARANGENG:**

Juga misalnya ada satu orang dipe rsoalkan apakah berhak mempunyai suara atau tidak. Thpi kalau di Bali jelas sekali, ada putusan PTUN yang meminta supaya pelantikan ditunda dan ada anggota DPRD secara terbuka mengatakan menerima duit dan orang yang memberikan duit mengaku memberikan duit.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda, bersandar pada alasan yang rasional, seharusnya pelantikan gubernur Bali ditunda ?

**ANDI MALARANGENG:**

Yang di Bali ditunda, yang di Sumatera Selatan tidak. Dan di sini persoalannya adalah ketidakkonsistenan dan abuse of power dari presiden sendiri. Presiden menyalahgunakan kewenangannya dalam membuat SK, menunda atau tidak menunda pengesahan, berdasarkan apa yang menjadi keinginan dia, apakah calon yang didukungnya terpilih atau tidak terpilih. Dan ini pelanggaran besar terhadap demokrasi.

**DENNY J.A.:**

Untuk Sumatera Selatan lagi, mungkin Presiden dan Mendagri mengatakan, dengan menunda pelantikan ini toh belum ada aturan yang dilanggar ?

**ANDI MALARANGENG:**

Betul, tidak ada aturan yang dilanggar. Thpi orang bisa berbicara mengapa yang di sini dilantik, yang di sana tidak dilandk,



standarnya apa? Pemerintah yang menggunakan standar, kalau tidak menggunakan standar, paling tidak standar etika, standar adminisuasi. Kalau tidak, maka pemerintahan tidak bisa dibilang sebagai pemerintahan yang cerdas.

**DENNY J.A.:**

Kita juga mendengar pembelaan Mendagri yang menyatakan bahwa untuk kasus di Bali, DPRD sudah mengambil keputusan dan PTUN itu dianggap tidak sah keputusannya karena belum ada keputusan final dari presiden, belum bisa di-review.

**ANDI MALARANGENG:**

Betul, pemerintah pusat mengatakan w'aktu itu, bahwa pelantikan gubernur diakukan untuk menghormati keputusan DPRD di Bali. Namun mengapa keputusan DPRD Sumatera Selatan tidak dihargai dan tidak digunakan istilah yang sama, mcnghargai keputusan DPRD? Kalau begitu DPRD Sumatera Selatan iebih rendah nilainya Daripada DPRD Bali. Mengapa bisa demikian ? Karena hasil pemilihan di DPRD itu tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan presiden.

**DENNY J.A.:**

Jadi itulah sekarang yang muncul, karena memang tidak adanya penjelasan yang masuk akal dan memadai. Dan saran anda sendiri selaku pakar, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengurangi damage-nya?

**ANDI MALARANGENG:**

Yang mungkin kawan-kawan di pemerintahan, termasuk sampai di Mendagri dan Presiden tidak mengetahui bahwa di Jakarta keputusan-keputusan mungkin hanya sekedar pasal-pasal dan ayat-ayat atau bahkan surat kawat. Di daerah, itu bisa berarti darah dan konflik yang besar, berlarut-larut. Apa yang terjadi di Papua misalnya, Inpres nomor 1 menghasiikan persoalan. Di Sumatera Selatan kita melihat sekarang sudah banyak demonstrasi-demonstrasi. Stabilitas politik di daerah, otonomi daerah tidak bisa berjalan dengan cara seperti ini. Lebih hebat lagi di Tual, tiga tahun sudah bupati tidak ada, tidak bisa terpilih. Di Lampung sudah setahun lebih. Karena itu sebenarnya sekarang ini, kalau untuk Sumatera Selatan, saya piki Presiden harus segera melantik dan kemudian kalau ada persoala segera diusut.

**DENNY J.A.:**

Bung Andi, kita lihat sekarang ini tak hanya di Sumatera Selatan tapi juga di Bali, juga di Lampung ada kasus heboh yang tiga-tiganya melibatkan konflik intemai partai besar dan kebetulan partainya presiden.

**ANDI MALARANGENG:**

Betul. Artinya calon-calon alternatif seperti Pak Sahrial di Sumatera Selatan atau Alzeir di Lampung bisa menang karena sebagian partai yang menang, PDIP misalnya melakukan pembelotan. Jadi ada konflik intemal dalam PDIP yang memungkinkan calon-calon yang sebenarnya dicalonkan oleh fraksi minoritas memenanglun pemilihan. Kalau tidak, mana mungkin Pak Sahrial bisa menang di Sumatera Selatan. Pembelotan PDIP inilah

yang kemudian mensiratkan adanya konflik kepentingan presiden untuk menunda atau tidak menunda SK pelantikan gubernur.

**DENNY J.A.:**

Jadi kubu PDIP yang membelot Lampung dan Sumselyang menang, sementara yang di Bali kalah ?

**ANDI MALARANGENG:**

Di Bali mereka kalah, di Kalimantan Timur juga begitu. Persoalan ketika yang membelot menang, seperti Sumarera Selatan, maka kemudian dihukum, tidak di-SK-kan. Dalam kultur PDIP siapa pun yang menjadi gubernur bahkan bupati harus mendapat rekomendasi dari DPP. Karena sistemnya sangat sentralistik, kalau tidak mendapat rekomendasi maka tidak boleh, dan siapa yang melawan rekomendasi ini bisa di-recall, dipecat dan sebagainya.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, kita melihat ada pembelotan partai di daerah. Mengapa lebih sering melanda PDIP ? Mengapa tidak partai-partai lain?

**ANDI MALARANGENG:**

Ya karena sentralisme pembuatan rekomendasi itu.

**DENNY J.A.:**

Jadi ini khas PDIP ya?

**ANDI MALARANGENG:**

Saya pikir di Golkar juga begitu. Partai-partai besar ini biasanya menentukan rekomendasi dari pusat karena gubernur, bupati dan walikota dianggap posisi strategis yang harus dipegang. Permasalahannya pusat tidak tahu siapa sebenarnya yang paling bagus menjadi bupati, gubernur, karena itu kemudian semua orang melobi DPP untuk mendapat rekomendasi. Bahkan kalau melihat wawanqua dari Sophan Sophian, dia mengatakan bahwa tidak jarang ada yang memberi uang satu miliar atau lebih kepada oknum-oknum DPP PDIP untuk mendapatkan rekomendasi itu. Ketika orang yang tidak populer di daerah berhasil mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP untuk pemilihan kepala daerah, di situlah timbul pembelotan.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda melihat ada fenomena sentralisme partai besar, tidak di PDIP?

**ANDI MALARANGENG:**

Betul, karena di Indoncsia rupanya kebijakan negara sudah mengarah pada desentralisasi, tapi kemudian poiirik negara, terutama dalam partai yang berkuasa masih tetap sentralistik, sehingga nantinya akuntabilitas kepaia daerah iebih kepada presiden dan partai, bukan kepada rakyat. Gawatnya lagi, ketika terjadi pembelokan beberapa orang partai dan ketika si pembelot menang, maka dihukumilah, yaitu dengan cara tidak diberi SK dan tidak dilantik. Tapi hukuman itu ternyata dampaknya justru kepada masyarakat. Masyarakat kehilangan pegangan, ekspektasi, lalu muncul kekecewaan besar, bisa menimbulkan konflik.

Kita melihat sekarang fenomena yang agak luas, pembelotan tokoh-tokoh partai lokal di daerah. Jika anda melihat lebih jauh dari sisi konsultasi untuk demokrasi mendatang, apakah ini pembelotan yang negatif karena disiplin partai menjadi susah ditegakkan, atau justru menjadi bagian dari koreksi yang sangat positif sekali supaya partai tidak terlalu sentralistis ?

**ANDI MALARANGENG:**

Kalau kita mau, dalam era otonomi daerah dan demokrasi, setiap anggota dewan harus mewakili rakyat. Maka bukan hanya kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tetapi juga anggota DPRD agar akuntabilitasnya ditujukan kepada rakyat bukan kepada ketua partai. Yang menarik lagi, Depdagri sedang mengajukan rancangan revisi UU No. 22 yang menyangkut pemilihan kepala daerah langsung. Namun dalam rancangan itu walaupun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun dia bertanggung jawab kepada presiden. Ini menjadi persoalan lagi. Presiden nanti bisa menunda pelantikan atau sebaiknyanya. Presiden bisa memutuskan, kalau gubernurnya bukan orang yang dia sukai maka pertanggungjawabannya akan ditolak.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda bagaimana sentralisme partai bisa dikoreksi ke depan ?

**ANDI MALARANGENG:**

Koreksinya tentu saja dengan mengubah aturan internal partai, sehingga kita tidak menggunakan cara-cara pemaksaan dari atas semacam itu. Tetapi yang bisa mengubah nantinya adalah hukum

rakyat dalam pemilu. Ketika rakyat mengatakan bahwa, “Saya tidak lagi mau memilih partai-partai yang tidak menghargai aspirasiku, aspirasi wakil-wakilku di daerah, dan hanya mengurus aspirasi diri mereka sendiri”.

**DENNY J.A.:**

Kalau anda melihat, apa efek bagi PDIP yang memaksakan kandidatnya kepada massa pendukung dalam proses pemilihan gubernur di berbagai daerah ?

**ANDI MALARANGENG:**

Jelas lebih buruk bagi PDIP Ini sudah tercermin dalam polling-polling yang membuat risau Ibu Megawati. Kalau dia risau, maka segera saja ubah kebijakan semacam itu dan pola sentralisme dalam PDIP Tapi kalau beliau tidak mengubahnya, saya pikir teman-teman PDIP sendiri sudah bicara keras, dan akhirnya akan ada judgement pada pemilu 2004. Itulah demokrasi !

**DENNY J.A.:**

PDIP memenangkan kursi gubernur, tapi kalah dalam memenangkan hati publik ?

**ANDI MALARANGENG:**

Kalah dalam hati rakyat.

**DENNY J.A.:**

Sekarang kita coba cari solusi ke depan, Bung. Hal-hal apa yang bisa dilakukan agar kehebohan pemilihan gubernur bisa dikurangi secara sistemik ?

**ANDI MALARANGENG:**

Yang pertama, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Kedua, partai harus lebih akuntabel kepada rakyat dengan cara membuat sistem pemilu lebih akuntabel untuk rakyatnya. Hak re-call partai mestinya sudah tidak perlu lagi ada. perlu ada calon independen supaya ada koreksi bahwa partai bukan segalanya. Kalau dia tidak bisa memenangkan hati rakyat, dia akan dihukum.

**DENNY J.A.:**

Jadi seperti model DPD sekarang, bahwa calon-calon di luar partai boleh mengajukan diri sebagai kandidat ?

**ANDI MALARANGENG:**

Kalau ada bagus juga. Hak recall yang sekarang ini ada dalam UU pemilu semesrinya tidak perlu lagi. Recall mestinya bukan oleh partai tapi oleh komisi etik yang ada di DPRD. Yang terakhir barangkali kiia menginginkan pemiihan langsung bisa dilakukan sesegera mungkin sesudah pemilu.

**DENNY J.A.:**

Jadi selain pemilihan langsung, ada calon indpenden. Ketiga, soal pelantikan. Apakah masih perlu presiden yang melantik atau cukup DPRD, untuk mengurangi keruwetan berikutnya ?

**ANDI MALARANGENG:**

Untuk gubernur barangkali iya. Tetapi discretionary power-nya harus jelas, tegas di mana batasnya. Dan untuk kepala daerah, bupati, walikota cukup gubernur saja.

**DENNY J.A.:**

Ok, Bung Andi, banyak sekali kita dapat dari anda, sayang sekali waktu sudah 18:42 dan anda sendiri tidak bisa berlama-lama dengan kita. Sebagai pemimpin partai, pasti anda akan turun ke bawah.

**ANDI MALARANGENG:**

Tahun 2004 ada pilihan baru dan harapan baru.

**DENNY J.A.:**

Ada beberapa SMS yang masuk:

- “Pasti ada alasan di balik presiden menunda pelantikan, tapi ini pasti masalah komunikasi politik sehingga presiden justru mungkin mendapatkan malapetaka dengan kasus ini karena citranya yang rusak”.
- “Dengan menunda pelantikan gubernur, presiden telah melanggar aturan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi”.
- “Presiden mungkin memenangkan pemilihan gubernur tapi kalah mendapatkan simpati publik”.

Para pendengar Delta FM, jika kita mencoba melihat intisari dan segala masalah heboh dengan pemilihan gubernur ini, memang ada beberapa pola yang kita lihat terdapat tidak hanya di Sumatera



Selatan tapi juga di Lampung dan Bali. Tapi sebelum kita detailkan lagi, kita coba dulu hubungi seorang pakar otonomi daerah lainnya, Bung Johermansyah Johan. Selamat pagi bung.

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Selamat pagi, Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Tadi kita sudah bersama Bung Andi Malarangeng, sekarang bersama anda. Kita ingin mendengar komentar umum anda dulu, presiden yang menunda pelantikan gubernur di Sumatera Selatan. Bagaimana anda melihatnya ?

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Ya, ini soalnya presiden tidak faham tentang UU Otonomi Daerah dengan baik.

**DENNY J.A.:**

Tapi Mendagri dan tim ahlinya di sana yang mestinya paham.

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Betul, tapi mereka tidak ikut dalam menyusun UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal40 UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah explicitly menegaskan bahwa gubernur ditetapkan sebagai kepaia daerah oleh DPRD dan disahkan oleh presiden. Jadi kewenangan untuk menetapkan pasangan calon yang sudah terpilih ada di tangan DPRD.

**DENNY J.A.:**

Menarik ini bung. Jika presiden beium melantik misalInva, apakah gubernur yang terpiihi itu sudah sah untuk memerintah ?

**JOHERMANSRAH JOHAN:**

Kalau bicara demokrasi kedar-rlatan rakyat ada di tangan DPRD, sebetulnya sudah sah. Demokrasi kan bukan besiuit, bukan ditentukan oleh SK. Presiden.

**DENNY J.A.:**

‘Wah, ini menarik, Bung. Jadi ada SK Menciagri yang memperpanjang jabatan gubernur lama, ini bisa dikalahkan dengan DPRD mengesahkan gubernur baru ?

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Pasti itu, kalau kita memang memihak demolcrasi yang ingin kita kembangkan. Presiden posisinya hanya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan.

**DENNY J.A.:**

Lalu secara formal, siapa sebenarnya Gubernur Sumatra Selatan?

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Formally tentu berdasarkan kehendak pemerintah pusat karena dia yang memegang kekuasaan. Tapi in realiry, dalam kenyataan hati masvarakat Sumsel, itu sudah Pak Sahrial Usman dan wakiinya. Itulah hasil pemilihan DPRD yang merupakan representasi rakyat.

**DENNY J.A.:**

Secara legal-formal Mendagri sudah memperpanjang masa jabatan. gubernur lama. Memang gubernur lama, Pak Rosihan itulah yang masih menjadi gubernur ?

**JOHERMANRYAH JOHAN:**

Betul, tidak dalam kenyataannya.

**DENNY J.A.:**

Untuk ke depan, bagaimana agar kehebohan semacam ini ridali terulang lagi ?

**JOHERMANSYAH JOHAN:**

Obat yang paling mujarab, pemilihan langsung kepala daerah, supaya tidak ada kewenangan presiden lagi untuk mengganjal, mengganggu kalau tidak cocok dengan seleranya.

**DENNY J.A.:**

Dalam sistem yang berlaku sekarang ini, kewenangan presiden untuk bermanuver masih terlalu besar?

**JOHERMANRYAH JOHAN:**

Iya, karena dalam undang-undang sebenarnya dia tidak mempunyai kewenangan. Jadi tidak salah kalau ada yang mau menggugat wewenang itu, melalui PTUN misalnya.

**DENNY J.A.:**

Tapi di Mendagri sendiri ada banyak sekali orang yang paham soal ini seharusnya. Agak susah kita bayangkan ada perbedaan menafsirkan undang-undang pada mereka.

**JOHERMANRYAH JOHAN:**

Mungkin juga tim Depdagri sudah mengerti tetapi presiden mempunyai tim sendiri yang akan membantu menelaah konsep atau usulan. Atau presiden bias dengan kepentingan politik sendiri dan tidak mengerti isi Undang-Undang No. 22.

**DENNY J.A.:**

Ok, Bung Johermansyah. Terima kasih banyak telah memberilian pandangan cukup kritis terhadap kebijakan Mendagri sekarang. Jadi para pendengar Delta FM, demikianlah tadi telah kita dengar berbagai hal di belakang isu ditundanya pelantikan gubernur Sumateta Selatan. Tentu kita dengan asumsi yang positif bahwa pastiiah Presiden dan Mendagri mempunyai alasan mengapa mereka menunda pelantikan itu. Namun sayangnya alasan ini tidak dinyatakan secara memadai sehingga publik melihat adanya hal yang tidak standard. Akibat tidak efektifnya komunikasi politik Mendagri, yang muncrrl kemudian adalah dugaan bahwa presiden atau Mendagri sudah membuat keputusan tidak bersandar pada undang-undang, tapi lebih persoalan politik mengenai apakah calon yang maju itu apakah calon yang didukung atau tidak oleh prcsiden. Jika rumor ini tidak segera dikoreksi justru akan memukui baiik.secara keras sekali terhadap citra Megawati sebagai presiden.

Demikianlah hasil dari diskusi kita, iumpa lagi minggu depan bersama saya Denny J.A. dengan topik aktual yang lain.

# **POTENSI KERUSUHAN DALAM PEMILU 2004**

Tanggal: 21 Januari 2004

Host: DennyJ.A.

Narasumber: Thamrin Amal Tomagola (Sosiolog UI), Permadi  
(Anggota F-PDIP DPR ), Ali Masykur Musa (F-PKB DPR)

Dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, potensi kerusuhan pada pemilu 2004 lebih besar. Kerusuhan itu minimal disebabkan oleh dua hal. Pertama, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, dalam setahun menyelenggarakan tiga pemilu nasional sekaligus: pemilu legislatif, pemilu presiden tahap pertama, dan pemilu presiden tahap kedua. Terbuka kemungkinan terjadinya eskalasi kemarahan atau kekecewaan karena kekalahan dalam pertarungan politik yang terjadi. Mereka yang kecewa pada hasil pemilu legislatif bisa saja bertambah kecewa pada pemilu presiden tahap pertama dan tahap kedua, sehingga situasi politik yang tercipta jauh lebih kompleks dan konfliktual. Kedua, untuk pertama kalinya presiden dipilih secara langsung. Jika dalam pemilu gubernur saja kita mendengar banyak konflik lokal terjadi, apalagi dalam pemilu presiden yang berskala nasional. Kita mendengar Panglima TNI dan Kasad sudah mensinyalir adanya sabotase terhadap pelaksanaan

pemilu. Sejauhmana kira-kira potensi kekerasan dalam pemilu 2004 dan bagaimana cara mencegahnya ?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar DeltaFM di mana Pun anda berada terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan' Jumpa lagi dalam "Dialog Aktual" bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah "Potensi Kerusakan Dalam Pemilu 2004" Akankah pemilu 2004 dikenang sebagai pemilu yang berdarah ? Ada Bung Thamrin Amal Tomagola, seorang sosiolog yang juga banyak terlibat dalam gerakan civil society, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik lokal.

Selamat pagi bung.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Selamat Pagi.

**DENNY J.A.:**

Sebelum kita berdiskusi dengan Bung Thamrin, saya akan memberikan background-nya. Belakangan ini ada dua lembaga yang mengumumkan potensi kerusakan dalam Pemilu 2004 : pertama, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada, dan kedua, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai, termasuk di dalamnya Bapak Thamrin Ami Tomagola. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu 2004 ini iebih potensial untuk terjadi kerusakan, setidaknya karena dua hal. Pertama, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, satu tahun melaksanakan tiga pemilu nasional sekaligus : pemilu legislatif, pemilu presiden

tahap pertama, dan pemilu presiden tahap kedua. Sehingga terbuka kemungkinan terjadinya eskalasi kemarahan atau kekecewaan akibat pertarungan politik yang terjadi. Mereka yang kecewa pada hasil pemilu legislatif bisa bertambah kecewa pada pemilu presiden babak pertama dan babak kedua, sehingga situasinya jauh lebih kompleks dan konfliktual. Kedua yang membikin lebih potensial rusuh, tahun 2004 untuk pertama kalinya presiden dipilih secara langsung. Jika dalam pemilu gubernur saja kita mendengar banyak konflik lokal, tentunya potensi itu lebih besar dalam pemilu presiden. Sebelumnya kita juga mendengar panglima TNI dan Kasad menyatakan ada sabotase terhadap pemilu. Kita akan mendiskusikan masaiah ini, apa kira-kira porenasi kekerasan dalam pemilu 2004 dan bagaimana cara mencegahnya?

BungThamrin, tanggal 29 Januari 2004, KPU akan mengumumkan secara resmi daftar calon legislatif. Menurut anda apakh ini titik krisis pertama yang harus kita lalui sebelum pemilu?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Benar. Tetapi kita akan mengamati, mencermati dan memantau terus sampai titik terakhir dari proses pemilu yang panjang. Pertama karena ini adalah tahap penetapan calon tetap dari setiap parpo;, calon legislatif tetap. Bagi mereka yang tidak lolos terutama para politisi busuk karena persaingan di dalam internal parpol pasti akan kecewa dan kekecewaan itu bisa merembet ke pendukung-pendukungnya yang besar.

**DENNY J.A.:**

Jadi lebih ke konflik internal partai ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Benar. Tanggal 29 Januari ini kira mengantisipasi konflik internal. Ada tiga pihak yang harus siap. Pertama pihak parpol sendiri. Tata cara kelembagaan yang sudah pernah ditetapkan, tolong ditegakkan sehingga berbagai macam friksi bisa diselesaikan menurut aturan internal. Kedua, aparat kepolisian harus waspada dan pihak penegak hukum tidak boleh berkelit dengan mengatakan bahwa masalah internal partai politik tidak boleh dicampuri oleh penegak hukum. Begitu terjadi kekerasan di mana pun, walaupun di wilayah privat, apalagi di wilayah publik, negara berhak masuk. Aparat kepolisian harus waspada, dan tidak segan-segan menindaklanjuti suatu kasus tertentu. Ketiga, masyarakat tidak perlu panik, tetap waspada karena ada potensi-potensi seperti itu. Jadi, barangkali tidak sampai pada posisi siaga satu, kalau kita pakai bahasa militer.

**DENNY J.A.:**

Belum siaga satu sampai Tanggal 9 Januari ini. Apakah ini konflik internal partai, yang lebih disebabkan oleh rebutan nomor satu ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Betul. Ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kepatutan suatu partai politik. Misalnya, ketika nanti pemilihan langsung dan nama plus foto kandidat dipajang, menjadikan figur sangat menonjol. Figur dapat diijual. Beberapa parpol di Jawa Barat ada yang mengganti calonnya dengan figur selebriti, yang tidak ada bobot politik dan bobot publiknya sama sekali. Namun karena dia selebriti, dia ditaruh di nomor satu.



**DENNY J.A.:**

Bung Thamrin, kita melihat ada potensi konflik internal partai akibat rebutan nomor jadi. Tetapi ada partai yang lebih tenang dalam hal ini, juga ada, yang lebih hot konfliknya. Apa yang membedakan partai-partai ini ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Masalah pokoknya adaiiah kesiapan kelembagaan dan penegakan aturan-aturan partai, Bagaimana mengatur sesuatu secara cermat.

**DENNY J.A.:**

Golkar dan PKS Lebih tenang, tetapi PDIP lebih hoebagaimana?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA :**

Benar, karena di PDIP kelompok-kelompok yang frustrasi di jaman Orde Baru numplek semua di situ. Mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan, keuntungan politik, tetapi secara organisasional kemampuan tidak bisa diandalkan. Banyak preman masuk di sirtu. Di daerah Pekalongan kita temukan banyak sekali preman yang masuk sebagai kader PDIP sehingga perebutan yang bersifat politik nanti akan menjadi benturan fisik.

**DENNY J.A.:**

PDIP sebagai partai pemenang pemiiu 1999 lebih repot dengan urusan internal ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Lebih repot secara internal. Saya kira tiga partai yang paling siap adalah partai Golkar PKS dan partainya Pak Hartono.

**DENNY J.A.:**

Partai Pak Hartono, dianggap lebih siap padahal partai baru. Apa yang membuat mereka jauh lebih tertib, apakah disiplin militer yang diwariskan Pak Harrono ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Bukan, tetapi popularitas Mbak Tutut dan jaringan yang sudah dibangun selama Orde Baru. Pasak-pasak cengkeraman dari orde baru yang pajing kuat di lapangan masih utuh. Orang-orang itu dengan jaringannya dikonsolidasi. Mereka bukan membangun sesuatu yang baru, tapi memanfaatkan sesuatu yang sudah lama ditanam.

**DENNYJ.A.:**

Pak Thamrin, kita akan menggaliberbagai kemungkinan konflik lainnya menjelang pemilu. 2004 dan pra pemilu legislatif. Baik para pendengar Delta FM, anda mendengar sendiri tanggal 29 Januari 2004, secara resmi KPU akan mengumumkan calon legislatif dan itu mungkin awal dari konflik pemilu pertama tahun ini, di mana calon-calon yang tidak masuk dalam nomor jadi akan melakukan mobilisasi, tidak puas dengan situasi partai-partai yang tidak siap secara internal akan rebih kerepotan dengan berbagai potensi konflik yang muncul.

Setelah kita mendiskusikan konflik pertama yang mungkin muncul pada tanggal 29 Januari, selanjutnya akan datang masa

kampanye, yang dimulai tanggal 11 Maret sampai awal April 2004. Ini adalah periode kampanye, kemungkinan terjadi konflik eksternal antara massa dan pendukung partai. Dua lembaga termasuk pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM membuat 15 hotspot, titik rawan yang mungkin akan terjadi kerusuhan di daerah. Di antaranya Jakarta, Sampang dan Makassar. Bagaimana Bung Thamrin, anda bisa memberikan eksplorasi yang lebih jauh ? Apa saja yang mungkin muncul di era kampanye ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Kita mengetahui bahwa konflik itu sudah lama terpendam, Pusat Studi Keamanan dan Peace and Security mengadakan lokakarya satu hari dan menemukan tiga kriteria yang harus diantisipasi sebagai daerah-daerah yang rawan yang kita sebut dengan daerah “batu bara tua”, artinya siap meledak kalau dipicu oleh satu dari tiga kriteria tertentu. Tiga kriteria itu adalah, pertama, daerah yang sudah mengalami konflik kekerasan berkepanjangan. Ke dua, daerah yang mempunyai potensi-potensi magma konflik yang terpendam. Ketiga, secara ritual pemilu-pemilu daerah itu memang bolak-balik terjadi kekerasan.

**DENNY J.A.:**

Daerah yang berpotensi konflik dikatakan ada 15 hot spot banyak sekali pak?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Kita mendaftar lebih dari itu, hampir empat puluhan titik kerusuhan. Tetapi dengan ketiga kriteria tersebut menyusut

menjadi delapan di Jawa dan tujuh di luar Jawa. Sama hot-nya antara Jawa dan luar pulau Jawa.

**DENNY J.A.:**

Jadi mereka menjadi wilayah rawan konflik karena 3 kriteria tadi?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Benar. Daerah konflik dengan kekerasan berkepanjangan, seperti Poso, Sampit dan Maluku. Kemudian daerah yang mempunyai potensi magma konflik yang terpendam, karena ada berbagai macam benturan ekonomi, sosial dan budaya dalam waktu yang lama.

**DENNY J.A.:**

Apa misalnya daerah itu Pak ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Misalnya di Jawa, yaitu daerah Pekalongan, Jepara dan daerah Tapal Kuda. Di luar Jawa ada Bali dan Lombok. Daerah-daerah tersebut sangat hot potensi konfliknya.

**DENNY J.A.:**

Sekarang sudah tersambung dengan Pak Permadi dari PDIP. Lembaga-lembaga kajian melengkapi peringatan dini pihak keamanan yang menyatakan ada kemungkinan terjadi kekerasan dan kerusuhan pada pemilu 2004. Pek Permadi sebagai salah seorang pemain di PDIP dan mempunyai intuisi keenam, apakah

akan terjadi kerawanan dan kerusuhan yang meluas pada pemilu 2004 nanti ?

**PERMADI:**

Sangat mungkin terjadi. Tetapi masalahnya bukan kerawanan-kerawanan itu sendiri, melainkan dipicu orerrformalitas. Katakanlah KPU. Saya meragukan pemilu bila tepat waktu, karena semua keterlambatan-keteriambatan dalam proses, persiapan pemilu terus terjadi. Seyogyanya kalau memang KPU menghitung pemilu tidak tepat waktu, karena kotak suara belum selesai dan segala macamnya belum siap, lebih baik mengatakan belum siap, daripada dipaksakan, malah repot. kedua, panwaslu dan KPU saling berbenturan. Satu mengatakan boleh memperingati hari ulang tahun, lainnya mengatakan melanggar peraturan. Jadi konflik-konflik itu dipicu oleh formalitas.

**DENNY J.A.:**

Menurut Bapak memang ada tambahan-tambahan konflik dari formalitas KPU dan Panwaslu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang digambarkan Pak Thamrin, bahwa ada hot spot di Jawa dan luar pulau Jawa yang sudah terbiasa dengan konflik-konflik lama ?

**PERMADI:**

Rakyat Indonesia tidak pernah mau damai. Tawuran antar kampung, antar partai dan lain sebagainya. Jadi harus diperhitungkan seberapa besar pengaruhnya. Perrama kita mesti memastikan ada partai-partai yang akan kalah dan itu akan memicu adanya konflik yang lebih besar. Belum konflik-konflik internal antar partai sendiri'

**DENNY J.A.:**

Kalau kita melihat pengalaman PDIP sendiri, pernah terjadi konflik dengan Golkar di Buleleng Bali. Seberapa jauh Pak Permadi dan kawan-kawan PDIP memperkirakan konflik-konflik serupa terjadi di wilayah lain ketika kampanye ?

**PERMADI:**

Soal Bali, kita harus melihat konflik tersebut tidak timbul saat itu, melainkan konflik kepanjangan. Ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Kita mesti melihat ada orang-orang yang ingin mematikan PDIP dan Mega sekaligus. Mega dimusuhi, dikeroyok orang-orang luar biasa hebatnya.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Kasus Bali bisa disorot dari dua aspek. Pertama, memang Golkar sedang “Halo-halo Bandung, Mari Bung Rebut Kembali” Jadi mereka mencoba, di basis PDIP yang sangat kuat. Tetapi juga ada kesalahan dari PDIP bersama polisi yang memanfaatkan pecalang-pecalang (semacam pamswakarsa adat), itu melanggar ketentuan publik. Pecalang adalah aparat adat, bukan aparat di wilayah publik. Ada kecenderungan di Bali, polisi mendiamkan pecalang. Hal seperti itu tidak bisa diterima dalam suatu pemilu.

**PERMADI:**

Masalahnya pecalang itu sendiri barangkali anggota PDIP jadi memadukan antara adat dan keanggotaan partai perlu dipertegas. Tetapi selama kader itu menjadi pecalang, iugasulit untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan. Tetapi kalau di Bali, menggeliat seperti apapun Golkar tidak akan menang.

**DENNY J.A.:**

Pak Permadi, untuk merespon kemungkinan adanya 15 titik rawan konflik, apa yang akan dilakukan PDIP terhadap massanya ?

**PERMADI:**

Saya takut PDIP tidak mampu menguasai massa, karena anar massa antar partai saja sudah seperti itu. Saya takut elit politik tidak terju sampai ke bawah. Mereka dibiarkan membenah dirinya sendiri. Semenrara kalau bawah sama bawah sudah sudah bertarung, bisa besar. Jangan lupa kalau PDIP sampai dikeroyok partai lain dengan keinginan menjatuhkan Megawati, massa bisa beringas, bisa membela habis-habisan, PDIP tidak bisa disalahkan.

**DENNY J.A.:**

Melihat ada kerawanan di tingkat massa, apakah elit tidak bisa mengontrol sepenuhnya ?

**PERMADI:**

Tidak bisa.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Ciri yang paling menonjol dari pemilu kali ini, isu lokal lebih dominan daripada isu nasional, sehingga isu menjatuhkan Megawati hanya bisa dibeli orang lokal kalau ada hubungannya dengan masalah lokal.

**PERMADI :**

Betul. Masalahnya kita harus sepaham bahwa reformasi ini sudah kebablasan.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Kalau saya tidak sepaham.

**DENNY J.A.:**

Menurut Pak Permadi, ada masalah-masalah konflik yang justru dipicu oleh kesiapan teknis-administratif KPU dan Panwaslu sendiri. Juga isu-isu bawah yang tak sepenuhnya bisa dikontrol oleh elit.

**PERMADI:**

Tetapi saya masih membedakan beberapa jenis konflik. Konflik Ambon dan Aceh itu berbeda dengan konflik internal partai atau antar partai. Karena di sini ditumpangi dengan kepentingan ideologi.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Memang mereka berbeda, artinya ada manuver-manuver internal parpol yang bisa dibawa keluar ke massa dan kemudian melibatkan emosi-emosi suku atau agama.

**PERMADI:**

Betul Pak, saya khawatir pemilu ini hanya menjadi isu tunggangan saja untuk mengobarkan kembali sentimen-sentimen agama, suku, dan lain sebagainya.



**DENNY J.A.:**

Menurut Pak Permadi, seberapa serius kemungkinan kerusuhan di 15 hot spot itu?

**PERMADI:**

Kita harus melihat kekuatan TNI/Polri.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Saya kira TNI di taruh di luar saja.

**PERMADI:**

Bukan, kalau sampai konflik berdarah' TNI akan masuk' Saya melihat kekuatan TNI sudah terpecah, sebagaimana terbesar ke Aceh' Papua dan Maluku sehingga sedikit sekali sisa untuk disebar ditempat hot spot tadi. Sementara Polri sendiri sibuk dengan teroris' sibuk dengan segala macam, sehingga saya juga khawatir bahwa pada akhirnya konflik tidak terkontrol. Kalau sampai tidak terkendali, bisa goro-goro.

**DENNY J.A.:**

Baik Pak Permadi, terima kasih banyak atas perspektif anda.

**PERMADI:**

Sama-sama Denny.

**DENNY J.A.:**

Pendengar Delta FM, kita dengar sendiri tadi konflik jenis kedua yang mungkin muncul di pemilu ini, yaitu konflik eksternal di era kampanye terutama di 15 hot spot di Jawa dan di luar Jawa. Sebagian karena di daerah-daerah ini sudah menyimpan potensi konflik yang cukup lama dan rawan jauh sebelum masa kampanye.

Masih bersama kita Bung Thamrin. Kita sudah menggali dua potensi konflik yang mungkin muncul dalam pemilu. Pertama, konflik internal partai akibat kekecewaan atas susunan calon legislatif. Kedua, konflik eksternal, kemungkinan bentrok antara massa pendukung partai, terutama di 15 hot spot di Jawa dan luar Jawa. Bagaimana menurut anda, tampaknya di daerah Tapal Kuda agak hot di era kampanye nanti. Menurut anda pertarungan siapa dan siapa itu ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Kita sebenarnya sudah memetakan dari Aceh sampai Papua. Di setiap daerah itu parpol apa yang saling bertarung memperebutkan masa secara dominan. Untuk tingkat Jawa Timur pertarungan antara PDIP dan PKB. Tetapi pada daerah Tapal Kuda saya perkirakan nanti lebih keras antara PPP dan PKB. Ada beberapa aspek dari benturan itu. Pertama, ada semacam warisan gerutuan atau warisan dendam masa lampau orang-orang PPP terhadap orang-orang Golkar yang kemudian menyeberang ke PKB. Bahkan di Jepara seorang Kapolres yang dulu memimpin Brimob dan menembaki orang PPP pada peristiwa Dongos tahun 1999, sekarang menjadi pimpinan PKB.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda yang paling hot justru pada komunitas radisional NU?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Ya. Di Tapal Kuda juga. diperparah dengan faktor kedua, yaitu mudahnya para kiai lokal berpindah-pindah parpol dan membawa massanya. Sehingga kadang-kadang friksi atau benturan pribadi menyeret massa yang ada di bawah.

**DENNY J.A.:**

Menarik, karena tempat yang paling hot spot adalah komunitas NU yang sangat kental Islamnya di mana terjadi manuver para kiai untuk berpindah-pindah partai.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Barang kali Tapal Kuda harus digandeng dengan daerah Sampang, Madura, di situ PPP dan PKB bertarung habis-habisan, sampai peristiwa Bupati Sampang yang agildilantik selama zamannya Gus Dur. Saya kira daerah itu menjadi daerah panas antara partai PPP, PKB dan PDIP Golkar saya kira tidak terlalu kuat di daerah Jawa Timur.

**DENNY J.A.:**

Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi agar hot spot tidak berubah menjadi kerusuhan di era kampanye ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Ciri yang paling unik dari pemilu 2004 adalah pemilu yang berdasarkan isu-isu lokal dan figur-figur lokal yang akan sangat dominan bersaing satu sama lain. Pencegahannya harus melalui pintu masuk para figur lokal juga. Pada tiap daerah harus dikenali figur-figur lokal yang masuk ke dalam caleg, kemudian kita dekati dan kita ajak bicara supaya mampu mengendalikan massanya.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana kalau figur lokal sendiri sudah terlibat dalam konflik karena dia pindah-pindah perahu partai politik ?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Tidak banyak yang bisa dilakukan kalau kepentingan ekonomi sosial begitu tinggi. Tetapi paling tidak kita harus berdialog dan menghimbau mereka, dan melakukan pencerahan-pencerahan pada tingkat pesantren supaya tidak mudah terpancing oleh kepentingan-kepentingan pribadi figur lokal tertentu.

**DENNY J.A.:**

Figur lokal yang nonpartisipan lebih mudah menjadi moderator dari konflik, bagaimana?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Di kalangan NU sebenarnya banyak kiai-kiai non partisipan dan mempunyai wawasan yang cukup luas dan tidak memihak.

**DENNY J.A.:**

Apa yang bisa dilakukan KPU agar situasi poririk tidak terlalu panas di daerah hot spot?

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

KPU tidak bisa berbuat banyak, lebih baik diserahkan kepada Pnawaslu. Sehingga apabila ada perbedaan penafsiran berbagai macam aturan antara KPU dan Panwaslu, yang harus berperan adalah Panwaslu

**DENNY J.A.:**

Kemungkinan potensi rusuh dalam pemilu terutarna di 15 hot spot di Indonesia dan lebih utama lagi justru di daerah Tapal Kuda di mana di sini komunitas Islam NU tradisional diperebutkan partai besar seperti PKB, PPB kadang Golkar dan PDIP terlibat di dalamnya dan besarnya peran tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh informal untuk ikut membuat situasi lebih tenang dan lebih damai. Sekarang kita terhubung dengan Bung Ali Masykur Musa seorang tokoh modern NU dan juga tokoh di PKB. Selamat pagi bung.

**ALI MARYKUR MUSA:**

Selamat Pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Bersama kita ada Bung Thamrin dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai, yang mengatakan daerah Tapal Kuda, daerah di mana basis NU-nya tinggi justru potensi konfliknya hot menjelang pemilu 2004. Bagaimana tanggapan anda ?

**ALI MASYKUR MUSA:**

Tidak begitu, karena di Tapal Kuda kita melakukan nota kesepahaman antar pimpinan partai. Bahkan antar caleg sendiri sudah road show. Misalkan dari partai A, B, C bagaimana agar dalam kampanyenya lebih santun dan lebih damai, tidak mengedepankan provokasi.

**DENNY J.A.:**

Kabarnya PPP dan PKB masih terlibat dalam perebutan massa pada komunitas NU yang sama. Apakah itu terjadi sekarang ?

**ALI MASYKUR MUSA:**

Wajar kalau masyarakat NU diperebutkan oleh PPP dan PKB khususnya, tetapi juga partai-partai lain' Tetapi saya yakin di tingkat grass-root sudah lebih matang dalam berpolitik dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang lalu.

**DENNY J.A.:**

Di tingkat grass root diperkeruh oleh beberapa elit lokalnya yang mungkin mulai kecewa dengan berbagai manuver Gus Dur yang menurut Bung Thamrin juga bisa menjadi pemicu mereka untuk pindah ke partai lain?

**ALI MASYKUR MUSA:**

Pindah partai itu hak siapa saja, tetapi loyalitas masyarakat NU kepada PKB jauh lebih mengedepan daripada ke orang per orang. Yang penting pemilu damai dan santun.

**DENNY J.A.:**

Bung Thamrin, bagaimana pendapat anda.

**THAMRIN AMAL TOMAGOLA:**

Selamat pagi Bung Ali. Berita yang menyejukkan sudah ada upaya-upaya di tingkat lokal untuk mencapai kesepakatan antar figur politik. Tetapi yang lebih penting adalah membenahi beberapa tumpukan kekecewaan dan gerutuan dari kiai-kiai lokal terhadap pimpinan nasional maupun pimpinan wilayah. Seberapa parah gemtuan itu?

**ALI MASYKUR MUSA:**

Pengamatan dari luar biasanya lebih over-estimasi. Apakah ada kekecewaan pada Gus Dur secara sistemik? saya melihat tidak ada, itu sangat over-estimasi.

**DENNY J.A.:**

Terima kasih Bung Ali Maskur pandangan anda. Jadi para pendengar Delta FM, perrama kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bung Thamrin Amal Tomagola dari Koalisi Masyarakat sipil untuk pemilu Damai, yang memberikan kepada kita perspektif cukup dalam dan juga cukup segar mengenai kemungkinan-kemungkinan potensi konflik sepanjang pemilu 2004.

Baik para pendengar Delta FM, kita akan jumpa lagi pada Rabu minggu depan, bersama saya Deny J.A. dengan topik yang aktual berikutnya dalam "Dialog Aktual".

**BAB IV**  
**DISINTEGRASI DAN**  
**REKONSILIASI**



## **DARURAT MILITER DI ACEH JILID KEDUA**

Tanggal: 12 Nopember 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Rusdi Marpaung (Imparsial), Ahmad Farhan (Anggota DPR), Tengku Lukmansyah (Mantan Wartawan di Aceh), Usman Hasan (Mantan Penasehat Presiden Soal Aceh)

Gerahan Aceh Merdeka (GAM) sudah berusia lebih dari 25 tahun. Indonesia sudah melewati kepemimpinan tiga presiden, namun GAM tak kunjung dapat ditaklukkan. Kini pemerintah memutuskan memperpanjang kembali Darurat Militer di Aceh. Sebuah pengakuan bahwa GAM memang masih sangat kuat. Apa yang membuat GAM begitu sulit ditaklukkan? Beberapa strategi pernah dicoba, namun semuanya belum berhasil menaklukkan GAM. Kemudian pemerintah mencoba kembali menerapkan Darurat Militer dengan nama "Operasi Terpadu". Tapi enam bulan kemudian ternyata GAM masih menguasai 70 persen senjata yang dimilikinya, dan gembong-gembong GAM tak kunjung bisa ditangkap. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan Megawati memperpanjang Status Darurat Militer. Seberapa efektifkah kebijakan ini untuk menjinakkan GAM? Dan apa pula komplikasinya bagi pemilu lokal di Aceh, juga Pemilu Nasional 2004?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar DeltaFM di mana pun anda berada, terutama anda yang berada di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar ? Kembali dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. Kali ini kita akan mengangkat topik “Darurat Militer di Aceh Jilid Kedua”. Mengapa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) begitu sulit ditaklukkan ? Dan apa pula efek dari Darurat Militer bagi pemilu di Aceh ? Bersama kita hadir seorang aktivis HAM dari Imparsial, Bung Rusdi Marpaung. Selamat pagi Bung.

**RUSDI MARPAUNG:**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Seperti biasa sebelum kita diskusi akan saya sampaikan dulu background-nya. GAM sudah berusia lebih dari 25 tahun. Kita sudah mengganti tiga presiden, namun gerakan ini tak kunjung dapat ditaklukkan. Kini pemerintah memutuskan memperpanjang kembali Darurat Militer di Aceh. Ini sebenarnya sebuah pengakuan bahwa GAM masih begitu kokohnya. Menjadi pertanyaan kita apa yang membuat GAM begitu sulit ditaklukkan, tiyak mati-mati dan terkesan mempunyai seribu nyawa? Beberapa strategi pernah dicoba, namun semuanya belum berhasil menaklukkan GAM. Misalnya di era Orde Baru pernah menerapkan strategi militer yang sangat keras di bawah status Daerah Operasi Militer (DOM). Namun yang terjadi remaja-remaja di sana menjadi bertambah radikal, semakin anti terhadap Indonesia, dan berbondong-bondong bergabung dengan GAM. Di awal Pemerintahan Megawati

diterapkan KOHAN, upaya damai di bawah Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah upaya yang tadinya banyak diharapkan dapat menyelesaikan masalah Aceh, namun di saat yang sama GAM justru bertambah kuat. Bertambah personilnya, bertambah pula senjata yang dimilikinya. Kini pemerintah menerapkan status Darurat Militer dengan nama "Operasi Terpadu." Tapi apa yang terjadi selama enam bulan kemudian ternyata 70 persen senjata masih dipunai oleh GAM, dan juga gembong-gembong GAM tak kunjung ditangkap. Kemudian pemerintah memperpanjang kembali Darurat Militer. Namun masalahnya seberapa efektif langkah ini untuk mengatasi GAM? Dan apa pula komplikasinya bagi pemilu lokal di Aceh dan juga Pemilu Nasional 2004? Kita akan menggali lagi masalah ini bersama Bung Rusdi Marpaung, dan juga beberapa tamu lainnya di line telepon.

Jadi Bung, bagaimana komentar umum anda, pemerintah akhirnya memberlakukan lagi Darurat Militer?

### **RUSDI MARPAUNG:**

Sebuah keputusan yang sangat disesalkan karena Parameter Operasi militer ini sesungguhnya tidak ter-cover dengan baik. Selain parameternya kurang jelas, juga karena sekitar 70 persen senjata masih belum ditemukan sampai Darurat Militer tahap pertama selesai. Karena itu Imparsial tetap konsisten tidak setuju dengan adanya perpanjangan darurat militer ini.

### **DENNY J.A.:**

Pemerintah mengatakan GAM sedang menyiapkan modus operandi baru, sehingga kalau Darurat Militer dicabut, akan

membuat GAM bertambah besar dan membahayakan Aceh sendiri nantinya?

**RUSDI MARPAUNG:**

Ya, tepatnya seperti yang dikatakan, Panglima TNI dan MenkoPolkam, bahwa GAM akan menggunakan teknik gerilya baru, bukan hanya wilayah-wilayah yang besar, tetapi juga wilayah-wikayah yang tersebar. Namun reaksi yang diambil pemerintah justru akan menjadi lelucon. Dari dulu strategi GAM seperti itu, jadi tidak ada yang baru. Sebuah Penyesatan juga kalau rencana Pemerintah itu kita terima, karena teknik gerilya memang sudah dilakukan GAM sejak lama. Tapi kalau misalnya, alasan perpanjangan Darurat Militer karena senjata GAM masih sebanyak 70 persen, lebih bisa diterima. Tapi masalah ini bisa dihadapi dengan operasi biasa, tidak harus dengan Darurat Militer. Karena dalam konteks UU Pertahanan Tahun 2002, memang ada langkah operasi, selain langkah perang. Jadi banyak sekali kemungkinan untuk operasi tanpa lewat Darurat Militer.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda, meskipun kira seruju operasi militer, tetapi bisa menggunakan UU Pertahanan Negara Tahun 2002?

**RUSDI MARPAUNG:**

Ya, tapi masih ada dualisme antara uu Darurat Militer Tahun 1959 dan UU Pertahanan Tahun 2002.

**DENNY J.A.:**

Enam bulan operasi Darurat Militer. Apa kekurangan atau kelemahannya ?

**RUSDI MARPAUNG:**

Mungkin GAM kekuatannya semakin melemah. Seperti dipaparkan media massa, akses komunikasi mereka terputus, akses transportasi dan mobilitasnya juga sudah dihancurkan. Tapi ada efek lain di kalangan masyarakat sipil, yang saya rasa sudah banyak sekali disebutkan. Ada beberapa persoalan seperti pengungsian yang semakin banyak, lebih dari 400.000 orang sekarang. Bukan hanya di sekitar Aceh, tetapi juga sampai keluar. Saya dengar sampai Jakarta. Di wilayah Bisangsoal KTP menjadi problem, meskipun identitas menjadi hak warga negara. Pemisahan KTP Merah Putih dan on-Merah Putih merupakan perlakuan yang diskriminatif dan satu persoalan baru. Ketika ada manipulasi dan sebagainya, KTP bisa dimodifikasi, bisa dengan mudah diperoleh, jadi bukan satu jaminan.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut anda, meskipun enam bulan Darurat Militer itu melemahkan GAM, tetapi efek pada penduduk sipil semakin lama semakin buruk?

**RUSDI MARPAUNG:**

Saya rasa begitu. Kita tidak belajar dari sejarah. Misalnya tidak usah terlalu lama waktu untuk DOM. Sangat nyata bahwa lebih dari 10 tahun pemberlakuan DOM di sana, kebencian terhadap Indonesia atau Jawa semakin memuncak.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung, nanti kita gali lagi. Jadi para pendengar Delta FM kita mendengar sendiri komplikasi dari darurat militer Aceh. Di satu sisi GAM sebagai kekuatan disintegrator yang ingin keluar dari NKRI ingin dilemahkan. Namun langkah yang diambil pemerintah mempunyai efek bagi penduduk sipil yang tidak berdosa, yang terkena dampak buruk dari Operasi Darurat Militer. Lalu bagaimana masalah ini dipecahkan?

Sekarang kita sudah terhubung dengan Ahmad Farhan dari DPR. Selamat pagi Bung, apa kabar?

**AHMAD FARHAN:**

Selamat pagi. Kabar baik.

**DENNY J.A.:**

Saya mendengar anda datang ke Aceh. Bagaimana kesan anda setelah diterapkannya Darurat Militer selama enam bulan?

**AHMAD FARHAN:**

Betul. Pandangan umum masyarakat yang kami jumpai, kondisi Aceh memang lebih kondusif dibandingkan dengan sebelumnya. Temuan ini kita dapatkan dalam perjalanan sepanjang 600 km lebih dari Banda Aceh sampai ke Medan.

**DENNY J.A.:**

Cukup besar wilayah yang anda kunjungi. Kita mendengar anda juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperpanjang Darurat Militer?

**AHMAD FARHAN:**

Itu bukan pandangan pribadi, tetapi pandangan masyarakat yang kita kutip sepanjang perjalanan itu. Saya sebenarnya tidak begitu sependapat dengan perpanjangan Darurat Militer, saya lebih setuju dengan alternatif lain, yang memang sekarang ini keihatannya juga diusulkan oleh TNI, yaitu menyiapkan operasi terpadu.

**DENNY J.A.:**

Ada banyak kawan yang bertanya mengapa tidak diusulkan saja Operasi Militer dalam UU Pertahanan Negara?

**AHMAD FARHAN:**

Saya termasuk yang mengusuikan itu. Saya pernah mengharapkan pemerintah menerapkan kebijakan alternatif.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana Bung Rusdi? Kawan-kawan DPR berkunjung ke Aceh. Data lapangan yang mereka dapatkan menimbulkan pro dan kontra. Tapi DPR tetap mengusulkan Darurat Militer supaya Aceh tuntas keamanannya. Bagaimana komentar anda?

**RUSDI MARPAUNG:**

Saya rasa pendapat sebagian masyarakat yang dilewati Bung Ahmad Farhan boleh saja dikutip. Kita sudah biasa mendengar kasus-kasus seperti kebulatan tekad, seperti masa Orde Baru ada kebulatan tekad memilih Suharto dan sebagainya. Tapi bukan itu satu-satunya pertimbangan apakah kita harus memperpanjang

atau menghentikan Darurat Militer. Kita harus benar-benar bisa melihat ukuran yang nyata. Parameternya harus jelas dan terukur. Kalau 70 persen senjata belum beres, mungkin memang diperlukan operasi militer, tapi bukan darurat militer. Karena data-data di luar menunjukkan korbannya sudah banyak, pengungsian semakin besar, masyarakat ketakutan. Itu yang perlu dikaji lagi. UU Pertahanan bisa dipakai untuk mencapai hal-hal yang belum dicapai TNI.

**DENNY J.A.:**

Kita sudah tersambung dengan Bung Tengku Lukmansyah. Halo bung, bagaimana komentar anda?

**TENGGU LUKMANSYAH :**

Saya tahun 1999 pernah aktif di kewartawanan, dan sempat berkunjung ke hutan tempur di mana ada Tengku Abdullah Syafi'i -Panglima GAM- untuk wawancara. Mereka ternyata menetapkan harga mati untuk merdeka. Saya memang agak miris hati juga karena saya orang Aceh. Waktu kami menanyakan bagaimana dengan referendum yang diusulkan para mahasiswa? Mereka mengatakan, "Itu kami hargai juga, tapi pada intinya kami menetapkan harga mati untuk merdeka." Ini membuat saya kecil hati, padahal saya mengharapkan supaya mereka tidak memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian yang kedua, mereka memang sudah sangat dendam terhadap pemerintah. Pada masa Tengku Abdullah Syafi'i, perjuangan mereka masih murni. Tapi belakangan ini saya kurang tahu, karena saya sudah tidak aktif lagi sebagai wartawan. Saya juga berkunjung ke suatu daerah di mana ada sembilan orang janda yang suaminya semuanya dibantai, maka disebutlah daerah



itu sebagai “Kampung Janda”. Kemudian ada secercah harapan. Karena kita sudah terlalu banyak menyakiti mereka maka sudah selayaknya kalau pemerintah bersikap low profile dan tidak menghantam mereka dengan kekerasan terus.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda setuju Darurat Militer di Aceh diperpanjang atau tidak?

**TENGGU LUKMANSYAH:**

Saya tidak bisa berkomentar lagi. Kalau itu memang dibutuhkan oleh orang Aceh sekarang, silahkan. Tapi kalau hanya sekedar pembicaraan orang di Jakarta saja, saya pikir sulit. Kita hanya mengikuti arus air saja sekarang ini. Secercah harapan jika pimpinan kita yang baru terpilih -Megawati- itu bisa langsung turun bertemu dengan para pejuang GAM dengan rendah hati. Masih ada luka yang harus diobati.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, terima kasih banyak. Jadi para pendengar Delta FM, kita mendengar tadi dua pandangan di lapangan, satu anggota DPR dan satu lagi wartawan, yang mengatakan beberapa hal penting. Di samping ada kemajuan dari Darurat Militer, juga dikatakan bahwa pejuang GAM menganggap Aceh Merdeka sebagai harga mati.

Bagaimana kita harus merespon secara arif, terutama bagi kehidupan Aceh menghadapi pemilu 2004?

**DENNY J.A.:**

Kembali kita menghubungi Bung Ahmad Farhan. Halo bung, tadi kita sudah mendengar dari Tengku Lukmansyah yang mengatakan bahwa Aceh merdeka adalah harga mati. Jadi kemungkinan dialog dengan GAM itu musnah, bagaimana komentar anda?

**AHMAD FARHAN:**

Saya tidak senang mendengarnya sesuatu sebagai harga mati. Kita ini manusia, dalam hukum agama semua hal di dunia ini tidak kekal. Karena tidak kekal maka semua pemikirannya juga menjadi tidak kekal. Jadi saya tidak percaya bahwa dialog tidak bisa dilakukan, akan selalu terbuka ruang untuk dialog, tapi mungkin peluang itu belum optimal kita gunakan.

**DENNY J.A.:**

Jadi pilihan dialog masih mungkin ?

**AHMAD FARHAN:**

Saya berpendapat demikian. Sebenarnya sekarang bola ada di tangan pemerintah. Kalau kita mau mengambil inisiatif itu, sekarang pun bisa, karena waktunya sudah tiba.

**DENNY J.A.:**

Tapi DPR secara kelembagaan memang mendukung perpanjangan Darurat Militer ?

**AHMAD FARHAN:**

Saya kira belum, karena biasanya dilakukan rapat konsultasi antara dewan dengan pemerintah terlebih dahulu. Tetapi kalau dilihat secara personal dan kelengkapan dewan, kelihatannya Komisi I juga memberi respon yang positif.

**DENNY J.A.:**

Lalu bagaimana dengan pemilu nanti kalau Darurat Militer masih diterapkan di Aceh?

**AHMAD FARHAN:**

Pada waktu berkunjung ke Aceh, kami berkonsultasi cukup lama juga dengan Panglima Darurat Militer di sana. Dan kita menyampaikan kekhawatiran semua pihak, apakah itu parpol, para pengamat di Indonesia atau juga kemungkinan pandangan-pandangan asing terhadap pelaksanaan pemilu di bawah keadaan Darurat Militer.

Dia memberi garansi yang cukup kuat, bahwa TNI tidak akan pernah terlibat dalam urusan-urusan intervensi terhadap parpol. Jadi tugas mereka adalah menciptakan keamanan yang sekondusif mungkin agar pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara luber-jurdil. Menjelang pemilu yang akan datang harus ada kelonggaran terhadap kehadiran kelompok-kelompok pemantau pemilu di Aceh. Karena selama ini informasi yang keluar hanya lewat satu pintu kehumasan dari Panglima Komando Operasi (Pangkoops), atau penguasa Darurat Militer. Tapi ke depan hal ini harus dikoreksi, di buka ruang bagi partisipasi para pemantau pemilu, ataupun jurnalis.

**DENNY J.A.:**

Jadi pemilu di Aceh nanti masih membuka ruang bagi para pengawas untuk datang?

**AHMAD FARHAN:**

Saya kira itu penting untuk membuktikan TNI tidak mempengaruhi jalannya pemilu.

**DENNY J.A.:**

Ok BungAhmad Farhan, terima kasih banyak atas pandangan anda. Kita kembali kepada Bung Rusdi Marpaung. Bagaimana Bung Rusdi, Penguasa Darurat Militer di Aceh rernyara masih membuka peluang bagi pengawas atau pamanrau untuk mengawasi jalannya pemilu?

**RUSDI MARPAUNG:**

Kita harus lihat faktanya nanti karena sekarang masih sekedar statemen-statemen. Menurut UU Darurat Militer, militer mempunyai kekuasaan apa saja. Kalau Bung Farhan mengatakan perlu fungsi pernantauan, fungsi itu bahkan bisa dihapuskan menurut ketentuan UU Darurat Militer. Bahkan kabar terakhir yang kita dengar minggu lalu misalnya, VCD atau laguJagu yang ditafsirkan sepihak sebagai mendorong orang untuk memberontak mulai disita oleh militer. Darurat Militer bisa menjamin keamanan, tapi tidak untuk kebebasan berekspresi politik orang per orang. Kekuasaan Darurat Militer bisa mengacaukan pakem-pakem pemilu yang demokratis.

**DENNY J.A.:**

Sekarang kita menghubungi Bung Usman Hasan, mantan Penasehat Presiden soal Aceh. Selamat pagi bung, apa kabar? Apa pandangan anda secara umum mengenai diterapkannya kembali Darurat Militer di Aceh?

**USMAN HASAN:**

Kabar baik, selamat pagi. Kalau kita melihat UU Darurat Militer, memang tidak ada larangan-larangan tentang pemilu. Hanya memang para Penguasa Darurat Militer dapat melakukan banyak tindakan yang bisa ditafsirkan mengurangi kebebasan. Tetapi kalau memang itikad dan tekad para Penguasa Darurat Militer ini untuk mensukseskan pemilu, tentu banyak juga yang bisa dilakukan untuk memberikan kebebasan melakukan pemilu.

**DENNY J.A.:**

Anda cukup banyak tahu mengenai Aceh dan pernah menjadi Penasehat Presiden soal Aceh. Apakah Darurat Militer perlu diterapkan ketika pemilu berlangsung di Aceh ?

**USMAN HASAN:**

Kedudukan Darurat Militer sesungguhnya tidak ada urusan langsung dengan pemilu. Penerapan Darurat Militer hubungannya dengan adanya GAM, keiompok bersenjata di sana. Kalau dalam pemilu nanti GAM masih ada, mereka akan memakai rumus yang sama.

Kecuali kalau GAM-nya tidak ada lagi, maka tidak diperlukan lagi Darurat Militer.

**DENNY J.A.:**

Tapi sampai bulan April ini mustahil GAM tidak ada lagi.

**USMAN HASAN:**

Tampaknya begitu. Alasan yang sama digunakan pemerintah untuk memperpanjang Darurat Militer. Tapi tidak ada hubungannya dengan pemilu menurut saya.

**DENNY J.A.:**

Secara profesional anda juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperpanjang Darurat Militer?

**USMAN HASAN:**

Bukan saya. saya melihat pandangan kelompok-kelompok strategis yang ada di Aceh, seperti ulama, kalangan pengusaha, dan tokoh masyarakat tertentu. Mereka memandang Darurat Militer menguntungkan rakyat Aceh, karena terbebas dari berbagai ancaman pihak-pihak yang bersenjata. Sebagian dianggap GAM, sebagian lagi kelompok bersenjata lainnya, saya tidak tahu kelompok apalagi itu.

**DENNY J.A.:**

Tadi Bung Rusdi Marpaung mengatakan operasi militer di bawah UU Pertahanan Negara, sebagai alternatif Darurat Militer. Mana yang lebih baik menurut anda ?

### **USMAN HASAN:**

Apapun strateginya, bagi orang Aceh tidak begitu penting, seperti ada pemilu atau tidak bagi mereka juga tidak Penting. Yang penting mereka terjamin hidupnya, bisa mencari nafkah, bisa melakukan pendidikan dan ibadah. Tiga hal itu yang paling pokok bagi orang Aceh, karena sudah cukup lama dizalimi, terlibat konflik berkepanjangan. Kalau memang katakanlah adanya TNI di sana bisa menjamin hal-hal tersebut, mereka akan senang. Tetapi kalau adanya militer justru mengganggu, mereka akan melawan.

### **DENNY J.A.:**

Ok Bung Usman Hasan, terima kasih banyak atas pandangan anda. Para pendengar Delta FM, tadi kita sudah mendengar pandangan mantan Penasehat Militer Presiden Soal Aceh, yang mengatakan bahwa dengan Darurat Militer enam bulan ini, banyak segmen di Aceh justru merasa aman, seperti ulama dan lain sebagainya. Karena keamanan menjadi kebutuhan pokok di Aceh, maka disarankan Darurat Militer ini diperpanjang, dengan alternatif operasi militer di bawah UU Pertahanan Negara.

Saya bacakan dulu berbagai SMS pendengar yang masuk. SMS pertama mengatakan, "Dialog terhadap GAM sudah pernah dicoba tapi belum ada hasilnya, karena itu perlu adanya darurat militer". Kedua, Bung Kaunang, Bandung, mengatakan, Aceh merasakan manfaat dari operasi terpadu. Kepada pengamat yang kritis kasus Aceh, apa yang sudah anda sumbangkan?" Ketiga, Bung Rahmat mengatakan, "Libatkan rakyat Aceh dalam perang melawan GAM." Terakhir, dari Bung Prananto yang mengatakan, "sebaiknya Darurat Militer kembali diterapkan, dengan catatan harus mengedepankan segi-segi kemanusiaan. " terima kasih banyak kepada semua opini lewat SMS yang beragam itu.

Kita kembali kepada Bung Rusdi Marpaung. Kita mencoba menggali kemungkinan lain dari Darurat Miliret, seperti yang banyak dikatakan para pengamat, bisa saja operasi militer di bawah UU Pertahanan Negara, hanya di kabupaten-kabupaten yang rawan saja. Bagaimana menurut anda, mengapa lebih baik operasi militer?

**RUSDI MARPAUNG:**

Ada dualisme dalam soal Aceh ini. Pertama, ada UU Darurat Militer Tahun 1959, yang pelaksanaannya dipimpin Endang Suwarya, yang mandatnya adalah membuat pemerintahan militer, tapi tidak dilakukan juga. Artinya kdau dia konsisren sebagai penguasa Darurat Militer, dia sebenarnya bisa membuat gubernur tidak mempunyai peran lagi. Semua posisi kepala daerah, sampai tingkat kabupaten bisa diisi oleh militer. Tapi di sisi lain ada Pangkoops Bambang Darmono yang juga berkaitan dengan operasi di bawah UU Pertahanan Tahun 2002, yang bertanggungjawab ke Panglima TNI.

Sedangkan UU Darurat Militer 1959 penanggungjawabannya kepada Menko Polkam dan Presiden. Terjadi kerancuan, ditambah lagi Gubernur Puteh masih tetap menjalankan pemerintahan. Jadi gado-gado sistem yang diterapkan, dan tidak jelas otoritasnya. Yang kedua, bila melihat apa yang terjadi di lapangan menurut saya banyak juga kasus-kasus kemanusiaan dan lain-lain. Sekarang bagaimana kita bisa support TNI untuk bicara secara profesional, kalau mau melakukan operasi, lakukan operasi yang benar.



**DENNY J.A.:**

Misalnya UU Darurat Militer dicabut dan hanya menggunakan UU Pertahanan Negara, berarti gubernur atau Penguasa sipil masih menjadi penguasa otoritas tertinggi di sana?

**RUSDI MARPAUNG:**

Ya, masih tetap.

**DENNY J.A.:**

Ada kritik justru pemerintah daerah di sana kurang begitu efektif sehingga ingin dihindari. Apakah itu bisa membentuk pemerintahan transisi sebagai alternatif lain ?

**RUSDI MARPAUNG:**

Mungkin bisa, makanya alternatif-alternatif itu harus dikumpulkan. Masih ada waktu buat pemerintah untuk mengkaji ulang semua alternatif pemecahan Aceh.

**DENNY J.A.:**

Jadi begitu banyak pilihan bung. Pertama Darurat Militer diteruskan. Kedua, Darurat Militer dicabut dan diganti dengan operasi militer berdasarkan UU Pertahanan Negara. Ketiga, kemungkinan dibentuknya pemerintahan transisi yang memang secara khusus diberi mandat dengan jangka waktu tertentu untuk menangani konflik di Aceh. Dari tiga ini, anda memilih yang mana Bung?

**RUSDI MARPAUNG:**

Saya pikir Darurat Militer pasti tidak kami sarankan, bahkan kami tolak. Kami mengharapkan itu dihindari saja, dan lebih baik pemerintahannya saja diperbaiki.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Rusdi Marpaung, rerima kasih banyak atas kehadiran anda, yang telah memberikan pandangan-pandangan dari kelompok aktivis HAM.

Para pendengar Deha FM di mana pun anda berada, mungkin sebuah kompromi bisa dibuat. Seperti kita ketahui dibutuhkan sebuah security di Aceh, tapi publik di Aceh juga membutuhkan pemilu yang legitimate. Mungkin solusinya Darurat Militer bisa diperpanjang sampai sebelum pemilu saja. Ketika pemilu berlangsung, kita membuat lagi peta baru, misalkan dipisahkan daerah yang masih rawan dengan daerah yang sudah aman. Di daerah yang sudah aman diterapkan saja undang-undang yang biasa, di daerah yang masih rawan mungkin perlu dikawal oleh operasi militer, dan itu pun hanya bisa dengan menggunakan UU Pertahanan Negara. Karena bagaimana pun di samping kita perlu menumpas GAM, kita juga membutuhkan pemilu yang legitimate, dan luber-jurdil.

Sampai jumpa lagi bersama saya Denny J.A. dalam “Dialog Aktual” Rabu depan dengan isu yang hot di minggu itu.

## **MELUMPUHKAN GERAKAN ACEH MERDEKA DI SWEDIA**

Tanggal: 4 Juni 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Bantarto Bandoro (Pengamat Hubungan  
Internasional CSIS),  
Yasril Ananta (Anggota F-Golkar DPR-RI)

Persoalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tak kunjung selesai, menimbulkan persoalan serius dalam hubungan bilateral Antar Indonesia dan Swedia. Semua orang tahu siapa Hasan Tiro. Dia adalah pemimpin tertinggi GAM yang berstatus warga negara Swedia. Hasan Tiro kini hidup nyaman di Swedia, dilindungi oleh hukum nasional di sana, sementara manuver politiknya membuat rakyat Aceh gonjang-ganjing, sebagian menjadi pengungsi, sebagian masuk-keluar hutan, sebagian ada yang terbunuh. Pemerintah Indonesia juga mendapatkan beban politik tambahan akibat aksinya. Persoalan menjadi sangat rumit karena Pemerintah Swedia cenderung tidak kooperatif terhadap upaya Pemerintah Indonesia untuk mempersoalkan tindakan-tindakan Hasan Tiro. Dengan alasan melindungi HAM dan hak warga negaranya, Pemerintah Swedia cenderung menutup akses Pemerintah Indonesia terhadap Hasan Tiro. Meskipun sejumlah bukti meyakinkan tentang

tindakan-tindakan Hasan Tiro yang merongrong pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah disodorkan. Sejumlah opsi telah diwacanakan untuk merespon sikap tidak kooperatif Pemerintah Swedia terutama dengan masalah Hasan Tiro dan GAM: pembekuan hubungan bilateral, boikot produk-produk Swedia, meminta intervensi PBB, meminta intervensi Amerika dalam konteks perang terhadap terorisme, bahkan yang paling serius: memutushan hubungan diplomatik secara total.

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Medan. Kembali bersama saya Denny J.A. dalam “Dialog Aktual” dengan topik kali ini “Melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka di Swedia”. Topik yang sekarang menjadi headline di berbagai media massa.

Kita mengetahui GAM sesungguhnya tidak dipimpin oleh orang Indonesia, tetapi oleh HasanTiro yang sudah menjadi warga negara Swedia. Hasan Tiro kini hidup nyaman di Swedia, dilindungi oleh hukum nasional Swedia. Sementara manuver politiknya menyebabkan rakyat Aceh gonjang-ganjing. Sebagian menjadi pengungsi, sebagian masuk-keluar hutan, sebagian ada yang terbunuh karena ulahnya. Pemerintah Indonesia pun mendapatkan beban politik tambahan. Jika diibaratkan ular, GAM ini hanya badan dan ekornya saja yang di Aceh, sedangkan kepalanya di Swedia.

Sebagaimana ular, kadang-kadang jika kepalanya dulu yang dipegang, badan kakinya lebih mudah dilumpuhkan. Persoalannya bagaimana kita melumpuhkan pimpinan GAM yang berada di Swedia yang sudah menjadi warga negara Swedia, dan dilindungi pemerintah Swedia.

Bersama kita pengamat Hubungan Internasional dari CSIS, Bung Bantarto Bandoro. Selamat pagi bung.

**BANTARTO BANDORO:**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Kita mendengar Swedia menolak memproses secara hukum Hasan Tiro dan lainnya karena dinilai belum ada satu pun pasal dari hukum nasional Swedia yang dilanggar. Bagaimana anda melihatnya?

**BANTARTO BANDORO :**

Sebenarnya tidak ada yang keliru pemerintah Indonesia mengirimkan tim keempat ke Swedia untuk mencari tahu, seberapa seriuskah Swedia ingin bekerja sama dengan kita untuk mengatasi masalah GAM. Hasan Tiro seperti yang dikatakan tadi adalah warga biasa yang memang banyak melakukan kegiatan-kegiatan politik. Tetapi belum ada bukti-bukti dia melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum politik Swedia. Seperti yang kita ketahui pemerintah Swedia tidak akan mengambil inisiatif untuk memproses secara hukum Hasan Tiro sebelum ada bukti tindakannya melanggar hukum.

**DENNY J.A.:**

Bagi Swedia yang penting adalah hukum nasional. Tidak terlalu peduli hukum nasional negara lain bahkan internasional, begitu?

**BANTARTO BANDORO :**

Dalam perspektif yang lebih umum hukum internasional tidak berlaku secara mudak terhadap hukum nasional. Karena itu manakala terjadi sesuatu terhadap warga negaranya, maka yang berlaku adalah hukum nasional. Seperti yang telah ditunjukkan Swedia kepada pemerintah kita.

**DENNY J.A.:**

Bung Bantarto, kita mendengar dari media massa, yang dipentingkan Swedia adalah apakah hukum nasional Swedia dilanggar oleh Hasan Tiro atau tidak.

**BANTARTO BANDORO:**

Benar, kalau tidak ada bukd Hasan Tiro melakukan pelanggaran terhadap hukum positif di sana, maka ddak ada alasan bagi Swedia untuk tunduk pada kemauan Indonesia.

**DENNY J.A.:**

Misalnya dapat dibuktikan bahwa Hasan Tiro mempunyai kaitan yang erat dengan aneka kriminal yang dilakukan di negara-negara lain di luar Swedia?

**BANTARTO BANDORO:**

Kalau pemerintah Swedia atau Indonesia bisa membuktikan bahwa Hasan Tiro melakukan tindakan itu, maka bukan tidak mungkin prosedur hukum yang akan berlaku.

**DENNY J.A.:**

Kalau kita mengikuti permainan Swedia, bahwa yang penting hukum nasionalnya tidak dilanggar, maka solusi yang perlu kita lakukan adalah mengirim tim ke sana untuk mempelajari hukum nasional Swedia dan melihat adakah potensi pasal-pasal yang dilanggar Hasan Tiro?

**BANTARTO BANDORO:**

Ada langkah-langkah untuk mengeksplor pasal-pasal mana yang telah dilanggar Hasan Tiro. Tetapi yang mempunyai kewenangan penuh itu Swedia bukan kita. Jadi kita harus bisa membuktikan kebalikan dari apa yang pernah dikatakan pemerintah Swedia.

**DENNY J.A.:**

Berarti kita harus mengikuti prosedur pengadilan Swedia untuk masuk ke sana, mengirim pengacara untuk mempelajari proses hukum di sana?

**BANTARTO BANDORO:**

Kalau memang menjadi salah satu dari tujuan kunjungan tim ke sana dan akhirnya masalah ini bisa diselesaikan lewat prosedur hukum, mengapa tidak?

**DENNY J.A.:**

Kita tidak mengetahui detail hukum di Swedia. Tetapi secara common sense bisa terjadi, warga negara Indonesia misalnya melakukan pembunuhan yang sadis di di luar negeri, kalau bukti-bukti itu kuat, tentu pemerintah Indonesia akan terdorong, minimal secara moral untuk menindak warganya sendiri”

**BANTARTO BANDORO:**

Sejauh dianggap melanggar hukum positif negara yang bersangkutan, bisa. Tetapi kalau Indonesia gagal membuktikan, maka proses diplomasi adalah cara paling efektif. Peluang diplomasi sangat terbuka, dan itu yang bisa dilakukan pemerintah selain melalui jalur bilateral.

**DENNY J.A.:**

Bung Bantarto, kalau kita mencoba jalur diplomatik untuk menekan pemerintah Swedia, instrumen epayarngbisa kita lakukan?

**BANTARTO BANDORO**

Selain melalui jalur bilateral, adalah meminta PBB untuk mendaftarkan GAM sebagai kelompok teroris.

**DENNY J.A.:**

Secara bilateral misalnya Indonesia mengancam memutuskan hubungan diplomatik, seberapa efektif?

**BANTARTO BANDORO:**

Itu salah satu dari tiga opsi jika pemerintah Swedia tidak pernah mau kooperatif.

**DENNY J.A.:**

Opsi pertama?



**BANTARTO BANDORO:**

Pertama, menurunkan derajat hubungan dari perwakilan duta besar menjadi kuasa usaha. Kedua membekukan sementara hubungan diplomatik. Ketiga pemutusan hubungan diplomatik secara total.

Banyak yang mendesak Indonesia untuk mengambil opsi yang ketiga, memutuskan hubungan diplomatik. Tetapi bisa kontraproduktif, sebab kita bisa menggunakan Swedia untuk “mencari tahu secara persis” sejauhmana Hasan Tiro melakukan kegiatan-kegiatan yang merongrong pemerintah kita. Jika hubungan diplomatik diputuskan kita akan kehilangan kontak dan akses untuk mencari info yang up to date mengenai Hasan Tiro.

**DENNY J.A.:**

Hasan Tiro mengharap hubungan ini diputuskan?

**BANTARTO BANDORO:**

Benar, karena dia akan mempunyai ruang yang besar untuk bergerak. Saya tidak menyarankan opsi itu digunakan. Tetapi cobalah rnenekan Swedia seefektif mungkin untuk bekerja sama.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda kita bisa mengancam menurunkan derajat hubungan, sambil menempuh jalur hukum dengan mengirim pengacara, tetapi untuk konsumsi domestik perlukah image bahwa kita melakukan banyak hal untuk menyeret Hasan Tiro?

**BANTARTO BANDORO:**

Betul, dan yang penting untuk dilakukan pada saat yang bersamaan adalah menjalankan operasi terpadu secara lebih konsekuen supaya bisa meyakinkan dunia.

**DENNY J.A.:**

Jika jalur hukum terlalu lama, jalur diplomatik kontraproduktif bagaimana jika memboikot barang-barang Swedia?

**BANTARTO BANDORO:**

Hubungan dengan Swedia tidak sama dengan Australia atau Amerika Serikat yang pernah mengalami pasang surur. Memboikot bisa saja dilakukan, tetapi apakah bisa menyelesaikan GAM secara menyeluruh. Ini perlu diperhatikan. Sebaiknya tidak mengambil cara-cara yang tidak realistis.

**DENNY J.A.:**

Anda menganjurkan solusi-solusi yang lebih dingin, rasional dan realistis, walaupun banyak politisi ingin memberikan kesan kepada Swedia bahwa kita marah. Kita boleh memperlihatkan kebijakan yang emosional tetapi juga penting untuk memberikan image bagus Swedia begitu ?

**BANTARTO BANDORO:**

Benar, kita tidak perlu emosional dengan pemutusan hubungan diplomatik, karena itu pilihan terburuk.

**DENNY J.A.:**

Tampaknya HasanTiro sangat terlindungi. Apakah ketika berubah menjadi warga negara Swedia dia sudah memperhitungkan semua hal ini?

**BANTARTO BANDORO:**

Betul. Ketika dia ke Swedia tahun 1970-an, sudah berpikir jangka panjang bahwa dengan mengadopsi kewarganegaraan Swedia dia akan bebas melakukan apa saja.

**DENNY J.A.:**

Ketika kita sedang memproses ke sana, Swedia menutup kedutaannya di Jakarta. Secara hubungan internasional, menurut anda ini sinyal apa?

**BANTARTO BANDORO:**

Sinyal bahwa Swedia tidak main-main. Mereka sungguh-sungguh memproteksi kepentingan-kepentingan Swedia di Jakana. Penutupan kegiatan kedutaan besar Swedia di Jakarta, bisa dimengerti karena ada unsur ancaman yang muncul. Sebenarnya Swedia berupaya keras bisa melakukan kontak formal dengan pemerintah.

**DENNY J.A.:**

Berbagai cara sudah kita tempuh tetapi tidak cukup membuat Swedia melakukan sesuatu terhadap Hasan Tiro. Bagaimana menurut anda?

**BANTARTO BANDORO:**

Swedia betul-betul taat terhadap hukum, tidak seperti Indonesia. Artinya manakala dia sudah memutuskan akan melindungi warga negaranya, dia akan melakukannya sekuat mungkin.

**DENNY J.A.:**

Kecuali Indonesia bisa menunjukkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan begitu ?

**BANTARTO BANDORO :**

Itulah yang diharapkan untuk memperlunak sikap Swedia.

**DENNY J.A.:**

Bukti-bukti itu pun harus diproses di pengadilan nasional Swedia?

**BANTARTO BANDORO:**

Betul, karena salah satu media yang bisa membuktikan adalah pengadilan. Dan ini menjadi yurisdiksi Swedia.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, tampaknya jalur-jalur bilateral tidak terlalu ampuh untuk menjinakkan Swedia. sekarang kita hubungi Yasril Ananta dari DPR selaku wakil rakyat, dan mengawasi kerja pemerintah. Bung Yasril, apa yang anda rekomendasikan untuk dilakukan pemerintah terhadap Swedia dan Hasan Tiro?

**YASRIL ANANTA:**

Pembekuan hubungan diplomatik dengan Swedia.

**DENNY J.A.:**

Sementara atau permanen?

**YASRIL ANANTA:**

Yang namanya pembekuan itu sementara. Saya belum sampai pada tahap pemutusan diplomatik, karena lebih berat administrasinya dalam pembukaan kembali.

**DENNY J.A.:**

Dengan pembekuan ini, message apa yang ingin disampaikan?

**YASRIL ANANTA:**

Message bahwa Swedia tidak memperhatikan permintaan Indonesia. Padahal bukti-bukti secara logis, lisan dan tertulis sudah kita sampaikan. Dalam hubungan bilateral atau hubungan antar negara, ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, saling menghormati, dalam arti sding menghargai. Kedua, saling pengertian. Ketiga, saling menguntungkan dan keempat, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Empat hal ini dilanggar oleh Swedia. Untuk apa lagi kita berhubungan? Kita harus memberikan sinyal kuat kepada pihak luar bahwa sesulit apapun kita di dalam negeri, tetapi kalau sudah menyangkut harkat diri bangsa, kita harus bersikap tegas.

**DENNY JA.:**

Anda mementingkan imageke dunia internasional untuk presiden selanjutnya?

**YASRIL ANANTA:**

Jelek-jelek Indonesia adalah pendiri Gerakan Non Blok, pendiri ASEAN, bahkan menjadi pemimpinya. Kita tunjukkan Peranan kita. Malaysia saja berani melawan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Bukan berarti nasionalisme kita sempit, atau kita emosional dan sok tahu.

**DENNY J.A.:**

Apakah anda menganjurkan kita memeriksa hukum nasional Swedia, apakah ada pasal yang dilanggar Hasan Tiro sehingga kita bisa memproses melalui pengadilan di sana?

**YASRIL ANANTA:**

Itu bisa kita pertanyakan melalui duta besar Swedia di Jakarta. Apakah betul tidak ada hukum nasional mereka yang mengatur kalau ada warga negaranya membuat tindak pidana, tindak kriminal, apalagi gerakan teroris di luar negeri harus dihukum? Bagaimana dengan konvensi PBB yang ada, bagaimana dengan resolusi PBB mengenai terorisme internasional yang dikeluarkan saat WTC di New york digempur teroris.

Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana seandainya saya dan pak Bantarto yang memimpin gerakan ini, yang ingin memisahkan sebuah tempat di Swedia. Apa Swedia dengan bermacam-macam moncongnya seperti masyarakat Eropa, termasuk Amerika, Inggris,

tidak melakukan preventive attack pada kita di sini? HAM dan demokrasi itu hanya kedok mereka untuk menekan negara-negara berkembang.

**DENNY J.A.:**

Kalau Indonesia super power, kita bisa mengebom Swedia?

**YASRIL ANANTA:**

Saya tidak berpikir begitu.

**DENNY J.A.:**

Seandainya kita membekukan hubungan diplomatik tetapi Swedia tidak memberikan respon yang memadai. Apalagi yang harus dilakukan?

**YASRIL ANANTA:**

Ya sudah. Kita tidak ada urusan sama Swedia, itu upaya maksimal. Lalu penurunan derajat. Sebenarnya ini sudah harus kita lakukan tahun lalu atau beberapa bulan sebelumnya. Kalau sekarang baru dilakukan, itu namanya terlambat. Kita harus sampai pembekuan hubungan. Saya tidak sampai meminta memutuskan hubungan diplomatik.

**DENNY J.A.:**

Pendengar Delta FM, anda mendengar dua cara pandang terhadap masalah Swedia. Yang satu dari jalur hukum akademis internasional, yang satu dari perspektif seorang politisi. Penting membuat image bahwa Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja

dan penting juga membuat tindakan yang keras terhadap Swedia sehingga memberikan isyarat kepada dunia bahwa inilah respon Indonesia jika kepentingan nasional diganggu.

Sekarang kita menderima telepon dari Bung Damiri. Halo bung.

**DAMIRI:**

Halo Bung Denny. Saya ingin bertanya soal hukum internasional. Apakah Aceh benar masuk ke dalam NKRI? Karena Aceh dan daerah lain pada tahun 1945 masuk NKRI secara politis saja, tidak ada satu pun hukum pada saat itu meminta Aceh dan wilayah lain masuk ke dalam NKRI. Aceh dari zaman dahulu adalah sebuah negara yang besar, tidak pernah menyerah kepada Belanda. Jaman Soekarno mereka ditipu, jaman Soeharto mereka diperkosa hak-hak asasinya. Sekarang kita langsung mengatakan bahwa gerakan Aceh adalah pemberontak dan teroris. Apakah itu adil?

**DENNY J.A.:**

Terima kasih Bung Damiri, anda mengungkapkan background luka publik Aceh yang membuat GAM tumbuh subur.

Ada beberapa SMS yang rnsuk. SMS pertama menyatakan, “Kekuatan Swedia ada pada penanaman modal di Timur Tengah dan Afrika. Maka carilah bantuan dari negara-negara itu untuk menekan Swedia!”. SMS berikutnya menyatakan, “Bagaimana dan mengapa Hasan Tiro bisa menjadi warga negara Swedia, ini pilihan yang sangat cerdas supaya dilindungi oleh hukum Swedia dan tidak terjangkau oleh pemerintah kita”. Lalu SMS Priyambodo di Bogor berbunyi, “Kita bisa memohon kepada George Bush agar Hasan Tiro bisa ditangkap dan dibawa ke Indonesia”.



Sekali lagi bergantung kepada Amerika Serikat, karena hanya negara inilah yang bisa memaksa Swedia unruk membawa Hasan Tiro ke Indonesia. Kembali ke Bung Bantarto, bagaimana anda mengomentari suara-suara publik ini?

### **BANTARTO BANDORO:**

Memang sejarah membuktikan masyarakat Aceh adalah korban ketidakadilan pemerintah pusat yang sudah berlangsung lama. Tetap juga tidak banyak yang membantah bahwa Aceh bagian dari NKRI sehingga kalau misalnya ingin memisahkan diri dari konsep NKRI bukan tidak mungkin mereka akan diberi label sebagai kelompok pemberontak. Dan memang mereka adalah pemberontak yang mencoba memisahkan diri dari hukum teritori kita.

### **DENNY J.A.:**

Ok terima kasih banyak Bung Bantarto, pengamat hubungan internasional CSIS.

Para pendengar, demikianlah anda telah mendengar bersama masalah Aceh, GAM dan Swedia. Kita mengerahui bahwa GAM tumbuh karena kekeliruan kebijakan pemerintah pada masa silam, tetapi koreksinya harus pula pada revisi kebijakan pemerintah. Jika solusinya pemisahan diri, separatisme, maka itu adalah solusi yang bahkan di negara demokratis pun tidak dikenal dan akibatnya para aktifis GAM dengan mudah diberi label pemberontak atau pemimpin separatis.

Demikianlah para pendengar Dela FM, kita berjumpa lagi minggu depan hari Rabu dengan topik yang menarik di minggu itu.

## KEMBALINYA KEKERASAN DI POSO MENJELANG PEMILU 2004

Tanggal :15 Oktober 2003

Host: DennyJ.A.

Narasumber: Laode Ida (Pengamat Konflik Daerah), Munir (Ketua Imparsial),  
Zainudin Paru (Ketua Pahang)

Poso kembali membara. Minggu ini sekelompok orang bersenjata yang kelihatan sangat menyerang empat desa sekaligus di Poso. Delapan orang tewas dan banyak yang luka-luka. Ada dugaan, ini ulah sekelompok orang terorganisir yang kembali ingin memicu konflik horisontal di Poso. Kita mengetahui, bagaimana dua tahun lalu, Poso terkoyak oleh tragedi berdarah antar agama. Menjadi lebih rumit masalahnya karena peristiwa berdarah kali ini pada saat-saat menjelang pelaksanaan Pemilu 2004.

Benarkah kerusuhan di Poso hanya kriminal biasa, atau peristiwa antar agama murni? Ataupun ada agenda lebih jauh untuk mengacaukan persiapan pelaksanaan pemilu di sana?

### **DENNY J.A:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta Makassar, Manado, Bandung dan Medan,

jumpa lagi dalam “DialogAktual” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “Kembalinya Kekerasan di Poso Menjelang Pemilu 2004”.

Sebelum kita diskusi, kita berikan dulu background-nya. Minggu ini telah kembali terjadi kekerasan di Poso. Sekelompok orang yang sangat terlatih dan bersenjata menyerang empat desa sekaligus, delapan tewas dan banyak yang luka-luka. Banyak yang menduga ini bukan peristiwa kriminal biasa. Diduga ada sekelompok orang terorganisir yang kembali ingin memicu konflik horisontal setidaknya di mulai dari Poso. Kita mengetahui dua tahun lalu tragedi berdarah kembali terjadi di sana. Konflik agama yang sangat parah, ada Laskar Islam, ada Laskar Kristen. Jika kembali terjadi konflik berbasis agama, mungkin bisa segera merembet ke tempat lain. Memang setelah peristiwa dua tahun lalu itu banyak sekali terjadi kesepakatan, ada yang namanya “Deklarasi Malino”. Namun setelah deklarasi disepakati, konflik kembali terjadi. Banyak yang bertanya apakah kekerasan baru ini akan membangkitkan kembali konflik horisontal. Akankah kekerasan di Poso menular ke wilayah lain. yang lebih mendesak lagi, apakah ini awal dari kerusuhan menjelang pemilu 2004?

Bersama kita pakar otonomi daerah, Bung Laode Ida. Bagaimana bung kita melihat kembali terjadi kekerasan, di Poso, bagaimana secara umum anda melihatnya?

**LAODE LDA:**

Kekerasan di Poso bisa dilihat dari berbagai aspek. Pertama, memang kalau spekulasinya bersifat makro, maka kita melihat ada satu agenda untuk menciptakan kekacauan di intern Indonesia. Spekulasi ini diperkuat asumsi bahwa sebenarnya pasca tragedi

11 September dua tahun lalu, ada upaya untuk terus-menerus mendiskreditkan umat Islam, sehingga kelompok-kelompok targetnya selalu terkait dengan umat Islam. Kedua, berkaitan dengan politik nasional sekarang pasca era Soeharto, tentara diajak kembali ke barak, pada saat yang sama kepemimpinan sipil ternyata tidak mampu mengelola bangsa ini secara baik sehingga ada berbagai kerusuhan. Muncul spekulasi di sini bahwa sebenarnya ada agenda terselubung di balik kerusuhan itu untuk menampilkan kembali dominasi militer di arena politik.

**DENNY J.A.:**

Bukan main, jadi masalah konflik di poso ini bisa ditarik-tarik, pertama ke masalah global, atau ke isu nasional dalam kaitan kembalinya rentara ke dunia politik.

**LAODE IDA:**

Ya, tapi ada aspek kedga yang harus dilihat, aspek lokal. Di Poso sebetulnya terjadi proses pemarjinalisasian kelompok-kelompok lokal oleh kalangan pendatang. Ini realitas di tingkat lokal. Ada dua suku yang ada di Poso, yaitu “Suku Pamona” dan “Suku Bungku”. “Suku Pamona” umumnya Kristen Protestan dan “Suku Bungku” kebanyakan campuran antara Islam dan Kristen. Ada suku yang lain sebenarnya sebelum dipecah menjadi Kabupaten Morowali, yaitu “Suku Mori” yang memang ada di Poso juga, dan umumnya beragama Kristen Protestan juga.

**DENNY J.A.:**

Jadi ada masalah keberagaman, beda secara suku, beda secara agama, ada pendatang ada juga penduduk asli.

**LAODE IDA:**

Ya. Kalau pendatang sekarang menguasai perkotaan, sektor perkotaan, ekonomi perkotaan. Juga politik lokal milik pendatang. Sedangkan penduduk asli yang umumnya Kristen Protestan berada di pedesaan dan termarjinalisi secara politik.

**DENNY J.A.:**

Ok bung jadi ada tiga kemungkinan yang pertama konflik lokal, kedua yang lebih nasional karena isu-isu tentara yang kembali ke politik, ketiga isu global masalah terorisme. Kita melihat di lapangan konflik dimulai dengan adanya sekelompok orang yang terlatih menyerang di subuh hari dengan senjata. Kira-kira mana yang paling mungkin dari ketiga perspektif ini, kalau itu fakta lapangannya?

**LAODE IDA:**

Mungkin ada relasi antara persoalan lokal dan fenomena politik di tingkat nasional. Tapi harus dibuktikan juga karena kalau kita mengatakan satu kelompok yang well organize itu sebetulnya siapa, apakah memang betul dikatakan itu adalah kelompok Laskar Islam menghadapi Laskar Kristen misalnya? Saya belum terlalu percaya. Tetapi kalau mau ditarik dengan agenda nasional misalnya, akibat perubahan-perubahan politik di tingkat nasional, mungkin saja yang well organize ini merupakan kekuatan yang harus dijelaskan dengan teori invisible hand, tangan-tangan yang tidak bisa terlihat, tidak bisa tersentuh. Tapi ini spekulasi juga.

**DENNY J.A.:**

Memang jawaban yang paling pasti adalah ketika investigasi sudah dilakukan. Anda yang juga well inform terhadap konflik di daerah, jika anda melihat ada kelompok terorganisir yang menyerang di subuh hari, dan ingin memprovokasi sebuah konflik baru, mana yang paling mungkin di antara ketiga perspektif yang anda kembangkan?

Apakah ini bagian dari agen global, agen nasional atau konflik-konflik lokal belaka?

**LAODE IDA:**

Saya menduga dua yang terakhir, nasional dan lokal. Tapi di Poso sudah coba diselesaikan dengan perremuan Malino II. Tapi kita ketahui penyelesaian Malino II hanya penyelesaian di permukaan yang tidak membumi sehingga tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh mereka yang bertikai di lapangan.

**DENNY J.A.:**

Coba kita lihat lebih detail lagi, mungkin publik perlu disegarkan lagi. Sebenarnya seberapa parah konflik yang pernah terjadi dua tahun lalu di Poso?

**LAODE IDA:**

Poso paling tidak berada pada urutan kedua terparah setelah Ambon. Tapi Poso lebih bertahan lama ketimbang Ambon karena mempunyai sejarah sosial yang berbeda dengan Ambon. Watak konflik Poso perlu diamati sebenarnya, mengapa konflik terjadi hampir selalu menjelang bulan puasa? Mungkin puasa menjadi

peluang yang terbaik menurut kalangan penggerak konflik untuk lebih melanggengkan konflik.

**DENNY J.A.:**

Probability untuk lebih meluaskan konflik menjelang bulan puasa. Ok bung, sebelum kita detailkan, sekarang ada Cak Munir dari Imparsial. Halo Cak Munir, apa kabar? Kita ingin mendengar komentar anda mengapa kembali terjadi kekerasan di Poso?

**MUNIR:**

Kabar baik. Saya melihatnya dua soal pada konflik Poso. Pertama sentimen dasar dalam konflik masyarakat Poso tidak pernah dipecahkan. Karena menurut saya agama itu hanyalah semacam identitas dari konflik, tapi sebetulnya sumber-sumber konfliknya sangat luas menyangkut segregasi ekonomi, segregasi birokrasi, soal-soal yang berkaitan dengan politik lokal dan sebagainya.

Ini sebenarnya mirip dengan kasus di Kalimantan dan Maluku, cuma identitasnya yang berbeda-beda. Di Kalimantan identitasnya lebih ke etnis, kemudian di Maluku ataupun di Poso lebih kepada agama. Tetapi di Maluku dulu diawali juga dengan identitas etnis kemudian switch ke agama. Nah, sementara policy-policy besar pemerintah untuk membantu proses itu tidak ada satu model yang integratif antara kebijakan mendamaikan dengan arah kebijakan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, birokrasi, politik lokal dan sebagainya. Kemudian upaya-upaya perdamaannya lebih menggunakan koersi, atau pun lebih pada seremonial. Maka dibentuklah Malino, asumsinya orang bertanda tangan lalu seluruh sentimen itu berakhir begitu saja.

**DENNY J.A.:**

Ok, ada hal lain bung?

**MUNIR:**

Saya tidak melihat konflik-konflik ini pure ada ditangan masyarakat. Tapi ada juga di level aparaturnegara yang juga berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah konflik itu. Hingga kemudian munculnya akses kelompok yang terlibat konflik terhadap persenjataan dan lain sebagainya yang tidak mudah diperoleh. Apalagi dalam kasus Poso yang terakhir, menjelang penyerangan seluruh telepon seluler di wilayah itu tidak bisa bekerja, seluruh saluran telepon SLJJ juga tidak bisa bekerja. Artinya ini bukan pemain-pemain kecil di mana sentimen agama bertarung di sana secara langsung, tapi ada satu proses politik yang jauh lebih luas.

Karena akses pengendalian terhadap alat-alat informasi semacam ini tidak mungkin dilakukan purely oleh masyarakat biasa.

**DENNY J.A.:**

Ini menarik bung, seandainya benar ada, katakanlah oknum aparat yang terlibat, apa kira-kira kepentingannya dengan konflik yang meluas itu?

**MUNIR:**

Saya sendiri tidak bisa langsung menangkapnya, kalau konteks konflik yang sebelumnya saya bisa lebih cepat melihat, misalnya konflik di Maluku. Misalnya muncul isu restrukturisasi



pemerintahan dan juga restrukturisasi aparatur negara, termasuk institusionalisasi beberapa lembaga baru di sana pasca konflik. Kalimantan Barat juga hampir sama, tapi dalam konteks Poso ini saya agak sulit melihatnya, karena konteks wilayahnya tidak seluas seperti di wilayah-wilayah lain. Tapi saya kira interest ekonomi, interest politik dan sebagainya akan sangat terpengaruh oleh bagaimana respon yang diberikan terhadap keadaan-keadaan itu di berbagai daerah.

**DENNY J.A.:**

Apa ada agenda yang lebih jauh menjelang pemilu ?

**MUNIR:**

Misalnya ini awal kerusuhan Poso memang relatif lebih spesifik kemungkinannya untuk inuodulai ke wilayah lain berkaitan dengan proses pemilu. Kecuali kalau konflik ini kemudian meluas ke wilayah-wilayah lain dengan sentimen yang kurang lebih sama. Tapi kita masih dapat dilihat apakah ada perluasan wilayah? Seperti kalau di Maluku dulu jelas, di mulai dari Kota Ambon terjadi perluasan wilayah yang luar biasa karena semakin banyak aktor yang bertarung di dalamnya.

**DENNY J.A.:**

Anda juga banyak mengamati konflik di daerah, bagaimana prospek dari kekerasan di Poso? Apakah ini akan meluas atau akan berhenti secara tiba-tiba?

**MUNIR:**

Kalau berhenti secara tiba-tiba saya kira tidak, pasti akan terjadi eskalasi dalam waktu tertentu, akan tetapi perluasan wilayah dugaan saya tidak akan terjadi. Karena konflik Poso yang sudah berlangsung kurang lebih dua setengah sampai tiga tahun itu berhasil membuktikan, wilayah-wilayah lain di Sulawesi tidak terseret konflik secara langsung. Padahal kalau dilihat peta pembagian penduduk berdasarkan agama, wilayah Sulawesi itu sangat riskan. Jadi saya justru percaya tidak akan meluas ke wilayah lain, tapi tension dari konflik di situ mungkin akan berkepanjangan.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Munir, terima kasih banyak atas perspektif anda. Jadi betapa kekerasan di Poso mempunyai akar-akar yang lebih dalam. Misalnya ketimpangan sosial, ekonomi dan politik dan juga mungkin adanya pertengkaran internal dari oknum-oknum aparat keamanan.

Ada dua SMS yang akan saya bacakan, Pertama dari Ibu Endah di Depok yang mengatakan, "Saya bingung mengapa ada konflik di Poso, karena Poso itu sebenarnya kota kecil yang sepi dan kehidupan antar agamanya juga tidak ada masalah.

Juga ada SMS Bung Deny di Manado, yang mengatakan, "Saya tidak setuju sentimen itu hanyalah baju dari konflik, menurut saya sentimen agak cukup besar berandil dalam berbagai kerusuhan, tak hanya di Poso tapi juga di Ambon dan Maluku.

Tentu saja kita mengundang berbagai komentar lainnya. Dan tadi sudah kita bahas berbagai kemungkinan penyebab kekerasan di Poso dan tentu saja investigasi dari aparat keamanan yang akan

memberikan final judgement. Lima tahun reformasi berjalan, dan diwarnai oleh besarnya konflik horisontal. Bahkan ada yang menghitung, jumlah korban yang terbunuh akibat konflik horisontal setelah reformasi sudah lebih dari 10 ribu nyawa. Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada kesalahan dalam model reformasi kita? Ataukah publik kita rawan terhadap konflik horisontal terutama yang sentimen agamanya sangat kental?

Kembali kepada Bung Laode Ida, mengapa banyak sekali terjadi konflik horisontal di Indonesia setelah reformasi?

**LAODE IDA :**

Satu yang sangat menonjol di era reformasi bahwa ada kekuasaan lokal. Pada saat pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi otonomi daerah, pada saat itu terjadi pergulatan kekuasaan tingkat lokal. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak terlalalu ketat atau tidak diikuti dengan berbagai tindakan atau persiapan-persiapan yang matang, menjadikan keretakan sosial pada tingkat lokal, di mana wujudnya berupa konflik agama, konflik antar suku dan sebagainya.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda melihat lepasnya otoritas pemerintah pusat terhadap daerah itu justru membuat kekuasaan di daerah diperebutkan oleh elit lokal?

**LAODE IDA :**

Ya, itu yang terjadi. Kontrol pemerintah pusat yang lemah ditambah dengan tiadanya otoritas yang kuat dari pemerintah

daerah. Karena pemerintah daerah juga tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat tapi dipiiih oleh para elitnya, dan pada saat yang sama juga menimbulkan kecemburuan sosial pada tingkat lokal.

**DENNY J.A.:**

Tadi Bung Munir mengatakan memang benar sentimen agama atau etnik yang muncul di permukaan. Tapi menurut dia akar-akar yang sebenarnya jauh di luar itu. Sentimen itu hanya baju luar saja tapi akarnya ketimpangan ekonomi-politik di daerah. Bagaimana anda melihatnya?

**LAODE IDA:**

Ya itulah, akarnya ketimpangan ekonomi, persis seperti hasil penelitian saya di Ambon tahun 1996 atau 1997 yang lalu. Saya menemukan persoalan ekonomi yang mulai didominasi pendatang.

Di Poso, seperti sudah saya katakan tadi, sektor ekonomi hampir seluruhnya dikuasai oleh pendatang, demikian juga sektor perkotaan dan politik lokal. Penduduk lokal yang membawa identitasnya sendiri, apakah sukunya, agamanya, atau keterkaitan di anrara keduanya melihat ini sebagai suatu persoalan.

**DENNY J.A.:**

Bung, tahun depan akan ada tiga pemilu, pemilu DPR, pemilu presiden tahap pertama, pemilu presiden tahap kedua” Jika kerusuhan di daerah begitu banyak, di Aceh, Papua, Poso dan lain-lain, pasti pemilu akan terganggu. Bagaimana anda melihat prospek konflik-konflik di berbagai daerah ini di tahun 2004 nanti?

**LAODE IDA :**

Saya kira begitu, sudah saya katakan tadi sebetulnya selama era reformasi, kebijakan otonomi daerah melahirkan persoalan-persoalan di tingkat lokal. Tetapi sekarang ketika kasus Poso, kasus Ambon, diselesaikan dengan Malino I dan Malino II, kemudian kita seolah-olah selesai semua konflik itu. Dan ketika kita melupakan konflik lokal itu, perhatian kita tersedot pada persoalan-persoalan politik tingkat nasional dalam persiapan pemilu 2004, di tingkat lokal itu lepas semua. Padahal di tingkat lokal sebetulnya yang paling rentan.

**DENNY J.A.:**

Jadi kita tersihir oleh politik nasional, semenrara politik lokal kembali bergolak, ini yang tidak banyak diperhatikan?

**LAODE IDA:**

Betul, jadi semua itu sebetulnya yang menjadi faktor penyebab.

**DENNY JA:**

Ok bung nanti kita kembali ke isu itu lagi. Sekarang kita hubungi Bung Zainudin Paru ketua Pahang. Selamat pagi bung, apa kabar?

**ZAINUDIN PARU:**

Selamat pagi, kabar baik.

**DENNY J.A.:**

Saya Denny J.A., bersama kita Bung Laode Ida. Soai konflik di Poso, menurut anda seberapa besar konflik ini meluas atau akan berhenti dalam waktu dekat?

**ZAINUDIN PARU:**

Kita mempunyai harapan bersama agar konflik Poso segera berakhir. Karena bagaimanapun di sana ada anak-anak bangsa, saudara-saudara kita yang tidak boleh hidup lama dalam penderitaan yang panjang, keprihatinan yang panjang, yang berakibat tidak mempunyai masa depan yang menentu. Baik kepada mereka yang saat ini sebagai orang tua, maupun yang lebih kita khawatirkan adalah anak-anak mereka dan generasi-generasi baru, yang kemudian mereka melihat bahwa konflik yang berjalan cukup lama dari tahun 1998 telah berakibat hilangnya masa depan dan harapan mereka.

**DENNY J.A.:**

Apakah konflik akan meluas melihat gelagat pemilu yang semakin dekat?

**ZAINUDIN PARU:**

Ini tentu sangat bergantung pada kemauan kita bersama, terutama kepada para pemegang kekuasaan baik di tingkat nasional maupun lokal. Karena selain masalah ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi di sana, saya melihat Poso juga akibat dari intrik-intrik politik yang terjadi.

**DENNY J.A.:**

Ok, bung, kita mencoba mencari solusi ke depan. Apa yang anda tawarkan agar konflik Poso tidak meluas?

**ZAINUDIN PARU:**

Kita masih tetap berharap Perjanjian Malino bisa dipegang semua pihak. Kemudian yang kedua, kita berharap semua pihak, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok yang beitikai di sana kembali berpikir secara terbuka dan riil, bahwa di bumi ini tidak akan pernah dihuni oleh satu kelompok orang, satu jenis, satu agama saja. Kalau kita bisa memandang itu sebagai realistis kita hari ini, maka kita akan hidup dalam suatu kedamaian. Tapi kalau kita selalu egois dengan diri kita masing-masing, kita tidak akan mendapatkan apa-apa.

**DENNY J.A.:**

Ok, terima kasih banyak Bung Zainudin, sudah kita tangkap pesannya. Bung Laode Ida, apa solusi agar konflik poso tidak meluas, apalagi tahun depan tahun pemilu?

**LAODE IDA :**

Pertama memang lokalisasi konflik, lokalisasi penyelesaian konflik. Kasus Poso adalah kasus Poso yang harus diselesaikan di poso. Kalau tidak diselesaikan di Poso dengan cara-cara orang poso, berbagai kemungkinan akan terjadi. Bahwa muncul masalah yang lebih besar yang mungkin saja akan mengganggu konsentrasi masyarakat daerah-daerah lain, yang mempunyai sentimen atau emosi-emosi yang sama, emosi-emosi keagamaan yang sama dan sebagainya.

Yang kedua, saya kira perlu tindakan antisipasi. Dalam menghadapi pemilu, manuver-manuver para politisi harus diantisipasi. Kita mengedepankan kedamaian ketimbang pertarungan politik, atau mementingkan masyarakat, ketenteraman masyarakat ketimbang perebutan kekuasaan antar para politisi. Dalam menghadapi pemilu, pertarungan ini kalau tidak diantisipasi berbahaya. Misalnya di daerah-daerah konflik harus ada ketegasan, tidak boleh ada kampanye pengerahan massa, dan seterusnya.

**DENNYJ.A.:**

Jadi Perlu regulasi kampanye pemilu yang ketat khusus untuk daerah konflik?

**LAODE IDA:**

Bukan hanya untuk daerah konflik saja, tetapi juga daerah yang mempunyai potensi konflik. Daerah potensi konflik mempunyai berapa watak, misalnya watak tradisional, fanatisme ketokohan, ada semacam fanatisme yang fundamentalis. Ada fanatisme ketokohan misalnya muncul di daerah yang derajat patronasinya tinggi.

**DENNYJ.A.:**

Jadi solusi kedua adalah menghindari kampanye yang melibatkan massa secara massif, karena berbahaya terutama untuk daerah yang konflik primordialnya tinggi. Yang ketiga, yang tak kalah penting, masalah aparat keamanan sebagai garda terdepan. Apa yang mesti diakukan agar tidak lengah atau dibuat lengah?



**LAODE IDA:**

Ini agak sulit bagaimana kita bisa mengukur aparat keamanan lengah atau tidak lengah. Sebenarnya mereka mempunyai aparat atau instrumen sampai ke daerah-daerah. Katakanlah di jajaran aparat keamanan, Babinsa itu sampai di tingkat kelurahan, desa, dan berperan aktif sebetulnya. Peran mereka seharusnya juga sebagai intel yang bisa mendeteksi secara langsung apa yang akan terjadi di masyarakat. Mereka mempunyai jaringan langsung di tingkat desa atau kelurahan.

**DENNY J.A.:**

Poso ini agak aneh, karena ini kota kecil dan terus menerus terjadi konflik, dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada aparat keamanan. Apalagi tadi dikatakan ketika terjadi serangan itu berbagai jaringan telepon mati?

**LAODE IDA:**

Di Poso ada wilayah perkotaan dan ada wilayah pedesaan. Tempat kejadian itu tidak di pusat kota, dan di sini sebetulnya aparat keamanan bisa berperan lebih proaktif karena ada Koramil, ada Polsek, tapi sejauh ini tidak berfungsi. Perlu diperiksa juga keberadaan aparat keamanan di situ, apakah mereka terlibat dalam merencanakan konflik atau tidak.

**DENNY J.A.:**

Jadi bung, tadi sudah ada tiga solusi yang anda katakan. Solusi keempat mungkin berhubungan dengan SMS Pak Priyatna bahwa sentimen agama dijadikan alat untuk memicu konflik. Namun kesalahan muncul ketika para pemuka agama sering memberikan

indoktrinasi secara fanatik serta membabi buta. Di sini mungkin peran informal leader di daerah yang perlu ditingkatkan, bagaimana anda melihatnya ?

**LAODE IDA:**

Ini agak sulit, karena persoalannya bahwa setiap agama, setiap orang yang beragama pasti menyatakan dia mempunyai keyakinan terhadap agamanya. Barangkali yang mau dikatakan adalah watak ekspansionis pemuka agama yang selalu mau mempengaruhi orang lain untuk seiman dengan mereka.

**DENNY J.A.:**

Dan anda melihat peran informal leader itu cukup besar di sana?

**LAODE IDA:**

Sangat besar, kalau di daerah pedesaan terurama di luar pulau jawa, kawasan timur Indonesia, peran informal leader cukup tinggi.

**DENNY J.A.:**

Jadi kalau ulama atau pendetanya moderat, sangat membantu moderasi konflik ?

**LAODE IDA :**

Ya, tapi agak sulitnya pemuka-pemuka agama tidak selalu moderat karena mereka mempunyai watak ekspansionis seperti yang saya katakan tadi, ini yang berbahaya sebetulnya. Makanya kalau menyatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu sesuai

dengan apa yang dikehendaki, biarkan tidak usah berperan sebagai misionaris misalnya, saya kira akan lebih bagus, tidak ada lagi misionaris karena semua orang Indonesia itu beragama. Harus itu yang diletakkan sebagai prinsip.

**DENNY J.A.:**

Jadi perlu payung teologi inklusif yang siap untuk hidup bersama dalam platform agama yang berbeda-beda?

**LAODE IDA :**

Seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu lagi agenda misionaris. Misionaris jangan diartikan bahwa hanya orang-orang non muslim mempengaruhi orang-orang yang bukan muslim untuk masuk agama non muslim, tapi orang-orang Islam juga seperti itu. Teologi inklusif itu yang harus coba diperkenalkan kepada mereka.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Laode Ida, terima fasi! banyak atas perspektif yang anda berikan. Para pendengar Delta FM, anda mendengar sendiri tadi masalah kekerasan di Poso. Melihat tahun depan itu tahun pemilu, sangat berbahaya sekali jika terjadi situasi konflik yang meluas di daerah-daerah. Kita sudah mengalami konflik di Aceh, Papua dan sekarang muncul lagi di Poso. Kita tidak tahu apakah konflik di Ambon akan muncul kembali? Dan jika muncul, habislah pemilu kita dan mungkin akan kekurangan legitimasi untuk mendapatkan pemilu yang bersih dan dianggap kompeten.

Ke depan mungkin ada beberapa solusi yang ditawarkan, pertama konflik-konflik lokal harus dilokalisir, dan kedua aparat

keamanan harus lebih profesional dan oknum-oknum aparat keamanan -jika benar mereka terlibat—harus ditindak tegas di muka pengadilan terbuka. Dan terakhir yang sangat penting—karena sering dipakainya sentimen agama dalam konflik—sudah saatnya para pemuka agama baik Islam ataupun non Islam menyadari, betapa besar dampak dari dakwah radikal yang mereka berikan kepada umat. Sehingga dibutuhkan sebuah moderasi atau sebuah teologi yang inklusif untuk dihayati, disebarkan dan didakwahkan oleh pemuka-pemuka agama yang masih efektif di daerah.

Kita jumpa lagi dalam “Dialog Aktual” minggu depan dalam tema yang aktual lainnya, semoga kekerasan di Poso tidak meluas dan tidak menjadi awal dari kerusuhan yang lebih besar menjelang pemilu 2004. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Denny J.A.

## **REHABILITASI HAK POLITIK KORBAN G 30 S 1965**

Tanggal: 27 Agustus 2003

Host: DennyJ.A.

Narasumber: DR. Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI)

Komunisme menjadi beban politik yang sangat berat bagi Bangsa Indonesia selama lebih dari empatpuluh tahun terakhir. Ketika era reformasi bergulir Mei 1998, di mana kita bisa berdiskusi secara dingin dan melangkah ke depan tanpa ada trauma dan beban politik masa silam, ternyata masih berlanjut perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang terkait G 30 S 1965. Banyak korban G 30 S 1965 yang sebenarnya belum diputus bersalah oleh pengadilan. Namun mereka sudah kena menderita karena hukuman politik. Keluarga, anak bahkan cucu-cucu mereka diperakuka diskriminatif akibat kesalahan yang belum tentu jelas. Merujuk pada surat Mahkamah Agung yang secara legal-formal menyetujui rehabilitasi korban G 30 S 1965, Komnas HAM meminta Presiden Megawati untuk segera melaksanakan proses rehabilitasi tersebut. Apa kesulitan atau komplikasi dari rehabilitasi ini? Adakah resistensi terhadapnya, dari mana resistensi itu, serta

bagaimana konsekuensinya jika rehabilitasi terhadap korban G 30 S 1965 dilakukan?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Medan. Kembali bersama saya Denny J.A. dengan topik kali ini ‘Rehabilitasi Hak Politik Korban G 30 S 1965’. Apa komplikasinya dan apa konsekuensinya proses rehabilitasi korban pemberantasan G 30 S 1965 ? Tamu kita kali ini adalah Dr. Asvi Warman Adam, sejarawan dari LIPI. Selamat pagi bung.

**ASVI WARMAN ADAM:**

Selamat pagi.

**DENNY J.A.:**

Para pendengar, kita mengetahui Komnas HAM sudah mengirim surat kepada Presiden Megawati yang isinya meminta Presiden segera merehabilitasi korban G 30 S 1965. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), banyak korban yang sebenarnya belum diputus bersalah oleh pengadilan, namun mereka sudah menderita lama sekali. Tidak hanya mereka, bahkan keluarga, anak dan cucu mereka terkena diskriminasi akibat kesalahan yang belum jelas. Komnas HAM merujuk surat Mahkamah Agung (MA) yang secara legal-formal menyetujui rehabilitasi terhadap korban G 30 S 1965. Lalu apa yang harus Presiden lakukan? Komunisme sudah menjadi momok dan beban politik kita selama 40 tahun lebih. Sekarang era reformasi, era di mana kita bisa mendiskusikannya secara dingin dan bisa melangkah ke depan tanpa trauma dan

beban politik dari masa silam. Persoalannya, apa kesulitan atau komplikasi dari rehabilitasi ini? Apakah akan muncul resistensi? Dan apa konsekuensinya jika rehabilitasi terhadap korban G 30 S 1965 dilakukan?

Bung Asvi Warman Adam, bagaimana komentar anda?

**ASVI WARMAN ADAM:**

Pertama, saya ingin mengoreksi dulu istilah yang dipakai selama ini G 30 S PKI. Selama 40 tahun, istilah itu dipakai dengan asumsi PKI adalah dalang tunggal dalam peristiwa 1965 itu. Lebih baik kita memakai istilah yang lebih netral yaitu G 30 S, atau G 30 S 1965 tanpa PKI. Sebenarnya MA pertama mengirim surat kepada Megawati tanggal 12 Juni 2003. Di dalam surat itu MA mengatakan diminta atau tidak, MA bisa memberikan saran kepada presiden mengenai hukum. Kemudian yang kedua, menurut UUD 45 yang telah diamandemen, rehabilitasi korban G 30 s 1965 diberikan presiden dengan pertimbangan MA. MA sudah mengeluarkan pertimbangan setelah menerima surat dari korban G 30 S 1965 yang meminta supaya nama baik mereka direhabilitasi. Lalu MA mengirim surat kepada presiden supaya ditindaklanjuti. Sekarang bola sudah ada di tangan presiden.

Ketiga, ada peristiwa penting, MPR sudah menugaskan kepada presiden untuk melakukan rehabilitasi nama baik Soekarno dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

**DENNY J.A.:**

Bola sudah sepenuhnya di tangan presiden, dan sudah ada dua lembaga tinggi negara, MPR dan MA yang meminta presiden

memulai proses rehabilitasi. Menurut anda, apa signifikansinya bagi politik dan sejarah kita ke depan?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Jelas akan sangat penting karena selama 30 tahun lebih ada golongan masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu, malah jutaan-bersama keluarganya mendapatkan stigma yang buruk : melakukan kudeta, tidak bertuhan, dan lain-lain. Mereka tidak boleh menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, menjadi anggota TNI/polri, menjadi pegawai negeri. Stigma itu ditanamkan demikian tajam, sehingga yang terjadi adalah satu kelompok masyarakat dengan jumlah yang besar termarjinalkan dalam kehidupan bernegara.

**DENNY J.A.:**

Kita mengetahui tidak semua pendengar paham sejarah. Anda mengatakan ini menyangkut lebih dari sejuta orang termasuk keluarganya yang mengalami diskriminasi. Kira-kira, mengapa represi terhadap komunisme itu begitu besar?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Garis besamya adalah soal perebutan kekuasaan. Peralihan kekuasaan dari Soekamo ke Soeharto adalah rangkaian dari perebutan kekuasaan. Ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan Soekarno, ada yang ingin mengambil kekuasaan Soekamo. PKI salah satu pendukung Soekamo yang jumlahnya sangat besar dan militan. Jadi untuk merebut kekuasaan Soekamo, tentunya kelompok yang mendukungnya harus dihancurkan.



**DENNY J.A.:**

Bagaimana dengan setting perang dingin?

**ASVI WARMAN ADAM:**

Pada masa itu memang terjadi Perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Kedua pihak tentunya tidak ingin satu negara jatuh kepada pihak lawan. Kita mengetahui di Vietnam sudah terjadi Perang.

Amerika tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis seperti di Vietnam Utara. Mereka mati-matian mencegah itu. Amerika merasa bahwa di Vietnam mereka harus menurunkan tentaranya dalam jumlah besar, bahkan korbannya sampai puluhan ribu serdadu.

Mereka tidak ingin ini terulang lagi di Indonesia. Oleh karena itu mereka dengan berbagai cara berusaha menghancurkan komunisme di Indonesia.

**DENNY J.A.:**

Pertama, G 30 S 1965 bagian dari konflik elit di tingkat lokal. Kedua, G 30 S 1965 bagian dari konflik elit di tingkat global antara blok Amerika dan blok Uni Soviet. Kekerasan tidak hanya menimpa kalangan PKI, tetapi juga kalangan yang anti komunis di negara-negara komunis.

**ASVI WARMAN ADAM:**

Benar. Kita melihat Khmer Merah di Kamboja melakukan represi yang luar biasa. Hal yang sama terjadi juga pada masa Orde Baru

yang konon berdasarkan Pancasila. Buktinya selama 10 tahun ada pembuangan tahanan politik di Pulau Buru.

**DENNY J.A.:**

Di tahun 60-an, blok komunis dan blok anti komunis sama-sama merepresi lawan politiknya secara-keras. Sekarang komunisme sudah hancur, Uni soviet sudah hancur. Menurut anda, apakah komunisme tidak lagi menjadi ancaman bagi Blok Barat?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Jelas. Komunisme sudah ambruk' dan tidak diterima di mana-mana. Kalaupun ideologi itu masih dipertahankan di berbagai negara seperti di RRC dan Vietnam, lebih kepada pertimbangan pragmatis. Kalau mereka tiba-tiba mengubah ideologinya menjadi demokrasi keadaan tidak akan terkendali.

**DENNY J.A.:**

Apakah rehabilitasi G 30 S 1965 bisa dilakukan karena Pertarungan global yang hampir selesai, sehingga pemerintah bisa merasa aman untuk melakukannya?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Betul. Tidak perlu lagi PKI atau komunisme dijadikan momok. Sudah lebih dari 30 tahun, orang-orang ini disiksa, mendapatkan perlakuan tidak manusiawi, seyogyanya hak mereka dikembalikan.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda jumlahnya ratusan ribu yang perlu kita rehabilitasi?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Benar, kalau kita melihat berbagai kriteria yang pernah disampaikan tim-tim yang menuntut rehabilitasi. Pertama presiden Soekarno. Kedua, menteri-menteri yang dulu pada bulan Maret 1965 ditangkap, ada sekitar 15 menteri. Ada anggota PNI, Partindo, PKI dan orang-orang yang mungkin bukan anggota partai tapi juga ditangkap dengan alasan terlibat dalam G 30 S. Keluarga mereka, saya kira jumlahnya sudah ratusan ribu, bahkan jutaan juga menjadi korban.

**DENNY J.A.:**

Sekarang presiden harus mempunyai kriteria, mempunyai petunjuk kira-kira dari sekian banyak tokoh dan orang-orang itu, mana yang bisa direhabilitasi dan mana yang tidak. Apa menurut anda kriterianya?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Orang-orang yang selama puluhan atau belasan tahun di hukum tanpa pengadilan, perlu direhabilitasi. Saya tidak melihat apa kriteria untuk tidak merehabilitasi orang-orang tertentu. Sebaiknya mereka yang menjadi korban diberikan rehabilitasi. Cuma yang menjadi persoalan apakah rehabilitasi harus diikuti dengan kompensasi atau ganti rugi. Kalau mereka menjadi pegawai negeri, atau anggota TNI mereka mendapat hak pensiun.

**DENNY J.A.:**

Sebelum ke kompensasi, kita ke kriteria rehabilitasi dulu. Misalnya rehabilitasi hanya diberikan kepada orang-orang yang bukan pelaku utama atautkah diberikan kepada pelaku utama, atau kepada orang-orang yang belum diadili dan juga kepada orang-orang yang sudah diadili, bagaimana?

**ASVI WARMAN ADAM:**

Pelaku utama G 30 S 1965 jumlahnya cuma belasan atau puluhan. Orang-orang seperti Latif misalnya, yang ikut dalam penculikan jenderal, apakah bisa diberikan rehabilitasi kalau kita menganggap bahwa gerakan yang dia lakukan bukan kudeta, melainkan penyelamatan presiden Soekamo. Itu perlu dipersoalkan lagi.

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM, tadi anda mendengarkan sendiri bahwa wacana rehabilitasi telah bergulir. Timbul komplikasi, misalnya siapa yang berhak untuk direhabilitasi dan siapa yang mungkin bermasalah untuk direhabilitasi. Tentunya presiden mempunyai kriteria yang valid, lengkap dan commonsense tentang kriteria ini. Kembali kepada Bung Asvi, kalau anda diminta Presiden untuk memberikan kriteria, kira-kira dari kelompok yang dituduh PKI itu yang mana yang bisa direhabilitasi, mana yang belum?

**ASVI WARMA ADAM:**

Semuanya perlu direhabilitasi. Karena dulu ada perbedaan antara tapol A, tapol B, dan tapol C. Tapol B itu orang-orang yang diduga terlibat G 30 S tetapi tidak cukup bukti, sehingga mereka

tetap ditahan tetapi akhirnya dibebaskan. Tapol A pernah diadili, tetapi pengadilan dilakukan Mahmilub yang menurut saya politis. Karena sebelum pengadilan dimulai, Soeharto sudah berpidato bahwa PKI salah. Kita mengetahui Soeharto menunjuk dirinya sebagai “perwira penyerah perkara”. Di dalam pidato penyerahan itu, dia sudah mengatakan PKI teriibat. Sebelum proses pengadilan, sudah ada keputusan. Semua yang diadili 20-an orang di Jakarta dan semuanya dihukum mati, kecuali Mojo dihukum seumur hidup. Yang masih hidup dan sudah dibebaskan, perlu direhabilitasi dan mendapatkan KTP seumur hidup.

**DENNY J.A.:**

Kalau tahanan politik yang kelas B, C dan kelas-kelas ringan lainnya mungkin tidak banyak yang melakukan resistensi. Kalau tapol A, apakah ada kelompok lain yang mungkin melawan dan menghendaki mereka tidak terlalu jauh mendapatkan rehabilitasi? Misalnya kalangan tentara atau kalangan Islam?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Ya, orang-orang seperti Pak Oemar Dani, maupun Pak Soebandrio sudah sepuh, umurnya sudah 80 ke atas. Apa yang bisa dibikin oleh orang-orang tersebut untuk melakukan pemberontakan? Keberatan atas rehabilitasi mereka tidak masuk akal.

**DENNY J.A.:**

Kita kemudian melihat kompromi-kompromi yang dilakukan Sidang Istimewa MPR. Sudah ada keputusan bahwa Tap MPR tentang PKI tetap dilanjutkan, tetapi dengan tambahan akan diberlakukan secara demokratis dan mempertimbangkan hak asasi

manusia. Apakah ini kompromi yang moderat bahwa masalah kebijakan “bersih lingkungan” dihilangkan, tetapi komunisme tetap dilarang sebagai ideologi?

**ASVI WARMAN ADAM:**

Sudah ada langkah maju satu tahap, walaupun belum memuaskan. Tetapi ketentuan-ketentuan yang menghargai hak asasi manusia harus dijalankan betul. Misalnya keputusan menteri yang tidak membolehkan orang-orang yang terlibat G 30 S 1965 dan keluarganya untuk menjadi pegawai negeri benar-benar harus dicabut. Kedua, KTP seumur hidup harus betul-betul dilaksanakan bagi mereka yang sudah berusia 60 tahun.

**DENNY J.A.:**

Sekarang ini terjadi kompromi. Masalah kebijakan “bersih lingkungan,” akan dihapuskan, tapi ideologi komunisme masih dianggap terlalu berbahaya untuk diijinkan. Dan ini didukung secara aklamasi oleh semua partai di DPR, bagaimana menurut anda?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Sejarah yang diajarkan selama 30 tahun itu betul-betul ampuh, sangat berhasil. Wacana bahwa komunisme sudah berontak dua kali, bahwa komunisme telah berkhianat dan akan mengkhianati lagi sangat kuat dan mengakar. Padahal apa daya mereka sekarang? Saya tidak yakin kalau PKI berdiri sekarang akan mendapatkan kursi di DPR.

**DENNY J.A.:**

Atau ada perbedaan perspektif ? Anda melihat dari perspektif hak asasi manusia dan akademik, sementara para politisi DPR melihat ideologi komunisme tidak hanya ideologi melainkan sebagai bagian dari pemicu disintegrasi bangsa ?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Selalu dibesar-besarkan pemberontakan Madiun 1948 dan tahun 1965. Tetapi mengapa orang cenderung lupa PKI juga menjadi bagian dari perjuangan melawan pemerintahan kolonial, dengan melakukan pemberontakan tahun 1926 dan 1927 terhadap Belanda ? Dan karenanya ribuan orang PKI yang dibuang ke Digul. Tidak hanya 1-2 tahun, bahkan tahun 1945 pun mereka masih dialihkan lagi ke Australia sebelum akhirnya kembali. Artinya PKI pun berjasa dan menjadi pahlawan pada era itu. Sekarang sudah terbuka fakta-fakta baru yang mempertanyakan soal keterlibatan PKI pada peristiwa 1965 dan 1948. Sudah muncul data-data baru yang meninjau kembali sejarah PKI. Jangan lupa bahwa hampir semua pemberontakan di Indonesia didukung oleh perwira militer pada pucuk pimpinannya. Apakah kita akan membubarkan TNI karena mereka pernah terlibat dalam pemberontakan?

**DENNY J.A.:**

Tampaknya pemerintah mengambil jalan yang moderat, rehabilitasi terhadap keluarga atau korban PKI akan dilakukan. Tapi komunisme sebagai ideologi tetap dilarang. Apakah ini kebijakan yang benar-benar moderat atau tidak konsisten?

Seandainya rehabilitasi memang dilakukan, apakah harus diikuti kompensasi finansial?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Rehabilitasi nama baik seperti sekarang ini sudah cukup. Kalau keuangan negara mengizinkan, baru diberikan kompensasi. Demikian juga dengan pensiun bagi mereka yang tiba-tiba dipecat dari pegawai negeri atau anggota TNI/Polri. Atau karyawan perusahaan yang melakukan hal yang sama dan mampu. Contohnya Caltex tahun 1964 dan 1966, di sana ada serikat buruh yang namanya Perbum (Persatuan Buruh Minyak) yang katanya berafiliasi ke PKI. Perbum mewajibkan anggotanya membayar iuran 100 perak/bulan. Setelah peristiwa G 30 S 1965, orang-orang Perbum hendak dibersihkan. Tetapi Caltex waktu itu masih membutuhkan tenaga mereka. Baru tahun 1985, mereka dirumahkan, dipecat dengan alasan keterlibatan mereka menjadi anggota Perbum dengan membayar 100 perak/bulan.

**DENNY J.A.:**

Kalau ingin memberikan kompensasi finansial, bagaimana cara menghitung selama 30 tahun itu?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Itu bisa dipikirkan. Tetapi paiting tidak, pertama adalah rehabilitasi nama baik. Kedua, kompensasi tidak dalam bentuk uang, namun dalam bentuk narural, dalam arti mereka memperoleh kemudahan kredit, anak-anaknya diberi beasiswa, semacam itu. Itu salah satu solusi yang bisa diambil.



**DENNY J.A.:**

Kalau kita melihat preseden sebelumnya, apakah kita pernah melakukan rehabilitasi serupa dengan melakukan kompensasi?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Secara individu pernah. Misalnya AM Fatwa, sekarang wakil ketua MPR- diberi rehabilitasi dan gaji dia yang sekian tahun di Pemerintahan DKI dibayarkan. Persoalannya pemerintah DKI sanggup membayar. Apakah lembaga atau instansi lain sanggup juga kalau menyangkut ribuan orang? Tetapi yang penting bisa dihitung dan bisa ditanggihkan pembayarannya sampai keuangan negara mengizinkan. Yang lebih penting rehabilitasi itu harus segera.

**DENNY J.A.:**

Wacana rehabilitasi memang sudah bergulir. Tapi yang menjadi masalah, apakah rehabilitasi itu perlu diikuti kompensasi finansial. Karena menurut Bung Asvi Warman Adam, dengan pemulihan nama baik untuk sementara sudah cukup, di saat ekonomi kita masih morat-marit. Masalah kedua, lalu siapa yang berhak direhabilitasi? Apakah termasuk mereka yang selama ini sudah diadili melalui pengadilan Mahkamah? Menarik kalau kita mendengar pandangan dari pihak lain, karena wacana ini akan terus bergulir. Dalam platform politik nasional Indonesia, tampaknya rehabilitasi akan terus digulirkan, meskipun komunisme sebagai ideologi akan tetap dilarang. Inilah bentuk kompromi yang moderat. Kita bertanya kepada Bung Asvi, jika Jerman demokratis melarang nazisme, mengapa Indonesia tidak boleh melarang komunisme?

**ASVI WARMAN ADAM :**

Pelarangan itu kontradiktif, bertolak belakang. Kalau di Jerman Nazi dilarang karena mereka membantai ribuan orang Yahudi pada masa perang dunia II atau sebelum masa PD II. Sedangkan sebaliknya di Indonesia, justru orang-orang komunis itu yang dibantai. Memang harus kita akui, sebelumnya ada tindakan agresif yang dilakukan orang PKI. Misalnya di pedesaan, masalah tanah adalah masalah yang sensitif dan sudah ada konflik antara orang-orang PKI atau BTI dengan golongan Islam. Konflik itu sudah terjadi sebelum tahun 1965. Ketika meletus peristiwa G 30 S 1965, isu ini dimanfaatkan untuk melakukan balas dendam.

**DENNY J.A.:**

Apakah rehabilitasi signifikan sekali bagi perkembangan demokrasi atau hak asasi manusia di Indonesia setelah reformasi?

**ASVI WARMAN ADAM:**

Benar, karena selama 30 tahun kita tidak ikut menyertakan sebagian anggota masyarakat dalam proses sosial-politik. Mereka dimarjinalkan perannya. Dibutuhkan rehabilitasi agar ini tidak terulang lagi. Contoh yang jelas adalah Sitor Situmorang. Dia bukan anggota PKI yang ditangkap pada tahun 60-an. Setelah 11 tahun ditahan di Salemba, dibebaskan hanya dengan secarik kertas yang mengatakan "Bersama ini kami kembalikan oknum Sitor Situmorang kepada Nyonya Sitor Situmorang, dengan catatan : tidak boleh mengirim surat ke luar negeri, tidak boleh menuntut aparat, dan lain-lain." Bayangkan, 11 tahun orang di penjara tanpa diadili, kemudian dibebaskan hanya dengan secarik kertas.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, terima kasih banyak telah memberikan penjelasan dengan perspektif dan data-data sejarah yang bisa memberikan satu pemahaman berbeda dari apa yang telah kita pahami selama ini.

Jadi para pendengar, kita pgngetahui sudah 40 tahun masalah komunisme menjadi momok dan beban politik kita, saatnya di era reformasi ini pemerintah mencari solusi dan merespon masa silam. Tampaknya pemerintah dan partai politik mengambil jalan moderat, yaitu menggulirkan wacana rehabilitasi, menghapuskan kebijakan “bersih lingkungan”, tapi komunisme sebagai ideologi tetap dilarang, dan kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin 15 tahun mendatang. Dan kita juga melihat rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap korban komunisme adalah bagian dari skenario yang lebih besar lagi yaitu rekonsiliasi nasional yang tak hanya dengan korban PKI, tapi menurut Ali Sadikin juga dengan merehabilitasi Bung Karno, berikut sekaligus memaafkan pak Harto.

Para pendengar, sampai jumpa lagi minggu depan dalam “Dialog Aktual” dengan topik yang aktual bersama saya Denny J.A.

**BAB V**  
**TERORISME DAN KONFLIK**  
**GLOBAL**

# TEROR BOM MENGGUNCANG JAKARTA

Tanggal: 6 Agustus 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber : Tjipta Lesmana (pengamat politik UI), Sripto (Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia), Pande Silalahi (Pengamat Ekonomi CSIS)

Sejak lama Indonesia dicap sebagai “surga teroris”. Sebutan yang tidak menyenangkan, tapi itulah yang terjadi. Mungkin karena lemahnya kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam mengantisipasi aksi-aksiteror. Mungkin karena lemahnya perang hukum untuk menjaring terorisme. Atau karena seringnya terjadi berbagai peristiwa yang dapat diklaim sebagai kegiatan terorisme. Tentu saja sebagian dari kecaman ini bisa kita tolak, tapi sebagian lagi mau tak mau harus diterima. Memang sebenarnya sudah ada langkah serius pemerintah untuk mengatasi terorisme. Sudah ada UU Teroris, sudah diangkat Menkopolkam sebagai pemimpin di lapangan untuk mengatasi masalah terorisme. Tapi serangan bom masih terus terjadi. Hotel bertaraf internasional, JW Marriot kali ini mendapatkan giliran serangan bom. Lebih dari 10 orang tewas, ratusan korban luka-luka. Namun korban tak langsung jauh lebih banyak : seluruh warga masyarakat yang kemudian hidup dalam

suasana was-was dan mencekam. Tak kalah mencekamnya adalah image Indonesia di luar negeri. Apa Efek bom terhadap politik-ekonomi Indonesia, khususnya menghadapi pemilu 2004?

**DENNY J.A.:**

Para pendengar 99,1 Delta FM Jakarta, Makassar, Manado, 94.25 Delta FM Bandung, 105.8 Delta FM Medan, dan 96.8 Delta FM Surabaya.

Pagi hari ini kembali “Dialog Aktual” bersama Denny J.A., dengan topik yang sedang hangat, “Teror Bom Mengguncang Jakarta”. Sebuah hotel mewah, JW Marriot kembali meledak kemarin siang, lebih dari 10 orang tewas, ratusan korban luka-luka. Tetapi korban tak langsungnya adalah hampir seluruh anak-anak negeri karena mereka sekarang hidup dalam suasana was-was. tidak kalah mencekamnya adalah image Indonesia di luar negeri sehingga investor baru sulit datang, sementara investor lama mungkin memilih hengkang. Tetapi bagaimana pun selalu ada hal-hal yang optimis membuat kita merasa pada saatnya gerakan terorisme akan digulung.

Apa efek bom terhadap politik ekonomi Indonesia menuju pemilu 2004? Apa efek jangka pendek dan jangka panjangnya bagi Indonesia? Bersama kita, Bung Tjipta Lesmana, pengamat politik dari UI.

Selamat pagi bung.

**TJIPTA LESMANA:**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Secara umum, bagaimana anda melihat ledakan bom lagi di tengah kota Jakarta itu?

**TJIPTA LESMANA:**

Pesannya adalah sederhana, bahwa teroris sudah banyak di negara kita. Kita hampir sembuh dari bom Bali dan mulai recovery, turis sudah mulai banyak, lalu dihantam lagi dengan bom baru. Ini bukan hanya mengejutkan, tapi sangat mengerikan. Keamanan kita sangat rentan dan rawan. Saya ledakan-ledakan bom masih akan ada lagi.

**DENNY J.A.:**

Apakah masih akan ada bom susulan ?

**TJIPTA LESMANA:**

Masih.

**DENNY J.A.:**

Mengenai target-target yang dipilih, apakah ini ada skenario rertenru, mengapa memilih JW Marriot?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya mendengarkan secara penuh wawancara Prof. Nitibaskara dengan Bung Zein dari Delta FM. Ada satu poin yang saya tidak setuju dengan Pak Nitibaskara. Dia memberikan tanda, ada kaitan dengan Amerika Serikat, sebab Marriot adalah semacam simbol. Saya kurang setuju, sebab dalam politik kalau ingin menghantam

sesuara kira tidak menelanjangi identitas kita sendiri. Pelaku bom ini cerdas sekali, tetapi bisa juga sasarannya memang Amerika, sebab Mariot itu seperti Hilton, simbol dari Amerika. Teroris itu hebat dan cerdas. Mereka dengan penuh kalkulasi melakukan aksinya.

**DENNY J.A.:**

Sekarang yang membuat terorisme sedikit menakutkan, karena dia tanpa alamat. Orang bilang the new terrorism, tidak ada yang mengklaim siapa pelakunya, tidak ada message yang jelas. Berbeda dengan dulu kalau ada gerakan teroris langsung dikatakan ini kami yang bawa, ini target kami. Ada apa Bung ?

**TJIPTA LESMANA:**

Karena aparat keamanan sedunia sekarang sedang mengejar teroris secara besar-besaran. Kalau mereka langsung mengklaim akan dengan mudah dikejar identitasnya. Mereka tidak berani seperti dulu.

Sekarang sudah ada kerja sama intemasional untuk memberanras dan mengejar teroris. Mereka pun takut.

**DENNY J.A.:**

Jadi gerakan tanpa memberikan alamar adalah bagian dari cara menghilangkan identitas ?

**TJIPTA LESMANA:**

Betul, itu bagian dari menghilangkan identitas supaya terhindar dari pengejaran.



**DENNY J.A.:**

Mereka menghadapi jaringan besar yang semakin canggih. Dan juga diberikan sinyal oleh Da'i Bahtiar bahwa ada kemiripan dengan Bom Bali. Bagaimana anda menangkap dari sinyal ini ?

**TJIPTA LESMANA:**

Kalau memang itu betur berarti salah satu kemungkinannya adalah sama sumber bahan peledaknya. Saya sependapat Bom Marrot ada kaitannya dengan jaringan internasional. Kalau kita lihat begitu hebat sekali ledakannya, dari mana mereka mendapatkan bomnya? Tentara pun tidak sembarangan menggunakannya.

**DENNY J.A.:**

Dua hal yang dikatakan Da'i Bahtiar. Pertama, keduanya sama-sama menggunakan mobil. Kedua, menyerang tempat yang ada unsur internasional, terutama simbol Amerika. Jadi menurut anda ini dilakukan oleh musuhnya Amerika atau orang yang ingin menyerang musuhnya Amerika ?

**TJIPTA LESMANA:**

Bisa juga bukan musuh Amerika. Tetapi mumi untuk menghantam pemerintahan Megawati. Belum tahu sarannya dalam negeri atau luar negeri. Kedua kemungkinan itu bisa terjadi. Kemungkinan bisa dari Aceh, bisa juga dari mana saja kita tidak tahu.

**DENNY J.A.:**

Sejak tahun 2003, ada empat ledakan : gedung Lobi Wisma Bhayangkara, gedung PBB, Bandara Soekamo Hatra, dan terakhir

di halaman gedung MPR/DPR. Anda melihat ini dilakukan oleh sebuah jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda ?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya tidak tahu pasti, tetapi menurut saya jaringannya berbeda sebab bahan peledak yang digunakan berbeda-beda. Cuma yang sekarang ini luar biasa kerasnya.

**DENNY J.A.:**

Menakutkan, karena ada saru dugaan akan datang bom susulan. Bagaimana anda memandangnya ?

**TJIPTA LESMANA:**

Bukan menakut-nakuti. Kalau kita melihat polanya baru bulan Agustus sudah lima kali. Kita memberikan semacam sinyal agar semua pihak berhati-hati, waspada,antisipasi, terutama tempat-tempat publik. Hotel sangat rawan. Ketika saya pergi ke beberapa hotel, tidak ada sama sekali pemeriksaan dari petugas dengan detector. Tetapi teroris sasarannya apapun. Kita melihat di Rusia Selatan, rumah sakit dihajar, 35 manusia mati, kejam sekali.

**DENNY J.A.:**

Apa efek teror ini bagi sistem poitik dan ekonomi kita terutama menjelang pemilu 2004 ? Dan kira-kira efek apa yang terasa dalam jangka pendek ?

### **TJIPTA LESMANA:**

Dalam jangka pendek, pengaruhnya di bidang politik. Keterpurukan pemerintahan Megawati akan semakin mencolok. Publik akan melihat pemerintah tidak sanggup menangani masalah bom, akan ada efeknya dalam pemilu Maret dan Agustus 2004.

Kecuali kalau pemerintahan Megawati mampu dalam waktu singkat menangani masalah ini dan mengejar para pelakunya. Sebetulnya sudah cukup baik pemerintahan Megawati dalam setahun terakhir ini. Tiba-tiba meledak lagi, sepertinya ingin meruntuhkan apa yang telah dicapai. Tapi yang lebih mengerikan adalah efek ekonomi. Terutama dikaitkan dengan hubungan internasional. Setelah Bom Bali, belakangan teman-teman pengusaha mengatakan sebetulnya sudah tumbuh kepercayaan internasional. Internasional investor sudah mulai berdatangan atau siap-siap masuk ke pintu Indonesia. Tiba-tiba bom meledak lagi. Mereka akan berpikir dua kali dengan melihat perkembangan di Indonesia terakhir. Ini yang mengerikan, sebab menyangkut perut rakyat. Kalau investor tidak masuk, kita susah bangkit dari situasi ekonomi sekarang ini. Sebab hanya dengan injeksi dari luar, ekonomi kita bisa tumbuh, dan memberikan pekerjaan serta memberikan isi perut kepada rakyat.

### **DENNY J.A.:**

Pengangguran atau setengah. pengangguran sudah mencapai angka 40 juta orang lebih. Dengan tidak masuknya investor berarti ancaman pengangguran bisa lebih dahsyat lagi. Tindak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan asing akan angkat kaki. Kecuali pemerintah memberikan security guarantee. Suatu hal yang sulit bagi ekonomi kita.

**DENNY J.A.:**

Kita-menjadi tercengang, bom ini terjadi justru melaksanakan sidang tahunan MPR. Sebuah ritual yang sangat berwibawa. Menurut anda ?

**TJIPTA LESMANA:**

Sebuah kesengajaan. Bagaimana pun MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR sedang, bersidang, bom meledak. Mereka menampar wibawa MPR yang lebih tinggi dari presiden. Ini simbolik, very-very significant.

**DENNY J.A.:**

Sulit kita sepenuhnya menyalahkan polisi bung. Karena kita melihat bom terjadi hampir tak terduga. Mereka sudah menjaga masjid, gereja, dan tempat-tempat strategis. Tiba-tiba muncul bom di hotel.

**TJIPTA LESMANA:**

Kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada polisi, tidak fair. Kita menghadapi sebuah mahluk yang tidak kelihatan sama sekali. Seharusnya polisi bekerja sama dengan tentara. Saya cuma khawatir apakah ini salah satu dampak dari pemisahan Polri dari TNI. Tetapi ada baiknya kerja sama. Sebab menghadapi teroris, TNI sudah berpengalaman. Mereka cukup capabel, BIN atau BAIS. Jangan menunjukkan semacam egosentrisme.

**DENNY J.A.:**

Selain kerja sama dengan polisi dan militer, mungkinkah dengan local security di masing-masing wilayah ?

**TJIPTA LESMANA:**

Jelas. Mereka mesti di-train supaya lebih canggih.

**DENNY J.A.:**

Karena beraneka ragam rarget bisa dijadikan sasaran. Tidak hanya di Jakarta, Bali atau mungkin propinsi lain. Bisa bandara, restoran, hotel. Apalagi yang bisa dilakukan lagi ?

**TJIPTA LESMANA:**

Mungkin dengan mengajak masyarakat luas dari kelompok yang terkecil, katakanlah RT, RW, LSM-LSM bisa diajak meningkatkan kesadaran, ikut menjaga keamanan negara kita. Polisi tidak bisa sepenuhnya mengamankan kota Jakarta. Dan kalau polisi tidak bisa, kita tidak bisa menyalahkan. Berapa sih kekuatan polisi ?

**DENNY J.A.:**

Hal-hal lain yang menarik adalah aspek intemasional dari teror ini. Karena kita melihat juga di Marriot, sebagaimana di Bali. Ada warga asing dari Belanda yang tewas. Kita mendengar Australia ingin mengirimkan tim polisinya. Bagaimana anda melihat efek baik dan buruk dari keterlibatan intemasional dalam kasus domestik seperti ini?

**TJIPTA LESMANA:**

Welcome saja. 'Waktu di Bali, Australia bekerja penuh dengan kita. Kita mengakui, sumbangsih mereka dalam mengungkap terror bom di Bali. Tidak ada salahnya kita mengajak mereka kerja sama, tentunya dalam batras-batas tertentu. The final decision tetap di

tangan polri. Mereka tidak bisa intervensi. Mereka canggih dalam teknologi. Canggih dalam pengusutan. Itu yang perlu kita ambil.

**DENNY J.A.:**

Terorisme sudah merupakan jaringan regional dan intemasional. Juga dihadapi dengan aparat dengan jaringan intemasional. Bagaimana menurut anda?

**TJIPTA LESMANA:**

Sudah semacam keharusan kerja sama intemasional. terutama ASEAN, jaringan kepolisian, jaringan inteligen. Kerja intemasional perlu ditingkatkan.

**DENNY J.A.:**

Bom kembali mengguncang Jakarta. Secara makro, teror ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di India, Rusia. Bahkan yang paling fenomenal terjadi di negara super power Amerika 11 September 2001. Terorisme mendapat status yang baru yaitu musuh politik global yang paling mendapatkan prioritas. Kita mengetahui sejak lama Amerika kehilangan the common enemy yaitu komunisme. Tapi kini pelan-pelan terorisme menjadi musuh utama Amerika. Di mana perhatian, kajian, dan dana paling banyak dikerahkan untuk menghantam terorisme. Amerika percaya ada kekuasaan global yang ingin menghancurkan berbagai kepentingan Amerika. Pertarungan global ini juga mempengaruhi berbagai negara lokal, termasuk Indonesia. Karena diwamai oleh sentimen keagamaan, muncul image terjadi satu pertarungan the clash of civilization antara Amerika yang barat melawan gerakan reroris yang mendasarkan diri pada interpretasi paling ekstrim, dan

paling buruk dari agama Islam. Dan itu pun terjadi di negara kita. Bagaimana bung Tjipta melihat terorisme menjadi fenomena global dan masuknya isu agama dalam perang ?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya belum lama membaca buku, tetapi lupa judulnya. Pengarang buku ini secara genit menyalahkan Amerika. Semua ciptaan dan biang keladinya Amerika. Uniknya buku itu dikarang oleh orang Amerika. Artinya dia ingin mengatakan musuh terorisme itu seolah-olah ciptaan Amerika sendiri. Prinsip ini ada dalam teori politik. Sebab kalau kita tidak mempunyai musuh, sepertinya kita tidak bisa membangun senjata, tidak mendapat dana besar dari Konggres. Tapi yang jelas Amerika berhasil menciptakan image di seluruh dunia bahwa terrorist is our common enemy at this moment.

**DENNY J.A.:**

Sekarang sudah hadir di telepon Bung Suripto. Anda mengetahui banyak soal security. Kita ingin dengar pandangan secara umum dulu mengapa terjadi ledakan bom lagi di Jakarta ?

**SURIPTO:**

Jangankan soal bom, soal pembunuhan dan segala macam peristiwa kriminal besar sekali kemungkinan terjadi. Pertama, kondisi obyekdf di Jakarta. Banyak orang yang mengganggu, banyak tentara yang desersi, mereka dengan mudah digunakan oleh orang-orang yang punya niat untuk merencanakan peledakan bom.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut bapak, faktor kesulitan ekonomi dan tentara yang desersi?

**SURIPTO:**

Ya, itu faktor yang menyebabkan suburnya pelaku-pelaku yang mau melakukan hal seperti itu. Dalam istilah intelijen itu namanya dumb agent. Artinya agen yang bisa dikorbkan. Yang harus dibongkar adalah siapa di balik agen itu. Apakah ada mata rantainya, ada benang merahnya di dalam konteks peledakan bom itu?

**DENNY J.A.:**

Ini kerja jaringan ya? Pelaku utamanya jauh tersembunyi di belakang. Lalu kira-kira mengapa hotel Marriot yang dipilih?

**SURIPTO:**

Bukan hanya hotel Marriot. Semua hotel internasional, apalagi yang berbintang lima dan mempunyai dampak internasional-berpotensi untuk diserang. Jadi peledakan itu dimaksudkan untuk membawa dampak internasional.

**DENNY J.A.:**

Efek publikasi begitu?



**SURIPTO:**

Benar. Membangun opini internasional, bahwa keadaan Indonesia, khususnya Jakarta mencekam. Ini target yang hendak diciptakan oleh peledakan itu.

**DENNY J.A.:**

Sasarannya ditujukan kepada pemerintahan Megawati atau Amerika?

**SURIPTO:**

Amerika atau siapa pun. Tetapi yang jelas target untuk menimbulkan opini internasional sudah berhasil.

**DENNY J.A.:**

Pak Da'i Bahtiar mengatakan ada kemiripan anrara bom di Marriot dan bom di Bali. Bagaimana bapak meresponnya ?

**SURIPTO:**

Dari sudut mana ada kemiripan itu. Kalau di fisik ada pakai mobil kijang terus diledakkan, lantas dahsyatnya peledakan yang secara sepiantas itu mirip. Tetapi kemiripan itu belum tentu ada benang merahnya. Bisa saja kemiripan itu diberikan oleh master mind untuk melakukan peledakan dan kemudian dikesankan bahwa ini dilakukan oleh orang yang sama dan pelaku yang sama.

**DENNY J.A.:**

Jadi meskipun modus operandinya sama, belum tentu pelakunya sama ?

**SURIPTO :**

Belum tentu mastermind-nya sama.

**TJIPTA LESMANA:**

Saya tertarik tentang dumb agent. Menurut bapak sampai sejauh mana potensi dumb agent ini untuk terlibat dalam gerakan teroris di Indonesia ?

**SURIPTO:**

Dumb agent ini adalah orang yang dibayar, orang yang belum mengetahui akibat dari tindakannya, apakah bom ini mengakibatkan kematian atau menimbulkan korban yang begitu besar. Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu dibayar.

**DENNY J.A.:**

Misalnya bom Bali. Ada Amrozi, ada Imam Samudera. Mereka itu dumb agent-nya atau mdster mind-nya?

**SURIPTO:**

Kalau Amrozi dan sebagainya, itu kemungkinan istilahnya bukan dumb agent. Tetapi kemungkinan besar ada unsur lain yang sudah menyusup jauh lebih lama ke dalam jaringan kemudian jaringan itu di-provok. Saya teringat dengan buku My Jihad. Buku karangan seorang Amerika yang masuk agama Islam dan kemudian direkrut oleh CIA, kemudian ikut dalam perang Afghanistan, perang Chechnya, dan sebagainya. Setelah dia merasa digunakan dan dirugikan, karena dengan keluarga susah ketemu dan sebagainya, dia menulis buku untuk membongkarnya. Di organisasi-organisasi Islam pun bisa saja direkrut anggota-anggota yang punya CIA.

**DENNY J.A.:**

Situasi menjadi kompleks. Tetapi yang menjadi hot adalah terorisme bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masuk sentimen-sentimen agama. Menurut bapak apakah masuknya senrime agama ini menjadi susah untuk diberangus di Indonesia ?

**SURIPTO:**

Orang-orang yang terlalu fanatis, kurang punya wawasan yang mendalam, mudah sekali untuk disusupi, di-provok melakukan hal yang berbau sentimen agama.

**DENNYJ.A.:**

Terima kasih Pak Suripto atas pandangannya.

Pak suripto banyak memberikan kepada kita pandangan rentang kemungkinan terpisahnya antara pelaku dengan mastermind. Baik para pemirsa Delta FM di mana pun anda berada. Masih bersama saya Denny J.A. dalam dialog aktif dengan topik yang hot yaitu “Bom yang melanda Jakarta, apa efeknya bagi ekonomi politik kita?” Di sebelah sana ada Bung Pande Silalahi, pengamat ekonomi CSIS. Anda seorang ekonom yang mengerti betul masalah ekonomi. Kira-kira efek apa yang sangat terasa dari bom di Jakarta di bidang ekonomi ?

**PANDE RADJA SILALAH I :**

Saya kira sangat berpengaruh, tetapi apakah pengaruh itu besar sangat tergantung bagaimana kita bereaksi. Kemarin di pasar modal terjadi goncangan, tetapi tidak terlalu besar.

**DENNY J.A.:**

Jadi, yang menentukan nanti adalah image dari stabilitas keamanan kita ?

**PANDE RADJA SILALAH I :**

Betul. Kalau pelakunya cepat ketemu, seperti pada bom Bali, recovery dampaknya juga akan cepat.

**DENNY J.A.:**

Saran terpenting bapak untuk pemerintahan Megawati agar situasi teror bom ini tidak mengganggu ekonomi kita ?

**PANDE RADJA SILALAH I :**

Tindakan nyata, misalnya melakukan tindakan preventif dengan meminta bantuan pihak kepolisian, berkoordinasi dengan aparat keamanan. Meminta Pengertian dari masyarakat. Itu harus datang dari orang pertama, harus tampil ke depan umum. Kita sudah dua kali belajar, kita harus tampil ke depan. Seperti halnya presiden Amerika Serikat.

**DENNY J.A.:**

Jadi bapak sarankan agar Megawati tampil di televisi' membuat speech gitu ?

**PANDE RADJA SILALAH I :**

Betul, bagaimana meyakinkan-masyarakat agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab. Itu lebih Penting.

**DENNY J.A.:**

Ok, terimakasih pak. Kembali pada Bung Tjipta. Bagaimana bung, apakah masih ada sikap kita untuk optimis ?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya kira sikap optimis tetap diperiukan. Perlawanan terhadap terorisme sama dengan perang. Dalam perang, sasaran utama adalah moral. Kalau moral sudah hancur, hancurlah kita. Teror justru yang dikehendaki adalah mora. Kalau moral kita hancur' habislah semua. Kalau kita apatis, tidak berani ke kantor, menang mutlaklah terorisme itu. Hal ini jangan sampai terjadi' Kita harus tetap optimis apapun yang terjadi. Tentunya bukan optimisme yang kosong. Kita mesti mendukung Polri. Kita mesti memberikan support dengan berbagai hal. Polri harus meningkatkan profesionalismenya' Pemerintah mesti meningkatkan kesejahteraan polisi. Saya senang melihat indeks bursa anjlok, tetapi dalam beberapa jam bangkit lagi. Ini hebat.

**DENNY J.A.:**

Kalau kita lihat dalam berbagai infrastruktur, kita tetap bisa optimis. Pertama, kita sudah mempunyai Undang-Undang Terorisme. Kedua, presiden sudah menunjuk secara langsung Menkopolkam untuk menjadi koordinator penanggulangan terorisme. Dan ada juga hal lain yang patut kita renungkanini.

**TJIPTA LESMANA:**

Saya sependapat dengan pak pande, Ibu Megawati harus tampil ke depan, pegang komando tertinggi langsung action. Ucapan

dan tindakan Megawati bisa seara langsung memperbaiki citra internasional.

**DENNY J.A.:**

Ini poin penting untuk didengar. Mudah-mudahan sampai kepada Ibu Mega dan pendukungnya. Di era krisis seperti ini, ketika ada ketidakpastian, penting bagi ibu Mega untuk muncul di televisi, membuat beberapa kali speech untuk membuat publik yakin, bahwa semua bisa dikendalikan, segala hal sdah dilakukan yang tinggi. Dan di masa datang dijanjikan dengan komitmen tinggi, bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi.

**TJIPTA LESMANA:**

Betul. Publik harus ditenangkan dulu. Hanya dengan omongan Presiden publik bisa reda dan tenang.

**DENNY J.A.:**

Di era demokrasi ini presiden menjadi pusat dari emosi kolektif publik. Menurut anda dengan diguungnya jaringan pelaku bom Bali, apakah akan mengurangi secara signifikan gerakan terorisme di Indonesia?

**TJIPTA LESMANA:**

Bisa. Jaringan terorisme semakin sempit geraknya, seperti yang terjadi di Semarang. Terapi bisa juga radikarime semakin tinggi karena mereka kepepet. Tapi at the end saya yakin sekali bahwa polisi bisa mengejar ruang gerak mereka semakin sempit.

**DENNY J.A.:**

Tadi Pak Suropto mengatakan adanya akar-akar masalah ketidakadilan ekonomi, tentara desersi, bagaimana?

**TJIPTA LESMANA:**

Faktanya memang demikian. Perampokan di bank sering terjadi dilakukan oknum. Atau kadang-kadang pistol dipinjamkan mungkin dengan sewa Rp. 1-2 juta. Menyedihkan sekali. Ekonomi secara makro penting sekali.

**DENNY J.A.:**

Mengenai kecanggihan para agen menyusup ke jaringan Islam misalnya?

**TJIPTA LESMANA:**

Iya, itu kan bisa dideteksi dan dicegah Intelijen Penting sekali.

**DENNY J.A.:**

Baiklah Bung Tjipta Lesmana terimakasih telah memberikan gagasan-gagasan kepada bagaimana cara merespon secara benar terorisme.

Para pendengar Delta FM, memang terorisme mengguncang-guncang kita dan menguatkan bahwa Indonesia sebagai “surga terorisme”. Namun tetap ada ruang untuk optimis karena bagaimanapun pelan-pelan telah dibuat infrastruktur yang lebih kuat melawan terorisme. Kita sudah mempunyai UU Terorisme, polisi yang berpengalaman menggulung terorisme di Bali, dan dukungan internasional, walaupun kita merasa tidak pasti dan

mungkin akan datang bom susulan. Namun optimisme dan harapan akan tetap ada karena memang pelan-pelan kita sadari bahwa terorisme menjadi musuh bersama masyarakat, tidak hanya musuh pemerintah.

Sampai jumpa lagi minggu depan dalam “Dialog Aktual” dengan topik yang aktual bersama saya Denny J.A.



# **SETAHUN BOM BALI, APAKAH INDONESIA SUDAH AMAN DAN JARINGAN TERORISME SUDAH HANCUR?**

Tanggal: 8 September 2003

Host: DennyJ.A.

Narasumber: Tjipta Lesmana (Pengamat Politik), Stanley Harsa  
(Atase Pers Kedutaan Amerika Serikat), Juanda (Pengamat  
Intelijen)

Sejak reformasi politik lima tahun yang lalu, banyak peristiwa besar terjadi di negeri ini. Bom Bali adalah salahsatu peristiwa yang paling tragis. Bukan hanya karena banyaknya korban yang jatuh, bukan hanya karena banyaknya korban warga asing rapi juga harena berkembang spekulasi, “Di balik Bom Bali ada jaringan teroris regional di Asia Tenggara”. Jaringan ini diduga juga mempunyai jaringan di Timur Tengah. Dan jauh lebih heboh lagi, jaringan ini dinduh mempunyai agenda besar membangun Negara Islam Ralta di Asia Tenggara. Kontrouersi tentang jaringan teraris ini membelah opini publik. Sekarang sudah setahun peristiwa in berlalu, sudah banyah analisis tentang pelaku pengeboman : Jama’ah Islamiyah, Alumni Afghanistan, dan sebagainya. Pelaku Bom Bali juga sudah divonis, dan Hambali juga sudah ditangkap. Lalu apaah hemudian Indonesia otomatis menjadi lebih aman? Apakah jaringan terorisme itu, jika memang benar ada, sudah hancur ?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi para pendengar Deha FM di mana pun anda berada terutama di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar ? Jumpa lagi dalam acara “DialogAktual” bersama saya Denny J.A.. Dengan topik yang sedang hot kali ini “Setahun Bom Bali, Apakah Indonesia Sudah Aman dan Jaringan Terorisme Sudah Hancur?”.

Hadir bersama kita sekarang, Bung Tjipta Lesmana. Komentar umum dulu, apakah anda sekarang ini sudah merasa aman tinggal di Indonesia setelah satu tahun Bom Bali?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya kira tonggaknya Bom Marriot. Sebelum Bom Marriot, situasi keamanan kita benar-benar sangat rawan dan membuat deg-degan. Meledak bom-bom berskala kecil di Mabes Polri, di gedung DPR/MPR, di belakang gedung PBB, dan lain sebagainya yang membuat kita selalu tegang. Dan sebulan terakhir ini kita sudah merasakan adanya perubahan yang cukup substansial dari segi keamanan. Situasi cukup kondusif dan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, terutama sejak tertangkapnya Hambali di Thailand. Kita yakin tertangkapnya Hambali terkait langsung dengan situasi keamanan di Indonesia.

**DENNY J.A.:**

Tertangkapnya ‘ikan besar’ Hambali ini menjadi faktor sangat kuat sekali untuk membuat publik merasa aman ?

**TJIPTA LESMANA:**

Ya, sangat kuat sekali.

**DENNY J.A.:**

Ada berita menarik di Majalah Times,yang mengatakan bahwa dana Bom Bali ini dari Al-Qaeda ? Bagaimana anda menanggapinya?

**TJIPTA LESMANA:**

Kita sebagai scientist sebelum melihat bukti tidak bisa percaya. Harus ada investigasi! Tapi kalau ini dilansir oleh Times yang katanya mengutip sumber-sumber yang layak dipercaya, saya kira boleh percaya boleh tidak.

**DENNY J.A.:**

Ini masih berupa data intelijen yang perlu diverifikasi ?

**TJIPTA LESMANA:**

Ya, masih data intelijen. Masalahnya bukan kita yang menginvestigasi. Lain soal kalau Mabes Polri yang menginvestigasi, kita akan lebih percaya.

**DENNY J.A.:**

Hambali -dalam Majalah Times- mengatakan bahwa Jamaah Islamiyah sudah hancur, pentolan-nya sudah ditangkap, dan tabungannya sudah terkuras.

**TJIPTA LESMANA:**

Saya meragukan itu. Saya mengajar Propaganda and Psychological Welfare di Sesko TNI. Dalam propaganda ada taktik: sebetulnya kita mau menghantam A, tapi kita mengatakan mau menghantam B, supaya orang tertidur orang lemah. Sebetulnya itu taktik yang tradisional dalam psychological welfare.

**DENNY J.A.:**

Jadi Hambali hanya melakukan manuver saja ?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya kira begitu, khususnya dengan mengatakan Jamaah Islamiyah sudah hancur. Ini merupakan isu yang sangat rawan. Kita tidak sedang memerangi Islam. Kita memerangi kaum teroris yang kebetulan beragama A, B. Yang jelas semua orang harus yakin, bahwa ada jaringan terorisme di Indonesia. Bahkan bukan hanya regional saja, tetapi mempunyai link internasional.

**DENNY J.A.:**

Menurut Kapolri masih ada puluhan kilo bahan peledak yang tidak ditemukan juga.

**TJIPTA LESMANA:**

Ini yang saya katakan probability rate masih ada. Karena orang-orang yang sudah diidentifikasi Polri sudah ditangkap, bahkan bahan baku peledak yang sudah diidentifikasi belum terbongkar, berarti any time bisa meledak. Tapi menurut keyakinan saya dibandingkan dengan dua bulan lalu, sekarang rate-nya jauh lebih rendah.

**DENNY J.A.:**

Jadi ada positifnya karena pelaku sudah ditangkap. Sisi negatifnya puluhan kilo bahan peledaknya belum ditemukan. Bagaimana dengan fenomena adanya bom bunuh diri di Indonesia?

**TJIPTA LESMANA:**

Itu yang paling mengerikan, praktek yang juga dilakukan di Palestina dalam Perang Palestina-Israel. Hamas sering melakukannya ke sasaran Israel, untuk membalas tindakan biadab Israel. Bom bunuh diri susah ditangkap pelakunya.

**DENNY J.A.:**

Mustahilnya juga orang melakukan bunuh diri jika tidak mempunyai fanatisme, yang menggunakan sentimen-sentimen agama misalnya?

**TJIPTA LESMANA:**

Ya jelas, ada fanatisme. Pokoknya dengan cara apapun akan mereka lakukan demi tercapainya cita-cita.

**DENNY J.A.:**

Dari komplekstias semua ini, Hambali tertangkap, sementara puluhan kilo bahan peledak belum ditemukan. Secara umum setelah setahun Bom Bali kita relatif lebih aman?

**TJIPTA LESMANA:**

Ya, lebih aman. Konkritnya adalah terselenggaranya KTT ASEAN. Ini sangat berisiko, karena melibatkan sekitar 13-15 kepala negara sahabat. Tapi kita yakin mampu mengamankan KTT itu.

**DENNY J.A.:**

Tapi Bagaimana dengan warga asing yang ada di Indonesia, apakah mereka juga merasa lebih aman setelah setahun Bom Bali? Kita menjumpai Bung Stanley Harsa dari Atase Pers Kedutaan Amerika Serikat (AS). Selamat pagi Bung Stanley, apa kabar?

**STANLEY HARSA:**

Selamat pak Denny, kabar baik, terima kasih.

**DENNY J.A.:**

Setahun setelah Bom Bali meledak, anda selaku warga negara asing (WNA) apakah merasa lebih aman atau kurang aman di Indonesia?

**STANLEY HARSA:**

Pertama saya ingin menyampaikan duka cita kepada para korban dan keluarga Bom Bali dan Bom Marriot. Sekarang keberhasilan Indonesia pesat sekali, sudah menangkap lebih dari 100 orang yang terkait dengan terorisme, sudah ada 10-an yang diadili, dan sudah banyak yang divonis, dan setiap minggu ada yang diadili lagi. Jadi sebenarnya setelah Bom Bali, masalah ke depan adalah perang terhadap terorisme. Apalagi di seluruh dunia Amerika menjadi salah satu pemimpin dalam perjuangan ini, juga dalam rangka demokrasi, karena terorisme telah melanggar hak asasi manusia.

**DENNY J.A.:**

Anda selaku WNA di Indonesia apa merasa lebih aman sekarang?

**STANLEY HARSA:**

Itu pertanyaan yang agak susah dijawab. Sekarang ini di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, ancaman terorisme tetap ada. Dan kita masih harus terus menerus berjuang melawannya, harus tetap waspada. Jadi saya mempunyai nasehat untuk diri sendiri, yang mungkin juga baik untuk kita semua, bahwa Indonesia harus tetap waspada, karena masih ada kemungkinan lagi aksi terorisme berlangsung.

**DENNY J.A.:**

Sebagai WNA apakah melihat pemerintah Indonesia sudah melakukan hal-hal yang cukup untuk menumpas terorisme?

**STANLEY HARSA:**

Banyak keberhasilan pemerintah Indonesia dengan begitu banyak orang yang ditangkap termasuk 'ikan besar' dalam berbagai peristiwa bom itu. Di mana-mana terlihat fasilitas, cara-cara untuk menghindari ancaman-ancaman terorisme. Amerika Serikat juga menjadi lebih sadar, lebih rajin, juga sama dengan Indonesia setelah 12 Oktober. Cuma kalau dalam hal pembiayaan menumpas terorisme tidak ada kendala, Indonesia bisa lebih giat lagi. Biaya untuk membasmi terorisme itu penting sekali.

**DENNY J.A.:**

Pemberantasan money laundering atau terorisme perlu untuk diintensifkan oleh pemerintah Indonesia?

**STANLEY HARSA:**

Ya, betul.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda apakah masih ada yang belum cukup dilakukan pemerintah Indonesia, terutama untuk aliran uang terorisme di Indonesia?

**STANLEY HARSA:**

Itu bisa lebih dalam, lebih teliti.

**DENNY J.A.:**

Sekarang ini banyak pertanyaan mengenai Hambali. Dia warga negara Indonesia (WNI) tetapi mengapa ditahan oleh pemerintah Amerika Serikat?

**STANLEY HARSA:**

Karena dia seorang teroris yang sudah terbukti terlibat banyak kasus bom, termasuk kasus 11 September. Dan Amerika Serikat mempunyai minat dan kepentingan yang besar untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Hambali.

**DENNY J.A.:**

Hambali juga diklaim terlibat dalam Bom Bali, bahkan Bom Bali ditengarai dibiayai Al-Qaeda. Apakah mungkin pemerintah Indonesia juga mengadili Hambali?



**STANLEY HARSA:**

Amerika Serikat sangat mengerti kepentingan pemerintah Indonesia untuk mengetahui informasi apa yang diketahui Hambali. Juga untuk membawa Hambali ke pengadilan, supaya semua orang mengetahui yang bertanggungjawab untuk semua serangan teroris di Indonesia adalah Jamaah Islamiyah. Kita sudah memberi tahu Indonesia kemauan Amerika Serikat untuk membagikan informasi yang perlu bagi Indonesia kalau informasi ini sudah diketahui.

**DENNY J.A.:**

Jadi pemerintah Amerika Serikat sudah membuka diri untuk sharing informasi tentang Hambali sejauh diperlukan Indonesia. Mungkinkah teleconference di pengadilan? Jadi pengadilan di Bali, Hambali dimunculkan di sana melalui teknologi itu?

**STANLEY HARSA:**

Pokoknya sekarang kasus itu akan terus menerus diperiksa, dan caranya bagaimana untuk mencari informasi serta bagaimana mendapatkannya, saya tidak tahu persis.

**DENNY J.A.:**

Bung Stanley Harsa, terima kasih banyak. Kita sudah mendengar bagaimana orang asing, terutama mereka yang terlibat dalam isu terorisme, memberikan pandangan tentang setahun Bom Bali.

Para pendengar, tadi anda sudah mendengar sendiri, bahwa WNA pun merasa aman setelah setahun peristiwa Bom Bali, walau masih tetap harus lebih waspada, karena tidak terduganya berbagai tindakan terorisme. Dan Stanley Harsa, Atase Pers

Kedutaan Amerika Serikat, juga mengatakan, sungguh pun Hambali WNI ditahan di Amerika Serikat, tapi masih terbuka kemungkinan untuk memperoleh informasi dari Hambali melalui kesepakatan pemerintah Amerika dan Indonesia.

Saya bacakan dulu beberapa SMS yang masuk. Pertama dari Bung Rivandi mengatakan, “Semua pelaku bom dan jaringannya yang terlibat dihukum mati, jangan pernah dikasih remisi.” SMS kedua, tanpa nama, mengatakan, “Hambali bukan ‘ikan besar’, karena ikan besar itu Amerika Serikat dan Israel.”

Tadi kita sudah mendengar, Stanley Harsa mengatakan bahwa Hambali sekarang di bawah kendali pemerintah Amerika Serikat. Tentu pemerintah Indonesia akan diberikan alrses Serikat sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana anda melihatnya ?

#### **TJIPTA LESMANA:**

Kita melihat pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat begitu. Mungkin kita bisa maklumi juga karena Hambali merupakan tokoh penting untuk membongkar jaringan terorisme di manca negara. Tapi saya mendambakan pejabat-pejabat kita masuk ke sana. Katakanlah Hambali tidak bisa dibawa ke Indonesia, tapi minimal perwira-perwira Polri diizinkan memeriksa Hambali dengan didampingi oleh petugas-petugas Amerika Serikat. Supaya kita memperoleh first hand information. Dan informasi ini lebih dipercaya bobotnya, karena dalam teori komunikasi, kalau informasi itu diperoleh dari perantara, bobotnya sudah berkurang. Sayang sekali, seharusnya pemerintah Bush memberikan kesempatan dan kepercayaan. Kalau kebijakannya begini orang-orang kita masih menganggap ini rekayasa Amerika Serikat saja. Karena tidak kita memperoleh secara langsung dari yang bersangkutan.

**DENNY J.A.:**

Posisi Hambali di sini memang sangat strategis

**TJIPTA LESMANA:**

Ya, sangat strategis. Siapa yang digulingkan Amerika Serikat, katanya juga agen CIA. Kesimpulannya CIA mempunyai kebiasaan memelihara orang, setelah orang itu besar namanya, kemudian digorok lehernya. Ini rumor yang kita dengar. Sampai sejauhmana kebenarannya, saya juga tidak tahu.

**DENNY J.A.:**

Ok, kita hubungi dulu Bung Juanda melalui telepon. Halo Bung Juanda, selamat pagi.

**JUANDA:**

Halo, selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Setahun setelah bom Bali, apakah jaringan rerorisme di Indonesia sudah terbongkar semua berikut master mind-nya?

**JUANDA:**

Kalau pelaku kita sudah ketahui, aktor intelektualnya perlahan-lahan juga kita ungkap, mengingat apapun yang terjadi di Indonesia tidak bisa lepas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah, dan kemudian berkaitan dengan perkembangan strategi perminyakan negara adi daya. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Kemudian kita mengetahui bahwa jejaring kelompok radikal Indonesia saling

sepenanggungan dengan berbagai pihak yang bermain. Itu yang sudah terlihat dari bagaimana jejaring yang dilakukan.

**DENNY J.A.:**

Pelaku sudah tertangkap tapi aktor intelektualnya masih abu-abu ?

**JUANDA:**

Bukan abu-abu, aktor intelektualnya sudah kita track juga. Namun aktor intelektual di sini bukan hanya di dalam negeri teiapi juga di luar negeri.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda Hambali itu siapa sebenarnya?

**JUANDA:**

Hambali itu sebagai Mister X saja, seseorang yang kita anggap sebagai pelaku. Apakah dia betul-betul sebagai aktor intelektual, arau semata-mata hanya sebagai agen ? Atau katakanlah fungsi lain. Karena beliau ini sedang dalam posisi sulit sebagai TNI, beliau ditangkap oleh negara lain.

**DENNY J.A.:**

Selama ini ada dua perspektif mengenai Hambali. Petrama Hambali adalah salah satu pelaku Bom Bali dan orang asli Jamaah Islamiyah, yang mempunyai ideologi membentuk Negara Islam . Kedua Hambali adalah agen CIA, yang bertolak belakang sekali.

## **JUANDA:**

Dugaan Hambali sebagai aktor intelektual dan sebagainya bukan dari pihak kita. Kalau di dalam ilmu propaganda dikenal sebuah adagium, “Hembusan yang dikeluarkan oleh pihak asing ke dalam negeri yang berkaitan dengan WNA harus tetap diwaspadai, karena ada niat yang terkandung di dalamnya.” Sedangkan dilihat dari latar belakang Hambali yang kita ketahui dari informasi media massa maupun pihak keluarga, menjurus kepada sebuah kesimpulan, Hambali semata-mata hanya agen. Apakah dia hanya semata-mata sebagai agen rahasia dalam konteks serai secret atau agen handler yang menangani agen-agen lain. Dan siapa yang menggunakannya sampai hari ini masih misterius.

## **DENNY J.A.:**

Ok Bung Juanda, terima kasih banyak atas verifikasi dan perspektif dari anda. Kita kembali kepada Bung Tjipta Lesmana. Kita melihat dalam Bom Bali ini terjadi keterbelahan opini publik yang terlihat dari diskusi soal Hambali. Ada yang mengatakan dia Pimpinan Jamaah Islamiyah yang mempunyai Ideologi Negara Islam. Ada lagi yang mengatakan dia agen CIA. Bagaimana komentar anda?

## **TJIPTA LESMANA:**

Saya ragu ini akan terbongkar tuntas. Yang lebih penring bagi kita bagaimana menjaga dan mengamankan rumah kita sendiri. Ini yang paling krusial, siapa yang kita duga ada kaitan, kita selesaikan secara hukum. Saya kira yang penting bagi aparar adalah berani menindak tegas, tidak peduli siapa pun. Pokoknya kalau ada indikasi, bukti-bukti cukup kuat, langsung tangkap saja.

**DENNY J.A.:**

Karena Hambali pelaku Bom Bali, kedua karena dia WNI, mungkin penting sekali kalau Polri mempunyai akses menginterogasi Hambali di mana pun dia berada.

**TJIPTA LESMANA:**

Seharusnya begitu, dan ini tantangan bagi menteri luar negeri. Setiap ada kesempatan cobalah dibujuk-bujuk pemerinrah Amerika agar memberi akses. Katakanlah satu jam Polri datang ke sana menginterogasi Hambali didampingi oleh pejabat Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh sangat berharga, sekaligus untuk membuyarkan spekulasi yang bernuansa negarif di dalam negeri, apakah Polri ini ngawur arau tidak.

**DENNY J.A.:**

Saya kira ini pesan penting yang bisa didengar kawan-kawan di Kedubes Amerika Serikat, bahwa leadership Amerika Serikat sangat didukung dalam memerangi terorisme. Tapi juga penting bagi Amerika Serikat untuk membuka diri bagi Polri untuk mengakses Hambali, karena Hambali dianggap ikut terlibat dalam beberapa

aksi teror di Indonesia, terutama aksi Bom Bali. Hambali bagaimanapun juga WNI, senrimen rasa nasionalisme Indonesia sangat kuat di sini. Jika Amerika Serikat memberikan akses kepada Polri mungkin justru akan menambah simpatik kepada Amerika Serikat untuk semakin memimpin pertarungan global melawan terorisme.

Selanjutnya saya ingin membaca beberapa pesan SMS dari publik. Pertama dari Pranata, yang mengatakan, "Apa perilaku Amerika Serikat di Irak bukan perilaku teroris?"

Kedua dari Sumamo di Tanjung Priok mengatakan, “Amerika Serikat tidak akan memberikan akses kepada Indonesia untuk dapat bertemu apalagi membawa Hambali karena Hambali itu boneka Amerika Serikat.”

Ini opini publik di Indonesia sekarang. Sekarang kita kembali kepada Bung Tjipta Lesmana. Setahun peristiwa Bom Bali, apakah pemerintah Indonesia melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk menumpas terorisme?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya yakin pemerintah sudah berbuat banyak, tapi ketika kita mengharapkan supaya pemerintah tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan yang tegas secara hukum, jangan terlalu curiga dengan kelompok tertentu. Dan kepada masyarakat saya menghimbau supaya mendukung pemerintah kita. Pemerintah saya kira sudah on the right track, misalnya merevisi UU No.14 Tahun 2003 tentang anti terorisme. Saya kira memang sudah sepantasnya kira mendukung, sebab aksi teror ini sangat berbahaya. Dia bukan hanya menghancurkan gedung, diskotik dan sebagainya, tetapi juga sendi-sendi negara.

**DENNY J.A.:**

Kita tahu, problemnya aksi anti terorisme ini dipimpin secara global oleh Amerika Serikat. Tapi sentimen anti Amerika Serikat di Indonesia juga meluas. Bagaimana ini?

**TJIPTA LESMANA:**

Ini seperti yang dikatakan Pak Juanda, bahwa sumber dari terorisme ini adalah karena konflik Palestina-Israel. Itu sebetulnya

yang harus diselesaikan, tapi sulit sekali. Karena sikap Amerika Serikat dan negara barat yang terlalu pro Israel. Apapun yang dilakukan Israel, mereka akan mendukung mari-matian. Saya kira diplomasi Indonesia di sini sangat diperlukan, supaya pemerintah Amerika Serikat jangan terlalu fanatik pro Israel, karena mendapat tantangan luas dari seluruh dunia.

**DENNY J.A.:**

Jadi penting juga didengar oleh Kedubes Amerika Serikat bahwa dengan melindungi Israel, justru membahayakan agenda besar melawan terorisme, karena senrimen anti Amerika Serikat menjadi meluas karena sikap Amerika Serikat terhadap Israel ? Amerika Serikat menyatakan sudah mendukung peta damai unuk Palestina merdeka. Menurut anda ini program yang baik ?

**TJIPTA LESMANA:**

Ya, ini program yang baik. Tapi dalam pelaksanaannya kita sudah melihat banyak sekali hambatan-hambatannya, sehingga Perdana Menteri Palestina pun jatuh. Bila perdamaian di Timur tngah bisa tercapai, saya yakin dunia itu lebih tenang. Grmasuk di Indonesia dampaknya pasti akan positif sekali.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada para pendengar ?

**TJIPTA LESMANA:**

Kita tetap saja live as usual, tidak perlu terlalu takut, tapi tetap waspada. Kita juga harus memberikan dukungan kepada



pemerintah untuk menangani terorisme secara arif, bijak, dan tegas, dengan mengangkat tinggi-tinggi hukum.

**DENNY J.A.:**

Mengenai UU Antiterorisme yang akan direvisi, menurut anda bagaimana?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya kira bukan hanya perlu, tapi sangat penting. Untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada aparatur hukum, apakah itu kepolisian, intelijen. Karena kalau tidak mereka memble sekali, tidak bisa bekerja. Saya percaya kalau Polri diberikan kewenangan yang lebih besar, dia tidak akan main serampangan, main tangkap saja. Justru kewenangan ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Saya yakin Polri juga akan mengerjakannya dengan lebih hati-hati. Karena mereka tahu, kalau mereka salah tangkap, sembarangan, mereka akan di praperadilan.

**DENNY J.A.:**

Keinginan untuk melibatkan satuan militer dalam satuan teror untuk hal-hal khusus, anda juga setuju ?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya seratus persen setuju TNI dilibatkan. Dan kita sudah melihat bahwa dua bulan terakhir diam-diam TNI dilibatkan. Memang terorisme ini semacam perang, dia betul-betul war fair. Oleh karena itu kita bukannya meragukan kemampuan kepolisian. Yang lebih cantik adalah kalau kepolisian ini bekerja sama dengan TNI.

**DENNY J.A.:**

Dan juga dari sisi sumber daya manusia dan keahlian, memang TNI lebih siap ?

**TJIPTA LESMANA:**

Jelas, mereka mempunyai pasukan anti terorisme yang luar biasa. Ada yang dididik di Jerman, Amerika Serikat dan Australia. Mereka tangguh dan canggih.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana dengan Iritik orang banyak terutama pakar HAM yang mengatakan bahwa jika TNI dilibatkan lagi dalam penanggulangan terorisme, akan kembali mengganggu program depolitisasi politik militer?

**TJIPTA LESMANA:**

Saya tidak setuju seratus persen, karena kita terlalu ketakutan terhadap pelanggaran HAM. Saya heran mengapa pakar HAM tidak ada suaranya dalam isu terorisme. Tindakan teroris jelas-jelas pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat serius, namun hampir tidak ada reaksi dari mereka. Dan efek korbannya jauh lebih besar daripada yang salah tangkap. Kita akan tetap mengontrol keterlibatan TNI. Media massa, LSM, DPR harus mengontrol dengan ketat.

**DENNY J.A.:**

Untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam memerangi terorisme tadi, pertama perlu direvisi UU Antiterorisme. Kedua,

melibatkan tentara dalam gerakan memerangi terorisme. Ketiga, ini yang jauh lebih kompleks, karena digunakannya sentimen agama Islam, seberapa besar kita bekerja sama dengan para ulama untuk mengatasi hal ini?

**TJIPTA LESMANA:**

Ini penting sekali, terutama untuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang kita kenal kemoderatannya. Kesempatan bagi mereka untuk berbicara, sosialisasi, bahwa pemerintah, Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri, tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan memerangi Islam. Yang kita perangi terorisme. Mereka semua juga muslim: Pak Sutarto, Hendrorpiyono, Da'i Bachtiar. Saya kira kewajiban juga bagi para ulama, bagi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk terjun ke lapangan, sosialisasi untuk membenahi rumah besar kita, NKRI, supaya aman tenteram. Sebab kalau aman kita bisa membangun.

**DENNY J.A.:**

Kcempat, yang terakhir bung, hubungan dengan Amerika Serikat perlu dibina karena negara ini menjadi hadership dari perang melawan terorisme .

**TJIPTA LESMANA:**

Mau tidak mau kita harus menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Tjipta Lesmana, cukup banyak yang sudah anda bahas. Terima kasih banyak.

Para pendengar sekalian, tidak terasa sudah setahun bom meledak di Bali. Dan sudah banyak yang berubah di sana-sini. Kita sekarang melihat banyak pelaku bom Bali yang ditangkap dan divonis. Dan terakhir kahi kita mendengar Hambali, ‘ikan besar’-nya, sudah pula dikendalikan di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Setahun setelah Bom Bali, kita menginginkan Indonesia semakin baik, semakin aman, dan kita mendukung semua langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk merevisi UU Antiterorisme, dan melibatkan tentara dalam satuan anti teror, termasuk juga membina hubungan yang lebih baik dengan pemerintah Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat juga kita himbau supaya lebih peka terhadap tingginya sentimen anti Amerika Serikat di Indonesia, sehingga lebih baik membuka diri, terutama untuk kasus Hambali yang sekarang ini sedang hotdikait-kaitkan dengan Bom Bali.

Baik para pendengar Deha FM, sampai jumpa lagi pada Rabu minggu depan, bersama saya Denny J.A. dengan topik yang aktual di minggu itu dalam “Dialog Aktual”.

## DUA TAHUN TRAGEDI 11 SEPTEMBER

Tanggal: 10 September 2003

Narasumber: Bantarto Bandoro (pengamat Hubungan  
Internasional CSIS),  
Ahmad Sumargono (Partai Bulan Bintang)

Dua tahun lalu terjadi aksi teror yang mungkin terbesar dalam sejarah manusia, yang dikenal sebagai "Tragedi 11 September". Lebih dari 3000 nyawa terbunuh dalam sebuah peristiwa yang mengguncang New York, jantung negara adidaya satu-satunya. Sejak saat itu, Amerika Serikat mengambil banyak inisiatif untuk memerangi terorisme, menelpon diri sebagai pemimpin perang melawan teroris. Namun Amerika Serikat sering melakukan aksi sepihak dan tetap mempertahankan standard gandanya dalam mensikapi problem terorisme di Timur Tengah.

Berbagai pihak, terutama negara-negara Islam melihat Amerika Serikat semakin arogan dengan perangnya melawan terorisme. Dan pada gilirannya, setelah melakukan serangkaian tindakan atas nama perang melawan terorisme: menyerbu Afganistan, menyerang Irak, Amerika tak jaga di pandang sebagai pahlawan dunia. Amerika tidak mendapatkan respek sebagai pemimpin

dunia. Sebaliknya, popularitas pemerintahan Bush justru semakin menurun, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga di dunia Barat, bahkan juga di dalam negeri. Mengapa inisiatif Amerika dalam memerangi terorisme tidak membuahkan simpati dunia, dan justru berujung pada pencitraan yang negatif ?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Medan. Kembali bersama saya Denny J.A. dalam “Dialog Aktual” dengan topik kali ini “Dua Tahun Tragedi 11 September”. Apakah adayangsaiah dengan cara Amerika Serikat (AS) memerangi terorisme? Tamu kita kali ini adalah Bung Bantarto Bandoro, pengamir Hubungan Internasional CSIS. Selamat pagi bung.

**BANTARTO BANDORO:**

Selamat pagi.

**DENNY J.A.:**

Seperti biasa saya akan memberikan background-nya. Dua tahun yang lalu terjadi aksi teror yang mungkin terbesar dalam sejarah manusia, yang dikenang sebagai “Tragedi 11 September”. Lebih dari 3000 nyawa terbunuh dalam sebuah peristiwa satu hari dan ironisnya justru terjadi di negara adidaya, AS. Kita mengetahui gedung WTC sebagai simbol kejayaan ekonomi dan gedung Pentagon simbol keperkasaan militer Amerika dihancurkan. Sejak saat itu dunia berubah. AS mengambil banyak sekali inisiatif menjadi pemimpin memerangi terorisme. Namun mengapa setelah dua tahun berlalu, Amerika justru bukan dipandang sebagai

pahlawan, atau dipuji sebagai pemimpin, namun semakin dibenci di berbagai negara, terutama di negara mayoritas Muslim. Sebuah riset memperlihatkan dua tahun setelah 11 September, Amerika justru semakin tidak populer di negara-negara Islam. Beberapa contoh saya sebut saja di sini. Di Indonesia popularitas AS turun dari 50% menjadi 15%, di Pakistan dari 23% menjadi 13%, di Turki dari 52% menjadi 15%.

Bung Bantarto, komentar anda secara umum, mengapa Amerika yang mengambil inisiatif memerangi terorisme justru semakin tidak populer?

#### **BANTARTO BANDORO:**

Popularitas Amerika sebenarnya sudah turun sejak ugedi'W'TC, bahkan sebelumnya. Terutama ketika presiden Bush berkampanye untuk rakyat AS, bahwa dia akan membawa AS ke puncak kekuasaan dunia. Bush juga mengeluarkan beberapa statement untuk meyakinkan dunia bahwa AS adalah negara besar dan tidak akan mampu ditandingi oleh negara lain. Begitu "tagedi 11 September" terjadi, sebenarnya popularitas AS semakin menurun karena tuduhan AS bahwa kelompok Muslim radikal berada di balik itu. Kemudian disusul lagi oleh invasi AS ke Afghanistan, Irak, dan juga beberapa statement yang tidak menyenangkan untuk standar negara-negara Islam. Hal ini membuat hubungan AS dengan negara Islam semakin menurun. Beberapa bulan belakangan ini pamor AS semakin menurun terbukti dari survey yang dilakukan oleh GEO.

**DENNY J.A.:**

Ketika AS ingin benar-benar melemahkan jaringan terorisme internasional, menurut anda apakah serangan ke Afghanistan dan Irak memang bagian dari strategi?

**BANTARTO BANDORO :**

Sebenarnya kalau kita melihat strategi AS secara keseluruhan, upaya-upaya seperti itu merupakan bagian yang tidak bisa dihindari, tetapi lmlau secara obyektif untuk memerangi terorisme tidak dengan cara demikian. Karena AS baru saja mengalami trauma tragedi WTC, dia melakukan invasi terhadap Afghanistan dan Irak yang dicurigai mendukung kegiatan terorisme. Justru itu menjadi tidak populer.

**DENNY J.A.:**

Tetapi ada pandangan yang mengatakan menurunnya popularitas AS adalah grafik yang normal. Cuma ketika perolehannya semakin konkret, terorisme semakin lemah, AS akan naik lagi popularitasnya. Anda setuju?

**BANTARTO BANDORO:**

Sangat bergantung bagaimana AS menangani terorisme. Kalau cara-cara sepihak terus dilakukan, secara unik teral pamor AS akan semakin menurun, dan kalau kira melihat polling-nya bukan tidak mungkin bahwa persentase mereka yang melihat AS jelek semakin banyak di waktu yang akan datang.



**DENNY J.A.:**

Menarik bung karena kita melihat rerorisme memang ancaman bagi dunia. Tetapi apa jadinya jika kekuatan yang melawan justru semakin lama semakin tidak populer. Kalau anda melihat kekuatan di luar AS, suategi apa yang lebih populer?

**BANTARTO BANDORO:**

Ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh AS untuk meningkatkan kembali pamornya di dunia. Salah satunya adalah mengajak negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme secara multilateral, tidak dengan cara-cara sepihak, baik melalui forum PBB atau forum-forum lainnya. Melakukan dialog baik dengan cara bilateral, trilateral maupun multilateral. Cara seperti ini akan meningkatkan kembali image AS di mata dunia. Budaya dialog harus dibangkitkan dalam upaya memerangi terorisme. Tidak dengan cara-cara yang seperti di Afghanistan dan Irak.

**DENNY J.A.:**

Kita melihat sejak dua tahun setelah “Tragedi 11 September”, AS justru tidak populer di negara-negara yang Muslim mayoritasnya. Anda kecewa, sedih atau senang melihatnya?

**BANTARTO BANDORO:**

Saya kecewa mengapa perang melawan terorisme menjadi monopoli AS. Saya khawatir ini akan berlangsung secara terus-menerus. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin sikap negara-negara di dunia semakin negatif terhadap AS, antipatinya akan semakin besar.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda AS gagal menjadikan rerorisme menjadi agenda semua negara?

**BANTARTO BANDORO:**

Benar, AS belum bisa meyakinkan dunia bahwa terorisme merupakan prioritas intemasional. Sebenarnya masih ada masalah lain yang perlu ditangani misalnya kemiskinan di dunia ketiga.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Bantarto nanri kira detailkan lagi. Pendengar sekalian, anda mendengar sendiri, dua tahun setelah “Tragedi 11 September”, AS menjadi leader yangingin menumpas jaringan rerorisme intemasional.

Tetapi apa yang terjadi, sang leader semakin lama semakin tidak populer. Yang mengkhawatirkan ketika isu terorisme menjadi monopoli AS dan negara lain belum menjadikannya sebagai agenda intemasional bersama.

Bagaimana Bung Bantarro, apa yang salah dengan AS dalam menangani terorisme? Banyak yang mengatakan 80% kemarahan publik Islam karena akamya di Timur Tengah.

**BANTARTO BANDORO :**

Kita tidak bisa serta-merra mengatakan sumber teror adalah negara- negara yang berada di Timur Tengah. Negara mana pun di dunia bisa melakukan hal yang sama kalau mereka mempunyai tujuan yang cidak tercapai. AS tidak bisa selalu menekankan cara-

cara konfrontatif untuk menghadapi teror, dia harus bisa mendekati persoalan dengan bilak.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Bantarto, nanti kita gali lagi dalam pandangan akademik. Apa yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah ? Sekarang kita jumpai Bung Ahmad Sumargono dari Partai Bulan Bintang. Selamat pagi Bung Ahmad Sumargono.

**AHMAD SUMARGONO:**

Selamat pagi, Assalamu 'alaikum.

**DENNY J.A.:**

Wa'alaikum Salam. Sebelah saya ada Bung Bantarto Bandoro. Setelah dua tahun Ttagedi 11 September", AS justru bertambah tidak populer di negara-negara Muslim. Bagaimana komentar anda?

**AHMAD SUMARGONO:**

Sebenarnya tidak hanya di negara-negara Muslim, di Eropa Pun nama AS sudah mulai jatuh. Penyebabnya adalah stigma-stigma yang dilontarlian Amerika yang memojokkan Islam'.Dari rentetan peristiwa yang kita lihat, sampai sekarang belum jelas apa yang dinamakan teror. Amerika sendiri terlihat tidak mampu memproteksi negerinya dan tidak bisa mengungkap siapa dalang di balik pengeboman WTC yang selama ini dituduhkan kepada Osama bin Laden yang tidak pernah terbukti. Al Qaeda menjadi kambing hitam. Orang bertanya-tanya, jangan-jangan Amerika mengetahui,

karena kebetulan pelakunya ini “konco-konco”nya sendiri dari Yahudi atau Mozart yang justru membuat teror negara (state of terror), Misalnya membunuh rakyat Afghanistan yang tidak berdosa, menuduh Irak, menyimpan senjata pemusnah massal.

**DENNY J.A.:**

Bung Gogon, anda melihat ada blunder pada cara Amerika menangani terorisme ini ?

**AHMAD SUMARGONO:**

Di dalam negeri, AS tidak melihat keadaan dirinya sedang terpuruk. Dollar anjlok, sehingga Indonesia terkena getahnya. Saya bisa memastikan di pemilihan umum mendatang Bush tidak akan terpilih lagi.

**DENNY J.A:**

Terirna kasih banyak Bung Gogon. Kita kembali ke Bung Bantarto. Pandangan Bung Bung Gogon, Bush menggunakan isu terorisme untuk meningkatkan popularitas dan mengambil kebijakan yang mungkin salah. Bagaimana menurut anda ?

**BANTARTO BANDORO:**

Kesalahan terletak dari pemahaman AS dan dunia mengenai teror. Masih ada gap mengenai apa itu aksi teror. Perspektif AS. aksi teror adalah sebuah tindakan yang mungkin secara langsung mengancam kepentingan AS. Kalau ada tindakan apa pun bentuknya dan dianggap mengancam kepentingan AS secara langsung maupun tidak langsung, misalnya di Timur Tengah melalui Israel, dia akan

melakukan tindakan-tindakan balasan. Ini yang tidak bisa kita rerima. Perlu pemahaman bersama mengenai aksi teror.

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM, dua tahun ttagedi 11 September,, Amerika semakin tidak populer dan negara kita mungkin terjepit antara tekanan dari dunia internasional dan dari komunitas Muslim sendiri.

**BANTARTO BANDORO:**

Begitu ada tragedi WTC, kita berada pada posisi yang sangat sulit. Apakah kita secara semerta-merta memberikan dukungan kepada AS dalam memerangi terorisme yang dalam hal ini juga memerangi Islam Radikal, atau kita mengambil sikap yang pasti.

**DENNY J.A.:**

Bisa anda berikan beberapa contohnya?

**BANTARTO BANDORO:**

Beberapa bulan lalu ada tekanan dari kelompok-kelompok tertentu di Indonesia agar Megawad mengambil sikap. Selama ini kekacauan di dalam negeri terjadi sebagai akibat ketidakmampuan Indonesia mengambil sikap. Tetapi setelah perang terhadap terorisme berjalan terus menerus, Indonesia mengambil sikap yang tegas. Sebelum bom Bali kita tidak mempunyai UU Anti Terorisme. Tetapi setelah bom Bali, ada beberapa kebijakan yang diambil Indonesia dalam rangka ikut memerangi terorisme, antara lain mengeluarkan UU Anti Terorisme. Sekarang pun Indonesia

semakin aktif membantu memerangi terorisme. Tetapi sebatas tidak berentangan dengan aturan-aturan hukum kita dan tidak bertentangan dengan sentimen-sentimen pubtik.

**DENNY J.A.:**

Anda melihat adanya evolusi dari ketegasan pemerinrah dalam terorisme? setelah bom Bali dan bom Marriot, pemerintah jauh lebih tegas?

**BANTARTO BANDORO:**

Jauh lebih tegas ketika mereka dihadapkan pada posisi untuk ikut memerangi terorisme secara multilateral. Keputusan-keputusan hakim yarig dijatuhkan terhadap pelaku bom Bali sudah melegakan maryarakat. Namun tetap tidak menyenangkan hati orang-orang atau negara-negar a yangmenjadi korban bom Bali.'

**DENNY J.A.:**

Mereka meminta lebih keras lagi ?

**BANTANO BANTIORO:**

Ya, tetapi belum bisa diterapkan kepada pelaku bom lainnya. Ini menjadi satu test case, apakeh Indonesia benar-benar serius dalam memerangi terorisme dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal?

**DENNY J.A.:**

Menarik lagi kasus Abu Bakar Bdasyir. Hukuman sudah dijatuhkan 4 tahun, tetapi pihak yang mendukung ataupun yang marah terhadap Bdasyir dua-duanya tidak Puas?

**BANTARTO BANDORO :**

Benar, keputusan itu memberikan rasa puas dan tidak puas kepada mereka yang mendukung dan tidak mendukung' Tetapi apa pun keputusannya yangtelah dijatuhkan pengadilan adalah keputusan yang obyektif dari perspektif majelis hakim.

**DENNY J.A.:**

Ketidakpuasan dari yang pro maupun yang kontra terhadap Ba'asyir menggambarkan dua dunia yang memang sedang konfliktual ?

**BANTARTO BANDORO:**

Benar. Karena ada dua kelompok yang bertenrangan bagaimana mengatasi terorisme, apa itu terorisme dan siapa yang terlibat dan tidak terlibat di dalamnya

**DENNY J.A.:**

Dalam perang global AS rerhadap terorisme, Indonesia semakin mendapat tempat khusus di AS karena dianggap jaringan Jama,ah Islamiyah di Asia Tenggara penuh derrga, tokoh dari Indonesia,

**BANTARTO BANDORO:**

Dugaan itu memang benar. Indonesia menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya gerakan-gerakan terorisme dan dicurigai – sebagai tempat gerakan jaringan Jamaah Islamiyah. Upaya untuk membuktikan bahwa Indonesia juga ikut memerangi terorisme antara lain dengan mencari sumber-sumber gerakan tersebut. Apakah dari kelompok-kelompok radikal atau melalui kerja sama internal. Ini penting untuk dipahami.

**DENNY J.A.:**

Yang menarik, Indonesia mengalami dua kali serangan teror yang cukup besar, bom Bali dan bom Marriot. Tentu pemerintah dan publik ingin ada upaya tegas memerangi terorisme. Dan kita mengetahui AS cukup tegas dalam menangani terorisme. Tetapi mengapa di Indonesia popularitas AS semakin tidak turun ?

**BANTARTO BANDORO :**

Yang dianggap sudah dalam memerangi terorisme adalah karena tidak ada koordinasi yang efektif antara instansi-instansi yang berwenang sehingga timbul perbedaan penghormatan bagaimana menangani terorisme. AS merasa upaya Indonesia dalam menangani terorisme tidak total, tidak komprehensif sehingga dia mencoba melakukan sendiri. Buktinya apa ? Ketika Hambali di tangkap di Thailand dan diserahkan ke AS. Ini membuktikan AS masih mencoba memonopoli penanganan terorisme. Cara-cara monopoli itu tidak tepat.

**DENNY J.A.:**

Membuat image AS kurang bagus ?



**BANTARTO BANDORO:**

Iya, cara-cara seperti itu tidak bisa dipertahankan kalau kita mau total memerangi terorisme.

**DENNY J.A.:**

Beberapa saat setelah “Tragedi 11 September”, kita melihat AS di Indonesia sering mengampanyekan image melalui televisi. Bagaimana AS welcome terhadap warga Muslim karena mereka ingin memberikan image AS tidak perang dengan Islam tetapi dengan terorisme. Tetapi dari hasil survey, kampanye itu tidak banyak hasilnya. Publik bukannya suka, justru semakin tidak suka terhadap AS. Apalagr yang harus ditempat AS sebagai leader dalam memerangi terorisme agar semakin populer di negara-negara Muslim?

**BANTARTO BANDORO:**

Untuk menaikkan pamor AS tidak hanya melalui propaganda. Ada cara lain yang lebih simpatik di mata dunia. Misalnya memahami bagaimana teror sebagai ancaman terhadap kemanusiaan secara umum atau terhadap lingkungan, dan sebagainya. Bagaimana meyakinkan teror adalah ancaman yang paling berbahaya, tetapi orang lain juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka anggap Penting.

**DENNY J.A.:**

Dua tahun setelah perang terhadap terorisme, adalah refleksi yang baik buat semua, terutama AS sebagai liader. Penaklukan militer secara total tidak sepenuhnya berhasil mendapatkan

simpati. Orang bilang AS harus mengembangkan strategi winning the mind and the heart, tidak militeristik semata.

**BANTARTO BANDORO:**

Kita dan beberapa negara lain memerangi terorisme tidak dengan kekuatan militer. Tetapi AS menggunakan unsur-unsur militer, dan sejauh ini memang berhasil. Mungkin kita juga perlu membuka kesempatan “tentara” untuk ikut berperang dalam menangani terorisme.

**DENNY J.A.:**

Ada penelepon, Bung Andi. Selamat pagi.

**ANDI:**

Selamat pagi Bung Denny. Sebenarnya terlalu superfisial, tidak menyentuh ke akar masalah. Titik tolaknya dari ketidakadilan Amerika yang berstandar ganda. Sebenarnya gampang kalau mau mendapat simpati yaim dengan mengusir Israel, dengan lebih adil terhadap dunia Arab, maka akan mendapat simpati dari Islam.

Tidak perlu kita menyarankan sesuatu ke AS, kita harus melihat diri kita sendiri. Itu saja komentar dari saya. Terima kasih pak Denny.

**DENNY J.A.:**

Ok terima kasih. Bung Bantarto, satu elaborasi lagi di samping ada blunder dalam kebijakan AS terhadap terorisme, ada standar ganda ddam membuat penilaian dan action terutama pada kasus Palestina-Israel. Bagaimana anda memberi komentar?

**BANTARTO BANDORO:**

Politik standar ganda AS bukan rahasia lagi bagi publik internasional. Itu menjadi alasan mengapa negara-negara di dunia mengecamnya. AS tidak bisa mengambil sikap yang tegas terhadap Israel. Ketika dia memerangi terorisme, memerangi negara-negara Islam radikal yang dianggap sumber kegiatan teror, dia tidak melakukan hal yang sama terhadap Israel.

**DENNY J.A.:**

Jika standar ganda ini diketahui efeknya buruk, tidak saja popularitas AS menurun tetapi juga warganya di seluruh dunia tidak aman, mengapa AS masih mempertahankannya?

**BANTARTO BANDORO:**

Ada alasan AS mempertahankan standar ganda itu. Sejauh memberikan keuntungan politik tertentu kepada AS, baik keuntungan jangka panjang atau jangka pendek. AS akan bertahan dengan kebijakan seperti itu.

**DENNY J.A.:**

Ok bung sebelum anda meng-ehslore lebih jauh, ada telepon dari Delila. Halo Delila?

**DELILA:**

Halo bung. Saya tidak melihat Amerika-nya tetapi presiden Bush-nya secara pribadi. Dia melakukan perang melawan terorisme hanya untuk mengejar ambisi pribadi. Sedikit pun saya tidak ada penghargaan untuk dia. Dia hanya ingin mengukir namanya di sejarah.

Biasalah kalau orang sudah banyak uang, apalagi yang ingin dicari.

**DENNY J.A.:**

Kira-kira dia berhasil tidak mengukir namanya dalam sejarah ?

**DELILA:**

Justru dia akan gagal, hancur. Di AS sendiri dia tidak populer lagi, warga negara AS pun sangat membenci cannya.

**DENNY J.A.:**

Terima kasih banyak Bu Delila. Bung Bantarto, lebih spesifik lagi, tidak ke pemerintah AS, tetapi lebih kepada leadership style dari Bush yang mungkin blunder karena di AS ada juga calon-calon pemimpin Demokrat juga mengkritik Bush soal Irak.

**BANTARTO BANDORO:**

Sebenarnya memang tidak bisa dikaitkan dengan karakter seorang pemimpin ketika dia mengambil kebijakan-kebijakan publik. Apa yang dilakukan Bush ketika menyerang Irak, apa yang dikatakan Bush mengenai exist ofeuil, dan sebagainya, akhinya semua merefleksikan pandangan AS mengenai masalah-masalah intemasional. Apa yang dikatakan Bush mau tidak mau membawa namaAS.

**DENNY J.A.:**

Dan juga merefleksikan aspirasi publik mayoritas mungkin. Ada Bung David dari Manado, silahkan bung.

**DAVID:**

Selamat siang. Bagi saya terorisme itu reaksi suatu kelompok yang eksistensinya terancam. Masalahnya istilah terorisme dilihaedari kacamara apa? Apakah istilah itu predikat yang diberikan masyarakat intemasional, atau bagaimana ? Seperti di Aceh di mana ada kelompok-kelompok yang merasa terancam, apakah itu juga teroris atau separaris ? Ketidakpuasan ada di mana-mana. Saya khawatir di waktu mendatang termasuk di Indonesia ketidakpuasan seperti itu memunculkan terorisme yang lebih luas dan oleh banyak pihak..

**DENNY J.A.:**

Ok terimakasih banyak. Bung Bantarto, anda bisa merespon sekaligus juga closing sutemerfi, bahwa banyak juga yang mengatakan AS sendiri melakukan sejenis teror yang lain. Hamzah Haz -wakil presiden Indonesia- mengatakan AS adalah "Raja Teror" dengan berbagai aksinya.

**BANTARTO BANDORO:**

Inti masalahnya adalah pada pemahaman kita yang berbeda mengenai teror, dan itulah yang membuat dunia terkotak-kotak.

MisalnyaAS dengan Eropa, AS dengan negara-negara Muslim. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Saya melihat setelah "Tragedi 11 September" ada beberapa pelajaran yang bisa kita tarik. pertarua, AS belum mampu meyakinkan dunia bahwa teror merupakan prioritas intemasional karena masih ada negara-negara lain yang masdah-masalahnya penting untuk ditangani. Kofi Anan dalam pidatonya di PBB mengatakan AS telah gagal meyakinkan dunia soal ierorisme.

Kedua, bahwa kesenjangan hubungan antara AS dengan dunia, khususnya dunia Muslim semakin lebar, semakin tidak bisa teratasi. Ini membuat perspektif mereka mengenai masalah-masalah internasional berbeda terutama dalam menangani masalah terorisme. Ketiga, pamor AS justru semakin menurun, tidak semakin kuat.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Bantarto terima kasih banyak atas kesimpulan anda. Pendengar Dela FM, dua tahun setelah “Tragedi 11 September” kita melihat tiga hal disini, pertama, kegagalan AS meyakinkan dunia bahwa terorisme adalah agenda internasional yang harus didukung oleh semua negara. Kedua, justru jurang pemisah antara dunia AS dengan dunia Muslim semakin lebar, dan heigayangsangat ironis, leadership dan inisiatif AS justru berakhir dengan semakin tidak populemya AS di dunia Muslim. Dua tahun “tragedi 11 September” membuat kita merenung, mungkin ada sesuatu yang salah dalam cara kita menangani terorisme terutama kesalahan leadership AS.

Sampai jumpa dalam “Dialog Aktual” dengan topik yang aktual lainnya minggu depan.

# **SADDAM HUSSEIN VERSUS GEORGE BUSH JILID KEDUA**

Tanggal: 6 Nopember 2003

Host: DennyJ.A.

Narasumber: Andi'Wij ayanto (Pakar Hubungan Intemasional),  
MustafaAbdul Rahman (Koresponden Kompas di Kairo)

Amerika Serikat selalu mengklaim bahwa perang Irak sudah berakhir tanggal 21 Mei 2003. Saat itulah Saddam Hussein berhasil dijatuhkan dari kekuasaannya. Namun cerita tentang kekerasan di Irak belum berakhir Dalam perbembangannya jumlah korban tentara Amerika Serikat yang terbunuh sejak jatuhnya Saddam Hussein justru lebih banyak daripada ketika perang masih berkecamuh. Sejak inuasi ke Irak, Amerika Serikat juga sudah membunuh 3240 warga sipil di Irak. Dan ternyata ada alasan pembenar untuk semua itu, karena senjata pemusnah massal sebagai alasan untuk menyerang Irak tak juga ditemukan. Amerika Serikat menyulut kontroversi. Dalam rangka memerangi terorisme, Amerika Serikat sendiri sudah menjelma menjadi kekuatan teroris itu sendiri, yang juga ikut membunuh warga sipil tak berdosa dengan tujuan politik yang semakin lama semakin tidak terlihat dasar moralnya. Amerika Serikat pun semakin dibenci oleh dunia.

Apakah ini awal dari jatuhnya dominasi Amerika Serikat, tidak hanya di Irak atau di Timur Tengah, tetapi juga di dunia internasional ?

**DENNY J.A.:**

Selamat pagi pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terutama anda yang berada di Jakarta, Makassar, Manado, Bandung dan Medan. Apa kabar ? Jumpa lagi dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya DennyJ.A. Kali ini kita akan mengangkat topik, isu yang mungkin paling hot di dunia internasional yaitu “Saddam Hussein Versus George Bush Jilid Kedua”. Temyata Irak tak kunjung bisa ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Bersama kita, sudah hadir seorang pakar Hubungan Internasional, Bung Andi Wijayanto. Selamat pagi bung.

**ANDI WIJAYANTO:**

Selamat pagi Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Sejak invasi ke Irak, Amerika Serikat sudah membunuh 3240 warga sipil di Irak. Dan sesungguhnya tak ada alasan pembenar terhadap hal itu, karena senjata pemusnah massal sebagai alasan untuk menyerang Irak tak juga ditemukan. Karena itulah Amerika Serikat menyulut konuoversi. Dalam rangka memerangi terorisme, Amerika Serikat sendiri sudah menjelma menjadi kekuatan teroris itu sendiri, membunuh warga sipil tak berdosa dengan tujuan politik yang semakin lama semakin tidak terlihat dasar moralnya. Amerika Serikat pun semakin dibenci dunia. Apakah ini awal dari tanda jatuhnya dominasi Amerika Serikat, tidak hanya di Irak atau di Timur Tengah, tetapi juga di dunia internasional pada umumnya?



Bung Andi, mengapa pemerintah Amerika Serikat tak kunjung berhasil mengendalikan keamanan di Irak ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Terima kasih. Pada awalnya Amerika Serikat merencanakan empat tahap strategi di Irak. Tahap pertama, tempur; tahap kedua stabilisasi; tahap ketiga rehabilitasi dan rekonstruksi, dan tahap terakhir normalisasi. Pada perencanaan awal tahap tempur direncanakan sekitar enam bulan. Pada 1 Mei 2003 Bush mengatakan, operasi militer skala besar akan berakhir. Berarti Amerika Serikat bisa mempercepat tahap tempurnya dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dengan jatuh korban total 115 tentara Amerika Serikat, tidak termasuk korban tentara koalisi, Inggris dan lain-lain. Kemudian proses rekonstruksi yang seharusnya dilakukan september-oktober, bisa dilakukan mulai bulan Mei. Jadi memang ada usaha untuk mempercepat proses stabilisasi dan rekonstruksi. Total proses rehabilitasi dan rekonstruksi di perencanaan awal itu akan berlangsung 24 bulan, sekarang baru berlangsung tujuh bulan. Dan ketika berlangsung tujuh bulan, pasukan-pasukan pro Saddam Hussein melancarkan strategi baru dalam bentuk alsi-alSi penyeragaman, aksi-aksi peledakan sporadis yang direncanakan. Dan ini yang menyulitkan mereka. Jadi mereka tidak bisa lagi menangani kegiatan militer di sana secara konvensional, jadi membutuhkan strategi khusus.

**DENNY J.A:**

Sebelum anda melanjutkan ke tahap lain, ternyata tahap rekonstruksi ini juga sama sulitnya dengan tahap yang lain karena perlawanan tampaknya cukup gigih.

**ANDI WIJAYANTO:**

Betul, bahkan jika dibandingkan dengan tahap tempur. Karena dalam tahap rekonsuulsi dan rehabilitasi ada satu titik di mana Iraqi Government Council yang dipimpin Paul Bremer harus dialihkan ke rakyat Irak melalui pemilu lokal. Dan pemilu lokal direncanakan setelah 18 bulan okupasi militer Amerika Serikat, setelah segala sesuatunya siap. Mungkin bagi Amerika Serikat yang dilakukan sekarang masih dalam tahap awal rekonstruksi dan rehabilitasi.

**DENNY J.A.:**

Jadi pemilu itu dilaksanakan dalam satu paket agenda rekonstruksi ya?

**ANDI WIJAYANTO:**

Ya. Kira-kira dalam rencana awal, Iraqi Government Council yang dipimpin Paul Bremen ini akan pindah ke tangan Amerika Serikat, dari Amerika Serikat akan pindah ke rakyat Irak. Itu akan berlangsung Saddam Hussein Versus George Bush Jilid Kedua kira-kira awal 2005. Setelah itu baru masuk tahap normalisasi kehidupan politik-ekonomi di Irak.

**DENNY J.A.:**

Berapa lama kira-kira ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Kalau dilihat dari situ, pasukan Amerika Serikat akan tetap berada di Irak, seperti mereka menempatkan pasukan AS di Okinawa atau Jerman.

**DENNY J.A.:**

Jadi Amerika Serikat memang berusaha untuk bisa mendemokraskan negara itu ?

**ANDI WIJAYANTO :**

Ya, hanya ada tiga asumsi yang semula diharuskan ada dalam proses rekonstruksi itu, tetapi tidak jalan. Asumsi pertama, mungkin jalan, dimana proses rekonstruksi dan rehabilitasi dimulai ketika rejim Saddam Hussein jatuh. Asumsi kedua seluruh pasukan Irak menyerah tanpa syarat. Ini tidak terjadi, karena tidak ada tanda-tanda menyerah tanpa syarat. Asumsi ketiga adalah serangan koalisi tidak menimbulkan kerusakan yang parah ke fasilitas-fasilitas umum. Ini juga tidak terjadi karena ternyata kerusakannya sangat parah, di mana Amerika Serikat menghamburkan sekitar 1400 Tom Hawk ke sana.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda apakah tahap rekonstruksi akan lebih singkat seperti yang Amerika Serikat bayangkan, ataukah akan lebih lama dan complicated ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Amerika Serikat tampaknya akan tetap berusaha menghindari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat dalam tahap rekonstruksi. Sekarang titik mandatnya pada PBB yang dimotori Perancis, Jerman, Rusia dan menginginkan peralihan dari Paul Bremer ke rakyat Irak berlangsung lebih cepat dari awal 2005. Namun Amerika Serikat menolak, karena dia yang ada di lapangan dan lebih tahu tidak stabilnya kondisi di Irak.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana dengan pemain-pemain lokal di Irak sendiri, seberapa kuat sentimen anti Amerika Serikat dan perlawanan militer anti Amerika Serikat ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Pasukan-pasukan pro Saddam Hussein masih terlihat jelas, dan misinya semakin lama semakin berbahaya, seperti dengan misi-misi kecil bom bunuh diri. Tapi rakyat Irak bukanlah masyarakat yang homogen. Mereka terpisah menjadi tiga: Kurdi, Syiah, dan Sunni. Dan ini menyulitkan Amerika Serikat untuk menciptakan satu Governing Council yang mewakili semua kepentingan.

**DENNY J.A.:**

Ok bung, nanti kita gali lebih jauh lagi. Jadi para pendengar Delta FM, tadi anda mendengar sendiri betapa besar komplikasi akibat jatuhnya Saddam Hussein. Karena tahap rekonstruksi yang diasumsikan Amerika Serikat aman-aman saja ternyata bergejolak dengan begitu banyak serangan ke tubuh tentara Amerika Serikat. Begitu banyak jumlah tentara Amerika Serikat yang jatuh, dibandingkan saat Saddam Hussein masih di tampuk kekuasaannya. Bagaimanakah sebenarnya prospek Amerika Serikat di Irak? Apakah benar Irak menjadi tahap Pertama Amerika Serikat untuk mendemokratisasikan Timur Tengah ?

Kita bacakan dulu ada SMS yang masuk. Pertama dari Bung Catur, Bandung, yang mengatakan, "Dengan masih bertahannya Amerika Serikat, jadi jeiaslah bahwa target Amerika Serikat bukan Saddam, tapi minyak dan berdagang senjata."

Jika kita membaca berbagai dokumen resmi atau berita di surat kabar, sebenarnya dikatakan targer Amerika Serikat ideal sekali, ingin menjadikan Irak sebagai tahap pertama untuk mendemokratisasikan seluruh Timur Tengah. Jika ini berhasil, kawasan Timur Tengah akan menjadi kawasan yang demoktratis menyusul Asia, Amerika Latin, dan beberapa Negara Afrika. Tapi apakah target ini sebenamya cukup realistis ? Kita kembali kepada Bung Andi Wijayanto. Bagaimana Bung, apakah cukup realistis menjadikan Irak sebagai tahap pertama demolcatisasi di Timur Tengah?

**ANDI WIJAYANTO:**

Tampaknya tidak. Pertama demokratisasi yang ingin dijalankan Amerika Serikat di Timur Gngah lebih sebagai jargon politik yang normatif. Real politiknya saya tidak yakin kalau Amerika Serikat siap menyebarkan demolaatisasi di negara-negara yang sudah pro Amerika Serikat, seperti Saudi Arabia, Bahrain, Jordania, Qatar, Kuwait, yang tentunya negara-negara dalam bentuk kerajaan monarkhi yang aspirasi demokrasi Jari bawahnya tidak tampak. Saya ragu Amerika Serikat mau menerapkan demokrasi di situ dengan kemungkinan runtuhnya rejim-rejim pro Amerika Serikat yang kemudian diganti oleh rejim yang tentu tentu saja nuansa Islamnya akan kental lagi di Timur Tengah.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda meskipun Irak berhasil didemokratisasikan, belum tentu tetangga-tetangganya secara cePat akan melakukan demokratisasi serupa?

**ANDI WIJAYANTO:**

Ya betul. Saya juga tidak melihat ada benih demolrasi yang cukup di Irak saat ini. Pertama, negara dan bangsa Irak belum pernah mengalami proses demoluatisasi sepanjang sejarahnya. Jadi mereka berrlih dari monarkhi ke kolonialisme, lalu ke sentralisme represif dari partai Sosialisme Baath yang tidak pernah melaksanakan proses demokratisasi secara baik. Jadi kalau tiba-tiba disalurkan ide demokrasi kepada masyarakat yang tidak homogen, mungkin konflik-konflik horisontal akan terjadi lebih dahulu. Kedua, kalau mereka ingin memakai model Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia II, maka strategi yang bisa dilakukan Amerika Serikat adalah menyiapkan perangkap politiknya, mulai dari konstitusi sampai aturan pemilu.

Kemudian yang paling Penting adalah PerPaduan antara paket politik dengan paket ekonomi.

**DENNY J.A:**

Memang ada perbedaan nuansa. Banyak orang-orang Amerika Serikat dan para pakar yang merasa berhasil mendemokratisasikan Jepang dan Jerman. Tapi menurut anda sangat susah mendemolcatisasikan Irak. Apa perbedaan antara Jepang dan Jerman di masa itu dengan kondisi Irak di masa sekarang ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Situasi pasca perangnya lain. Ada penyerahan kekuasaan tanpa syarat dari Jepang dan Jerman. Pada saat itu Hirohito menyerah tanpa syarat dan Adolf Hitler bunuh diri dan kemudian rejimnya hancur begitu saja. Ada war seattlement-nya, sementara untuk Irak tidak ada.

**DENNY J.A.:**

Ok bung nanti kita detailkan kembali, mengapa mereka berhasil mendemokratisasikan Jepang dan Jerman, tetapi susah sekali untuk Irak. Sekarang kira menghubungi dulu Bung Mustafa Abdul Rahman, koresponden Kompas di Kairo, untuk mendengar pandangan mata dari dekat. Selamat pagi Bung, apa kabar ?

**MUSTAFAABDUL RAHMAN :**

Selamat pagi, kabar baik bung.

**DENNY J.A.:**

Bagaimana situasi terakhir di Irak setelah jatuhnya helikopter itu, apakah sentimen anti Amerika Serikat menguat atau melemah?

**MUSTAFAABDUL RAHMAN:**

Sentimen anti Amerika Serikat memang menguat khususnya di kalangan ralsyat Irak sendiri dan bangsa fuab pada umumnya' Di sini media massa diTimurTengah semuanya mencerca sikap Amerika Serikat dan meminta suPaya Amerika Serikat segera membuat perencanaan yang jelas untuk menarik pasukannya. Kemudian menyerahkan secara bertahap kedaulatan kepada rakyat Irak sendiri. Ini adalah suara dari media massa Arab' Kemudian juga pertemuan antara Presiden Mesir HusniMubarak dan Presiden Suriah Bashar Asaad di Damaskus, iuga menyuarakan hal yang sama, bahwa sangat penting penyerahan kekuasaan dari pasukan pendudukan dalam perencanaan yang jelas. Artinya mberikan janji yang jelas rakyat Irak terhadap harapan yang lebih baik ke depan.

**DENNY J.A.:**

Apakah menurut publik di sana perencanaan Amerika Serikat untuk pemilu 2005 terlalu lama ?

**MUSTAFAABDUL RAHMAN :**

Tampaknya demikian, bahkan diharapkan pertengahan 2004 ini sudah dibuat kejelasan tentang penyerahan kekuasaan dari Amerika Serikat ke rakyat Irak. Walaupun itu masih langkah awal, tapi harus ada kejelasan. Sebab sampai saat ini pernyataan dari pejabat Amerika Serikat sendiri selalu simpang siur'

**DENNY J.A.:**

Penyerahan kekuasaan itu apakah ke PBB atau ke rakyat Irak langsung melalui Pemilu ?

**MUSTAFAABDUL RAHMAN:**

Masalah ini tidak jelas' Negara-negara.fua! sendiri' khususnya negara tetangga Irak, menyarankan penyerahan kekuasaan itu kepada PBB dulu, baru kemudian kepada rakyat Irak. Ada juga yang berpendapat supaya Dewan Transisi Irak pantas diberi wewenang lebih besar dari penguasa sipil Amerika Serikat Dari Dewan Transisi Irak ini kemudian beralih ke pemerintahan yang sesungguhnya sesuai dengan aspirasi rakyat Irak, artinya yang terpilih oleh rakyat Irak melalui pemilu.

**DENNY J.A.:**

Target dari pemerintah Amerika Serikat yang kesannya ingin mendemokratisasikan Irak lalu virus demokrasi ini disebar ke Timur Tengah. Apakah ini realistis melihat kondisi Irak saat ini?



**MUSTAFA ABDUL RAHMAN :**

Justru yang terjadi sebaliknya. Amerika Serikat pada awalnya menginvasi ke Irak dengan janji demoliratisasi, memberi kebebasan, melepaskan ralsyat Irak dari tirani Rejim Saddam Hussein. Tapi yang terjadi sekarang justru sebaliknya adalah, anarkhisme di Irak. Kesejahteraan yang dijanjikan justru tidak kunjung tiba. Kota Baghdad pada malam hari tetap gelap, persediaan air bersih paling banyak hanya untuk separuh rakyat irak yang berjumlah 25 juta.

Artinya janji-janji Amerika Serikat sebelum ini tidak terwujud, sehingga menimbulkan kekecewaan besar dan gerakan perlawanan.

**DENNY J.A.:**

Apa yang salah sehingga yang terjadi justru kebalikan dari janji Amerika Serikat ?

**MUSTAFA ABDUL RAHMAN:**

Adalah ketidakmampuan Amerika Serikat menciptakan keamanan di Irak.

**DENNY J.A :**

Ok Bung, terima kasih banyak. Mustafa Abdul Rahman yang memberikan pandangannya secara langsung dari lokasi di Kairo. Kita bacakan dulu SMS dari Bung Acil yang mengarahan, “Tak akan ada demokrasi buatan Amerika Serikat di Timur Tengah, selama demokrasi cuma dalih penguasaan ekonomi apalagi sekedar benteng pertahanan Israel. “

Bagaimana Bung Andi anda mengomentari masalah ini ?

**ANDI WIJAYANTO :**

Seperti yang dikatakan Bung Mustafa bahwa yang diharapkan rakyat Irak adalah kehidupan akan jauh lebih baik dari era Saddam Hussein: tidak ada represi, iklim kebebasan dan pemenuhan kehidupan yang lebih layak. Semuanya gagal dipenuhi Amerika Serikat. Harus diingat bahwa Amerika Serikat melakukan operasi militer di Irak juga disaat ada kesulitan anggaran. Amerika Serikat mengalami defisit anggaran lebih dari 320 triliun sampai kuartal kedua tahun ini.

**DENNY J.A.:**

Kita sudah tersambung dengan penelepon dari Pamulang, Bung Teuku Lukmansyah. Selamat pagi bung, apa kabar ? Silahkan langsung saja komentar anda.

**TEUKU LUKMANSYAH:**

Selamat pagi Bung Denny. Kabar baik. Yang sdah adalah rasa percaya diri Bush yang terlalu besar. Kedua adalah sikap usil Amerika Serikat yang terlalu besar di bawah Bush. Sebenarnya Bush tidak terlalu pintar, tidak seperti Clinton. Bush hanya percaya diri saja. Padahal masalah dalam negerinya terlalu besar, sehingga dia usil campur tangan urusan ke luar' Sehingga urusan-urusan di luar negeri pun tidak berhasil, karena di dalam negeri sendiri dia banyak yang tidak mendukung. Masalah Irak sekarang ini belum selesai, dia akan menyerang yang lain lagi. Padahd Afghanistan sendiri belum tuntas juga sampai sekarang.

**DENNY J.A.:**

Oh terima kasih banyak Bung Lukman' Jadi menurut Bung Lukman ini ada faktor leadership, Bush salah ambil kebijakan karena salah perhitungan. Bagaimana menurut Bung Andi ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Kalau dikaitkan dengan masa Clinton tentang keusilan Amerika Serikat di luar negeri sebenarnya jauh lebih banyak dibanding dengan Bush. Hanya bedanya Clinton-yang demokrat tentunya lebih mengandalkan suategi multihteralisme di bawah PBB. Kalau ada keterlibatan Amerika Serikat, entah itu di Somalia, Haiti, Amerika Serikat selalu masuk dalam agenda PBB. Karena itu dukungan intemasional besar karena masuknya mendapat dukungan dari komunitas PBB.

**DENNY J.A.:**

Mengapa Bush dibawah Partai Republik begitu nekad tanpa dukungan PBB?

**ANDI WIJAYANTO :**

Salah satunya mungkin kesalahan strategi bahwa yang diincar pertama adalah senjata pemusnah massal, itu adalah just cost, untuk masuk ke Irak. Sementara PBB sudah memiliki mekanisme melalui tim inspeksi senjata PBB untuk menangani masalah tersebut. Sementara laporan-laporan intelijen menunjukkan -yang tidak terbukti sekarang- ternyata ancaman senjata pemusnah massal yang bisa diluncurkan hanya dalam waktu 45 menit itu, saya pikir entry pointnya salah.

Sementara kalau entry point-nya misalnya pemerintahan yang represif dan seterusnya, sehingga perlu ada desakan dari komunitas internasional kepada Saddam Hussein untuk memperbaiki kinerja regimnya mungkin akan lain ceritanya.

**DENNY J.A.:**

Akibat tidak ditemukannya senjata pemusnah massal itu, alasan moral bagi invasi ke Irak itu, karena tidak juga menyertakan PBB menjadi hal yang sangat fatal sekali bagi image Amerika Serikat di mata dunia kini.

**ANDI WIJAYANTO:**

Ya, kemudian juga agak merusak koalisi Amerika dengan negara-negara eropa.

**DENNY J.A.:**

Ok para pendengar, remyeta masalahnya lebih rumit, ketika Amerika Serikat ingin mendemokratisasikan Irak, remyeta justru anarkhisme massal yang terjadi. Amerika Serikat semakin kehilangan kredibilitasnya dan mungkin tidak ditemukan alasan moral mengapa Bush menyerang Irak secara sepihak. Sedangkan senjata pemusnah massal itu tidak kunjung ditemukan. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya demi terciptanya Timur Tengah yang lebih damai?

**ANDI WIJAYANTO:**

Saya pikir mempercepat upaya pengalihan okupasi militer Amerika Serikat ke PBB. Itu bisa dilakukan misalnya dengan

mengatakan Negara Irak sebagai non-government territoris, maka PBB akan menjalankan pemerintahan transisi administrasi di sana, seperti UNTAET di Timor Timur. Dan UNTAET di Timor Timur terbukti menjalankan tugasnya dengan baik, karena di masa tugas UNTAET berakhir, Timor-Timur memiliki konstitusi, bisa menjalankan pemilu, bisa membentuk angkatan bersenjata dan seterusnya. Jadi harus ada pemerintahan transisi yang tampaknya tidak bisa dilaksanakan oleh Amerika Serikat

**DENNY J.A.:**

Mengapa Amerika Serikat tak kunjung memberikan kekuasaan di Irak kepada PBB ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Mereka mau, tetapi masalahnya kapan dilakukan. Terutama masalah kapan penyerahan dari, Iraq i Government Council yang dipimpin Paul Bremen, kepada rakyat Irak. Perbedaan waktu itu yang tampaknya dicurigai sebagai uPaya Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya kepada elit-elit. Jadi ia ingin membentuk elit-elit yang pro Amerika Serikat, kemudian dari situ dia bisa menjalin kontrak-kontrak ekonomi dengan perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat unuk menangkap sumber daya minyak Irak yang begitu besar. Walaupun ide itu selalu dibantah oleh Bush dan Donald Rimsfeld -Menhan Amerika Serikat- dengan menyatakan tidak akan ada perusahaan multinasional Amerika Serikat yang melakukan negosiasi dengan Irak untuk minyak.

**DENNY J.A.:**

Dewan keamanan PBB sendiri sudah meminta peralihan lebih cepat?

**ANDI WIJAYANTO:**

Ya, Amerika Serikat mau menyerahkan kekuasaan pada Februari 2004. Tapi ada juga yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan peran OKI dan Liga Arab. Dengan harapan sesuatu yang berasal dari regionalnya, yang kental nuansa Islamnya, akan jauh lebih diterima oleh rakyat Irak daripada intervensi dari luar.

**DENNY J.A.:**

Jika pengalihan kekuasaan dilakukan dengan cara cepat oleh PBB, mungkinkah target Amerika Serikat untuk membuat Irak demokratis bisa tercapai lebih dahulu ?

**ANDI WIJAYANTO:**

Akan tercapai secara bertahap. Tetapi tahap awalnya, seperti yang dilakukan UNTAET diterapkan dahulu perangkat-perangkat untuk membuat negara yang demokratis, konstitusi, aturan, pemilu, kepolisian, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Setelah itu baru, dilakukan pemilihan presiden dan seterusnya.

**DENNY J.A.:**

Jika Amerika Serikat mengalihkan kepada PBB, apakah Amerika Serikat tidak akan khawatir muncul image bahwa ini kegagalan Amerika Serikat sebenarnya?

**ANDI WIJAYANTO:**

Kegagalan saya pikir bisa. Refleksinya bisa dilihat, artinya itu adalah bentuk kepemimpinan yang diinginkan oleh dunia internasional, yaitu kepemimpinan yang selalu berusaha menggunakan lembaga internasional, terutama PBB. Tidak bertindak secara unilatera.

**DENNY J.A.:**

Jadi sejak awal Amerika Serikat memang sudah menyalahi konvensi internasional dengan tidak mengindahkan PBB ?

**ANDI WIRYANTO:**

Dengan tidak melandaskan diri kepada resolusi Dewan Keamanan PBB, sehingga Amerika Serikat betul-betul memanipulasi hak veto yang dimilikinya di Dewan Keamanan untuk memblokir semua usaha PBB untuk menangani Irak.

**DENNY J.A.:**

Apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat untuk mendapatkan simpati di dunia Islam?

**ANDI WIJAYANTO:**

Personal Bush dan seterusnya. Tapi yang jauh peluangnya adalah ada di negara-negara OKI dan Liga Arab untuk menggunakan Majelis Umum PBB, bukan menggunakan DK PBB, untuk mendesak adanya pengalihan pemerintahan transisi dari Amerika Serikat ke PBB.

**DENNY J.A.:**

Ok Bung Andi, terima kasih banyak atas berbagai cuplikan dan perspektif untuk mengulas masalah-masalah yang sangat hot hari ini, yaitu “Saddam Hussein versus George Bush Jilid Kedua. Banyak sekali yang bisa dipelajari Amerika Serikat dari kasus ini, bahwa dunia tak bisa dikuasai oleh Amerika Serikat hanya dengan supremasi militer, atau kekuatan ekonomi. Dunia bisa ditaklukkan hanya dengan adanya supremasi moral. Itulah tampaknya yang absen dari serangan Amerika Serikat ke Irak. Publik juga tidak melihat alasan moral untuk membenaran serangan itu. Akibatnya Amerika Serikat menginginkan demokrasi di Irak, yang terjadi justru anarkhisme- Amerika Serikat menginginkan aksi terorisme yang melunak, tapi justru aksi terorisme semakin meluas. Amerika Serikat menginginkan dukungan dunia Islam, yang terjadi justru Amerika dilaitik tidak hanya oleh negara-negara Islam radikal, tapi juga oleh negara Islam moderat. Mereka sama-sama melihat tidak ada alasan moral atas invasi Amerika ke Irak. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan yang sangat arogan dan menafikan PBB, lembaga yang justru dilahirkan oleh Amerika Serikat sendiri.

Para pendengar Delta FM di mana Pun anda berada, demikianlah dialog kita pagi ini. Sampai jumpa lagi Rabu minggu depan dalam “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. dengan topik yang hot di minggu itu.



**BAB VI**  
**GOOD GOVERNANCE**

## **NU DAN MUHAMMADIYAH MERAMAIKAN GERAKAN MELAWAN KORUPSI**

Tanggal: 19 September 2003

Host: DennyJ.A.

Nrasumber: Ahmad Bagdja (PBNU), Prof. Abdul Munir  
(Muhammadiyah), Danang Widoyoko (ICW)

Reformasi telah bergulir beberapa tahun. Namun ada satu agenda reformasi yang demikian sulit untuk dilaksanakan: pemberantasan korupsi. Alih-alih mau mengungkap bermacam-macam korupsi uarisan Orde Baru, kita justru dihadapkan korupsi-korupsi baru yang tak kalah buruh. Ketika sentralisme kekuasaan eksekutif berhasil diurai, dan kekuasaan berhasil didistribusikan secara horisontal dan vertikal, pada saat itu pula virus-virus korupsi menyebar ke lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak dikenal sebagai “sarang korupsi”. Peluang korupsi juga “terdesentralisasi” ke daerah dengan skala yang tak kalah besar, namun dengan kontrol publik yang jauh lebih longgar. Jadi korupsi follow the power. Pemerintakan boleh berganti, tetapi korupsi jalan terus. Korupsi telah menjadi semacam “ideologi nasional”. Namun dalam hejenuhan geraharu anti korupsi yang belum menghasilkan dampak signifikans, muncul terobosan baru dari organisasi maasa

Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mereka mengumandangkan perlawanan moral korupsi terhadap korupsi, mencoba memerangi para koruptor dengan berbasis pada nilai-nilai agama. Apakah terobosan ini akan berhasil?

**DENNY J.A.:**

Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, jumpa lagi dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. Topik kita kali ini adalah “NU dan Muhammadiyah Meramaikan Gerakan Melawan Korupsi”. Akankah gerakan ini akan berhasil ? Karena sekarang ini secara sinis dikatakan, korupsi sudah menjadi ideologi nasional yang lebih ditaati daripada ideologi Pancasila. sebelum kita diskusi dengan narasumber, seperti biasa saya akan memberikan dulu background-nya.

Setelah lima tahun reformasi, ternyata agenda yang paling sulit dilaksanakan adalah pemberantasan korupsi. Agenda lain relatif bisa dicapai, misalnya agenda reformasi politik. Kehidupan politik kita sekarang sudah cukup demokratis, sudah cukup bebas. Juga agenda tentang dwifungsi ABRI, militer sudah relatif ‘menyingkir dari pentas politik. Tapi berkaitan dengan agenda korupsi, di era reformasi ini korupsi justru bertambah parah dan menyebar tidak hanya di parlemen tetapi juga ke berbagai daerah. Ketika kekuasaan menyebar ke berbagai daerah, korupsi pun ikut menyebar ke berbagai daerah.

Jadi korupsi follow the power. Bahkan survey Transparansi Internasional menyatakan, Indonesia kini berada pada rangking keenam negara terkorup dari 133 negara yang diteliti. Padahal berbagai gerakan anti-korupsi sudah dibuat, namun korupsi juga tak kunjung mati. Sekarang lahir gerakan dengan modus baru,

perlawanan moral korupsi yang melibatkan dua organisasi besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Kampanye anti korupsi dengan melibatkan hati nurani, dengan basis agama. Akankah gerakan ini efektif ?

Bersama kita hadir Bapak Ahmad Bagdja dari NU. Pak Ahmad Bagdja, apa backgroundnya sehingga NU bersama-sama Muhammadiyah melibatkan diri dalam gerakan anti korupsi?

**AHMAD BAGDJA:**

Baik Bung DennyJ.A., korupsi kalau kita ibaratkan air, sudah hampir menenggelamkan bangsa ini. Kita sudah dalam keadaan yang sangat NU dan Muhammadiyah Meramaikan Gerakan Melawan Korupsi kritis karena korupsi. Ada beberapa hal yang dapat disepakati antara NU dan Muhamadiyah dalam memandang persoalan bangsa, anrara lain yang berkaitan dengan korupsi. Kita melihat di tataran pemerintah -khususnya aparat penegak hukum- tidak berjalan gerakan pemberantasan korupsi. Kemudian Political Will pemerintah untuk mengelola negara dan menciptakan pemerintahan yang bersih, juga jauh dari harapan masyarakat. Lalu sistem dalam kehidupan bernegara kita tidak mem-bachup agar korupsi bisa ditekan, tetapi bahkan justru menciptakan peluang-peluang untuk melakukan korupsi. Yang terakhir, kontrol masyarakat terhadap korupsi ternyata kurang kuat. Memang sudah ada berbagai macam LSM yang sangat gencar memerangi korupsi, tetapi temyata juga belum mempunyai daya tekan terhadap pemerintah maupun penegak hukum. Di sini NU dan Muhammadiyah ingin menggalang solidaritas masyarakat, membangunkan kekuatan moral, dan menekan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyadari problem korupsi sudah sangat parah.

**DENNY J.A.:**

Jadi di era reformasi pun, pemerintah masih terlalu lunak terhadap korupsi. Tapi Mengapa baru sekarang NU dan Muhammadiyah bergerak?

**AHMAD BAGDJA:**

Kita sebagai organisasi masyarakat tidak mempunyai kekuatan formal secara konstitusi. Sedangkan korupsi itu sesungguhnya tingkat penyelewengan yang asal muasalnya di level pemerintahan, di birokrasi. Jadi kita tadinya berharap dengan reformasi, penegakkan hukum akan berjalan, keadilan dapat ditegakkan, perlakuan hukum bisa dengan adil. Tetapi ternyata tidak.

**DENNY J.A.:**

Jadi bapak dan kawan-kawan di NU dan Muhamadiyah memberikan kesempatan dengan gerakan reformasi tapi sudah lima tahun tidak ada hasilnya?

**AHMAD BAGDJA:**

Kita hampir sudah tidak mempunyai harapan lagi kepada aparat penegak hukum. Bagaimana supaya hukum dapat ditegakkan, bagaimana koruptor bisa diberi tindakan yang setimpal, ternyata harapan itu tidak pernah terwujud.

**DENNY J.A.:**

Ada yang mempertanyakan, seberapa efektif gerakan NU dan Muhammadiyah ? Karena korupsi terjadi di level pemerintahan, sedangkan NU dan Muhamadiyah ada di luar pemerintahan.

**AHMAD BAGDJA:**

Saya memahami kekhawatiran itu. Masyarakat memanghampir putus asa terhadap usaha memberantas korupsi. Meskipun begitu, kita sebagai masyarakat beragama -inilah yang menjadi landasan kita- tidak boleh putus asa. Sekecil apapun peluangnya, kita tetap harus bergerak.

**DENNY J.A.:**

Ok, nanti kita akan gali lagi. Para penggemar Delta FM, kita telah mendengar sendiri, bagaimana korupsi di Indonesia sudah menjadi semacam raksasa yang sakti dan tidak mad-mati. Berbagai gerakan sudah dibuat, dan sekarang ini muncul gerakan civil society dari NU dan Muhammadiyah yang meramaikan perlawanan melawan korupsi.

Pertanyaannya seberapa efektif perlawanan ini, karena korupsi umumnya terjadi di level pemerintahan, sementara NU dan Muhammadiyah adalah civil society yang berada di luar pemerintahan.

Sekarang kita menghubungi melalui telepon seorang narasumber lain dari Muhammadiyah, Prof. Abdul Munir Mulkan. Selamat pagi, Assalamu'alaikum pak ?

**ABDUL MUNIR MULKAN :**

Selamat pagi. W'a'alaikum salam Bung Denny.

**DENNY J.A.:**

Pertama kita ingin mengetahui dulu apa latar belakang Muhammadiyah ikut dalam gerakan melawan korupsi ini?

**ABDUL MUNIR MULKAN:**

Karena korupsi sudah merajalela di mana-mana. Kalau pada masa Orde Baru, mungkin hanya berpusat di Jakarta, sekarang sudah melebar, mengalami desentralisasi ke seluruh daerah. Dan kita mendengar masyarakat semakin ragu dan mungkin setengah tidak percaya terhadap aparat yang semestinya menegakkan hukum. Kalau dibiarkan terus bangsa ini bisa hancur.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda juga melihat, bahwa sejak reformasi, korupsi lebih parah?

**ABDUL MUNIR MULKAN:**

Bukan lebih parah, tetapi juga ternyata ada reformasi juga dalam tata cara korupsi.

**DENNY J.A.:**

Ada istilah korupsi berjamaah ya. Lalu menurut anda, apakah NU dan Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi dalam gerakan anti korupsi ini ?

**ABDUL MUNIR MULKAN:**

Ya, sekurang-kurangnya ketika semua orang ragu-ragu, tidak percaya pada sistem dan tidak percaya pada aparat penegak hukum, kami bergerak. Pertama, saya kira Muhammadiyah dan NU bisa mengambil peran untuk sekurang-kurangnya memberikan kekuatan moral kepada masyarakat untuk terus-menerus menuntun pejabat-pejabat publik untuk melakukan tugas-tugas yang semestinya harus diemban. Kedua, kami harus merasa malu

dan bertanggungjawab untuk membuktikan bahwa sesungguhnya religiusitas itu berkaitan dengan hidup bersih dan transparans, antitesa dari korupsi.

**DENNY J.A.:**

Ada yang sinis mengatakan Departemen Agama merupakan departemen yang korup. Di situ juga banyak orang NU dan Muhammadiyah. Bagaimana menurut anda ?

**ABDUL MUNIR MULKAN :**

Justru karena itulah kemudian Muhammadiyah dan NU merasa bertanggung jawab untuk terlibat memikirkan bagaimana korupsi bisa diberantas di negeri ini. Memang ada hal-hal yang perlu diluruskan dalam pemahaman agama, mungkin perlu sanksi-sanksi moral dan teologi, walaupun Muhammadiyah dan NU juga tidak mau main hakim sendiri. Karena bagaimanapun kasus korupsi harus diselesaikan secara prosedural, secara hukum, supaya kehidupan bangsa bisa tertata secara sistematis.

**DENNY J.A.:**

Juga ada kritik yang mengatakan, jangankan gerakan moral dari NU dan Muhammadiyah, gerakan hukum pun dengan berbagai undang-undang tak mempan untuk memerangi korupsi. Bagaimana tanggapan anda ?

**ABDUL MUNIR MULKAN:**

Ya justru karena itulah Muhammadiyah dan NU merasa terpanggil untuk kemudian mengajak kepada seluruh masyarakat. Barangkali melakukan boikot kepada para koruptor. Saya setuju



pada beberapa tulisan di Harian Kompas yang menyerukan jihad memerangi korupsi. Kalau kemudian masyarakat tidak juga bisa dibangkitkan, kita harus tetap berbuat untuk memerangi korupsi. Tapi saya tidak percaya kalau rakyat Indonesia tidak mau digerakkan untuk memberantas korupsi, karena itu berarti mereka tidak mau hidup lebih baik.

**DENNY J.A.:**

Juga melalui kampanye-kampanye, bahwa misalnya jangan memilih para politisi yang melakukan KKN ?

**ABDUL MUNIR MULKAN:**

Ya, saya kira nanti akan ada deklarasi-deklarasi lain, bahkan mungkin juga akan ada surat-surat edaran, ada pernyataan bersama NU Muhammadiyah untuk melakukan kesepakatan agar para koruptor tidak lagi diberi kesempatan mengelola negeri ini. Misalnya dengan menyerukan jangan memilih para pemimpin yang diduga korupsi, jangan memilih calon-calon DPR, DPRD, DPD yang diduga korupsi.

**DENNY J.A.:**

Saya kira itu mungkin merupakan jembaran untuk masuk ke politik praktisnya. Tekanan yang kuat kepada mereka yang ada di struktur kekuasaan ?

**ABDUL MUNIR MULKAN :**

Kita menyadari bahwa Muhammadiyah dan NU bukan partai politik, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk melakukan

pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak memilih mereka yang cacat secara moral.

**DENNY J.A.:**

Ok, terima kasih banyak sumbangan dari anda Prof. Abdul Munir Mulkan dari Muhammadiyah. Para pendengar sekalian, demikian tadi pandangan dari rekan Muhammadiyah.

Sebelum kembali kepada rekan NU, saya bacakan dulu berbagai SMS yang masuk. SMS pertama dari Bung Rio berbunyi, “Bagaimana LSM mau melakukan pemberantasan korupsi, kalau mereka sendiri ‘eker-ekeran’ uang. Selain mereka juga merasa paling benar dan arogan. Tapi saya dukung gerakan moral NU dan Muhammadiyah” Lalu juga Bung Zaki dari Jakarta mengatakan, “Perlunya keteladanan dan shock therapy”.

Sementara dari Anto, Bekasi, mengatakan, “Firman Allah jelas bahwa kita harus bersih dan memberikan peringatan dengan sanrun, sedangkan hasilnya addah urusan Allah.

Bung Ahmad Bagdja, bagaimana anda menanggapi pendapat para pendengar, yang salah satunya mengatakan perlu adanya shock-therapy. Misalnya ada kasus besar korupsi yang dibuka oleh pemerintah atau ditahannya seorang koruptor kelas kakap ?

**AHMAD BAGDJA:**

Saya ingin menggarisbawahi bahwa sekarang yang dirusak tidak hanya kekayaan negara, tetapi juga moral bangsa. Sehingga kita mengalami krisis moral yang sangat mengkhawatirkan. Semula kita menduga kerusakan akibat korupsi terbatas hanya pada uang negara yang hilang. Tetapi sekarang kita meyakini sepenuhnya

bahwa justru moral bangsa yang lebih hancur, khususnya moral pemimpin.

**DENNY J.A.:**

Jadi menurut Pak Bagdja , sumbangan dari NU lebih banyak dari sisi moralnya ?

**AHMAD BAGDJA:**

Ya, saya kira begitu. Misalnya contoh kecil di masyarakat kita sering mendengar seorang ibu yang susah menyekolahkan anaknya, kemudian dia bercerita kepada tetangganya, “Alhamdulillah anak saya bisa masuk, setelah melobi orang dalam.” Perkataan ini diucapkan dengan alhamdulillah. Bukankah itu sebuah pikiran yang keliru? Dan masyarakat merasa hal seperti itu sudah lazim. Padahal ini merusak masyarakat. Menyogok, menyuap, untuk menyekolahkan anaknya dianggap perilaku yang baik, tidak apa-apa. Karena memang sudah menjadi wabah, dan sudah dianggap menjadi perilaku yang benar Menurut saya, ini sudah merupakan sesuatu yang dahsyat bagi bangsa.

**DENNY J.A.:**

Ok pak, nanti kita gali lagi. Kita juga melihat banyak SMS yang masuk. Dari Manado, ada mengatakan, “Reformasi sebaiknya diganti saja dengan revolusi, karena korupsi tidak hancur-hancur”. Kemudian ada SMS lain mengatakan, “Datang terus ke masjid, sholat jumat jalan terus, tarawih jalan terus, tapi korupsi juga jalan terus.”

Bukan main, banyak sekali SMS yang agak cynical. SMS Widya di Depok mengatakan, “Gerakan penolakan para pengacara-

pengacara untuk menolak membela para koruptor". Ini luar biasa, Si Widya menghendaki agar pengacara pun menolak untuk menangani kasus-kasus korupsi. Tapi saya kira ini ide yang melawan hukum, karena pada dasarnya siapapun, termasuk para koruptor harus diadili di muka pengadilan, dan tentu saja dia berhak untuk mempunyai pengacara.

Sekarang kita hubungi melalui telepon Bung Danang Widoyoko dari ICW. Halo Bung Danang, selamat pagi.

**DANANG WIDOYOKO :**

Selamat pagi Bung Denny J.A.

**DENNY J.A.:**

Saya ingin mendengar komentar anda secara umum dulu mengenai masuknya NU dan Muhammadiyah dalam gerakan anti korupsi.

**DANANG WIDOYOKO:**

Ini upaya yang bagus sekali, karena dalam pemberantasan korupsi kita tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum dengan satu bagian saja, yaitu pada bagian upaya hukuman saja, punishment-nya. Tetapi ada lagi upaya yang lebih penting, upaya preventif. Ini membutuhkan peran seluruh anggota masyarakat, terutama organisasi-organisasi keagamaan yang besar, seperti NU-Muhammadiyah. Bagaimana mencegah korupsi sejak awal, terutama untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, supaya tidak melakukan korupsi. Itu yang saya pikir bisa dilakukan dan menjadi agenda penting lembaga keagamaan itu.

**DENNY J.A.:**

Menurut anda mengapa korupsi di era reformasi malah bertambah besar? Di mana akarnya?

**DANANG WIDOYOKO :**

Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Poin penting dari korupsi adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan, dalam arti kekuasaan politik. Jadi korupsi di sini bukan fenomena ekonomi atau fenomena hukum belaka tetapi yang lebih mendasar korupsi itu adalah persoalan politik. Dalam budaya politik kita, korupsi menjadi bagian dari praktek kekuasaan, menjadi bagian dari praktek kehidupan berpolitik.

**DENNY J.A.:**

Kita melihat sekarang pers sudah bebas untuk mengontrol, ada demokrasi, ada kebebasan investigasi, ada berbagai lembaga seperti ICW. Tetapi mengapa korupsi tidak terjadi?

**DANANG WIDOYOKO:**

Kalau kita bisa menelusuri, macemnya penanganan korupsi ada di sisi penegakan hukum. Kalau kita menelusuri lagi siapa yang berperan dalam penegakan hukum? Inisiatif pertama untuk menegakkan hukum dalam memberantas korupsi adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung ini poin penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam alur ini criminal justice system peradilan pidana terpadu, penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Yang melimpahkan kasus dari penyidikan polisi sampai ke pengadilan itu jaksa. Tetapi kemudian dalam hierarki peradilan kita, jaksa diangkat oleh

presiden, jadi jaksa merupakan bagian dari eksekutif. sedangkan eksekutif sendiri dipilih melalui proses politik melalui pemilu. Jadi kaitan antara penegakan hukum dan politik di sini. Kita bisa melihat kalau Kejaksaan Agung tidak beres kerjanya, atau gagal menuntaskan kasus-kasus korupsi, tentu yang ditanya atasannya, bagaimana kinerjanya? Harus dievaluasi.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda melihat reformasi kurang begitu signifikan dalam memberantas korupsi, karena figur Jaksa Agung-nya juga kurang mempunyai komitmen pada pemberantasan korupsi?

**DANANG WIDOYOKO:**

Mungkin bukan hanya pada Jalaa Agung seorang, karena dalam situasi politik seperti sekarang ini, posisi eksekutif sebetulnya di bawah, tidak bisa dikatakan setara. Mungkin posisi legislatif cukup kuat saat ini sehingga apapun yang dilakukan Kejaksaan Agung juga harus terkait dengan kepentingan legislatif. Kasus yang paling jelas adalah kasus Akbar Tanjung. Bagaimana mungkin seorang terpidana masih bebas berkeliaran. Kalau kita bicara masalah hukum, Jaksa Agung seharusnya memasukkan Ketua DPR itu ke penjara. Tak ada bedanya koruptor dengan maling ayam dalam hal ini. Jadi ini bukan lagi semata-mata soal hukum, tapi lebih ke soal politik.

**DENNY J.A.:**

Jadi anda melihat ada jalinan politik yang kompleks sekali, yang memang menjadi penghalang bagi pemberantasan korupsi. Akibatnya berbagai turunan ke bawahnya juga tidak jalan ?

**DANANG WIDOYOKO :**

Ya, bisa jadi begitu.

**DENNY J.A.:**

Dan apa anda optimis ini akan dapat diatasi dalam beberapa waktu berikutnya?

**DANANG WIDOYOKO:**

Ya harus optimis, makanya itu kami melihat keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi merupakan poin penting. Karena NU dan Muhammadiyah yang mempunyai kaki di dunia politik melalui sejumlah partai politik. NU terkait dengan PKB dan sejumlah partai-partai lain di kalangan Nahdliyin, Muhammadiyah dengan PAN. Saya pikir ini menjadi satu poin penting dalam pemberantasan KKN.

**DENNY J.A.:**

Ok, terima kasih banyak Bung Danang atas perspektif anda. Para pendengar sekalian, anda dengar sendiri tadi, mengapa korupsi begitu sulit diatasi karena korupsi telah menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan, melibatkan berbagai partai politik, baik di legislatif ataupun eksekutif sudah saling jalin menjalin untuk saling melindungi dan saling menutup aib. Akibatnya jaringan korupsi sulit sekali ditembus. Kita akan melihat lagi seberapa jauh NU dan Muhammadiyah bisa turut campur untuk mengurai problem korupsi yang sudah saling jalin menjalin.

**DENNY J.A.:**

Sebelum kita kembali ke Bung Ahmad Bagdja, saya bacakan dulu SMS yang masuk. pertama dari Bung Rudy di Bintaro, “Presiden Megawati sendiri tidak mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi. Hukuman mati untuk koruptor dibilang melanggar HAM, dan bahkan putranya terlibat dalam proyek Kemayoran”.

Bung Bahu di Manado yang mengatakan, “Saya ragu apakah NU dan Muhammadiyah sudah bersih dari korupsi, karena ketika Gus Dur menjadi presiden, toh juga terlibat korupsi dan diturunkan dari kekuasaan. Dan Gus Dur adalah pimpinan NU”. SMS ketiga berbunyi, “Selama ada parpol selalu ada korupsi, karena korupsi bagian dari aksi politik untuk memperkuat parpol itu sendiri”.

BungAhmad Bagdja, ada yang tidak percaya dengan komitmen NU dan Muhammadiyah dalam gerakan anti korupsi, karena Gus Dur ketika menjadi presiden juga tidak lepas dari masalah korupsi.

**AHMAD BAGDJA:**

Itu bukti bahwa masyarakat sudah hampir putus asa. Tidak percaya satu sama lain. Tapi seperti saya katakan tadi, sebagai orang beriman tidak boleh putus asa. Sekecil apapun peluang, harus kita raih, kita rebut agar bisa melakukan sebuah gerakan nasional untuk peduli terhadap tindakan korupsi yang sangat membahayakan.

**DENNY J.A.:**

Ada jarak nampaknya antara ritual agama dengan perilaku sosial. Seperti isi SMS tadi, “Ke masjid jalan terus, tarawih jalan terus, korupsi juga jalan terus.”



**AHMAD BAGDJA:**

Saya kira betul, ternyata ritual keagamaan tidak menjamin seseorang bebas korupsi. Saya kira memang ada jarak, ada distorsi antara moralitas agama dengan realitas sosial. Ini juga sangat membahayakan.

**DENNY J.A.:**

Kita sudah melihat, akar permasalahan korupsi ada pada kekuasaan. Apakah NU bisa mengeluarkan fatwa bersama Muhammadiyah bahwa koruptor itu bisa dihukum mati?

**AHMAD BAGDJA:**

Banyak pendapat, sebagian besar tokoh masyarakat di Jawa Timur mengusulkan hukuman mati itu. Saya ingin mengomentari apa yang dikemukakan Bung Denny J.A. tadi. Tidak hanya kekuasaan saja yang terjangkiti korupsi, tapi juga sektor lain. Tapi memang porsi terbesar korupsi di tingkat birokrasi pemerintahan, karena mereka yang menyerap anggaran negara paling banyak.

**DENNY J.A.:**

Korupsi sudah saling menjalin, apakah Pak Bagdja setuju bahwa perlawanannya pun harus dari berbagai sisi? Dari sisi civil society, pemerintahan secara moral, juga secara hukum. Dan intinya seperti tadi dikatakan oleh Bung Danang, pada law enforcement di tingkat hukum praktis, bagaimana agar polisi, jaksa, dan hakimnya benar-benar bersih dan terkontrol.

**AHMAD BAGDJA:**

Seperti saya katakan tadi bahwa perlu political will pemerintah yang kuat. Ada sistem yang berjalan di dalamnya, ada penegakan hukum, kemudian ada kontrol dari masyarakat. Kontrol masyarakat ini bagian dari civil society, seperti NU dan Muhammadiyah mengambil dari sisi itu. Perlu tekanan masyarakat kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kita sekarang ingin membangun opini nasional bahwa korupsi sudah sangat parah, sehingga nanti kita akan melakukan upaya kajian dari segi pengertian, pemahaman, tematik dari kaidah-kaidah agama. Kita juga ingin menggerakkan seuruh perangkat yang ada di NU dan Muhammadiyah. Kita mempunyai jaringan lebih dari 300 cabang di seluruh Indonesia, juga mempunyai 14 badan otonom dan 17 lembaga, serta mempunyai ribuan da'i, para muballigh yang bisa disebar. Kemudian kita mempunyai sejumlah pondok pesantren, media-media yang bisa digunakan untuk pengajian agama, kajian-kajian kitab, diskusi keagamaan, halaqoh, dan lain sebagainya. Nanti kita akan galakkan rema-tema korupsi.

**DENNY J.A.:**

Ok, terima kasih banyak Bung Ahmad Bagdja dari NU yang sudah memberikan perspektif kepada kita bagaimana perlawanan korupsi bisa dimulai dan bisa didukung oleh kekuatan-kekuatan civil society terutama NU dan Muhammadiyah yang mempunyai jaringan yang cukup besar di tingkat grass root. Kita tahu sekarang ini memang terjadi satu sinergi dari berbagai gerakan terhadap korupsi. Di level pemerintah misalnya, sekarang sudah dibentuk Komisi Anti Korupsi, yang mempunyai kewenangan sangat besar sehingga dianggap sebagai super body. Dia bisa menyelidiki, juga bisa menuntut di muka pengadilan. Juga sudah ada pengadilan

husus korupsi dengan hakim karir dan hakim ad hoc yang diangkat khusus untuk masalah korupsi. Korupsi juga sudah didefinisikan sebagai kejahatan yang luar biasa, extra ordinary crime. Bahkan di kalangan pengusaha, juga sudah ada “Pakta Anti Korupsi”, di mana para pengusaha berupaya untuk membuat pakta bersama-sama dengan pemerintah untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi.

Dan yang menyenangkan lagi, sekarang organisasi agama seperti NU dan Muhammadiyah ikut terlibat dalam sinergi gerakan antikorupsi. Lalu apakah korupsi benar-benar akan mati? Karena dari pengalaman 40 tahun kita merdeka, korupsi tampil sebagai raksasa yang begitu sakti dan tidak mati-mati. Begitu banyak presiden silih berganti, tetapi korupsi jalan terus. Sehingga akhirnya dikatakan bahwa korupsi ternyata menjadi ideologi nasional yang lebih dipatuhi ketimbang Pancasila. Semoga gerakan NU dan Muhammadiyah memberikan energi awal bagi menggulungnya bola salju gerakan melawan korupsi yang lebih kontinyu dan efektif.

Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi Rabu minggu depan, bersama saya Denny J.A. dengan topik yang aktual di minggu itu dalam “Diaiog Aktual”.

## KONTROVERSI PEMBELIAN PESAWAT RUSIA

Tanggal: 16 JULI 2003

Host: Denny J.A.

Narasumber: Happy Bone Zulkarnaen (Golkar)

Isu SukhoiGate sedang ramai diberitakan berbagai media. Apakah hasus ini bisa berkembang menjadi Bulog Gate jilid ketiga, dan akan menggoyahkan posisi Megawati? Kalau kita membuka kembali kasus-kasus Bulog, lembaga ini bagaikan kuburan para politisi. Berbagai kasus di lembaga ini mampu menggoyahkan posisi politisi kelas kakap. Bulog Gate I bisa menjatuhkan Presiden Abdurahman Wahid. Lalu muncul Bulog Gate jilid kedua, dengan korban Akbar Tanjung. Akbar Tanjung memang tetap bertahan sebagai Ketua Partai Golkar juga tetap bertahan sebagai Ketua DPR karena memang leadership dan kelihaiannya. Namun citra politiknya terlanjur cacat dan bukan termasuk capres populer menjelang pemilu 2004. Sekarang akankah skandal pembelian pesawat dan senjata Rusia, yang juga melibatkan Bulog, akan menjadi Bulog Gate jilid ketiga?

Apakah SukhoiGate dimunculkan benar-benar dalam konteks mewujudkan the clean government? Atau lebih merupakan mainan politik DPR saja, karena sesungguhnya pada saat yang sama masih banyak isu yang tak kalah penting untuk dipermasalahkan DPR?

**DENNY J.A.:**

Kembali dalam acara “Dialog Aktual” bersama saya Denny J.A. Para pendengar Delta FM di mana pun anda berada, kali ini kita akan angkat isu yang menjadi top hit minggu ini, bahkan mungkin minggu depan, “Kontroversi Pembelian Pesawat Rusia”. Seberapa jauh ‘Sukhoi Gate’ ini dapat menyeret Presiden Megawati? Atau kasus ini hanya sekedar menjadi mainan politik anggota DPR menjelang 2004?

Semuanya belum bisa dinilai sekarang. Karena masih berkembangnya waktu dan masih mungkin terjadi hal-hal baru yang tidak bisa kita duga.

Mulai minggu depan, panitia kerja DPR akan mulai bekerja untuk meneliti kasus ini. Tidak tanggung-tanggung, yang akan dipanggil adalah tokoh-tokoh kelas kakap. Mulai dari Menkeu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, juga Dirut Bulog sendiri, beserta para businessman.

Baik para pendengar sekalian, sekarang kita sudah bersama seorang tokoh Golkar, seorang intelektual yang menjadi politisi, Happy Bone Zulkarnaen, yang juga menjadi anggota Panja SukhoiGate. Hallo Bung Happy Bone Zulkarnaen, selamat pagi.

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Hallo, selamat pagi Bung Denny J.A.

**DENNY J.A.:**

Apa benar SukhoiGate ini menjadi mainan DPR menjelang tahun 2004?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ini bukan mainan politik bung, ini obyek kontrol politik, karena kita melihat apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya mengandung kejanggalan-kejanggalan. Antara lain pembelian pesawat tidak melalui mekanisme dan prosedur yang sudah diatur sedemikian rupa, baik oleh undang-undang maupun oleh konstitusi. Misalnya dalam UU No.3 rentang Pertakanan, disebutkan bahwa semua pembelian yang berkaitan dengan alusista harus dilakukan oleh leading sector, yaitu Menhan, bukan Memperindag atau Kabulog. Ketika pembelian dilakukan oleh Memperindag dan Kabulog maka terjadi disorientasi di dalam sistem yang selama ini kita atur sedemikian baik.

**DENNY J.A.:**

Ok, sebelum kita masuk ke substansi. Kalau orang melihat ada Bulog Gate I di mana PKB sudah kena, Bulog Gate II di mana Golkar sudah kena, dan nampaknya Golkar juga ingin supaya PDIP kena juga di Bulog Gate III dalam Sukhoi Gate ini?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Kita tidak berpikir begitu. yang kita lakukan sekarang adalah kontrol. Buktinya Panja Sukhoi disetujui juga oleh teman-teman dari PDIP. Bahkan yang memimpin pembentukan Panja saudara Amri Hasan, wakil ketua komisi I DPR dari PDIP.

**DENNY J.A.:**

Sebelum Panja terbentuk, bukankah DPR sudah memanggil Menhan, Kabulog, Panglima TNI, apa tidak cukup sehingga diperlukan Panja?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Memang tidak cukup, karena ketika kami memanggil mereka, penjelasan-penjelasan mereka mengambang, dan ada kesan hands-up dari posisinya masing-masing. Misalnya penjelasan Menhan ketika kami menanyakan. “Mengapa anda membiarkan departemen lain yang mengurus Sukhoi ini? Bukankah ini adalah otoritas anda?” Lalu dijawab dengan entengnya oleh Menhan, bahwa kalau sudah ada yang mengurus dan ada hasilnya, mengapa harus ikut-ikutan mengurus.

**DENNY J.A.:**

Apa bedanya seandainya eksekutif nanti dipanggil Panja dengan dipanggil DPR sebelum Panja? Bukankah bisa saja mereka mengatakan hal yang sama?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Saya melihat ada perubahan-perubahan. Misalnya statemen Panglima TNI baru-baru ini, yang menyayangkan mengapa DPR sikapnya berubah-ubah, dulu mendukung, sekarang seakan-akan menghalang-halangi. Padahal ketika kita memanggil beliau dan kemudian terjadi dialog, beliau mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui tentang perencanaan pembelian Sukhoi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi yang baik dalam kabinet. Dan anehnya kemudian terungkap Panglima TNI ikut

tandatangan juga. Yang jelas DPR ingin melakukan kontrol dalam rangka menegakkan system building yang selama ini memang harus kita kerjakan bersama-sama.

**DENNY J.A.:**

Apakah menurut anda, dengan kerangka Panja mereka akan bisa dipaksa lebih serius?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, agar eksekutif lebih serius dan transparan. Kita ingin menggali sebenarnya ada apa di balik pembelian senjata itu.

**DENNY J.A.:**

Mengapa Panja, bukan Pansus?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ini sebetulnya lebih banyak merupakan urusan komisi I DPR, sehingga kalau kita lebarkan kemudian menjadi lebih kompleks. Juga belum tentu bisa terbentuk secara cepat. Padahal kita ingin menjelaskan kepada publik duduk persoalan yang sesungguhnya, supaya tidak terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, yang menghabiskan energi. Misalnya bagaimana menteri-menteri terkait akhir-akhir ini mengatakan bahwa sukhoi adalah satu peralatan atau pesawat yang sangat diperlukan oleh tentara kita, tetapi DPR sepertinya menghalmg-halangi pembeliannya? Ini harus diklarifikasi. DPR tidak pernah menghalang-halangi dan kami ingin supaya semua pihak mempunyai komitmen untuk betul-betul membangun TNI yang professional.



**DENNY J.A.:**

Jadi DPR membentuk Panja karena proses pembentukannya lebih mudah? Kedua kalau tidak lewat Panja, para Menteri tidak menjawab serius pertanyaan-pertanyaan DPR?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya betul, kita harus bisa bicara lebih dalam. Mulai dari masalah apa dilakukan riset atau tidak sebelum pembelian pesawat, apa pernah dilakukan perencanaan yang baik dan seterusnya.

**DENNY J.A.:**

Sekarang kita akan verifikasi terutama dari segi prosedur dan substansi. Pertama kita ingin taku dulu secara substansial, sebenarnya seberapa mendesak kita membeli pesawat tempur yang bukan berasal dari Amerika Serikat ataupun Inggris. Setelah kita mengetahui kedua negara ini terlalu mengontrol bagaimana cara pesawat itu dipakai. Sementara Rusia atau negara-negara Eropa Timur dan negara-negara eks komunis lebih memberikan kebebasan kepada kita sebagai pembeli untuk menggunakannya bagi kepentingan dalam negeri. Bagaimana anda melihatnya secara substansi, apakah memang sebaiknya kita juga mendiversifikasi sumber pembelian senjata tempur ini? Sehingga tidak hanya dari Amerika Serikat atau Inggris, tetapi juga dari Rusia misalnya?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, diversifikasi pada saat sekarang adalah satu kebutuhan, bahkan satu keniscayaan. Karena itu DPR memberikan dukungan penuh. Artinya kita tidak depend on Amerika dalam soal-soal ini. Karena kalau kita depend on, Amerika dengan mudah akan

mendikte sehingga kita tidak bisa leluasa untuk melindungi negeri sendiri. Oleh karena itulah keinginan untuk melakukan diversifikasi itu pasti mendapat dukungan.

**DENNY J.A.:**

Setelah melihat pengalaman kemarin, di mana Amerika Serikat melakukan embargo terhadap spare part pesawat tempur kita, Inggris melarang pesawatnya digunakan di Aceh, untuk kepentingan dalam negeri memang pembelian senjata di Rusia sudah tepat?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya tepat, bahkan bukan hanya ke Rusia, ke negara lain pun begitu. DPR memberikan satu dukungan supaya kita secara kreatif melakukan diversifikasi seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri di tingkat intemasional. Kemudian supaya Amerika juga memperhitungkan kita.

**DENNY J.A.:**

Dari segi substansi membeli ke Rusia itu justru menjadi satu kekuatan, dibandingkan dengan membeli di Amerika atau Inggris. Kemudian apa yang terjadi dalam Sukhoi Gate adalah tidak digunakannya agen dalam pembelian, sehingga bisa lebih hemat karena biasanya kalau melalui agen menggunakan fee. Menurut anda ini hal yang benar?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, itu kebijakan pemerintah. Mau menggunakan agen atau tidak itu hak pemerintah. Kita hanya ingin menegaskan bahwa

reformasi politik sebenarnya bukan hanya sekedar reformasi politik, tapi juga manajemen keuangan negara. oleh karena itu kontrol dilakukan oleh DPR yang merupakan representasi wakil rakyat. Itulah sebabnya DPR mempunyai hak budget. Kita ingin melihat penggunaan dana negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

**DENNY J.A.:**

Sekarang kita ke arah substansi dulu. Pertama masalah pembelian pesawat ke Rusia. Kedua tanpa agen. Ketiga kita membeli pesawat Rusia, tetapi Rusia juga membeli komoditas kita. Jadi ada dagang yang timbal-balik. Apakah menurut anda ini juga hal yang baik dibandingkan kita hanya membeli sukhoi saja tanpa mereka membeli komoditas kita?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Persoalannya bukan di situ, tapi adalah akuntabilitas dari proses pembeliannya. Kalau pun kita mau bicara masalah substansi imbal-beli, imbal-belinya dengan apa? Dengan CPO, tekstil, karet? Barang-barang itu adalah barang yang liquid. Tanpa kita melakukan imbal-beli pun sebetulnya bisa kita perdagangkan dengan negara yang lain. Jadi agak menyesatkan kalau dikatakan bahwa kita tidak punya pasar.

**DENNY J.A.:**

Itu lebih bagus jika pembelinya sudah pasti. Kita membeli barang dia, tapi ada kepastian dia pun membeli barang kita sesuai dengan jumlah yang disepakati. Sehingga penjualan yang ditangani Bulog juga mempunyai pasar yang sudah pasti. Masalahnya jauh

lebih baik alternatifnya, dibandingkan kita hanya membeli tanpa membuat mereka juga membeli barang kita?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, bisa saja seperti itu. Tetapi tolong diingat, soal-soal seperti ini sebenarnya berakibat mengganggu sistem. Kita sudah membentuk sistem, kalau kemudian kita membuat usulan lagi bahwa kita nanti akan membeli sukhoi, akan terjadi tumpang tindih. Ada subsistem yang mengintervensi sistem yang lain. Ini akan menyebabkan koordinasi dalam kabinet terganggu. Karena leading sector-nya adalah Menhan.

**DENNY J.A.:**

Jadi kasus sukhoi ini persoalan utamanya bukan pada substansi, tetapi pada prosedur. Pembelian ke Rusia ini memang lebih baik bila dibandingkan ke Amerika atau Inggris. Imbal dagangnya juga mungkin lebih baik bagi kita. Apakah memang ada kontroversi mengenai prosedur? Menurut anda kontroversinya di mana?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ini saya bawa catatannya, kontroversinya sebenarnya terletak pada kesalahan prosedur dalam kebijakan pengadaan peralatan TNI oleh Bulog dan Menperindag, itu yang paling mendasar. Akar persoalan yang sebenarnya, anda bisa melihat dalam surat Menperindag No.305/2003. Di sini ada perihal laporan realisasi imbal-dagang dengan Rusia pada butir 4. Dapat dilihat dengan jelas sebagai pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 6 UU No.3 tahun 2003. Di mana dalam laporan Menperindag kepada presiden, dalam butir 4 berbunyi, bahwa periu kiranya kami laporkan kepada Ibu

Presiden bahwa Bulog, merupakan Perum BUMN dalam UU No.9 tahun 1969, sebagai pelaksana imbal-dagang tersebut memerlukan jaminan dari pemerintah dalam APBN melalui Depkeu. Sehingga Bulog dapat melaksanakan imbal-dagang dimaksud sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Ini yang saya bacakan adalah surat dari Menperindag.

Pelanggarannya di sini karena kontrak imbal-dagang pesawat militer, sedangkan TNI sebagai pemakai, maka Bulog perlu mendapatkan surat penunjukan langsung dari Presiden RI untuk membeli peralatan militer. Jadi di sini memang pembelinya Bulog, pemakainya TNI. Di sini Bulog telah melanggar Pasal 6 ayat 2 dan 3 tentang pendirian Perum Bulog sesuai dengan PP no.7 tahun 2003 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 januari 2003. Inti pasal 5 ayat 2 menyatakan Bulog hanya melakukan pengelolaan tentang masalah harga pangan pokok, pengadaan pangan, distribusi pangan, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa masuk dalam wilayah pembelian persenjataan itu.

#### **DENNY J.A.:**

Mungkin masalahnya begini, jika ini pembelian murni pesawat tanpa imbal-dagang komoditas yang menjadi wewenang Bulog, akan kelihatan betul kesalahan Bulog. Tapi di sini yang menjadi kontroversi, dan agak abu-abu, karena Bulog sendiri memang ikut dalam imbal-dagang tersebut, dan yang dijual adalah barang-barang Bulog sendiri. Sehingga mereka menganggap ini masih relevan. Kedua, Bulog sendiri hanya sebagai juru bayar. Bagaimana anda melihat ini?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Bisa begitu. Tetapi tolong anda ingat, semua itu semestinya memakai perencanaan, tidak bisa ujug-ujug. Presiden datang ke Rusia untuk membeli pesawat, tidak seperti membeli oleh-oleh. Perencanaan sangat diperlukan.

**DENNY J.A.:**

Isu kedua, mengenai masalah perencanaan di APBN, ini masih abu-abu atau sudah pasti salah?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Pasti salah. Menhan sebagai pemilik otoritas untuk melakukan pembelian-pembelian senjata. Dia mengajukan 33 item pada tahun 2003. Tidak ada satu pun item di situ yang menyebutkan adanya rencana untuk membeli sukhoi.

**DENNY J.A.:**

Nah, saya juga baca di media, KSAU mengatakan pernah merencanakan membeli sukhoi sejak tahun 1995-1996 yang dilakukan di era Suharto. Berarti sudah ada juga pengetahuan dari Dephan soal itu?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya betul, tapi tolong duduk persoalannya dilihat. Artinya jangan kemudian kita 'gebyah uyah'. Jangan kita melakukan generalisasi tanpa secara cerdas memahami persoalan ini. Misalnya pada tahun 1997, memang ada keinginan untuk memiliki pesawat sukhoi. Tapi kemudian krisis moneter. Semangatnya ada, tetapi kita tidak

sanggup karena krisis moneter. Lalu masuklah era reformasi. Kita juga ingin membeli segala sesuatu, tapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Anda lihat sekarang, untuk melakukan pemeliharaan terhadap senjata-senjata, pesawat-pesawat kita yang ada saja sepertinya kita sudah kehabisan nafas. Bahkan sekarang dana-dana untuk TNI lebih diorientasikan untuk bagaimana menyejahterakan para prajurit di tingkat yang paling bawah. Tapi pemerintah justru mau menganggarkan dana yang besar sekali untuk pembelian pesawat.

### **DENNY J.A.:**

Apakah benar prosedur itu dilanggar? Ataukah area ini masih abu-abu karena masih pro-kontra, karena ada data dan counter-data soal itu? Secara substansial tampaknya pembelian sukhoi memang sudah benar di Rusia, ketimbang kita membeli di Inggris atau Amerika yang akan banyak mengontrol kita. Dan sudah benar juga dibeli tanpa agen karena kalau lewat agen akan lebih banyak lagi fee yang harus keluar. Dan juga mungkin sudah benar bahwa dibeli dengan satu janji Rusia akan membeli barang-barang kita. Sebuah kecerdasan tersendiri dalam dagang internasional. Tapi memang ada persoalan dengan prosedur, mulai dari keterlibatan Dephan, ada persoalan juga dengan APBN. Namun juga masih belum bisa dipastikan apakah salah secara prosedur ataukah ini kontroversi yang masih abu-abu, tidak hitam tidak putih. Karena itu juga maka muncul berbagai analisis, apakah Sukhoi Gate ini akan menjadi kasus yang dibuat atau dievaluasi untuk the clean government? Ataukah lebih merupakan mainan politik DPR saja, karena masih banyak isu besar yang bisa dilakukan DPR tapi tidak diangkat?

Sekarang kita dengar dulu dari penelepon, silahkan Bung Ahmad Fuad Afdal.

**AHMAD FUAD AFDAL:**

Saya hanya ingin membahas satu aspek saja, yaitu soal counter trade. Ini hal yang lazim dalam international marketing. Sebelum istilah ini keluar, semua buku teks international marketing menggunakan istilah barter. Mungkin sekarang masih ada, dagang barter garam dengan beras. Kalau sekarang istilahnya tukar-guling.

**DENNY J.A.:**

Anda mendukung sekali kalau ada imbal-dagang seperti ini?

**AHMAD FUAD AFDAL:**

Ya, ini counter trade. Kalau barang saya dijual ke orang lain, baru kemudian membeli pesawat, ini prosesnya dua kali, makan waktu.

**DENNY J.A.:**

Ok, terima kasih banyak bung. Kita juga banyak dapat SMS, yang pertama dari Ary Depok mengatakan, "Sukhoi Gate sebenarnya hanya karangan anggota DPR untuk menutupi kesalahan sendiri, dan ingin mendapatkan bagian dari transaksi ini".

SMS yang kedua mengatakan, "Harus transparan demi kepentingan bangsa dan negara". SMS ketiga mengatakan, "Yang meributkan Sukhoi Gate karena tidak dapat komisi". SMS keempat mengatakan, "Kasus Sukhoi Gate disamakan dengan kasus UU Pendidikan, Akbar Tanjung dan sebagainya".



Ok, Bung Happy Bone Zulkarnaen, anda tadi sudah banyak menganalisa dari berbagai sisi tentang Sukhoi Gate, menurut anda nanti ujungnya ke mana kasus ini? Apa benar bisa sampai menjatuhkan Megawati atau Dirut Bulog?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Saya tidak bisa berspekulasi seperti itu. Niat DPR adalah agar system building bisa ditegakkan, dipelihara dengan baik. Bahwa komentar pendek Pak Fuad tadi, saya tahu beliau itu pakar marketing, saya kenal beliau, saya juga tidak membantah tentang perlunya counter-trade. Tetapi yang dipersoalkan Komisi I DPR adalah pelanggaran mekanisme dan prosedur. Dan kalau nantinya terbukti, itu adalah contempt of parliament. Termasuk juga soal SMS yang disampaikan kawan-kawan dari luar, sebetulnya kalau DPR melakukan kontrol seperti ini harus mendapat dukungan dari masyarakat, jangan justru under estimate.

**DENNY J.A.:**

Menarik bahwa ketika DPR ingin membuat panja dalam rangka the clean government mendapatkan sinisme yang cukup besar. Ini yang saya ingin taku dari anda. Kalau memang DPR ingin menegakkan clean government dan menekan korupsi, publik melihat 2 hari rapat pleno pembentukan komisi anti korupsi yang penting sekali, tetapi sidang paripurna tidak memenuhi quorum. Ini bagaimana?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, itulah. Jadi yang harus menKehormatan sororan justru hal-hal seperti itu. Ketika anggota-anggota DPR ada banyak kegiatan,

jadwal seringkali dalam satu waktu yang sama, kemudian ada jadwal beberapa. Kita harus memilih, tendarangan dulu lalu pergi. Tapi juga saya tidak membantak banyak anggota DPR yang akuntabilitasnya juga lemah.

**DENNY J.A.:**

Saya juga berusaha memahami adanya sinisme dari publik, yang menyangka Sukhoi Gate hanya mainan politik DPR saja. Termasuk juga adanya tuduhan korupsi yang terjadi di DPR tidak diusut secara tuntas, seperti kasus amplop Bank Niaga. Apa seharusnya ini juga diusut secara tuntas?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Ya, semuanya saja. Sukhoi Gate-nya jangan dilemahkan, tapi korupsi di DPR juga harus diusut. Kan ada kontrol yang kuat dari masyarakat, karena ini urusan kita bersama. Dan menyangkut uang rakyat juga.

**DENNY J.A.:**

Apa yang ingin anda sampaikan untuk publik mengenai kasus Sukhoi Gate supaya menjadi perhatian kita?

**HAPPY BONE ZULKARNAEN:**

Tentu saya minta kepada publik untuk memonitor kinerja Panja Sukhoi. Karena yang kita bicarakan adalah masalah system building tadi. Yang hedua adalah masalah transparansi penggunaan uang negara. Itu yang kita minta sama-sama. Kalau memang ada hal yang perlu dikritisi pada anggota-anggota DPR, silahkan dikritisi saja.

Dan kita juga terbuka dengan hal-hal seperti itu. Tetapi jangan melemahkan semangat kita, semangat anggota DPR. Karena semangat ini seharusnya bersenyawa juga dengan semangat rakyat. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Kalau kita seperti jaman dulu lagi, kita akan susah lagi nanti.

**DENNY J.A.:**

Baik Bung Happy Bone Zulkarnaen, saya kira rekomendasi anda harus kita dukung. Bahwa semua langkah DPR adalah dalam rangka menuju clean governmentt, harus kita dukung. Tetapi kita juga harus memahami kenapa publik menjadi begitu sinis terhadap DPR. Salah satunya tadi disebutkan karena mereka menduga DPR tidak begitu konsisten untuk mencapai apa yang telah kita cita-citakan membentuk clean government. Maka Sukhoi Gate pun dianggap sebagai mainan politik DPR yang baru dalam rangka menuju pemilu 2004. Untuk klarifikasi, kita sudah mendengar bersama-sama Bung Happy Bone Zulkarnaen, bahwa Sukhoi Gate belum bisa kita anggap skandal karena kesalahannya belum bisa dipastikan. Sehingga paling jauh Sukhoi Gate ini hanya kita letakkan sebagai kontroversi saja. Itu pun dapat kita pisahkan antara masalah substansi Sukhoi Gate, dan masalah prosedur Sukhoi Gate.

Untuk substansi justru harus didukung, karena, Pertama, membeli senjata dari Rusia membuat kita tidak tergantung teknologi militer hanya pada satu negara kepada Amerika atau Inggris yang terlalu banyak mengontrol kita. Kedua, kita bisa menghilangkan peran agen, sehingga membuat pembelian lebih murah. Yang ketiga ada masalah counter trade, sehingga pembelian terhadap komoditas kita – yang ditangani Bulog akan menjadi lebih pasti. Yang masih kontroversi adalah masalah prosedur.

Pertama apakah Dephan tahu atau tidak itu memang masih terbuka kemungkinannya? Kedua di APBN sudah direncanakan apa tidak? Karena itupun masih terbuka kemungkinannya, karena ada yang namanya ABT, addendum di bulan Agustus nanti. Dan ketiga seberapa besar Bulog terlibat dalam kasus ini? ini pun masih kontroversi karena Bulog juga berkepentingan dalam counter trade.

Demikianlah isu besar Sukhoi Gate sekarang menjadi headline berbagai koran. Saya tidak takut apakah ini bisa berkembang menjadi Bulog Gate jilid III yang akan memangsa politisi seperti Megawati ataukah akan menghilang dari peredaran, karena adanya isu-isu yang akan lebih sexy dan sensational ke depan.

Para pendengar setia Delta FM di mana pun anda berada, terima kasih atas kebersamaanya. Sampai jumpa lagi bersama saya Denny J.A. dalam "Dialog Aktual" Rabu depan.

## ASAL TULISAN

1. 4 Juni 2003, Melumpuhkan Gerahan Aceh MerDelta di Swedia, Bantarto Bandoro, Yasril Ananta. Host: Denny J.A.
2. 2Juli 2003, Mahkamah Konstitusi sebuah Monster Barar, Sultoni. Host: Denny J.A.
3. 9 Juli 2003, Kompromi Calon Presiden mehlui RUU Pemiliban Presiden, Hadar N. Gumay. Hosr: Denny J.A.
4. 16 Juli 2003, Kembalinya Lembaga Recalling, Bivitri Susanti, Pramono Anung. Host: Denny J.A.
5. 25 Juli 2003, Kontroversi Pemblian Pesawat Rusia, Happy Bone Zulkarnaen. Host: Denny J.A.
6. 30 Juli 2003 , Konflik Intemal PDI-P dakm Pemilihan Gubernur, Indra J. Pilliang. Host: Denny J.A.
7. 6 Agustus 2A03, Teror Bom yang melanda Jaharta, Tjipta Lesmana, Suripto, Pande Silalahi. Host: Denny J.A.
8. 27 Agustus 2003, Rehabilitasi Korban G 30 S PKI, DR. Asvi Warman Adam. Host: Denny J.A.
9. 8 September 2003, Setahun Bom Bali, Apahah Indonesia sudah aman dan Jaringan Terorisme sudah hancur?, Tjipta Lesmana, Stanley Harza, Juanda. Host: Denny J.A.
10. 10 September 2003, Dua Tahun Tragedi 11 September, Bantarto Bandoro, Ahmad Sumargono. Host: Denny.J.A

11. 17 September 2003, Kemelut Pemilihan Gubernur Mendagri Menunda Pelantikan Gubernur yang Terpilih Secara Sah, Andi Malarangeng, Johermansyah Johan. Host: Denny J.A.
12. 19 September 2003, NU dan Muhammadiyah Ramaikan Gerakan Melawan Korupsi, Ahmad Bagdja, Prof Abdul Munir Mulkan, Danang Widiatmoko. Host: Denny J.A.
13. 1 Oktober 2003, Capres dari Kalangan Tentara, Muhammad Qodari, Djuanda. Host: Denny J.A.
14. 15 Oktober 2003, Kembalin4a Keherasan di Poso, Apakah Ini Awal dari Kerusakan Menjelang Pemilu?, Laode Ida, Munir, Zamudin Paru. Host: Denny J.A.
15. 22 Oktober 2003, Konaensi Partai Golhar, Mengapa Golhar semakin Populer sebagai Partai tapi calon Presidennya
16. Belum Populer? Saiful Mujani, Marzuki Darusman. Host: Denny J.A.
17. 6 November 2003, Saddam Husein versus George Bush Jilid kedua, Andi Wijayanto. Host: Denny J.A.
18. 12 November 2003, Darurat Militer di Aceh Jilid kedua, Rusdi Marpaung, Ahmad Farhan, Tengku Lukmansyah, Usman Hasan. Host: Denny J.A.
19. 3 Desember 2003, Penetapan Partai Peserta Pemilu, Seberapa Jauh Partai ini dapat Mengobati Kekecewaan Publik atas Reformasi, Samsudin Haris, Nazaruddin Syamsudin, Indria Samego, Ray Rangkuti. Host: Denny J.A.

20. 10 Desember 2003, Heboh Mbah Tutut sebagai calon Presiden, Apakah ini Tanda Kegagalan Lima Tahun Reformasi, J. Kristiadi, Ari Mardjono. Host: Denny J.A.
21. 17 Desember 2003, Pertarungan Tiga Putri Bung Karno, Reni Soewarso. Host: Denny J.A.
22. 24 Desember 2003, Kemunghinan Kembalirya Para Politisi Hitam Melalui Pemilu 2004, Farid Faqih, Saiful Mujani, Franky Sahilatua. Host: Denny J.A.
23. 7 Januari 2004, Menjadi Presiden versi SMS, Akhir Matwa Harahap, Hidayat Nur Wahid. Host: Denny J.A.
24. 14 Januari 2004, Konflik Internal Partai Soal Calon Anggota DPR, Hadar N. Gumay Anis Mama, Nurul Arifin. Host: Denny J.A.
25. 21 Januari 2004, Potensi Kerusuhan Dalam Pemilu 2004, Thamrin Amal Tomagola, Permadi, Ali Maskur Musa. Host: Denny J.A.
26. 4 Februari 2004, Konflik Internal Partai Politik Menjekng Pemilu, Ray Rangkuti, Sophan Sophian. Host: Denny J.A.

Pemilu 2004 berjalan demokratis, relatif lancar dan aman. Di luar dugaan banyak pihak, tingkat kekerasan dan konflik justru menurun dibandingkan pemilu 1999. Dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam melakukan demokratisasi politik. Pemilu 2004 mendapatkan respek dari banyak pihak. Pertanyaannya kemudian, bagaimanakah liku-liku dan dinamika yang muncul menuju pemilu yang demokratis itu? Kendala-kendala apa saja yang menghambat, konstelasi-konstelasi semacam apa yang muncul, dan komplikasi masalah seperti apa yang mewarnai tahap demi tahap menuju pemilu 2004? Apa yang terjadi di balik “pesta besar demokrasi” itu? Buku ini secara komprehensif merekam liku-liku dan dinamika politik menuju pemilu 2004 itu. Dengan sangat menarik buku ini memberikan rekaman kronologis sekaligus pemetaan masalah-masalah yang melatarbelakangi pemilu 2004.